



RPKD

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

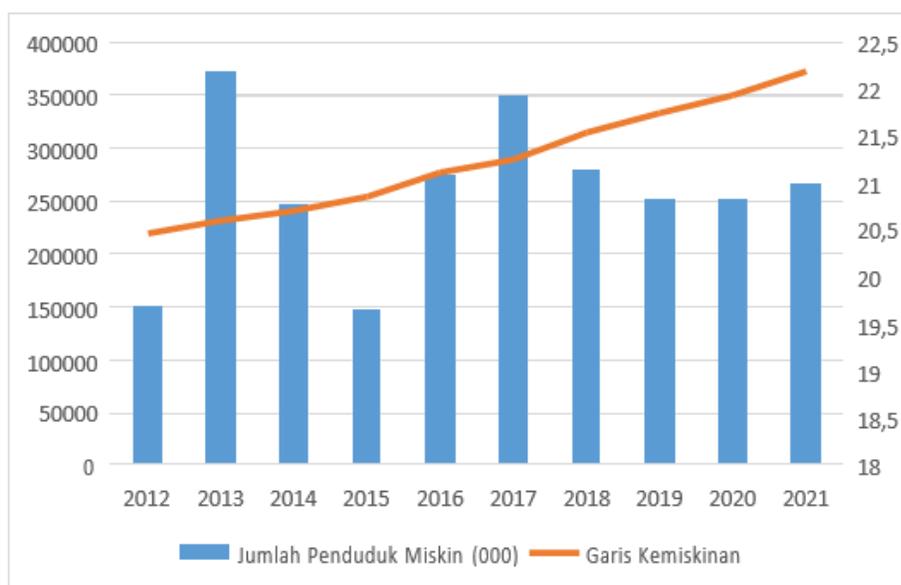
Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan nasional. Berbagai kebijakan, strategi, program dan kegiatan telah diimplementasikan dalam skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia baik yang bersifat langsung (program-program perlindungan sosial) maupun yang tidak langsung (program sektoral dan daerah) masih perlu di perhatikan dengan baik agar semua program-program penanggulangan kemiskinan dapat berperan dalam menurunkan angka kemiskinan.

Dalam pengukuran kemiskinan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (GKM) sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan bukan makanan esensial (GKMN) seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya yang diukur dari sisi pengeluaran. Pengeluaran penduduk dalam rupiah yang harus dibayar dalam pemenuhan kebutuhan dasar ini disebut dengan Garis Kemiskinan (GK). Dengan kata lain, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan adalah penduduk yang termasuk dalam kategori miskin.

Secara nasional, beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan yaitu : (a) terbatasnya cakupan dan kualitas pelayanan bantuan sosial; (b) masih adanya ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam provinsi maupun Kabupaten/Kota; (c) akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar secara rata-rata masih rendah dan terdapat perbedaan akses antar kelompok pendapatan; (d) adanya globalisasi yang meningkatkan gejolak ekonomi dan menimbulkan kerentanan di dalam masyarakat terutama masyarakat miskin; dan (e) meningkatnya kerentanan masyarakat miskin sebagai akibat dari perubahan iklim. Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip empat utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu (i) perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial; (ii) peningkatan akses pelayanan dasar; (iii) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan (iv) pembangunan yang inklusif. Mengacu kepada prinsip-prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi yaitu (i) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (ii) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (iii) mengembangkan dan menjamin usaha mikro serta kecil; dan (iv) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Kompleksitas kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, oleh karenanya Penanggulangan Kemiskinan Daerah diperlukan sebagai cara dalam mengurai persoalan yang kompleks menjadi lebih mudah dalam menetapkan konsep, menentukan masalah utama serta mempermudah pemahaman dan ruang lingkup intervensi kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan. Selain itu prioritas penanganan permasalahan di setiap daerah juga berbeda sesuai dengan kondisi daerah tersebut, menyangkut indikator kemiskinan dalam dimensi yang lebih luas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan.

Pada tahun 2021, garis kemiskinan sebesar 350.576 rupiah/kapita/bulan, terdapat 20,82 ribu atau 6,85 persen penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur. Angka ini turun di banding tahun 2020 sebanyak 20,83 ribu atau 6,98 persen penduduk miskin. Hal ini dapat dilihat dari gambar 1.1 Garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013-2020 berdasarkan data BPS Kabupaten Luwu Timur berikut :



Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Grafik 1.1 Garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013-2020

Kondisi ini memerlukan intervensi yang nyata dari pemerintah dan stakeholders lain untuk mengurangi jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu, melalui kebijakan program penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam rencana Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (2022-2023) serta upaya sinergi antar OPD terkait serta peran swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Tokoh masyarakat, dan juga media, maka diharapkan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur bisa efektif menjawab penurunan angka kemiskinan dan sebagai jawaban atas tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat miskin di Kabupaten Luwu Timur.

Sejalan dengan upaya mendorong peran pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan, maka rencana penanggulangan kemiskinan harus mengacu pada suatu landasan (dokumen) sebagai hasil identifikasi dan kajian secara mendalam terkait dengan permasalahan dan kondisi lokal sehingga penanggulangan kemiskinan di daerah dapat berjalan dengan optimal. Sejalan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Kemiskinan (RNPK), maka perlu disusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai pedoman bersama pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat untuk mengatasi akar persoalan kemiskinan yang terjadi di daerah sesuai dengan karakteristik dan sumberdaya yang tersedia.

RPKD merupakan wujud komitmen pemerintah dalam proses desentralisasi sehingga daerah mampu mengidentifikasi dan mengatasi kemiskinan dengan kemampuan dan wewenang yang dimiliki. Otonomi daerah juga mengisyaratkan kewajiban serta pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota untuk lebih akomodatif dan responsif serta memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ruang pengambilan keputusan.

Mengingat pentingnya penyusunan Rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 -2023 sebagaimana diuraikan di atas, Berkaitan dengan target pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat khususnya dalam penanggulangan kemiskinan maka Rencana penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan oleh para perencana dan pengambil kebijakan. Keterangan mengenai jenis persoalan dan akar permasalahan yang dihadapi berbagai jenis segmen penduduk miskin beserta profil dan karakteristik kemiskinan dapat membantu perencana program dalam menentukan program- program yang tepat dan pengambil kebijakan dapat lebih menfokuskan program pengentasan kemiskinan, sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang didasari pemahaman menyeluruh mengenai kondisi sosial ekonomi penduduk miskin dapat membantu perencanaan, pengambilan kebijakan, implementasi kebijakan akan tepat sasaran dan juga akan memudahkan proses evaluasi kebijakan.

1.2 Maksud Dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Penyusunan Dokumen RPKD Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi model pentahelix yaitu kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, tenaga ahli akademisi, pelaku usaha, lembaga internasional, peran media, dan pihak yang peduli untuk memecahkan masalah kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur, serta memandu penajaman intervensi program bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Luwu Timur 2022-2023 antara lain adalah :

1. Kemiskinan permasalahan yang kompleks dan multidimensi sehingga perlu adanya konsep pemahaman kemiskinan dan ruang lingkup intervensi kebijakan untuk penanggulangannya.
2. Menjabarkan strategi dasar penanggulangan kemiskinan nasional ke dalam konteks penyelesaian masalah yang ada di daerah.
3. Memperkuat pengarusutamaan (*mainstreaming*) penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan;
4. Mendorong sinergi dan penyelarasan serta memastikan bahwa penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas intervensi kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah pusat, daerah, swasta, masyarakat dan pihak yang peduli terhadap kemiskinan.

1.3 Sasaran

Sasaran dari penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Luwu Timur 2022-2023 adalah sebagai berikut :

- a. Tersusunnya konsep Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2022–2023;
- b. Terumuskannya kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur;
- c. Terumuskannya wilayah dan program yang merupakan prioritas dalam penanggulangan kemiskinan;
- d. Tersusunnya Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan kemiskinan secara komprehensif;

1.4 Landasan Kebijakan

Dalam menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif sekaligus sebagai tindak lanjut dari strategi tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota maka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan secara berkeadilan tanpa perbedaan. Sebagai sebuah dokumen strategis yang menjadi acuan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Beberapa landasan hukum/Kebijakan terkait penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang RKP 2011;
 7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Indonesia Tahun 2010;
 8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya);
 10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kab./Kota;
 12. Surat Keputusan Gubernur Nomor 523/II/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan amanah dari Permendagri No. 53 tahun 2020 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 13. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 37F-02//II/Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

1.5 Sistematika RPKD

Laporan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Luwu Timur 2022-2023 mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan, berisi landasan kebijakan mengenai Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Selain itu juga menjelaskan dokumen RPKD mencantumkan landasan kebijakan secara terstruktur mengenai penanggulangan kemiskinan. Bagian ini juga menjelaskan maksud dan tujuan serta sasaran dari dokumen RPKD, landasan hukum, yang kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan dokumen RPKD.
2. BAB II Kondisi Umum Daerah, berisi kondisi geografis dan demografis lalu kaitannya terhadap kondisi kemiskinan di daerah. Perlu menjelaskan informasi tentang administrasi wilayah, penduduk, dan kondisi sosial lainnya.
3. BAB III Profil kemiskinan daerah yang berisi: (profil kemiskinan daerah harus sudah melampirkan masuk ke analisis karakteristik kemiskinan dan analisis data

kemiskinan).

4. BAB IV Prioritas program (Indikator perkembangan antar waktu; capaian indikator efektivitas, intervensi perbaikan serta bagaimana perkembangan capaian indikator capaian indikator sebagai dasar merumuskan program prioritas).
5. BAB V Prioritas Wilayah. Penentuan lokasi berdasarkan beberapa syarat yang sesuai dengan pencapaian target/sasaran program dan proyek, agar lebih tepat sasaran capaian Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati yang tertuang di dalam RPJMD 2018-2023.
6. Bab VI Penutup, berisi harapan daerah dengan disusunnya dokumen RPKD terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

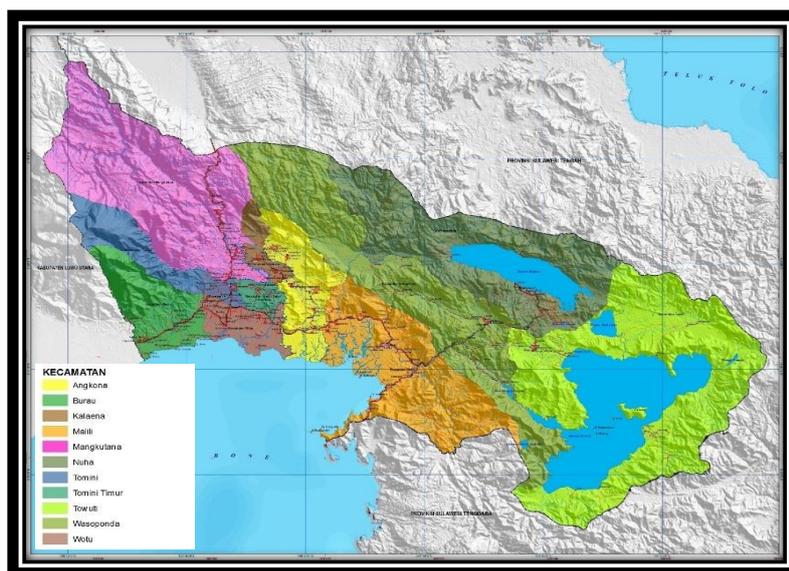
2.1 Geografis

Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten yang terletak di ujung Provinsi Sulawesi Selatan. Secara astronomis, Luwu Timur terletak antara $2^{\circ}03'00''$ - $3^{\circ}03'25''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}28'56''$ - $121^{\circ}47'27''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur tercatat 6.944,88 km persegi wilayah administrasi Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 11 (sebelas) wilayah kecamatan dengan Towuti tercatat memiliki wilayah paling luas yaitu 1.820,48 km persegi atau 26,21 persen dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Timur, sedangkan Kecamatan Kalaena memiliki luas terkecil, yaitu 41,98 Km persegi atau 0,60 persen dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Luwu Timur memiliki batas-batas bagian Utara dan timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone, sebelah barat Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 11 Kecamatan yang terdiri dari 3 Kelurahan dan 126 Desa, yaitu: Kecamatan Towuti, Tomoni, Wotu, Wasuponda, Tomoni Timur, Nuha, Mangkutana, Kalaena, Burau, Angkona, Malili. Wilayah Kecamatan Towuti tercatat memiliki wilayah paling luas yaitu 1.820,48 Km persegi atay 26,21 persen dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Timur, sedangkan Kecamatan Kalaena memiliki luas terkecil, yaitu 41,98 Km persegi atau 0,60 persen dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Berikut dapat dilihat peta wilayah administrasi Kabupaten Luwu Timur pada Gambar 2.1 dibawah ini.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur



Sumber : Dokumen Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2022

Luas wilayah dan nama Kecamatan menurut 11 Kecamatan yang terletak di Kabupaten Luwu Timur lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

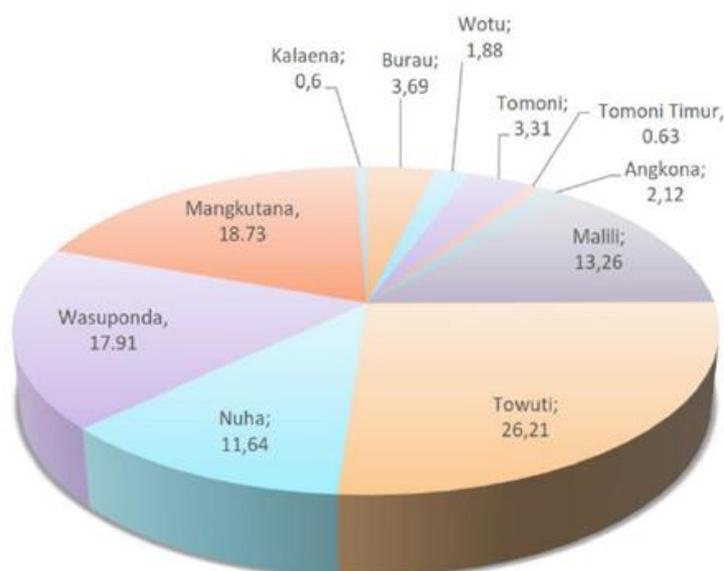
Tabel 2. 1
Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of Subdistrict</i>	Luas Daerah <i>Total Area</i> (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Burau	Burau	256,23
Wotu	Bawaliu	130,52
Tomoni	Mandiri	230,09
Tomoni Timur	Kertora arjo	43,91
Angkona	Solo	147,24
Malili	Puncak Indah	921,2
Towuti	Langkea Raya	1 820,48
Nuha	Sorowako	808,27
Wasuponda	Ledu-Ledu	1 244
Mangkutana	Wonorejo	1 300,96
Kalaena	Kalaena Kiri	41,98
Luwu Timur	Malili	6 944,88

Sumber : Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Luwu Timu, 2021

Persentase Luas daerah wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Grafik 2.1 berikut :

Grafik 2.1
Persentase Luas daerah wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Luwu Timur



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2011

Berdasarkan grafik 2.1 dan tabel 2.1 dapat di ketahui bahwa untuk wilayah terluas dari 11 kecamatan adalah Kecamatan Towuti, kemudian Kecamatan Mangkutana, Wasuponda, Malili, Nuha, sementara Kecamatan yang luas wilayahnya kecil yaitu Kecamatan Burau, Tomoni, Angkona, Wotu, Towoni Timur dan yang terakhir Kecamatan Kalaena.

Sampai tahun 2021 jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Luwu Timur mencapai 129 desa/Kelurahan, sementara jumlah kecamatan sebanyak 11 kecamatan. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2 yaitu Jumlah Desa/Kelurahan tiap Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	2017 ¹	2018 ¹	2019 ^{1,2}	2020 ¹	2021 ¹
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Burau	18	18	18	18	18
Wotu	16	16	17	17	17
Tomoni	13	13	13	13	13
Tomoni Timur	8	8	8	8	8
Angkona	10	10	10	10	10
Malili	15	15	15	15	15
Towuti	19	19	20	20	19
Nuha	5	5	5	5	5
Wasuponda	6	6	6	6	6
Mangkutana	11	11	11	11	11
Kalaena	7	7	7	7	7
Nama Kabupaten/Kota	128	128	130	130	129

Sumber : Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat jumlah desa/kelurahan yang terbanyak yaitu berada di Kecamatan Towuti sebanyak 19 Desa/Kelurahan pada tahun 2021, sementara tahun 2020 sebanyak 20 Desa/Kelurahan, sedangkan Kecamatan yang memiliki desa/kelurahan paling sedikit yaitu Kecamatan Nuha dengan 5 Desa/Kelurahan disusul Kecamatan Wasuponda dengan 6 Desa/Kelurahan.

Pada tahun 2017 dan 2018 jumlah total Desa/Kelurahan di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 128, dan tahun 2019 dan 2020 bertambah 2 desa/kelurahan menjadi 130 Desa/Kelurahan dan terakhir pada tahun 2021 jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Luwu Timur berjumlah 129 Desa Kelurahan terdiri atas 126 Desa dan 3 Kelurahan.

2.2 Iklim Dan Musim

Kabupaten Luwu Timur pada umumnya sama dengan daerah lain yang ada di Indonesia, mempunyai dua musim yaitu musim kemarau. Berdasarkan pengamatan di Stasiun Meteorologi Andi Jemma rata-rata suhu udara minimum 22,4 °C di Kabupaten Luwu Timur dan sekitarnya tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Suhu udara maksimum di Stasiun Meteorologi Andi Jemma 35,3 °C dan suhu minimum 21,4 °C. Untuk Pengamatan unsur iklim di stasiun Badan Meteorologi, klimatologi dan Geofisika menurut bulan, tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut;

Tabel 2.3

Pengamatan unsur iklim di stasiun Badan Meteorologi, klimatologi dan Geofisika menurut bulan, tahun 2021

Bulan <i>Month</i>	Suhu <i>Temperature</i> (oC)		
	Minimum	Rata-Rata <i>Average</i>	Maksimum <i>Maximum</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari/ <i>January</i>	22,0	27,2	33,6
Februari/ <i>February</i>	22,4	27,5	34,3
Maret/ <i>March</i>	22,9	27,3	34,2
April/ <i>April</i>	23,2	27,7	35,2
Mei/ <i>May</i>	23,6	27,5	33,2
Juni/ <i>June</i>	23,0	27,3	33,5
Juli/ <i>July</i>	22,6	26,5	33,0
Agustus/ <i>August</i>	22,4	26,6	34,2
September/ <i>September</i>	21,4	26,7	33,7
Oktober/ <i>October</i>	23,2	28,0	35,0
November/ <i>November</i>	22,2	27,6	35,3
Desember/ <i>December</i>	22,6	27,6	35,2

Sumber: Stasiun Meteorologi Andi Jemma

Sedangkan Berdasarkan hari hujan di Kabupaten Luwu Timur rata rata selama setahun di tahun 2021 terdapat 19 hari hujan per bulan, dengan memberikan curah hujan rata rata 267 mm air hujan selama tahun 2021, untuk melihat jumlah curah hujan dan hari hujan tiap bulannya tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4**Jumlah Curah Hujan Dan Hari Hujan Menurut Bulan Tahun 2021**

Bulan Month	Jumlah Curah Hujan Number of Precipitation (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day)
(1)	(2)	(3)
Januari/ <i>January</i>	309	24
Februari/ <i>February</i>	244	18
Maret/ <i>March</i>	305	24
April/ <i>April</i>	189	14
Mei/ <i>May</i>	219	15
Juni/ <i>June</i>	245	14
Juli/ <i>July</i>	332	19
Agustus/ <i>August</i>	328	23
September/ <i>September</i>	239	19
Oktober/ <i>October</i>	204	15
November/ <i>November</i>	369	22
Desember/ <i>December</i>	221	18

Sumber : Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2021

Dari tabel 2.4 dapat dilihat bahwa jumlah curah hujan tertinggi ada pada bulan November 2021 dengan curah hujan 269 mm, sedangkan jumlah hari hujan terbanyak ada pada bulan maret 2021 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

2.3 Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Timur tahun 2021 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2022- 2023 (kondisi pertengahan tahun/ Juni) sebanyak 300.511 jiwa dengan rasio jenis kelamin penduduk laki- laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,99. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2020, penduduk Luwu Timur tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebanyak 3.770 atau sebesar 1,27 persen.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 mencapai 43,27 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Tomoni Timur dengan kepadatan sebesar 309,77 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Mangkutana sebesar 17,15 jiwa/km².

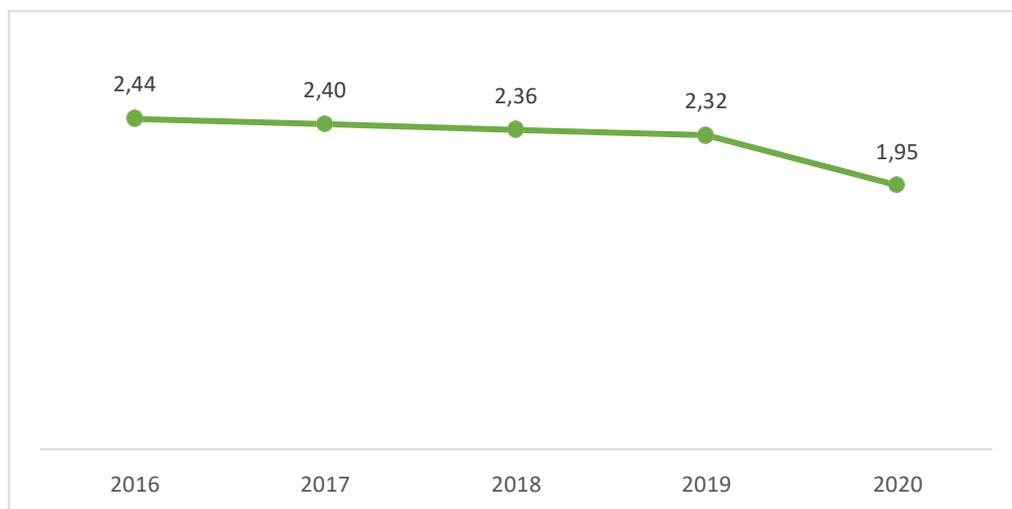
Tabel 2.5
Penduduk, laju pertumbuhan penduduk pertahun 2020 – 2021 menurut
Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur

Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2021
(1)	(2)	(3)
Burau	34 306	0,27
Wotu	33 657	0,94
Tomoni	26 644	0,90
Tomoni Timur	13 602	0,64
Angkona	25 247	0,69
Malili	43 640	1,90
Towuti	43 586	3,56
Nuha	23 575	0,75
Wasuponda	21 840	1,06
Mangkutana	22 316	0,38
Kalaena	12 098	0,55
Luwu Timur	300 511	1,27

Sumber : Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur yang paling banyak adalah Kecamatan Malili dengan Jumlah Penduduk 4.640 Jiwa, sementara untuk laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Towuti dengan persentasi 3,56 persen, untuk kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Kalaena yaitu sebanyak 12.098 Jiwa, sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang paling kecil berada di Kecamatan Burau yaitu 0,27 Persen. Untuk membandingkan laju penduduk dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 2.2 berikut:

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan penduduk Kab. Luwu Timur tahun 2016-2020



Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2035

Dilihat selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Luwu Timur melambat dengan rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 1,95 persen per tahun. Selama tahun 2016-2020 laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Luwu Timur terus mengalami penurunan. Tahun 2020, pertumbuhan penduduk Kabupaten Luwu Timur berada pada angka 1,95 persen. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin menurun akan semakin baik karena mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk semakin terkendali, alangkah lebih baik jika laju pertumbuhan penduduk hingga mencapai angka kurang dari satu persen.

Tabel 2.6
Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur

Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
(1)	(2)	(3)
Burau	11.42	133.89
Wotu	11.20	257.87
Tomoni	8.87	115.80
Tomoni Timur	4.53	309.77
Angkona	8.40	171.47
Malili	14.52	47.37
Towuti	14.50	23.94
Nuha	7.84	29.17
Wasuponda	7.27	17.56
Mangkutana	7.43	17.15
Kalaena	4.03	288.18
Luwu Timur	100.00	43.27

Sumber : Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2021

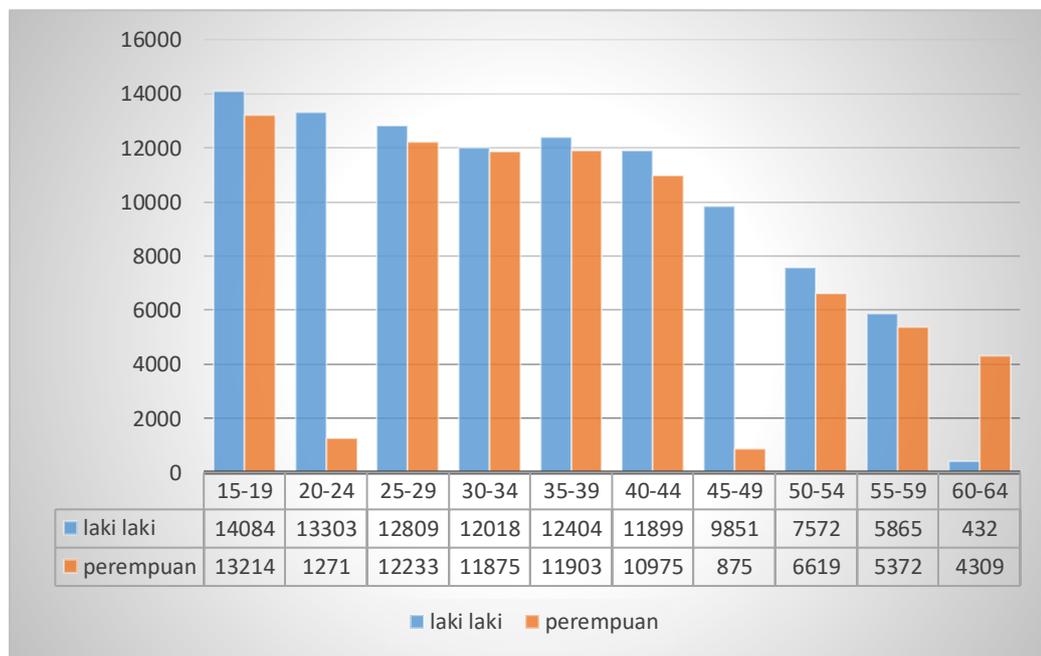
Dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi dengan kepadatan yang tinggi, penentuan kebijakan harus mempertimbangkan banyak hal, misalnya penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang implementasi kebijakan bidang kependudukan tersebut. Pertumbuhan penduduk yang kurang terkendali akan menimbulkan berbagai masalah baik pengangguran, kemiskinan, tingkat kualitas SDM, kejahatan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Hal ini bisa saja memberikan dampak negatif pada upaya peningkatan kualitas SDM. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah penduduk yang besar juga merupakan modal dan aset pembangunan.

2.4 Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin

Penduduk di Kabupaten Luwu Timur di bagi berdasarkan usia terdapat usia Balita dan Anak rentang Usia 0 sampai 14 Tahun dan usia produktif (15-64 tahun) dan usia lanjut 65 sampai 75 tahun ke atas. Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 230.073 jiwa.

Perbedaan yang tajam antara jumlah penduduk usia produktif dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), yaitu 82.726 jiwa dan 15.700 jiwa, hal ini mencerminkan bahwa Kabupaten Luwu Timur masih berada dalam masa bonus demografi karena sebagian besar penduduknya masih berada di usia produktif, berikut gambar kelompok penduduk usia produktif dan jenis kelamin (Grafik 2.2) berikut:

Grafik 2.3
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin



Sumber : BPS, Sensus Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia produktif di dominasi oleh jenis kelamin laki-laki dan berada di rentang usia 15 -19 tahu yaitu sebanyak 14.084 jiwa dan yang paling sedikit berada di rentang usia 60-64 tahun, sedangkan untuk jenis kelamin perempuan yang paling banyak berada di rentang usia 15 -19 tahun sebanyak 13.214 jiwa dan yang paling sedikit penduduk usia 45-49 tahun yaitu 875 jiwa di Kabupaten Luwu Timur.

Untuk lebih detailnya pada tabel berikut akan disajikan jumlah penduduk berdasarkan desa/kelurahan dan jenis kelamin serta jumlah penduduk. Untuk jumlah penduduk terbanyak berada desa/kelurahan Sorowako Kecamatan Nuha dengan Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 5.525 dan perempuan sebanyak 5.507 jiwa dengan jumlah keseluruhan penduduk Sorowako sebanyak 10.032 jiwa. Proporsi Penduduk di Kabupaten Luwu Timur menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7
Proporsi Penduduk di Kabupaten Luwu Timur menurut Desa/Kelurahan dan
Jenis Kelamin tahun 2021

DESA/KELURAHAN	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
MALEKU	1.427	1.380	2.807
WANOREJO	1.267	1.265	2.532
MARGOLEMBO	1.373	1.256	2.629
TEROMU	790	795	1.585
MANGGALA	448	422	870
KASINTUWU	1.703	1.560	3.263
BALAI KEMBANG	958	956	1.914
PANCA KARSA	798	823	1.621
SINDU AGUNG	909	936	1.845
WONOREJO TIMUR	1.288	1.275	2.563
KORONCIA	387	347	734
KEC. MANGKUTANA	11.348	11.015	22.363
NUHA	340	328	668
NIKKEL	2.861	2.539	5.400
MATANO	979	862	1.841
MAGANI	3.305	2.716	6.021
SOROWAKO	5.525	5.507	10.032
KEC. NUHA	13.010	10.952	23.962
LOEHA	796	701	1.497
MAHALONA	1.026	1.009	2.035
TIMAMPU	1.873	1.694	3.567
WAWONDULA	3.013	2.610	5.623
LANGKEA RAYA	2.581	2.242	4.823
TOKALIMBO	517	479	996
BARUGA	1.306	1.189	2.495
PEKALOA	1.232	1.099	2.331
LIOKA	1.370	1.105	2.475
ASULI	2.793	2.336	5.129
BANTILANG	1.118	1.086	2.204
MASIKU	446	397	843
RANTE ANGIN	912	833	1.745
MATOMPI	1.453	1.280	2.733
TOLE	720	644	1.364
LIBUKAN MANDIRI	949	832	1.781
KALOSI	694	646	1.340

DESA/KELURAHAN	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
BUANGIN	1.009	909	1.918
KEC. TOWUTI	23.808	21.091	44.889
HARAPAN	1.369	1.225	2.594
LASKAP	1.021	932	1.953
MALILI	2.000	1.945	3.945
MANURUNG	2.071	1.944	4.015
WEWANGRIU	1.777	1.695	3.472
BARUGA	2.251	2.075	4.326
LAKAWALI	1.841	1.755	3.596
USSU	1.139	1.140	2.279
TARABBI	808	753	1.561
BALANTANG	1.399	1.353	2.752
ATUE	576	561	1.137
PONGKERU	1.176	1.082	2.258
PUNCAK INDAH	3.804	3.482	7.286
PASI PASI	610	550	1.160
LAKAWALI PANTAI	914	848	1.762
KEC. MALILI	22.756	21.240	44.096
TAWAKUA	1.652	1.595	3.247
TAMPINNA	2.315	2.188	4.503
SOLO	1.007	995	2.002
TARIPA	1.706	1.639	3.345
MANTADULU	1.189	1.191	2.380
BALIREJO	969	904	1.873
MALIWOWO	1.122	1.052	2.174
LAMAETO	1.119	1.058	2.177
WATANGPANUA	1.184	1.095	2.279
WANASARI	734	718	1.452
KEC. ANGKONA	12.997	12.435	25.432
LAMPENAI	2.937	3.044	5.981
TARENGGE	902	923	1.825
MARAMBA	683	657	1.340
CENDANA HIJAU	1.299	1.292	2.591
BAWALIPU	3.610	3.689	7.299
KALAENA	643	595	1.238
LERA	1.453	1.423	2.876
KANAWATU	755	752	1.507
BAHARI	420	381	801
KARAMBUA	547	506	1.053
PEPURO BARAT	412	400	812
BALO BALO	527	562	1.089
RINJANI	813	752	1.565
TARANGGE TIMUR	702	737	1.439
MADANI	791	787	1.578

DESA/KELURAHAN	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
TABAROGE	480	451	931
KEC. WOTU	16.974	16.951	33.925
BURAU	1.050	1.051	2.101
JALAJJA	2.228	2.226	4.454
LEWONU	699	670	1.369
LAMBARESE	1.233	1.208	2.441
LAUWO	1.576	1.592	3.168
BONE PUTE	1.168	1.096	2.264
LUMBEWE	1.502	1.519	3.021
MABONTA	843	802	1.645
LARO	881	821	1.702
BENTENG	917	896	1.813
BATU PUTIH	463	375	838
LANOSI	660	623	1.283
LEGEGO	1.176	1.136	2.312
CENDANA	700	612	1.312
BURAU PANTAI	704	661	1.365
ASANA	508	488	996
KALATIRI	795	716	1.511
LAMBARA HARAPAN	855	842	1.697
KEC. BURAU	17.995	17.334	3.292
BAYONDO	813	855	1.668
MULYASRI	1.447	1.431	2.878
TOMONI	1.765	1.769	3.534
LESTARI	1.667	1.595	3.262
KALPATARU	874	838	1.712
TADULAKO	562	533	1.095
BERINGIN JAYA	1.151	1.125	2.276
BANGUN JAYA	1.368	1.377	2.745
MANDIRI	1.534	1.491	3.025
SUMBER ALAM	417	397	814
UJUNG BARU	447	401	848
BANGUN KARYA	768	734	1.502
RANTE MARIO	828	743	1.571
KEC. TOMONI	13.641	13.289	26.930
KERTORAHARJO	989	955	1.944
CENDANA HITAM	631	556	1.187
PURWOSARI	1.071	984	2.055
PATTENGKO	1.069	1.021	2.090
MANUNGGAL	1.028	1.011	2.039
MARGOMULYO	1.310	1.355	2.665
ALAM BUANA	322	281	603
CENDANA HITAM TIMUR	558	538	1.096
KEC. TOMONI TIMUR	6.978	6.701	13.679
KALENA KIRI	1.192	1.207	2.399

DESA/KELURAHAN	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
SUMBER AGUNG	952	893	1.845
PERTASI KENCANA	681	712	1.393
NON BLOK	626	650	1.276
ARGOMULYO	613	622	1.235
SUMBER MAKMUR	965	960	1.925
MEKAR SARI	1.168	1.104	2.272
KEC. KALAENA	6.197	6.148	12.345
LEDU LEDU	3.656	3.264	6.920
KAWATA	1.052	917	1.969
TABARANO	1.909	1.686	3.595
WASUPONDA	1.772	1.493	3.265
PARUMPANAI	1.888	1.715	3.603
BALAMBANO	1.423	1.240	2.663
KEC. WASUPONDA	11.700	10.315	22.015
KAB. LUWU TIMUR	157.367	147.671	304.938

Sumber : Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur

2.5 Rasio Jenis Kelamin

Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2021, Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Luwu Timur rata rata berjumlah 105,99 Angka ini mengandung arti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan, ada sekitar 106 orang penduduk laki-laki. Dengan kata lain, penduduk laki-laki di wilayah ini lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Berdasarkan kecamatan rasio tertinggi yaitu Kecamatan Nuha dengan Rasio 114.77 dan yang terendah adalah Kecamatan Kalaena yaitu 100.26.

Dengan mengetahui rasio jenis kelamin, akan dapat diidentifikasi komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Informasi ini digunakan untuk perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Dahulu, karena adat dan kebiasaan, pendidikan laki-laki lebih diutamakan daripada pendidikan perempuan. Oleh karena itu, di masa sekarang, pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui jumlah laki-laki dan perempuan di kelompok umur yang sama. Selain itu, informasi mengenai rasio jenis kelamin juga penting diketahui dalam dunia politik terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Berikut tabel 2.8 menggambarkan terkait Rasio Jenis Kelamin:

Tabel 2.8
Rasio JenisKelamin menurut Kecamatan Di Kabupaten Luwu Timur

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Burau	103.74
Wotu	100.65
Tomoni	103.23
Tomoni Timur	104.48
Angkona	103.93
Malili	105.57
Towuti	111.49
Nuha	114.77
Wasuponda	112.43
Mangkutana	102.98
Kalaena	100.26
Luwu Timur	105.99

Sumber : Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2021

2.6 Pendidikan

Akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator, diantaranya melalui tingkat partisipasi penduduk usia sekolah terhadap layanan pendidikan menurut jenjang pendidikannya. Hal ini juga sesuai dengan amanat dalam UUD 1945 yang salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dalam salah satu tujuan SDGs yaitu tidak ada seorangpun yang tertinggal, terlupakan, atau bahkan terpinggirkan dari hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

2.6.1 Angka Partisipasi Sekolah

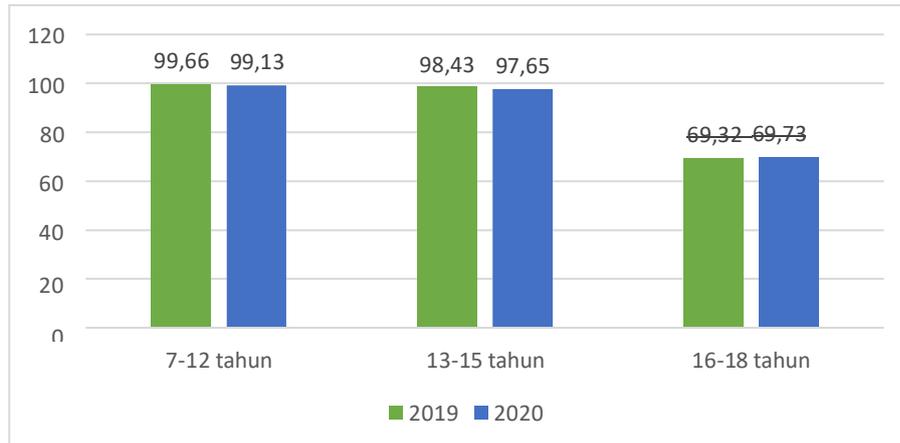
Manusia merupakan modal utama pembangunan. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, salah satunya yaitu melalui peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Bentuk peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dapat dilihat dari persentase partisipasi sekolah penduduk. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah penduduk usia tertentu.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Grafik 2.4 berikut:

Grafik 2.4

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2020



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Luwu Timur 2019-2020

Pada tahun 2020, APS Kabupaten Luwu Timur meningkat untuk kelompok umur 16-18 tahun. Sementara untuk kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun sedikit menurun. Adanya ketimpangan APS dari SD, SMP/SLTP, dan SMA/SMK menunjukkan perlu ada penelitian lebih lanjut guna mengurangi ketimpangan yang ada.

2.6.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

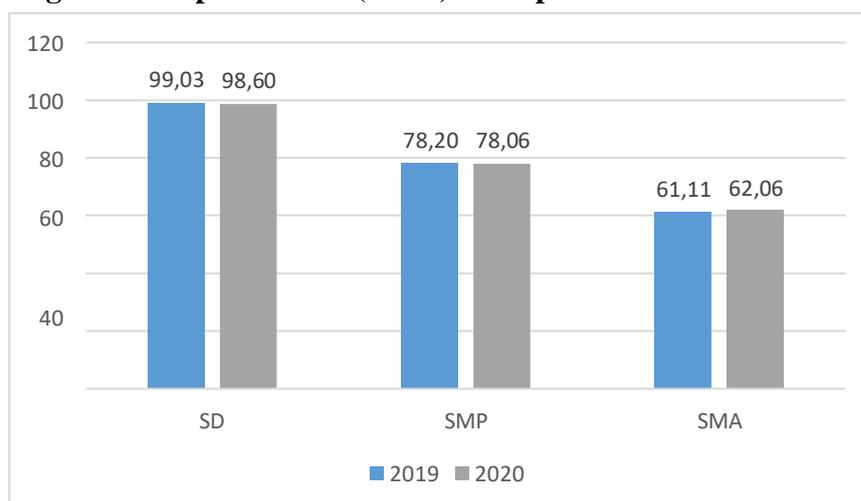
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator selain APS yang dapat dikatakan lebih halus dalam perhitungannya. Jika APS tidak memperhitungkan jenjang pendidikan apa yang sedang ditempuh oleh anak usia sekolah, APM ini hanya memasukkan anak yang sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan umurnya. APM SD untuk anak usia 7-12 tahun yang sedang sekolah di jenjang SD, APM SMP untuk anak usia 13-15 tahun yang sedang sekolah di jenjang SMP, dan APM SMA/ SMK untuk usia 16-18 tahun yang sedang sekolah di jenjang SMA/SMK. Sehingga APM akan lebih rendah daripada APS.

Menurut definisi, Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan.

Tujuan dari perhitungan APM adalah untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Untuk mengetahui Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Grafik 2.5 berikut:

Grafik 2.4

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2020



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Luwu Timur 2019-2020

Jika melihat perkembangan APM di Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2019 hingga tahun 2020, terlihat adanya kenaikan pada jenjang SMA sebesar 0,95 persen poin, sedangkan APM pada jenjang SD dan SMP mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,43 dan 0,14 persen poin.

Tabel 2.9

Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar berdasarkan Jenjang Pendidikan tahun 2020-2021

Jenjang Pendidikan <i>Educational Level</i>	Angka Partisiipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI/Sederajat <i>Primary School</i>	98,6	98,52	107,09	109,02
SMP/MTs/Sederajat <i>Lower Secondary School</i>	78,06	78,81	85,78	87,2
SMA/SMK/MA/Sederajat <i>Upper Secondary School</i>	62,06	61,26	87,33	84,74

Sumber : Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2021

2.7 Kesehatan

Kesehatan menjadi salah satu modal dasar dalam proses pembangunan dan menjadi tujuan pembangunan manusia. Sumber daya manusia yang sehat memegang peranan yang sangat penting bagi pembangunan karena jika sebagian besar sumber daya manusia tidak sehat atau sakit maka cenderung proses pembangunan menjadi tidak maksimal. Banyak penelitian yang menyatakan orang yang sakit cenderung lebih rendah produktifitasnya dibanding orang yang sehat.

Pelayanan kesehatan diharapkan semakin baik dengan adanya fasilitas kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat, sehingga dapat secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan perubahan pola pikir tentang pola hidup sehat. Keluhan kesehatan yang terjadi pada penduduk dapat memberikan satu informasi yang penting untuk melihat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. diketahui bahwa terdapat jumlah kasus 10 penyakit terbanyak di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 di sajikan dalam tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10
Jumlah kasus 10 penyakit terbanyak di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Jenis Penyakit	Jumlah Kasus
(1)	(2)
Ispa	17 420
Hipertensi	12 208
Febris	9 846
Gastritis	8 139
Flu Biasa	8 081
Dispepsia	6 849
Chepalgia	5 729
Dermatitis	4 065
Batuk	2 942
Diare	2 023

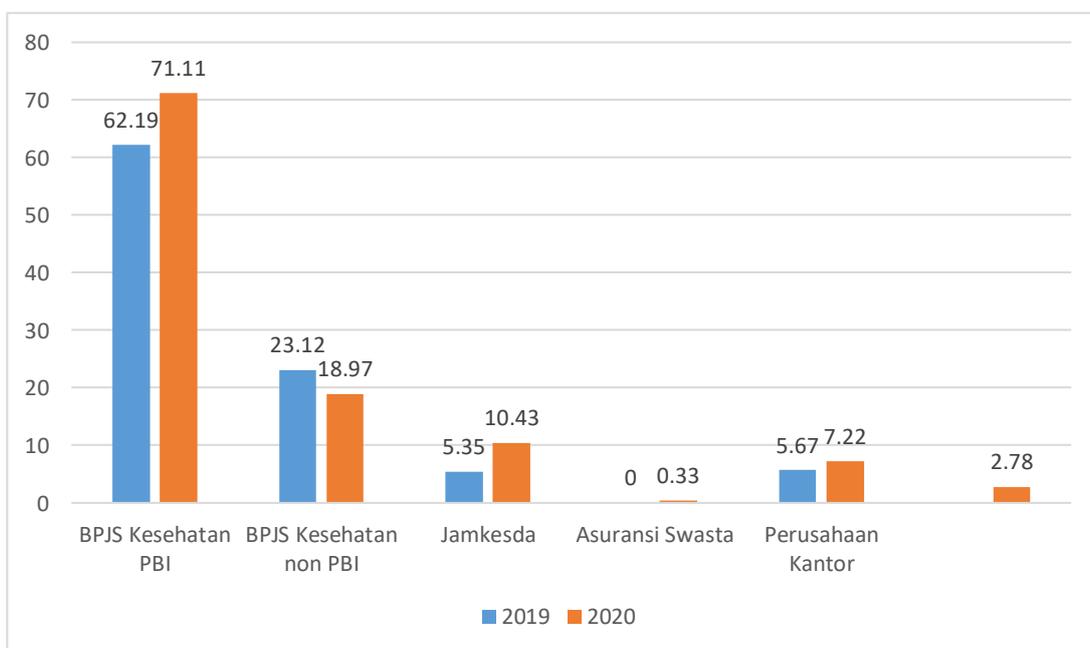
Sumber : Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus terbanyak yaitu 17.420 kasus dengan jenis penyakit Ispa, kemudian jumlah kasus penyakit diare yaitu 2.023 kasus yang merupakan kasus yang rendah diantara 10 penyakit terbanyak di Kabupaten Luwu Timur.

Ketiadaan biaya pengobatan secara tidak langsung menjadi salah satu penyebab menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai pada Januari 2014 diberlakukan bagi seluruh penduduk Indonesia tak terkecuali penduduk Kabupaten Luwu Timur, tujuannya mengatasi kendala biaya pengobatan. JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory). Hal ini berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.

Sampai saat ini, pelaksanaan JKN semakin direspon cukup positif oleh masyarakat. Dari data Susenas menunjukkan penduduk Kabupaten Luwu Timur yang tidak menggunakan jaminan kesehatan semakin berkurang. Di tahun 2019, penduduk yang tidak menggunakan jaminan kesehatan masih sekitar 7,35 persen, turun menjadi sekitar 2,78 persen di tahun 2020. Grafik 2.5 berikut terkait presentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan menurut jenis jaminan kesehatan 2019-2020 berikut.

Grafik 2.5
Presentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan 2019-2020



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2020

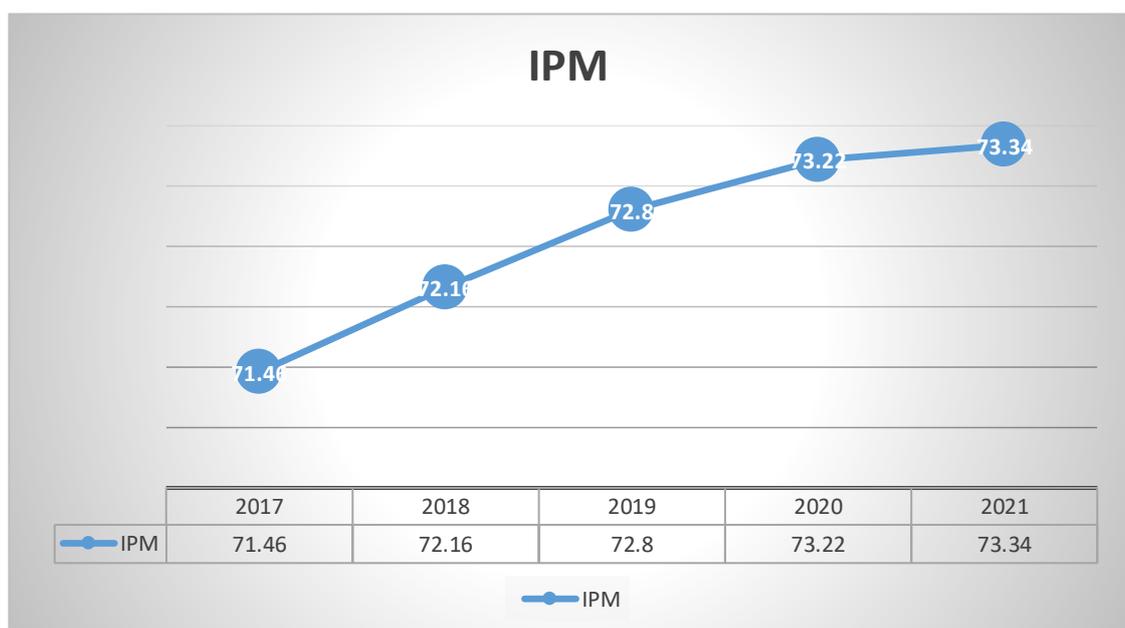
2.8 Pembangunan Manusia Dan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Konsep pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 melalui laporan Human Development Report (HDR). Munculnya gagasan tentang pembangunan manusia yang dikemukakan oleh UNDP tersebut bukan hanya menempatkan manusia sebagai input dari pembangunan tetapi juga menjadi tujuan akhir pembangunan, yaitu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk produktif sehingga dapat memiliki umur panjang dan hidup sehat, menguasai pengetahuan, dan memenuhi standar hidup yang layak.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia selama periode 2017-2021 angka IPM Kabupaten Luwu Timur setiap tahun selalu mengalami peningkatan, selain itu, juga selalu berada diatas IPM Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil penghitungan IPM menggunakan metode baru, angka IPM Kabupaten Luwu Timur. Tahun 2021 sebesar 73,34, menempati peringkat 4 di Provinsi Sulawesi Selatan, sama dengan tahun sebelumnya pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2017 sudah berstatus tinggi.

Grafik 2.7

Indeks Pembangunan manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Sumber : Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2021

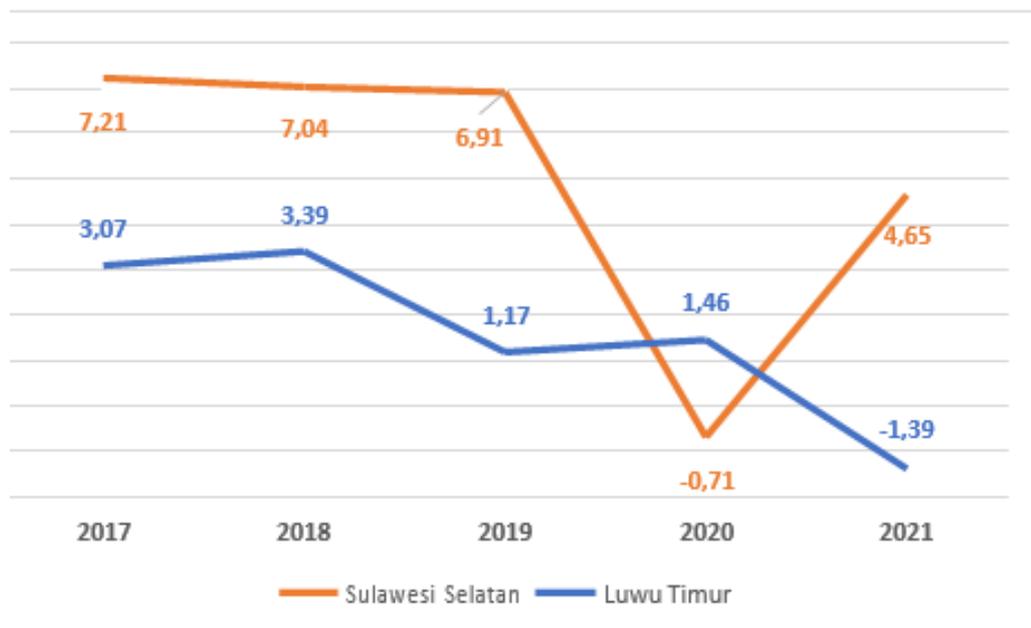
2.9 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomidihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Laju pertumbuhan PDRB 2021 atas dasar harga konstan 2010 Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar 4,65%, nilai ini tidak sebanding dengan laju pertumbuhan Kabupaten Luwu Timur yang mengalami kontraksi sebesar -1,39%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik 2.7 persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan:

Grafik 2.7

Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan garfik di atas dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu di tahun 2020, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi berada pada 1,46 persen, kemudian di tahun 2021 turun menjadi -1,39 persen dan merupakan titik terendah dari tahun 2017-2021.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik akibat aktivitas ekonomi, bertujuan untuk melihat struktur perekonomian berdasarkan harga berlaku pada periode perhitungan. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB Tahun 2021, angka PDRB atas dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur mencapai 23,61 Triliun rupiah.

Pertumbuhan produk regional Bruto selama tahun 2021 masih didominasi oleh pertambangan dan penggalan; yaitu sebanyak 43,99 persen. Sementara itu sektor produktif lainnya antara lain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 25,01 persen, konstruksi sebanyak 10,78 persen. Sektor pertambangan dan penggalan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor konstruksi memberi indikasi bahwa Tiga sektor dominan tersebut pembentuk besaran produk regional Bruto di Kabupaten Luwu Timur.

Sementara untuk sektor-sektor lainnya memiliki rata-rata dibawah 10 persen kontribusi terhadap pertumbuhan regional bruto di Kabupaten Luwu Timur. Disamping itu,terdapat beberapa sektor yang masih rendah dalam pembentukan struktur ekonomi Regional Bruto hingga 2021. Untuk mengetahui Distribusi Persentasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Distribusi Persentasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha tahun 2017-2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020 ^x	2021 ^{xx}
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,47	24,23	23,84	23,96	25,01
B	Pertambangan dan Penggalan	47,95	47,77	45,26	44,95	43,99
C	Industri Pengolahan	3,47	3,39	3,82	3,67	3,65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	8,96	9,25	10,44	10,54	10,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,72	3,80	4,20	4,10	4,07
H	Transportasi dan Pergudangan	0,72	0,72	0,78	0,68	0,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,20	0,20	0,22	0,19	0,18
J	Informasi dan Komunikasi	1,39	1,41	1,55	1,68	1,65

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020 ^x	2021 ^{xx}
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,90	0,93	1,00	1,03	1,00
L	Real Estat	2,36	2,28	2,43	2,52	2,43
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,40	2,54	2,70	2,67	2,60
P	Jasa Pendidikan	2,01	2,01	2,17	2,26	2,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,21	1,23	1,34	1,51	1,52
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,12	0,13	0,14	0,12	0,12
Produk Domestik Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2021

2.10 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Salah satu aspek penting dalam mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

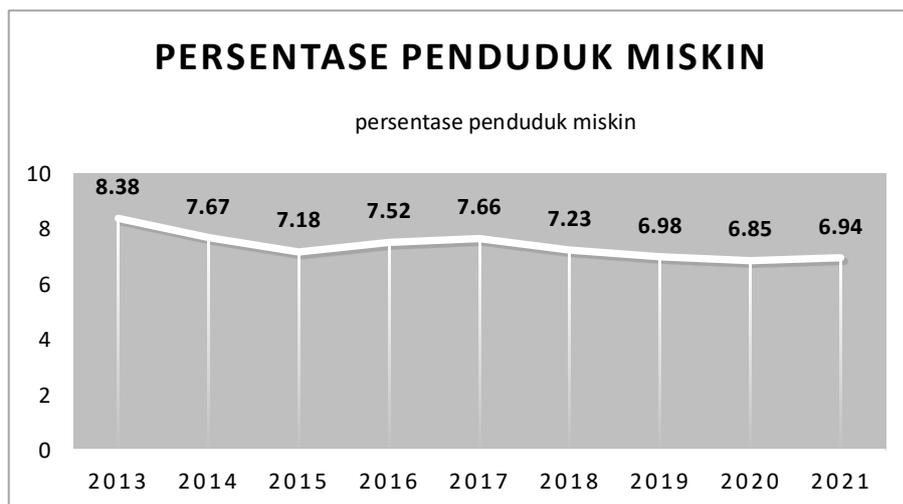
Pertumbuhan ekonomi diharapkan akan memberikan kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat di wilayah tersebut. Namun terkadang, pertumbuhan ekonomi yang terjadi kurang dapat terdistribusi dengan merata sehingga belum mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat bahkan menyisakan masalah kemiskinan untuk sebagian masyarakat karena kurangnya kemampuan dalam mengakses baik sumber daya dan faktor produksi yang tersedia maupun hasil yang telah dicapai dalam pembangunan ekonomi tersebut.

Salah satu indikator yang digunakan dalam analisis kemiskinan adalah garis kemiskinan. Indikator ini sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Dalam proses perhitungannya, Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Sedangkan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren menurun selama periode 2013-2020 akan tetapi sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,09 persen. Pemerintah tentunya terus berupaya menekan angka kemiskinan. Tahun 2021 (periode Maret), jumlah penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur sebesar 6,94 persen dari seluruh penduduk Kabupaten Luwu Timur.

Grafik 2.8
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2013 sampai 2021



Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan BPS Tahun 2020

Melihat perbandingan trennya dengan angka nasional, angka kemiskinan Kabupaten Luwu Timur cenderung memiliki tren yang sama dengan angka Sulawesi Selatan. Perlu diapresiasi bahwa angka kemiskinan Kabupaten Luwu Timur selalu berada di bawah angka Sulawesi Selatan.

Sementara Garis kemiskinan Kabupaten Luwu Timur sendiri mengalami peningkatan setiap tahun. Selama periode 2013-2021 kenaikan garis kemiskinan sebesar Rp.140.500 yaitu dari Rp.231.447 di Maret 2013 menjadi Rp.371.947 di Maret 2021. Salah satu penyebab kenaikannya tentunya adalah inflasi yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur. Garis kemiskinan Kabupaten luwu timur dari tahun 2013 sampai 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut :

Table 2.12
Garis Kemiskinan kabupaten Luwu Timur Tahun 2013-2021

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	231 447	22,2	8,38
2014	240 729	20,78	7,67
2015	254 957	19,67	7,18
2016	277 520	21,08	7,52
2017	289 214	21,94	7,66
2018	315 478	21,15	7,23
2019	333 739	20,83	6,98
2020	350 576	20,82	6,85
2021	371 947	20,99	6,94

Sumber :BPS, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2021

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau Poverty Gap Index (P1) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbec (FGT). P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, angka P1 yang semakin mendekati 0 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Selain indeks kedalaman kemiskinan, Persoalan keparahan dari tingkat kemiskinan juga harus menjadi perhatian. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan adalah Indeks Keparahatan Kemiskinan atau Distributionally Sensitive Index (P2) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbec (FGT). P2 memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, angka P2 yang semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil. Untuk melihat Indeks Kedalaman kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 2.13 dan Indeks Keparahatan Kemiskinan dapat dilihat pada Grafik 2.9 serta Grafik 2.10 indeks kedalaman (P1) dan indeks Keparahatan (P2) Kemiskinan berikut:

Tabel 2.13
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2013-2021

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan
(1)	(2)
2013	1,37
2014	1,18
2015	1,28
2016	1,09
2017	1,6
2018	1,16
2019	1,11
2020	1,05
2021	1,09

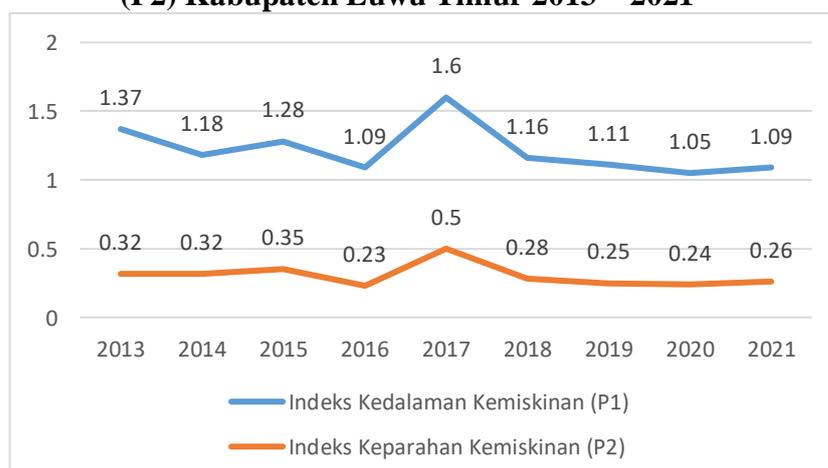
Sumber : BPS, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2021

Grafik 2.9
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Luwu Timur 2013 – 2021



Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2021

Grafik 2.10
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Luwu Timur 2013 – 2021



Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2021

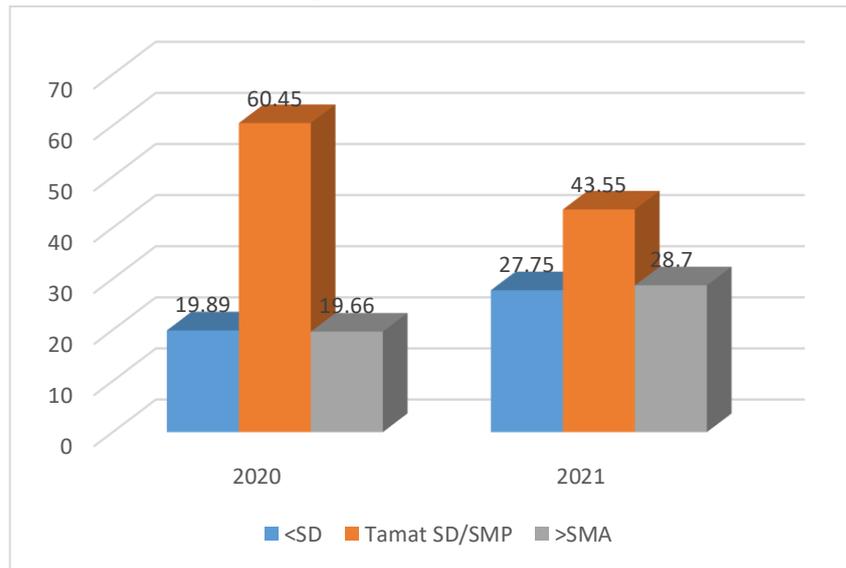
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Kabupaten Luwu Timur pada periode 2013 – 2021 cenderung berfluktuasi antar tahun. Pada tahun 2013, indeks P_1 di Kabupaten Luwu Timur sekitar 1,37 dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 1,60. Selanjutnya pada tahun 2018 hingga 2020, indeks P_1 mengalami penurunan menjadi 1,05, dan tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu 1,09. Tahun 2020 merupakan indeks kedalaman paling rendah selama kurun waktu sembilan tahun terakhir. Dari perubahan indeks P_1 ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur semakin berkurang selama periode sembilan tahun terakhir. Nilai P_1 yang semakin rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P_1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

Sementara itu untuk melihat masalah ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin digunakan ukuran *Poverty Severity Index* (P_2). Indeks ini secara sederhana merupakan jumlah dari *poverty gap* tertimbang yang penimbangnya sebanding dengan *poverty gap* itu sendiri. Dengan mengkuadratkan *poverty gap*, indeks ini secara implisit memberikan penimbang yang lebih pada unit observasi yang makin jauh di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks keparahan kemiskinan (P_2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. P_2 juga berfluktuasi untuk periode 2013-2021. Selama satu tahun terakhir, indeks P_2 mengalami peningkatan dari periode Maret 2020 (0,24) hingga Maret 2021 (0,26).

Salah satu penyebab tingginya tingkat kemiskinan adalah karena tingkat pendidikan yang kurang, untuk persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2021 tamat SD dan SMP sebanyak 43,55 persen, sedangkan yang belum tamat SD sebanyak 27,75 persen dan tamat SMA 28,7 persen, hal ini mengalami penurunan di banding tahun 2020 untuk tamat SD dan SM sedangkan tamat SMA mengalami peningkatan dari 19,66 persen. Untuk persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas dan pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2021 dapat dilihat pada Grafik 2.11 berikut:

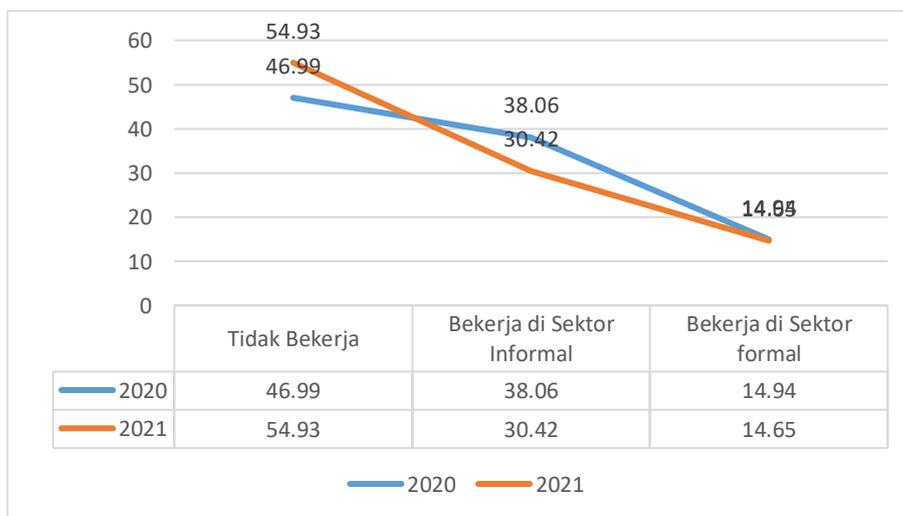
Grafik 2.11
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 tahun ke atas dan pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dan 2021



Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Selain pendidikan, sektor ketenagakerjaan juga mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah, sehingga untuk mengetahui sektor ketenagakerjaan penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur, untuk mengetahui status bekerja dan sektor bekerja penduduk miskin 15 tahun ke atas di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Grafik berikut:

Grafik 2.12
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Status Bekerja



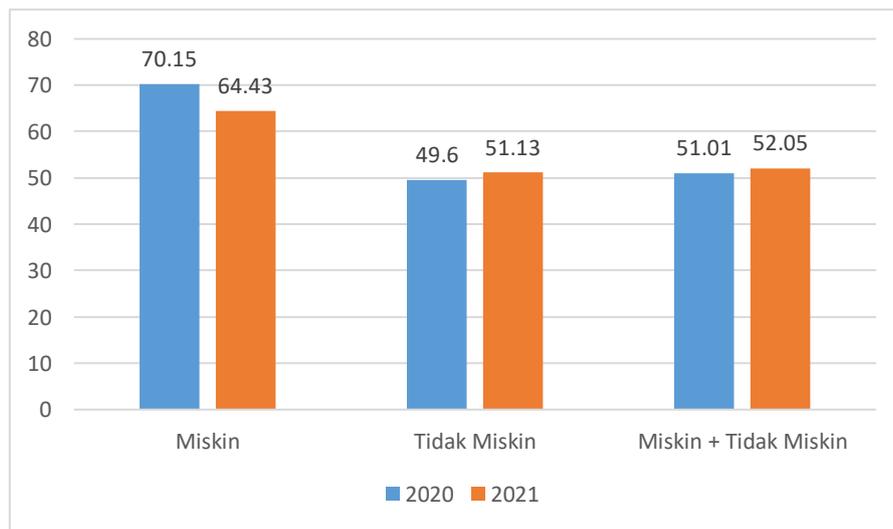
Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Berdasarkan Grafik diatas persentasi penduduk miskin usia 15 Tahun katas menurut status kerja dan sektor kerja dapat dilihat bahwa persentase penduduk yang bekerja masih lebih banyak di banding yang tidak bekerja dan untuk sektor bekerja dapat dilihat bahwa penduduk miskin usia 15 tahun keatas lebih banyak bekerja pada

sektor informal di Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 dan 2021 yaitu sebanyak 38,06 persen tahun 2020 dan 30,42 persen tahun 2021, dan sektor informal yang hampir sama yaitu di tahun 2020 dan 2021 mencapai 14,94 dan 14,65 persen. sedangkan penduduk tidak bekerja ada peningkatan di tahun 2021 yaitu 54,93 di bandingkan tahun sebelumnya yaitu 2020 jumlah persentase penduduk tidak bekerja sebanyak 46,99 persen.

Selain dari segi jumlah dan persentase penduduk miskin, perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan, yang tercermin pada besaran dan pola pengeluaran penduduk. Pada tahun 2020-2021, pengeluaran perkapita untuk makanan dan status miskin di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Grafik 2.14 berikut :

Grafik 2.13
Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan dan Status Miskin Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2020-2021



Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan BPS Tahun 2021

2.11 Program Penanggulangan Kemiskinan

Program penanggulangan kemiskinan pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 dilakukan dalam berbagai kegiatan baik yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan tingkat kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang berasal dari bantuan pemerintah pusat yaitu program Sembako/BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang tersebar di Kabupaten Luwu Timur merupakan Program Nasional yang mempunyai Keluarga Penerima manfaat yang cukup banyak, berikut dipaparkan dalam Tabel 2.13 terkait persentase Rumah tangga menurut Program Perlindungan Sosial yang diterima di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 berikut:

Tabel 2.14
Persentase Rumah Tangga menurut Program Perlindungan Sosial yang diterima di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Jenis Program Perlindungan Sosial	Persentase Rumah Tangga Yang Menerima
(1)	(2)
Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako)	14,93
Program Indonesia Pintar (PIP)	7,55
Kartu perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahterah (KKS)	10,74
Program Keluarga Harapan (PKH)	11,74

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS Tahun 2021

Selain Program perlindungan sosial Bantuan Pemerintah pusat, Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur juga perlu dilaksanakan dan di tingkatkan, akan tetapi program penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilaksakan hanya dengan satu Organisasi Perangkat Daerah saja melainkan seluruh OPD di Kabupaten Luwu Timur saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam Penanggulangan kemiskinan agar apa yang akan dikerjakan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat sasaran. Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur di berbagai Organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut:

Tabel 2.15
Program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dalam membantu proses penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sulawesi Selatan

No	Program/Kegiatan	OPD/Dinas
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Program/Kegiatan	OPD/Dinas
7	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
8	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
11	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
12	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
13	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
14	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
15	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
16	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	11 Kecamatan
18	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
19	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
20	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
21	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
22	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
23	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
24	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
25	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
26	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian
27	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian

No	Program/Kegiatan	OPD/Dinas
28	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pertanian
29	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
30	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
31	Program Pengembangan Umkm	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
32	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
33	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
34	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
35	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
36	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
37	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
38	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
39	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
40	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
41	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian
42	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
43	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
44	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
45	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
46	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
47	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

No	Program/Kegiatan	OPD/Dinas
48	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
49	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
50	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
51	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
52	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
53	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
54	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
55	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
56	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
57	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
58	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
59	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
60	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
61	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
62	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
63	Program Penanganan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial
64	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
65	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
66	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

No	Program/Kegiatan	OPD/Dinas
67	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
68	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
69	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
70	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
71	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
72	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
73	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
74	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
75	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
76	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
77	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
78	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
79	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sumber : Matriks Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur

Dalam hal Penanggulangan Kemiskinan sudah banyak program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur dampak program atau kegiatan sedikit berubah ketika pandemi covid-19. Kondisi pandemi covid-19 membuat banyak penyesuaian terutama dari sisi anggaran kebijakan, dan semakin beratnya kondisi kemiskinan dengan ditandai berubah arahnya pola tingkat kemiskinan dari yang sebelumnya mengalami tren penurunan menjadi tren kenaikan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penanggulangan kemiskinan, dan banyak hal yang membutuhkan perhatian lebih lanjut diantaranya adalah:

1. Belum terdapat implementasi Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga masih terjadi exclusion error dan inclusion error pada data DTKS.

2. Komitmen terhadap Pengentasan kemiskinan Masih lemah di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.
3. Belum optimalnya advokasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan TKPK Provinsi dan kabupaten/kota.
4. Peran CSR dalam pengentasan kemiskinan masih belum maksimal.
5. Penggunaan basis data terpadu masih belum optimal dalam pelaksanaan intervensi penanggulangan kemiskinan serta dalam dokumen perencanaan penganggaran daerah.
6. Kemampuan Pengelolaan dan analisis data DTKS masih lemah.
7. Meningkatkan dan memperkuat Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait program-program dalam Penanggulangan Kemiskinan.
8. Kurangnya Konvergensi Program, baik program Pusat, Program Khusus maupun Program daerah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

Dalam merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang terarah dan tepat sasaran perlu didukung oleh data yang menggambarkan letak permasalahan secara akurat dan menentukan target sasaran program secara tepat, sehingga rumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana secara lebih efektif.

Hal ini juga didukung oleh Perpres No. 18 Tahun 2020 mengenai RPJMN 2020 – 2024 terkait strategi penanggulangan kemiskinan yang menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan perlu didukung oleh data yang valid dan sistem informasi yang terpadu dengan **memanfaatkan data kemiskinan terpadu serta instrumen perencanaan, penganggaran dan pemantauan yang berpihak pada masyarakat miskin.**

Data kemiskinan merupakan cikal bakal analisis kemiskinan yang menjadi pertimbangan utama dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah terutama dari sisi penentuan program/kegiatan dan perumusan target sasaran yang tepat dan terukur. Berdasarkan data yang valid dan akurat maka proses pengambilan keputusan dalam rangka menentukan sasaran program/ kegiatan dan target penerima manfaat dapat terlaksana secara lebih terarah dan efektif.

Data yang baik juga dapat mendorong konsistensi program pembangunan secara horizontal (antara sasaran kegiatan dalam perencanaan dan alokasi dana pada penganggaran) dan vertikal (antara kebijakan program pusat dan daerah maupun). Sehingga data merupakan suatu alat informasi yang *sangat 'powerful' dalam menentukan perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat rentan dan miskin* sehingga perlu dikelola dengan baik.

Profil dan karakteristik kemiskinan ditulis dalam bentuk analisis agar dapat memberikan gambaran mengenai jenis persoalan dan akar permasalahan kemiskinan yang sedang dihadapi, lebih tepatnya disebut proses identifikasi masalah. Sehingga para perencana program dan pengambil kebijakan dapat

lebih fokus dalam menentukan program-program yang tepat atau sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin.

Dalam bab ini kemiskinan dibahas dari dua sisi, yaitu indikator kemiskinan yang berbasis *konsumsi atau pengeluaran*, serta kemiskinan dari sisi multidimensi yang terdiri dari *beberapa bidang kebutuhan dasar*. Paket analisis dalam membahas masing-masing bidang melalui empat tahapan sebagai berikut :

1. Analisis posisi relatif yang berisikan penjelasan :
 - a) Posisi capaian indikator Provinsi Sulawesi selatan terhadap daerah/provinsi lain di Indonesia.
 - b) Posisi capaian indikator Provinsi Sulawesi selatan terhadap daerah/provinsi lain di Pulau Sulawesi
 - c) Posisi capaian indikator Provinsi Sulawesi selatan terhadap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi selatan
2. Analisis perkembangan antar waktu yang berisikan penjelasan :
 - a) Perkembangan capaian indikator dalam setahun terakhir
 - b) Pola perubahan capaian indikator tahun ke tahun (konsisten/fluktuatif)
3. Analisis efektivitas yang berisikan penjelasan :
 - a) Perubahan capaian selama periode kebijakan tertentu (RPJMD)
 - b) Perubahan antar periode kebijakan (antar periode RPJMD)
4. Analisis relevansi perkembangan dari kondisi kemiskinan tersebut yang berisikan penjelasan pola perubahan daerah terhadap pola perubahan di tingkat yang lebih tinggi atau lebih luas.

3.1 Bidang Konsumsi Pengeluaran

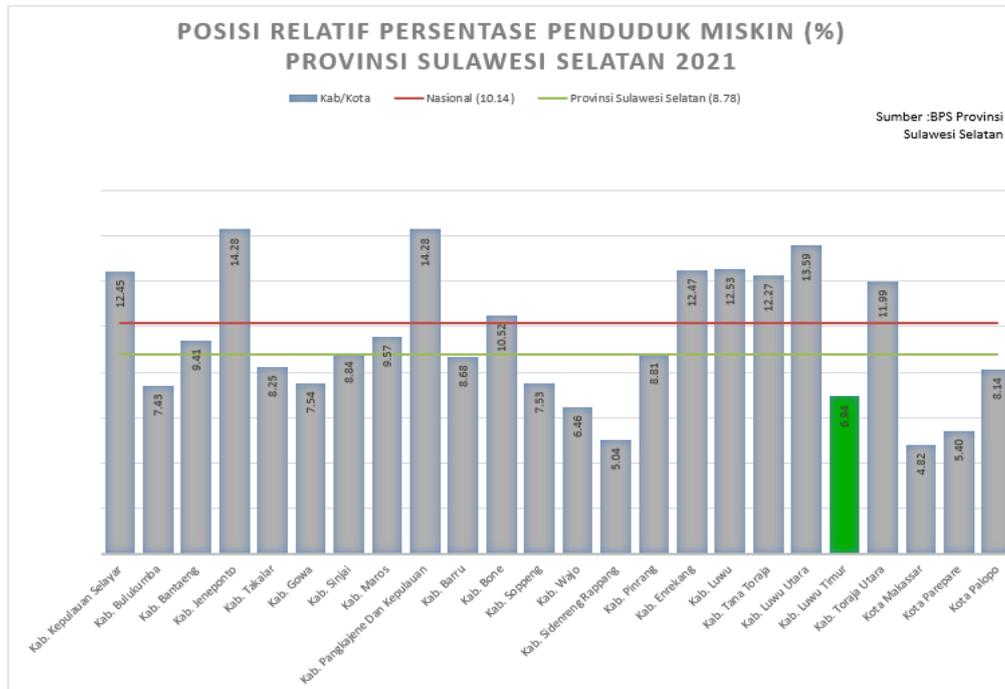
Pengukuran kemiskinan berbasis konsumsi atau pengeluaran pada dasarnya menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Beberapa indikator yang dihasilkan dari konsep kemiskinan ini

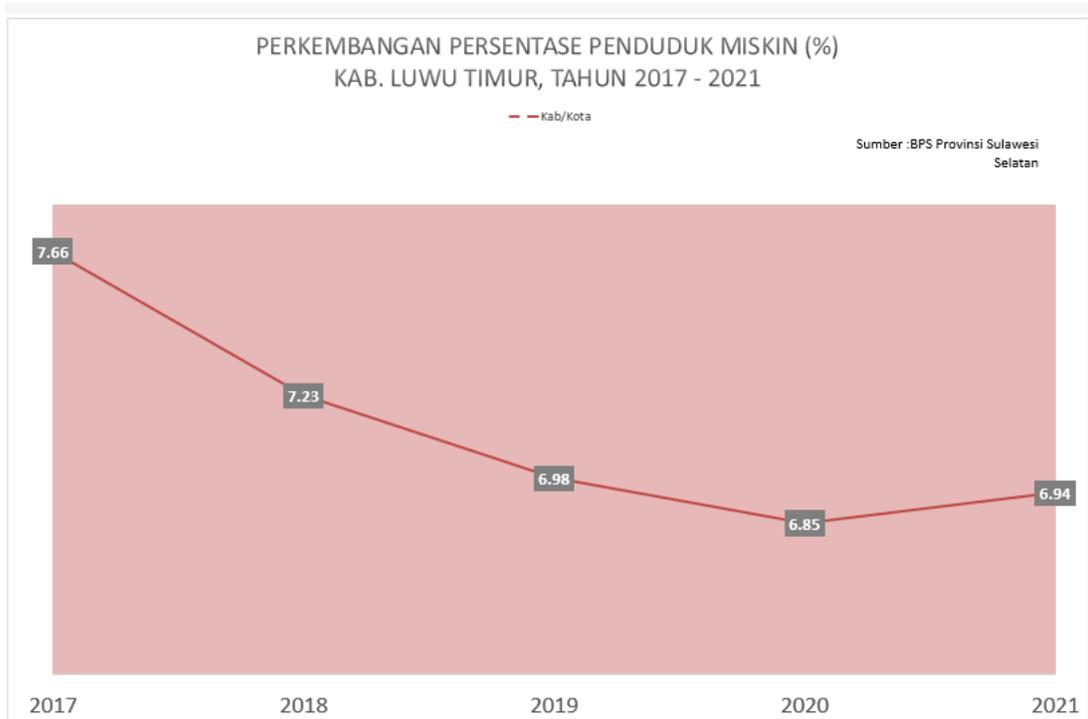
diantaranya, persentase penduduk miskin (P0), Jumlah Penduduk Miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2), serta tentunya Garis Kemiskinan (GK) yang dijadikan patokan atau penentuan status kemiskinannya, Tingkat kemiskinan ekstrim, tingkat ketimpangan, serta dibahas juga tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berkaitan dengan bidang pengeluaran yang nantinya menjadi sasaran program dan prioritas wilayah. Analisa lengkapnya dijabarkan dibawah ini.

3.1.1 persentase Penduduk miskin (P0)

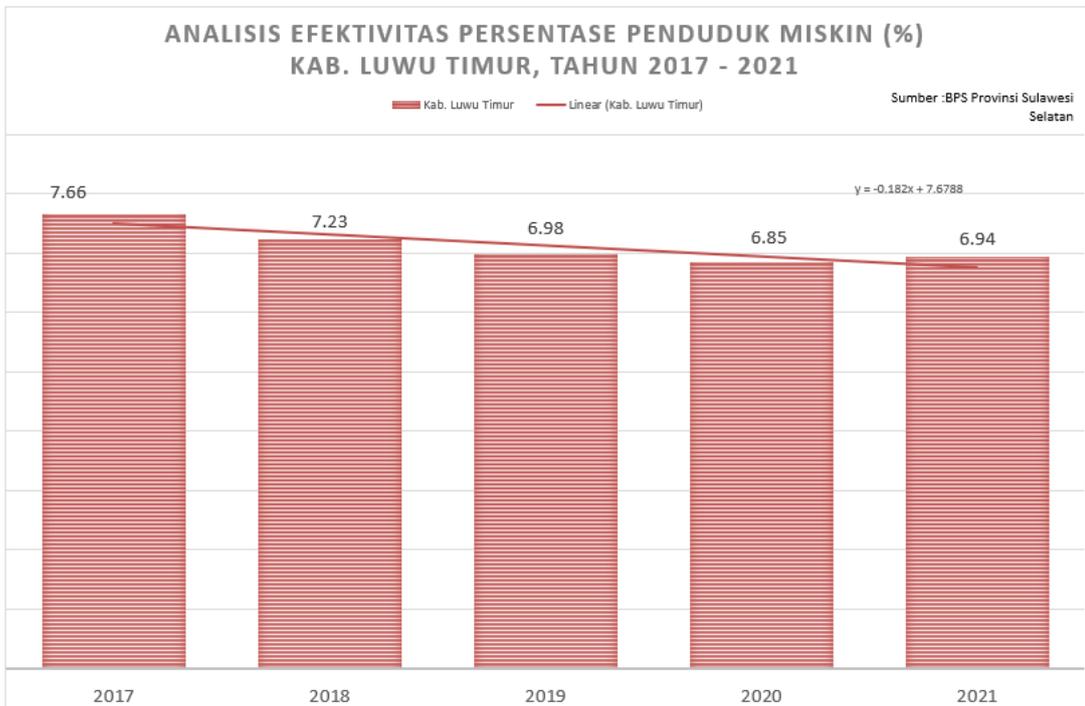
Gambar 3.1 Posisi Relatif persentase Penduduk Miskin Prov Sulsel Tahun 2021



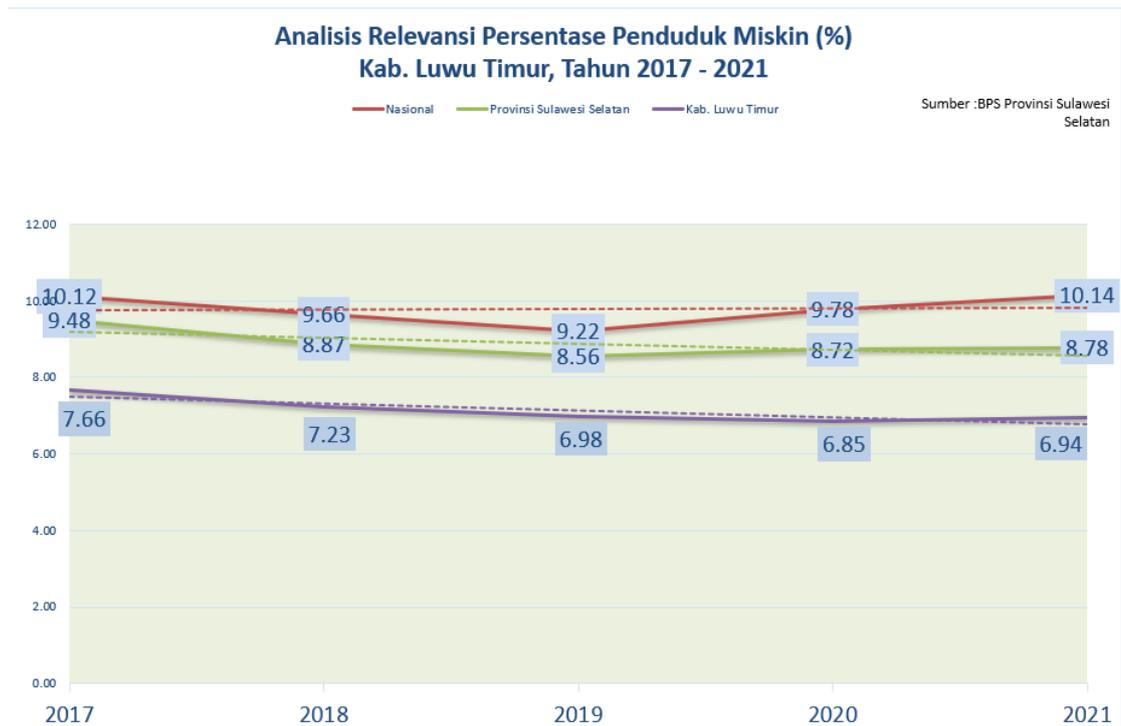
Gambar 3.2 Perkembangan antar Waktu persentasePenduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021



Gambar 3.3 Analisis Efektivitas persentasePenduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.4 Analisis Relevansi persentasePenduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Kondisi Karakteristik Masalah persentasePenduduk Miskin :

a. Posisi Relatif:

- ✓ Pada tingkat Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat 9 Kabupaten yang capaian nya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan nasional, kemudian 2 Kab/Kota yang capaian nya diatas Provinsi Sulawesi selatan namun sudah dibawah nasional, sisanya sebanyak 13 Kab/Kota termasuk Kabupaten Luwu Timur telah berada dibawah Provinsi Sulawesi selatan dan nasional. Ini menggambarkan bahwa sebagian besar kab/kota di Sulawesi Selatan sudah menunjukkan capaian yang lebih baik dari capaian Nasional dan capaian Prov Sulsel.
- ✓ Pada Tahun 2021 Kabupaten Luwu Timur berada di posisi ke-5 terendah untuk persentase tingkat kemiskinan di antara 24 Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Capaiannya sebesar 6.94%, posisi pertama terendah adalah Kota Makassar dengan capaian 4.82% dan posisi tertinggi dengan capaian 14.28% di tempati oleh Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Pangkajene & Kepulauan.
- ✓ Target persentase Tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dalam dokumen RPJMD 2021–2026 adalah 5.84% pada tahun 2026. Target tahun 2026 tersebut diharapkan bisa tercapai, walaupun masih berada pada

tahap pemulihan ekonomi pasca pandemi covid19 sejak tahun 2020 yang membuat banyak perubahan di berbagai bidang kehidupan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Jika dilihat tren pada periode tahun 2017-2021, tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 7.66% menjadi 6.94%. Terjadi penurunan sebesar 0.72%. Tahun 2020 capaian tingkat kemiskinan terendah berada pada titik 6.85% tetapi kemudian mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 0.09% menjadi 6.94%. Hal ini disebabkan karena tahun 2020 menjadi awal pandemi covid19 di Indonesia termasuk di Kabupaten Luwu Timur.
- Apabila dilihat pada tren ataupun pola perubahan pada periode 2017-2020 menunjukkan Tren penurunan yang cukup konsisten meskipun lajunya dirasa cukup lambat. Kemudian mengalami perubahan pada periode 2020-2021 menjadi tren kenaikan.

c. Efektivitas:

- Pada Periode 2017-2021, adanya pola penurunan yang signifikan terutama pada tahun 2017-2020. Namun pada tahun 2020 hingga sekarang menunjukkan pola kenaikan akibat adanya pandemi covid-19. Meskipun demikian, secara keseluruhan capaian indikator tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan penurunan sebesar 0.72% walaupun penurunannya sangat lambat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jika dihitung dalam 5 tahun Pemerintah Kabupaten Luwu Timur hanya mampu menurunkan 0.144% tingkat kemiskinannya setiap tahunnya. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Pemkab sudah efektif walaupun masih belum maksimal dan membutuhkan langkah-langkah strategis dan massif untuk mencapai target RPJMD di tahun 2026 sebesar 5.84%.

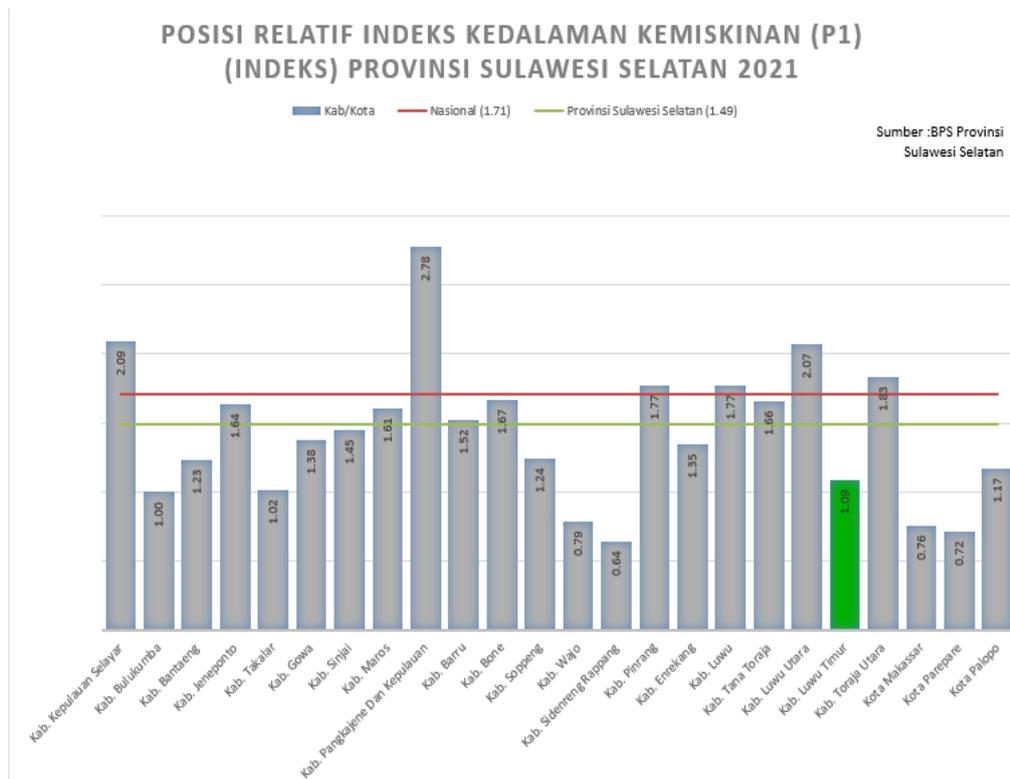
d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan mulai tahun 2017 hingga tahun 2021. Pada tahun 2017, capaian Nasional sebesar 10,12% dan capaian Prov Sulawesi Selatan sebesar 9.48% masih lebih tinggi dibandingkan capaian Kabupaten Luwu Timur yang hanya sebesar 7.66%. Kemudian mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya. Di tahun 2020

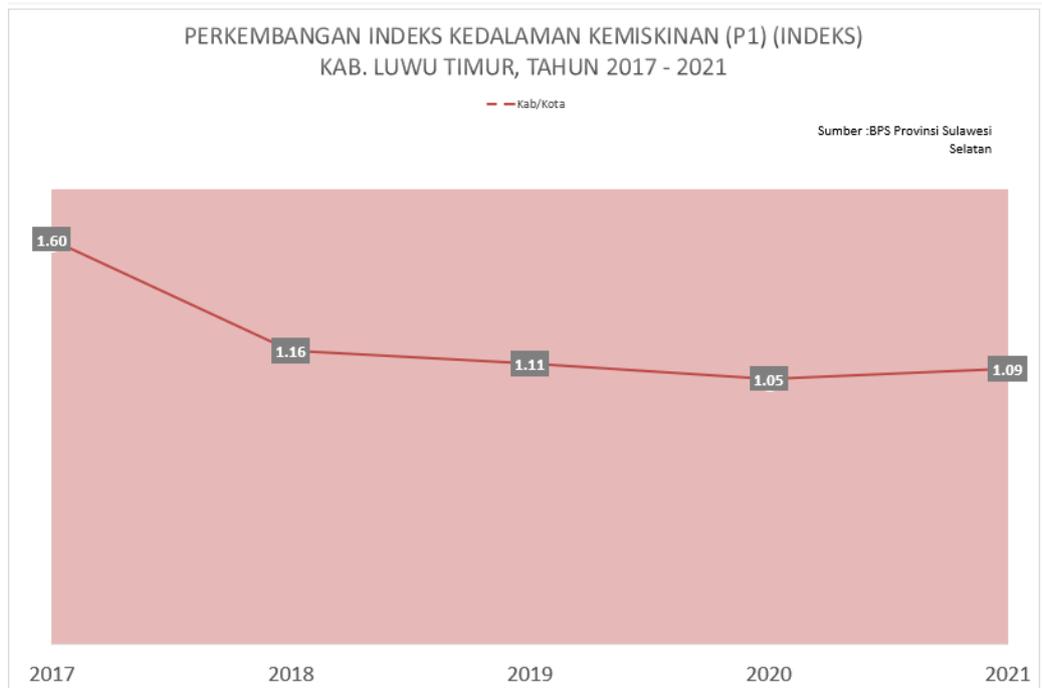
sampai 2021 capaian Nasional mulai mengalami kenaikan menjadi 10.4% dan begitu pula dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan menjadi 8.78% walaupun capaian ini masih jauh di bawah dari capaian Nasional sementara Kabupaten Luwu Timur juga mengalami kenaikan dari 6.85% menjadi 6.94%. Hal ini berarti capaian indikator tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2017-2021 relevan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan juga dengan capaian Nasional.

3.1.2 Indeks kedalaman kemiskinan (P1)

Gambar 3.5 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Prov Sulsel Tahun 2021



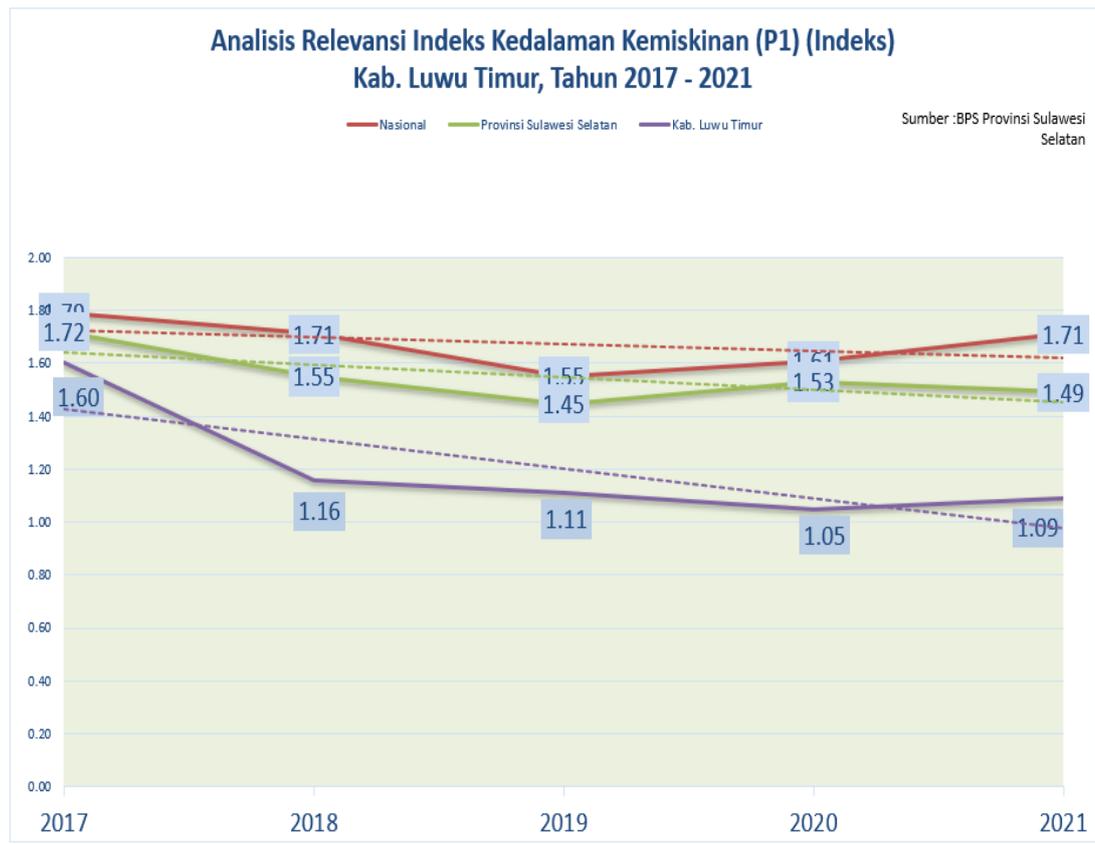
Gambar 3.6 Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.7 Analisis Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.8 Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Kondisi Karakteristik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) :

a. Posisi Relatif:

- ✓ Pada tingkat Kab/Kota, terdapat 6 Kab/Kota yang capaiannya di atas capaian Nasional, sebanyak 5 Kab/Kota capaiannya berada di atas Provinsi Sulawesi selatan dan di bawah capaian Nasional. Sisanya sebanyak 13 kab/kota sudah berada dibawah capaian Prov Sulawesi Selatan dan tentu saja di bawah capaian Nasional. Ini menggambarkan bahwa Sebagian besar kab/kota di Sulawesi Selatan sudah menunjukkan capaian yang lebih baik dari capaian Nasional dan capaian Prov Sulsel.
- ✓ Posisi Relatif Kabupaten Luwu Timur berada pada posisi ke-7 terendah di antara 24 Kab/Kota Se-Sulsel dengan capaian 1.49%. Posisi pertama ditempati oleh Kabupaten Sidenreng Rappang dengan angka 0.64% dan posisi tertinggi di tempati oleh Kabupaten Pangkajene & Kepulauan

dengan angka 2.78%.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada periode 2017-2021 indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 1.60% menjadi 1.09%.
- Apabila dilihat pada tren ataupun pola perubahan pada periode 2017-2021 menunjukkan Tren penurunan yang fluktuatif dengan laju yang cukup lambat hanya terjadi penurunan sebesar 0.51% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

c. Efektivitas:

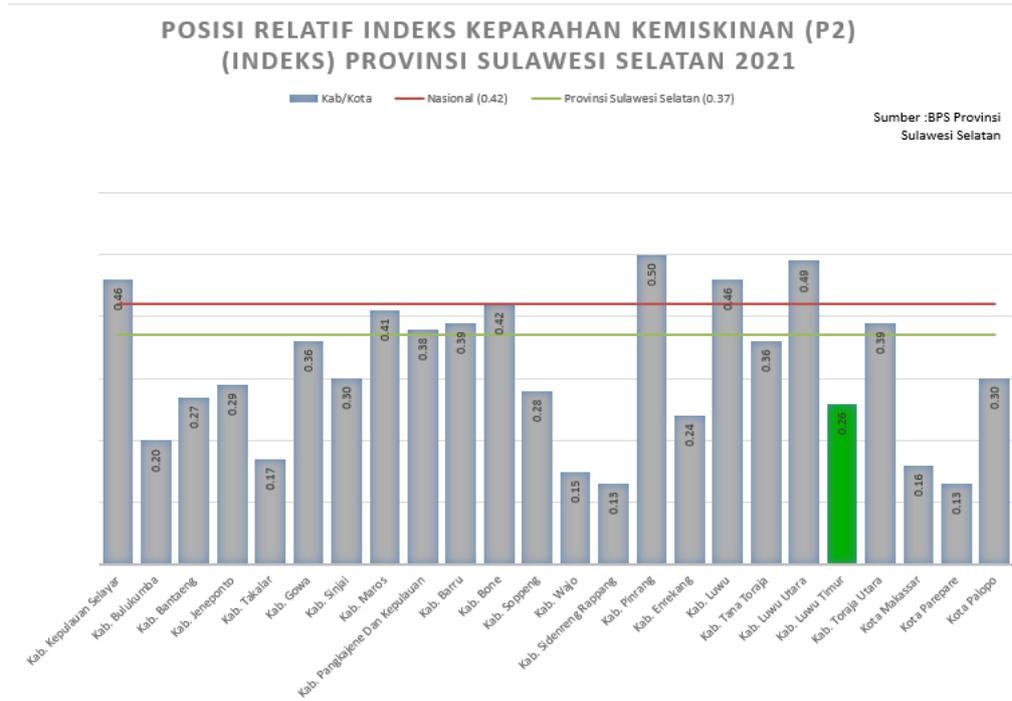
- Pada Periode 2017–2021 terjadi penurunan sebesar 0.51% dari 1.60% di tahun 2017 menjadi 1.09% di tahun 2021. adanya pola penurunan indeks kedalaman kemiskinan ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemkab Luwu Timur sudah efektif tetapi masih harus perlu dimaksimalkan karena masih terdapat kesenjangan pengeluaran antara masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

d. Relevansi:

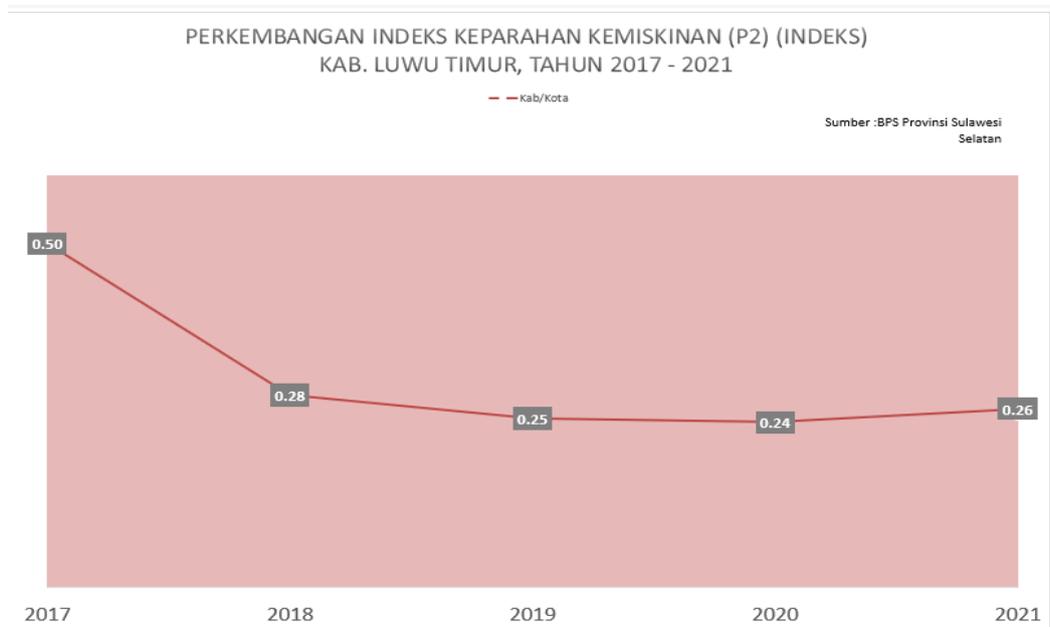
- Pada tahun 2017 hingga tahun 2021, Tren dan pola perubahan antara capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan. Hanya saja, pada tahun 2021, capaian Provinsi Sulawesi Selatan mengalami perbaikan dengan penurunan angka dari capaian tahun 2020, sedangkan capaian Nasional sama dengan capaian Kabupaten Luwu Timur yang mengalami kenaikan dari capaian tahun 2020, walaupun demikian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya sejak tahun 2017 sampai 2021 capaian Kabupaten Luwu Timur relevan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan capaian Nasional.

3.1.3 Indeks keparahan kemiskinan (P2)

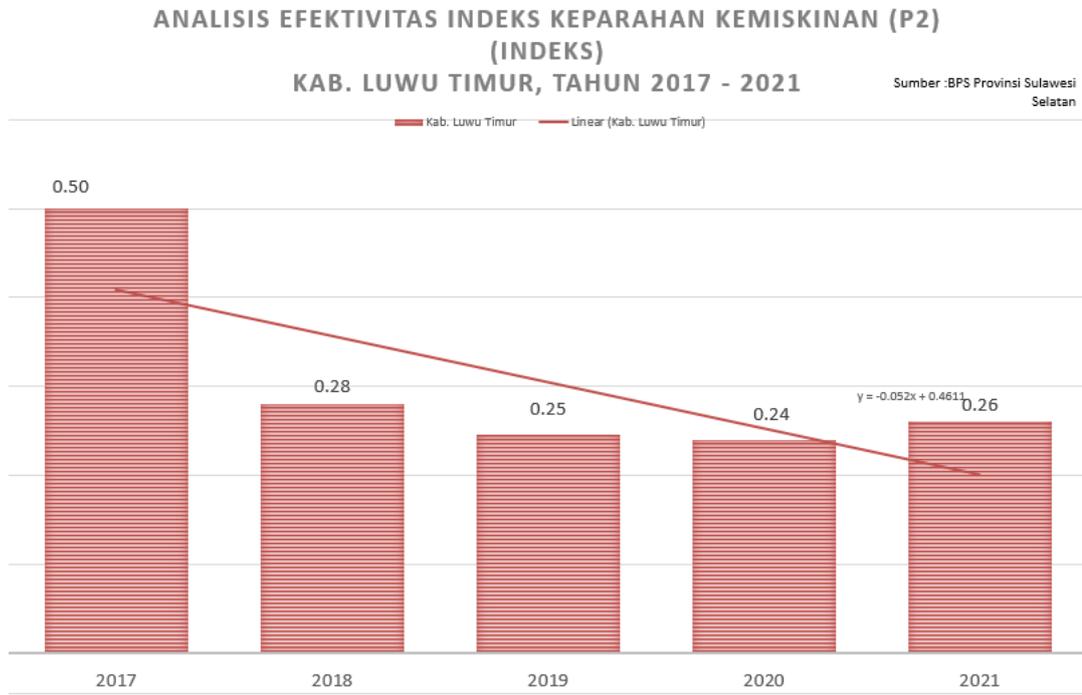
Gambar 3.9 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Prov Sulsel Tahun 2021



Gambar 3.10 Analisis Perkembangan antar Waktu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.11 Analisis Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.12 Analisis Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Karakteristik Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) :

a. Posisi Relatif:

- Pada tingkat Kab/Kota, terdapat 4 kab/kota yang capaiannya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan nasional, 5 Kab/Kota yang capaiannya diatas Provinsi Sulawesi selatan namun dibawah nasional, sisanya sebanyak 15 Kab/Kota telah berada dibawah Provinsi Sulawesi selatan dan nasional. Ini menggambarkan bahwa Sebagian besar kab/kota menunjukkan capaian yang lebih baik dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
- Posisi Relatif Kabupaten Luwu Timur di antara 24 Kab/Kota se-Sulawesi Selatan menempati posisi ke-7 terendah dengan capaian 0.26%. Posisi pertama terendah ditempati oleh Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kota Pare-pare dengan capaian 0.13%, sementara posisi tertinggi ditempati oleh Kabupaten Pinrang dengan angka 0.50%

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2021 indeks Keparahan kemiskinan Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 0.50% menjadi 0.26%. Terjadi penurunan terendah di tahun 2020 sebesar 0.24% dari 0.25% di tahun 2019. Namun meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 0.26%.
- Apabila dilihat tren ataupun pola perubahannya, pada periode 2017-2021 menunjukkan Tren penurunan yang fluktuatif meskipun cukup lambat karena hanya sebesar 0.24% selama 5 tahun terakhir.

c. Efektivitas:

- Pada Periode 2017–2021, menunjukkan adanya pola penurunan indeks Keparahan kemiskinan. Namun pada tahun 2021 menunjukan pola kenaikan akibat adanya pandemi covid-19. Jika dilihat tren-nya terjadi penurunan, sehingga bisa disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan untuk menurunkan persentase keparahan kemiskinan sudah efektif. Namun masih harus lebih dimaksimalkan karena masih ada kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin.

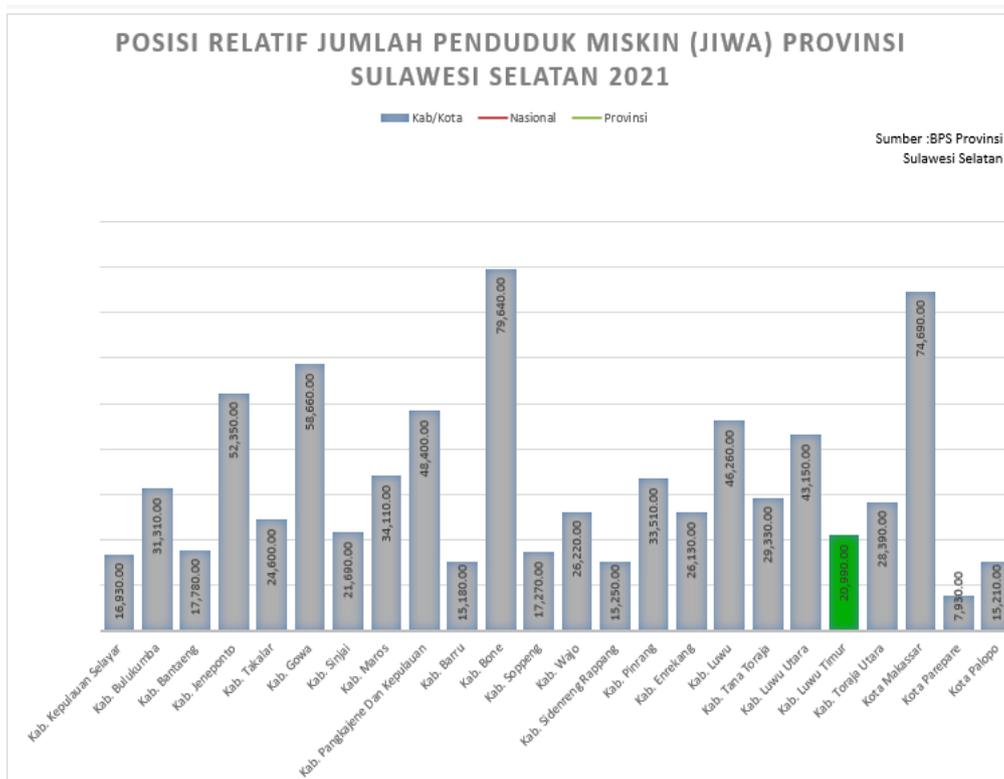
d. Relevansi:

- Pada tahun 2017 hingga tahun 2021, Tren dan pola perubahan antara capaian Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dan

Provinsi Sulawesi selatan juga capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan. Hanya saja, pada tahun 2021, Provinsi Sulawesi sudah menunjukkan perbaikan capaian dari tahun 2020 karena mengalami penurunan sebesar 0.02%. sedangkan Nasional mengalami kenaikan di tahun 2021 seperti capaian Kabupaten Luwu Timur dari capaian tahun 2020. Pada umumnya dapat disimpulkan bahwa capaian ketiganya relevan.

3.1.4 Jumlah penduduk miskin

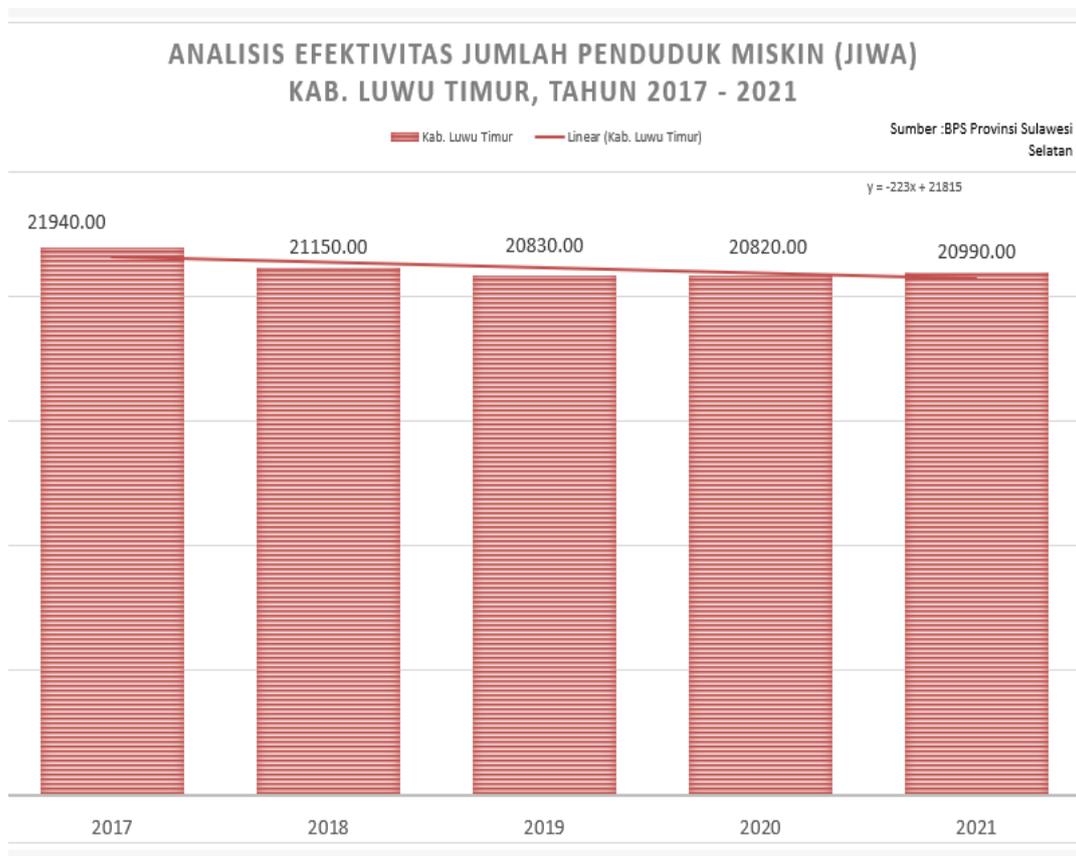
Gambar 3.13 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Prov Sulsel Tahun 2021



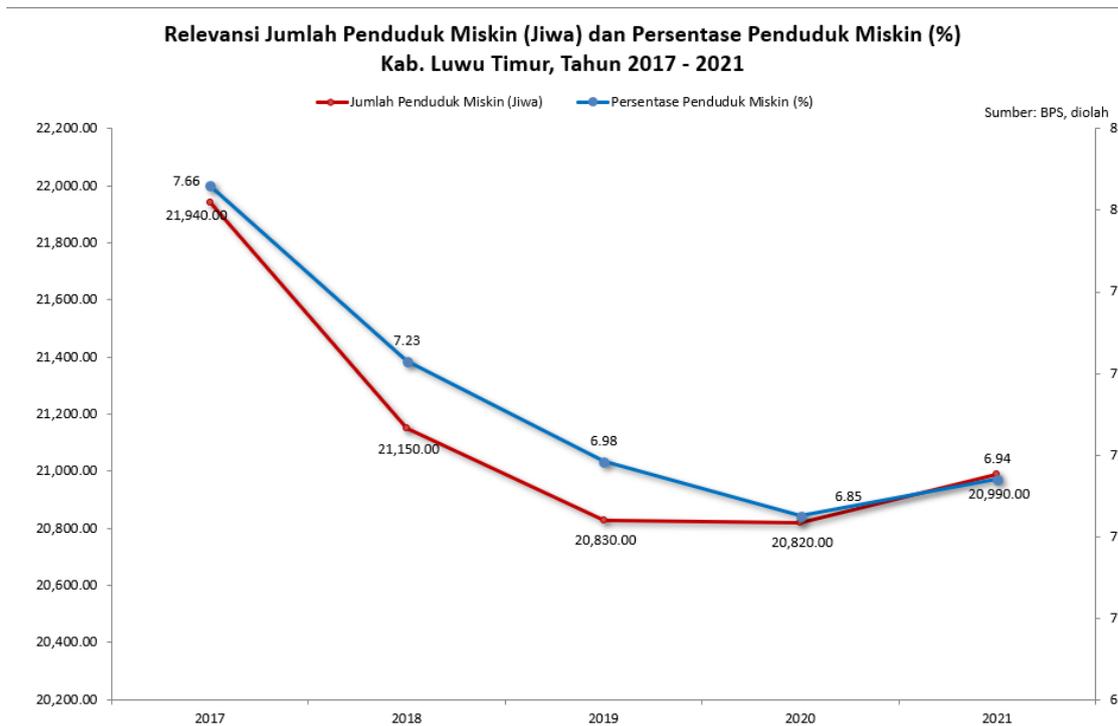
Gambar 3.14 Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.15 Analisis Efektivitas Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.16 Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Kondisi Karakteristik Jumlah Penduduk Miskin :

a. Posisi Relatif:

- Pada tingkat Kab/Kota, semua menunjukkan angka yang lebih rendah dari capaian Provinsi Sulsel dan juga tentu saja lebih rendah dari capaian Nasional.
- Posisi Relatif Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 menempati posisi ke-8 terendah di antara 24 Kab/Kota di Sulawesi Selatan dengan jumlah 20.990 penduduk miskin. Posisi terendah di tempati oleh Kota Pare-pare dengan jumlah 7.930 penduduk dan di posisi tertinggi berada pada Kabupaten Bone dengan jumlah 79.640 penduduk.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode Tahun 2017-2021, Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 21.940 jiwa menjadi 20.990 jiwa. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sedikit lebih baik dibandingkan tahun sebelum dan sesudahnya yaitu sebesar 20.820 jiwa, namun kemudian mengalami peningkatan jumlah di tahun 2021 menjadi 20.990 jiwa diakibatkan oleh banyaknya masyarakat yang terdampak Covid19.

- Apabila dilihat pada tren ataupun pola perubahan pada periode 2017-2021 menunjukkan Tren penurunan yang fluktuatif, walaupun pada periode 2020-2021 menunjukkan tren kenaikan.

c. Efektivitas:

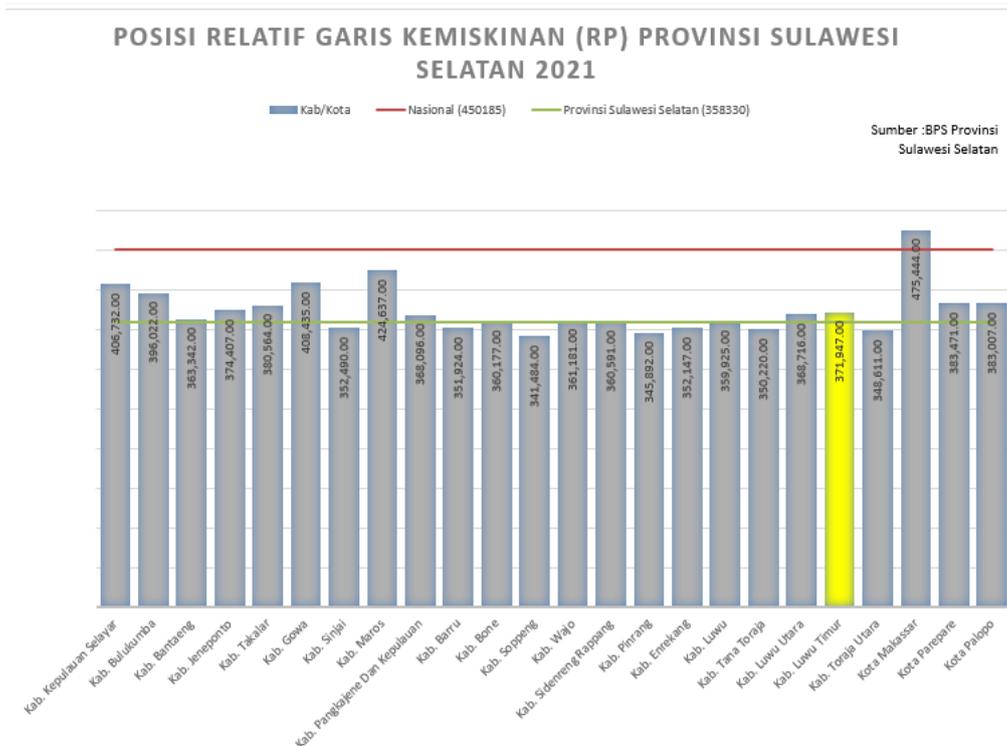
- Pada Periode tahun 2017–2021, adanya pola penurunan jumlah penduduk miskin terutama pada periode 2017-2020. Namun pada tahun 2021 menunjukkan pola kenaikan akibat adanya pandemi covid-19. Penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur hanya sebanyak 950 jiwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, hanya sebesar 190 jiwa per tahunnya. Angka ini masih menunjukkan perlambatan penurunan jumlah penduduk miskin, sehingga dibutuhkan Langkah-langkah strategis dan konkrit dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Walaupun secara umum dapat dikatakan bahwa upaya penurunan jumlah penduduk miskin sudah efektif.

d. Relevansi:

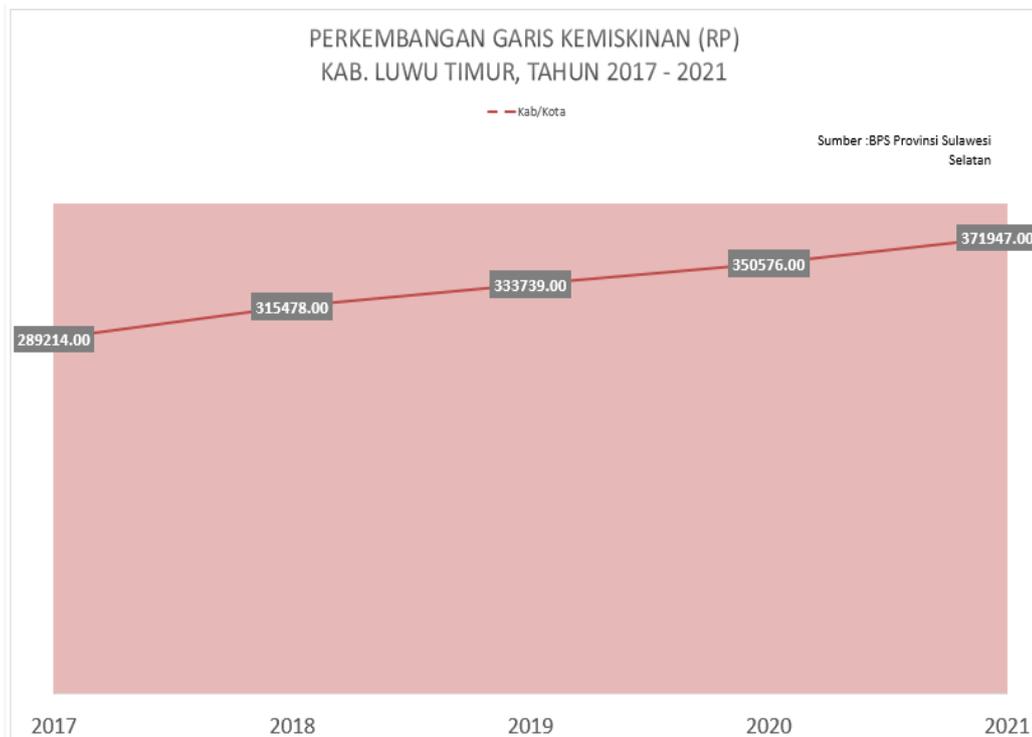
- Pada tahun 2017 hingga tahun 2021, Tren dan pola perubahan antara capaian jumlah penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur dengan capaian persentasePenduduk Miskin dapat dikatakan cukup beriringan. Atau dapat dikatakan perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur relevan dengan capaian persentasePenduduk Miskin.

3.1.6 Garis Kemiskinan

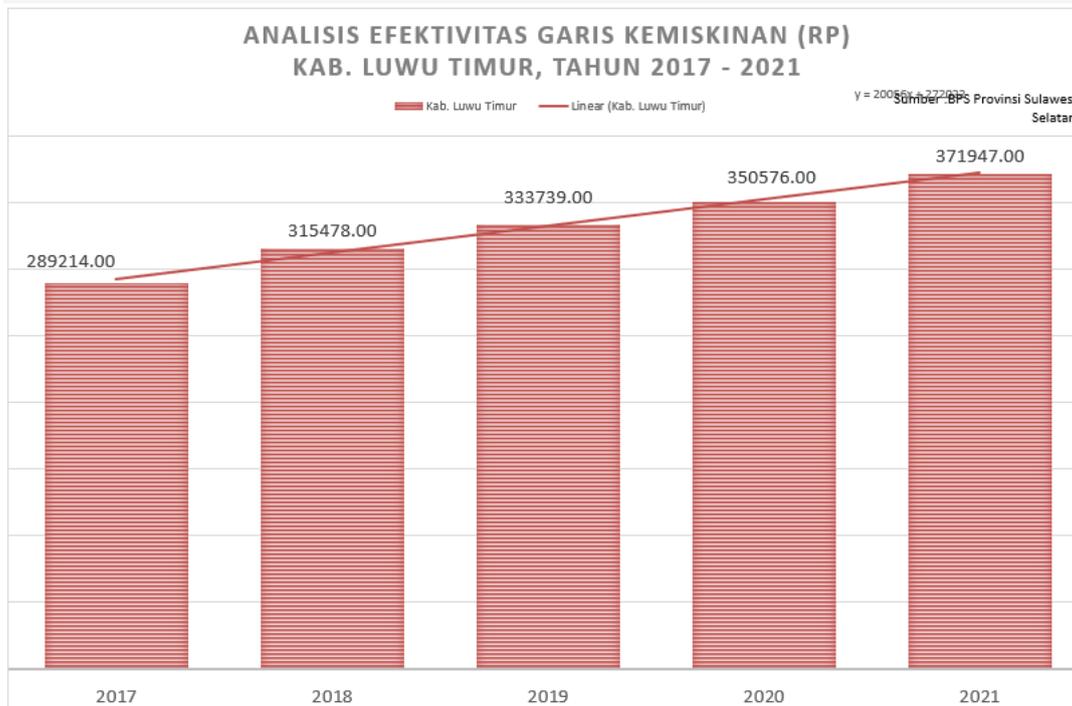
Gambar 3.17 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Prov Sulsel Tahun 2021



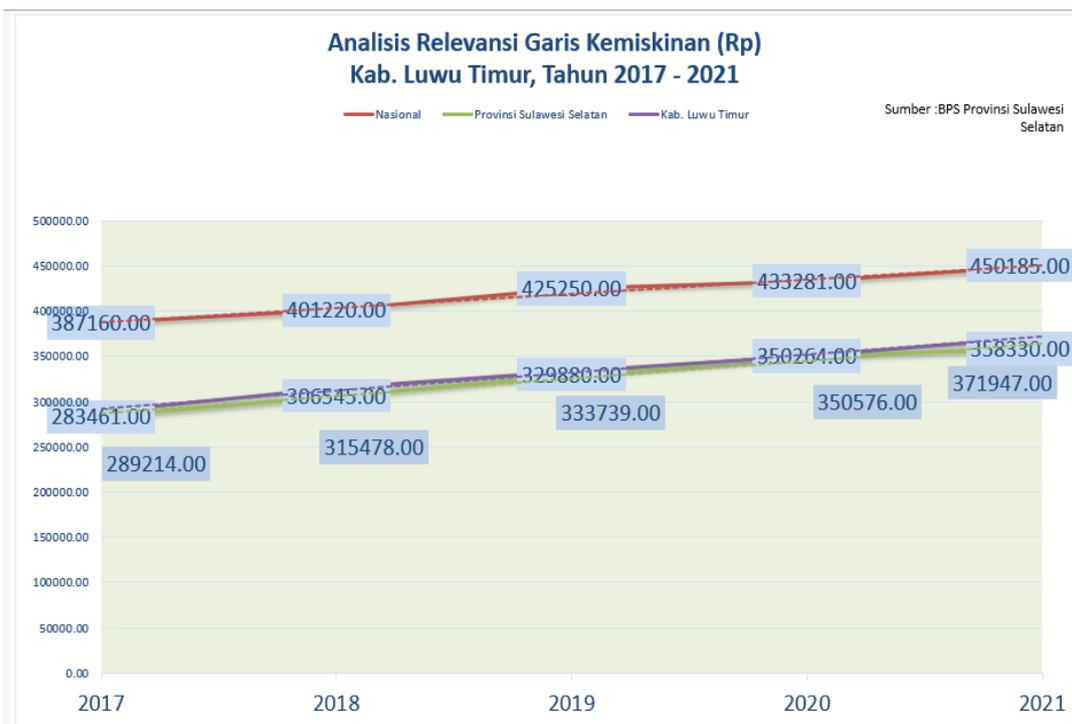
Gambar 3.18 Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.19 Analisis Efektivitas Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.20 Analisis Relevansi Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Kondisi karakteristik Garis Kemiskinan :

a. Posisi Relatif:

- Pada tingkat Kab/Kota terdapat 1 kab/kota yang garis kemiskinannya di atas Nasional, terdapat 16 kab/Kota yang garis kemiskinannya di atas Provinsi Sulawesi selatan dan di bawah nasional salah satunya adalah Kabupaten Luwu Timur, sisanya sebanyak 7 kab/kota berada di bawah garis kemiskinan Provinsi Sulawesi selatan dan nasional.
- Posisi relatif Kabupaten Luwu Timur di antara 24 Kab/Kota se-Sulawesi Selatan adalah berada pada posisi ke-8 tertinggi dengan angka Rp 371.947,- Posisi terendah di tempati Kabupaten Soppeng dengan angka Rp 341.484,- dan posisi tertinggi di tempati oleh Kota Makassar dengan angka Rp 475.444,-

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode Tahun 2017-2021, Garis kemiskinan Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan dari Rp 289.214,- di tahun 2017 terus meningkat menjadi Rp 371.947,- di tahun 2021.
- Apabila dilihat pada tren ataupun pola laju pertumbuhan garis kemiskinan, pada periode 2017-2021 menunjukkan pola kenaikan yang konsisten.

c. Efektivitas:

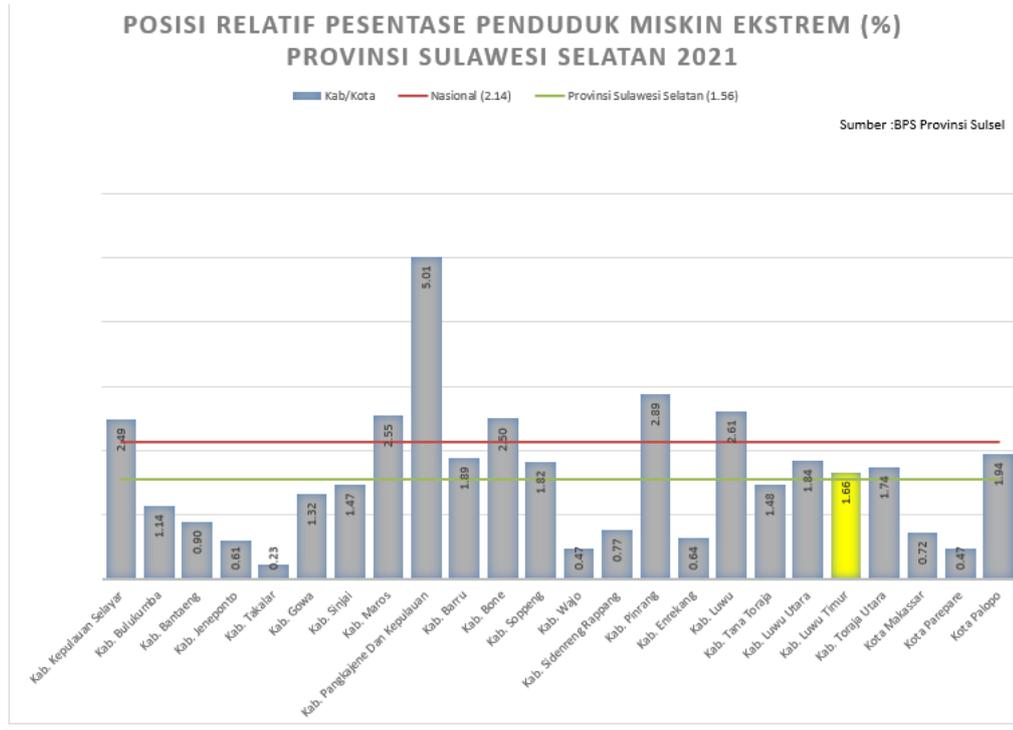
- Pada Periode tahun 2017–2021, laju pertumbuhan garis kemiskinan begitu konsisten mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh harga dari komoditi yang dikonsumsi masyarakat juga menunjukkan kenaikan harga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya penurunan garis kemiskinan yang diselenggarakan oleh Pemkab masih belum efektif.

d. Relevansi:

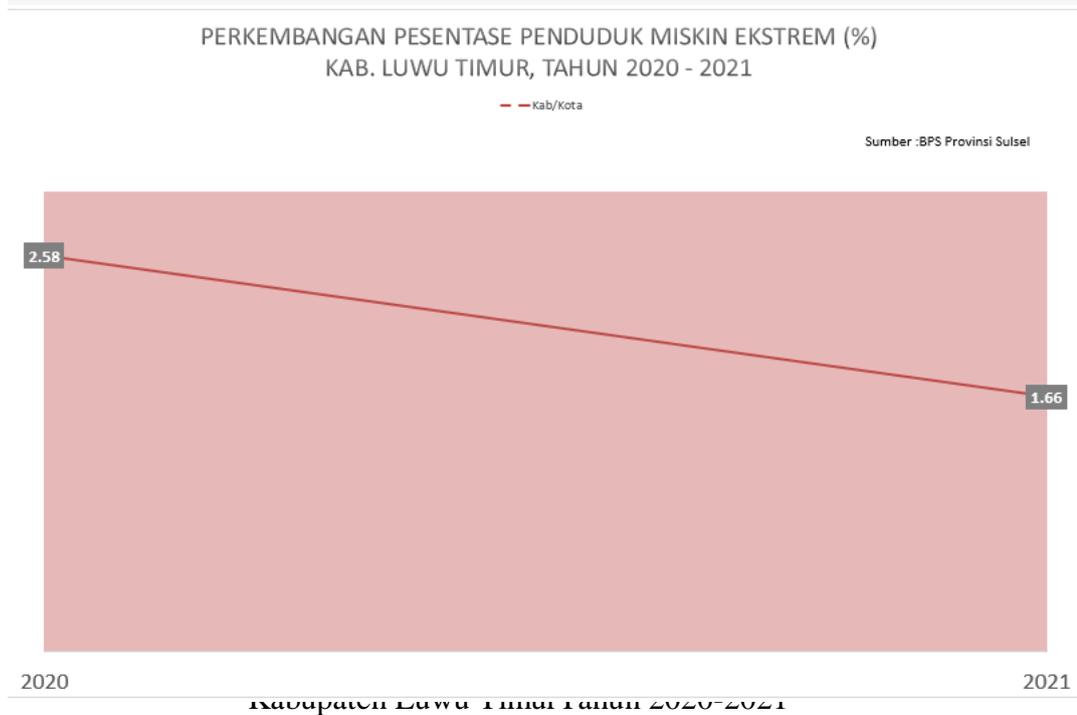
- Pada tahun 2017 hingga tahun 2021, garis kemiskinan Kabupaten Luwu Timur lebih rendah dibandingkan garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Secara Tren dan pola perubahan antara garis kemiskinan ketiganya dapat dikatakan sangat beriringan, artinya pola kenaikannya hampir sama antara Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi selatan dan nasional, yang berbeda hanya besaran angka dan perubahannya di setiap tahunnya. Jadi hubungan ketiganya relevan.

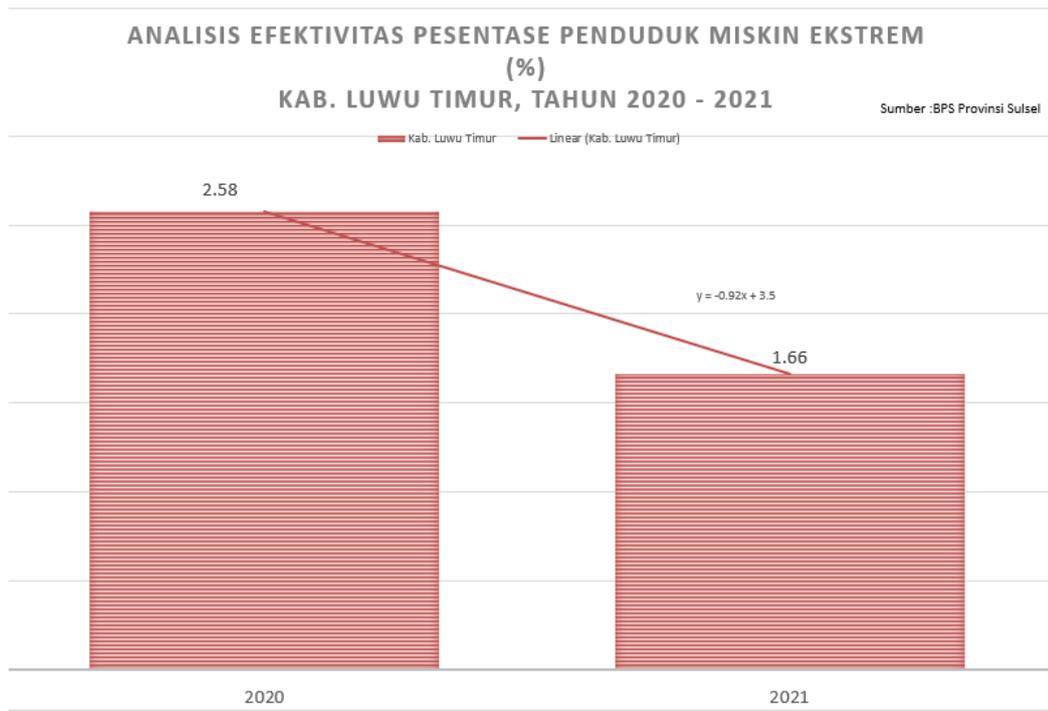
3.1.7 persentasePenduduk Miskin Ekstrem

Gambar 3.21 Posisi Relatif persentasePenduduk Miskin Ekstrem Prov Sulawesi Selatan Tahun 2021

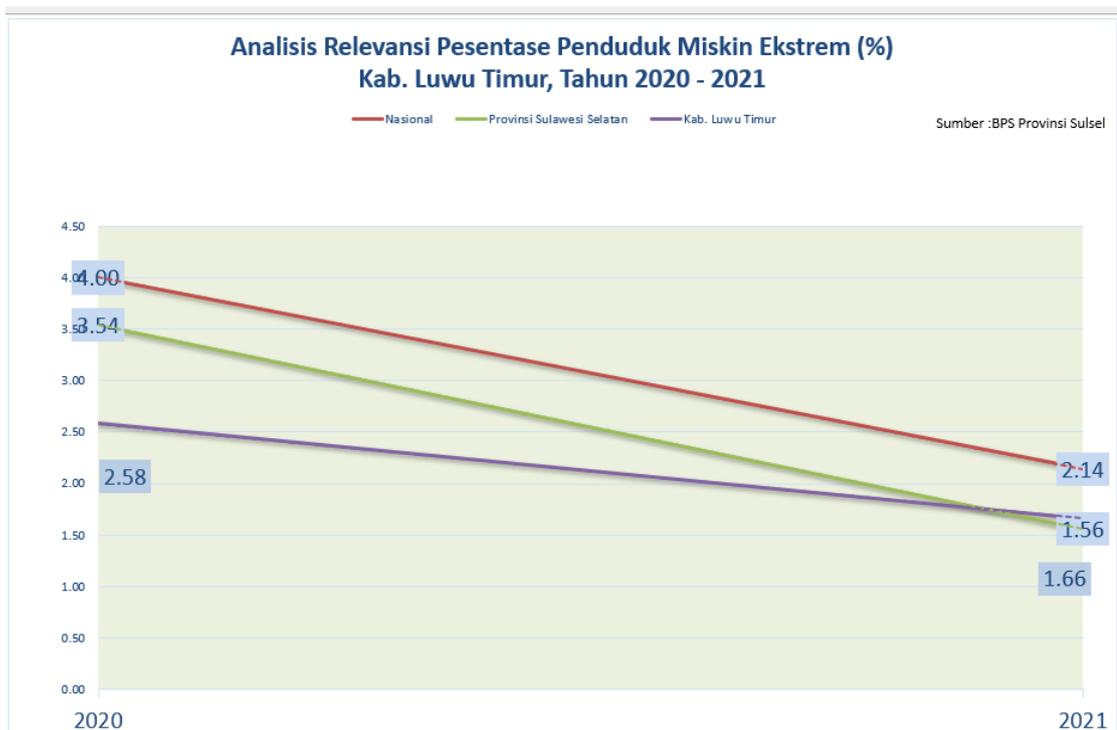


Gambar 3.22 Perkembangan Antar Waktu persentasePenduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2021





Gambar 3.24 Analisis Relevansi persentasePenduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2021



Gambaran Kondisi Kemiskinan Ekstrem (<1,9\$ PPP) Tahun 2020 Provinsi Sulawesi selatan:

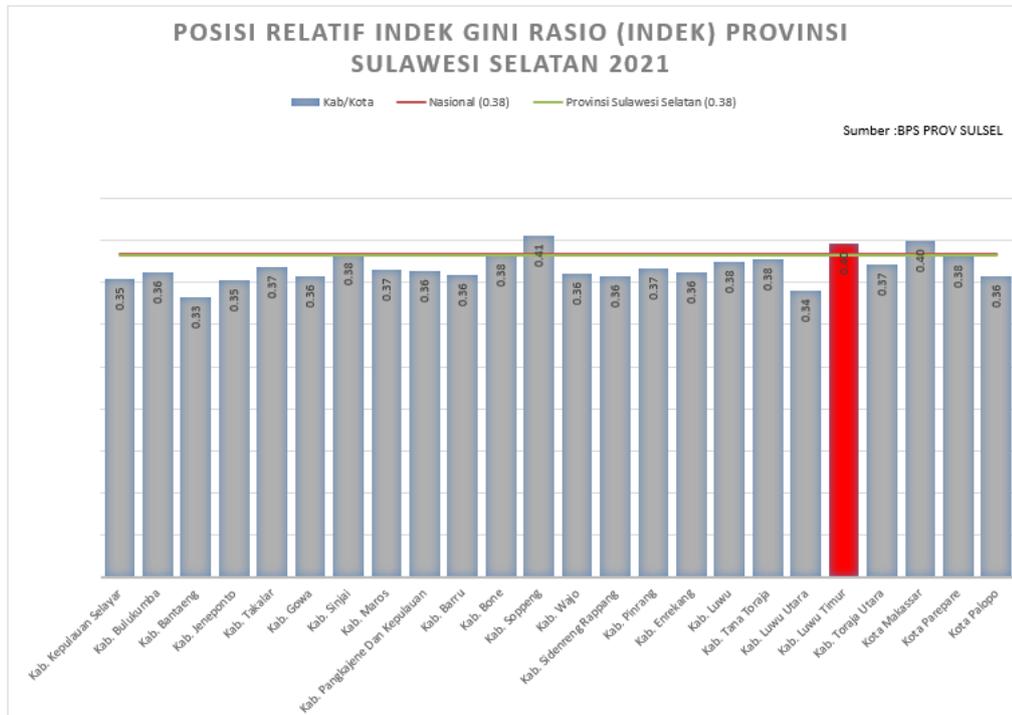
- ✓ Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan

masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem setara dengan USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan *absolute poverty measure* yang konsisten antar negara dan antar waktu.

- ✓ Berdasarkan Data Tahun 2021, Secara persentase Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sulawesi selatan mencapai 3,54%. Angka tersebut berada dibawah rata-rata Nasional yang sebesar 4,00%. Kondisi ini menempatkan Provinsi Sulawesi selatan pada peringkat ke-17 secara nasional atau peringkat ke-5 terendah di Sulawesi.
- ✓ Pada tingkat Kab/Kota, terdapat 6 Kab/Kota yang kondisinya diatas tingkat kemiskinan ekstrim Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional, sementara 6 kabupaten termasuk Kabupaten Luwu Timur berada diatas angka provinsi namun sudah dibawah Nasional, sedangkan sebanyak 12 Kab/Kota telah berada dibawah angka Provinsi Sulawesi selatan maupun Nasional.
- ✓ Perkembangan antar waktu persentase tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2020 sampai 2021 menunjukkan penurunan angka capaian, dari 2.58% menjadi 1.66%.
- ✓ Penurunan angka capaian dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 0.92% menunjukkan upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Luwu Timur sudah efektif.
- ✓ Berdasarkan tren sejak tahun 2020 ke tahun 2021 menunjukkan relevansi penurunan capaian Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan capaian Nasional. Sehingga dapat disimpulkan jika capaian ketiganya relevan.

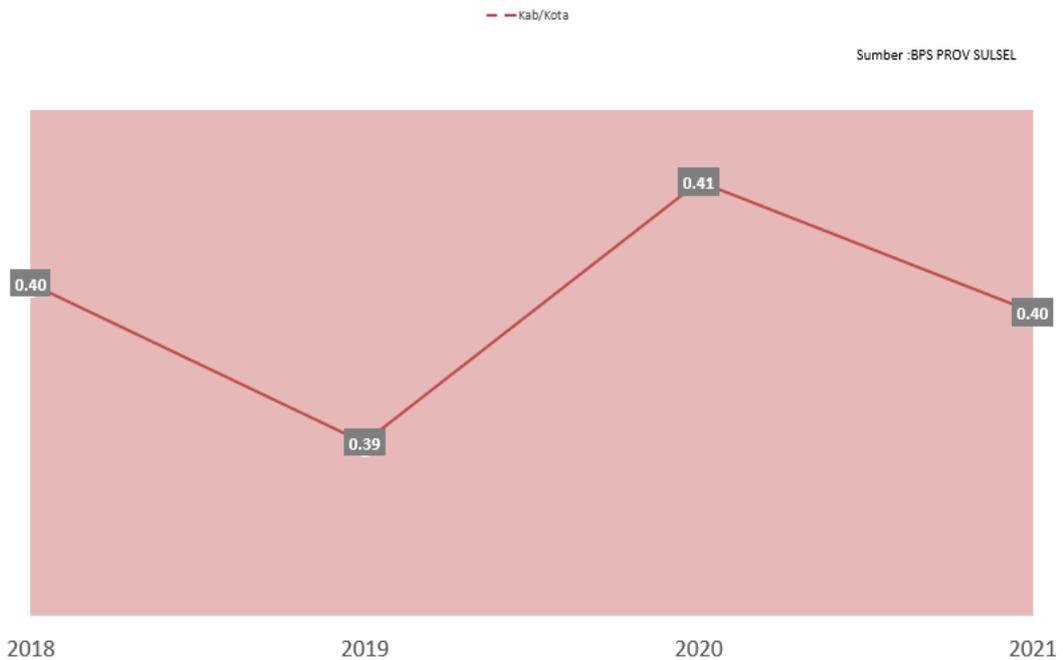
3.1.8 Tingkat Ketimpangan Pengeluaran (Gini Ratio)

Gambar 3.25 Posisi Relatif Indeks Gini Ratio Prov Sulsel Tahun 2021

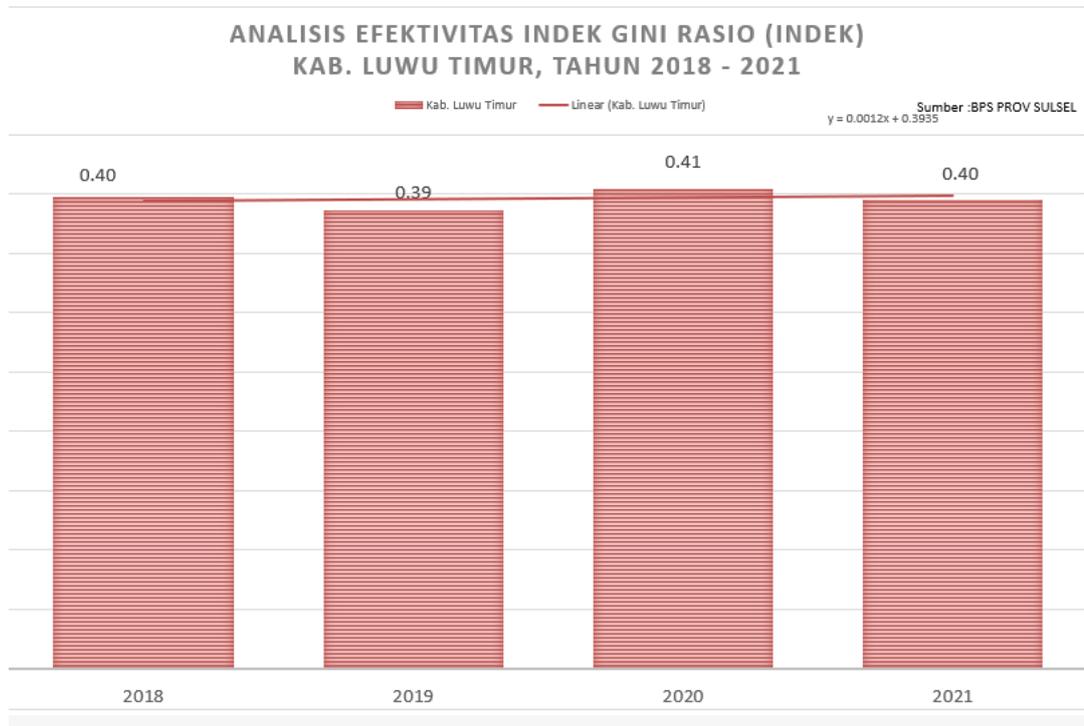


3.26 Perkembangan Antar Waktu Indeks Gini Rasio Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 - 2021

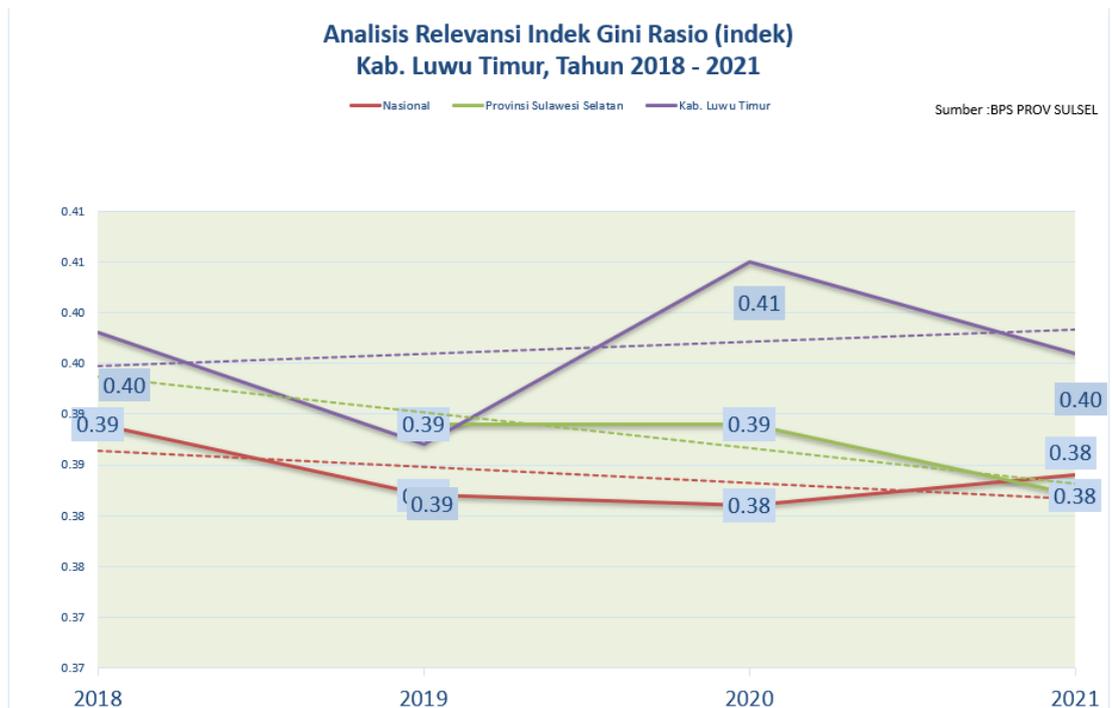
PERKEMBANGAN INDEK GINI RASIO (INDEK) KAB. LUWU TIMUR, TAHUN 2018 - 2021



Gambar 3.27 Analisis Efektivitas Indeks Gini Rasio Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 – 2020



Gambar 3.28 Analisis Relevansi Indeks Gini Rasio Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 – 2020



Kondisi Karakteristik Masalah Ketimpangan Pengeluaran :

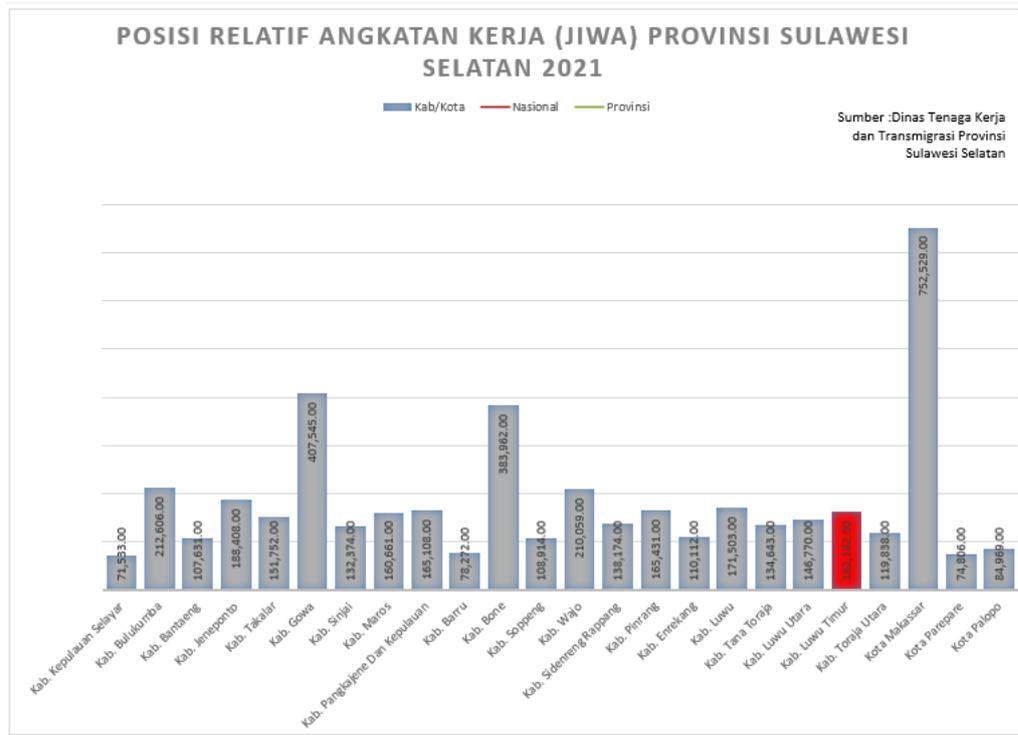
- a. Posisi Relatif:
 - ✓ Pada Tahun 2021 tingkat ketimpangan pengeluaran (*Gini Ratio*) Kabupaten Luwu Timur sebesar 0.40 berada pada posisi ke-3 tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Capaiannya Lebih tinggi dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang hanya sebesar 0.38
 - ✓ Target ketimpangan pengeluaran (*Gini Ratio*) Kabupaten Luwu Timur pada RPJMD 2021–2026 yaitu 0,217 di tahun 2026.
- b. Perkembangan Antar Waktu:
 - ✓ Pada Periode tahun 2018-2021 tingkat ketimpangan pengeluaran di Kabupaten Luwu Timur mengalami perkembangan yang fluktuatif dan tidak terjadi penurunan karena capaian di tahun 2018 angkanya 0.40 menurun di tahun 2019 menjadi 0.39, naik di tahun 2020 menjadi 0.41 dan Kembali menjadi 0.40 di tahun 2021.
 - ✓ Apabila dilihat pada tren ataupun pola perubahan pada periode 2018-2021 menunjukkan Tren peningkatan meskipun angkanya capaian di awal dan akhirnya sama.
- c. Efektivitas:
 - ✓ Pada Periode tahun 2018–2021, tingkat ketimpangan pengeluaran mengalami tren peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemkab Luwu Timur belum efektif dalam menurunkan tingkat ketimpangan pengeluaran.
- d. Relevansi:
 - ✓ Pada tahun 2018 hingga tahun 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran Kabupaten Luwu Timur lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Secara Tren dan pola perubahan antara ketiganya dapat dikatakan tidak beriringan, artinya pola kenaikannya tidak sama antara Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi selatan dan nasional, jadi hubungan ketiganya tidak relevan

3.2 Bidang Ketenagakerjaan

3.2.1 Angkatan Kerja

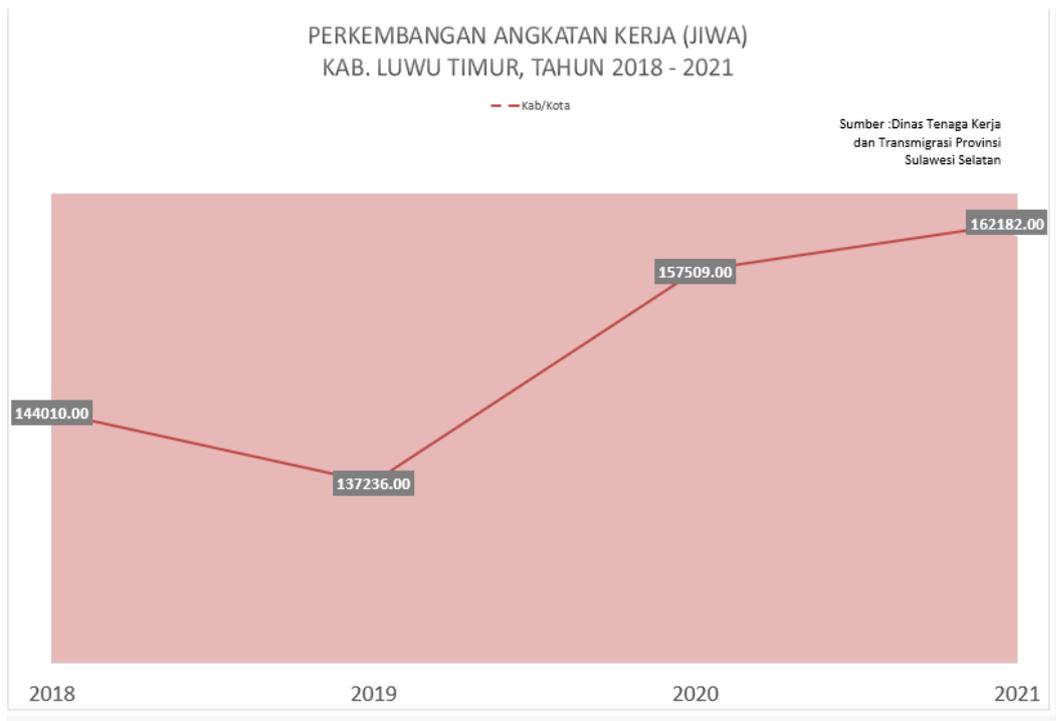
Gambar 3.29 Posisi Relatif Angkatan Kerja Provinsi Sulsel Tahun

2021

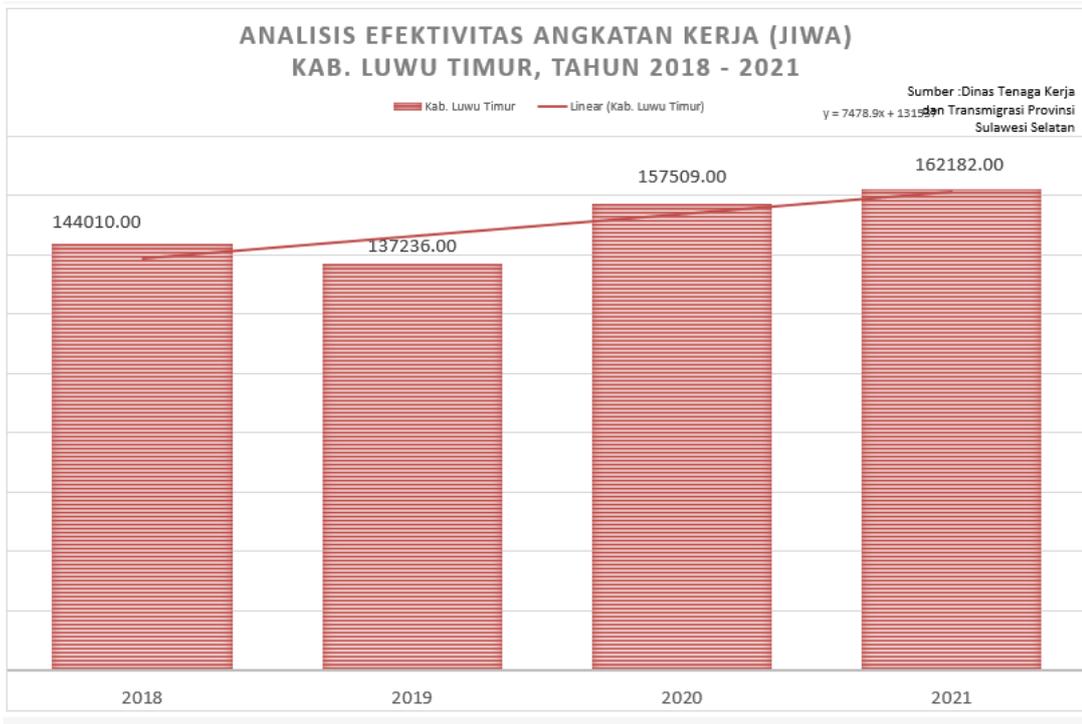


Gambar 3.30 Perkembangan Antar Waktu Angkatan Kerja Kabupaten

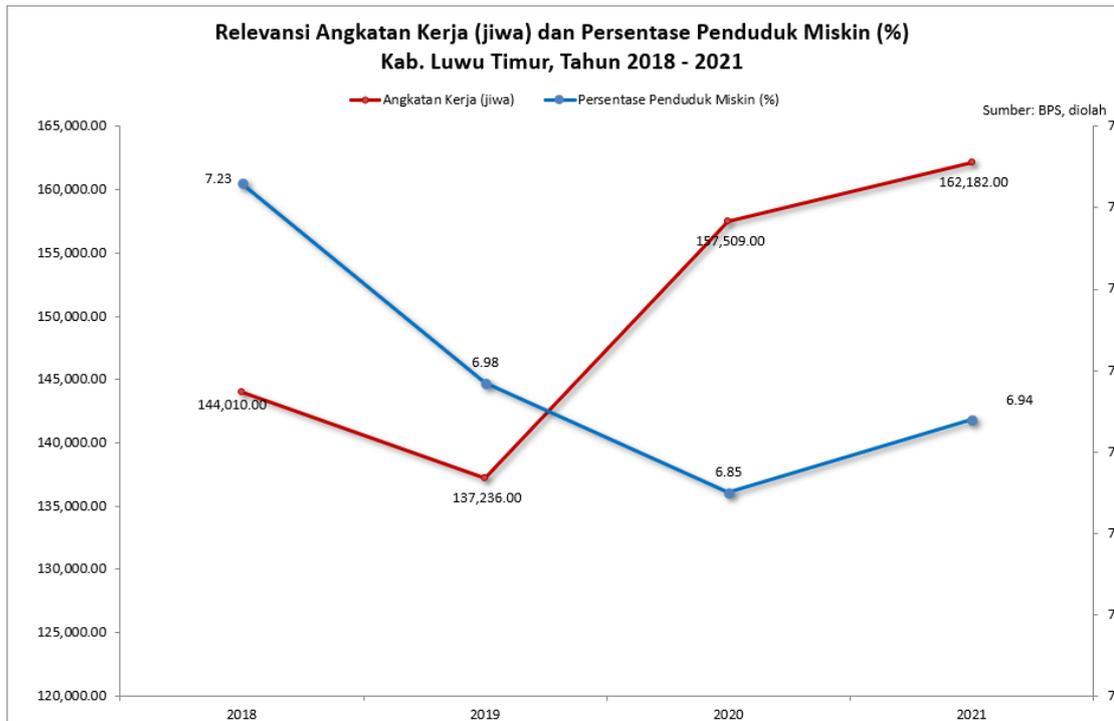
Luwu Timur Tahun 2018-2021



Gambar 3.31 Analisis Efektivitas Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Gambar 3.32 Analisis Relevansi Angkatan Kerja dan persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021

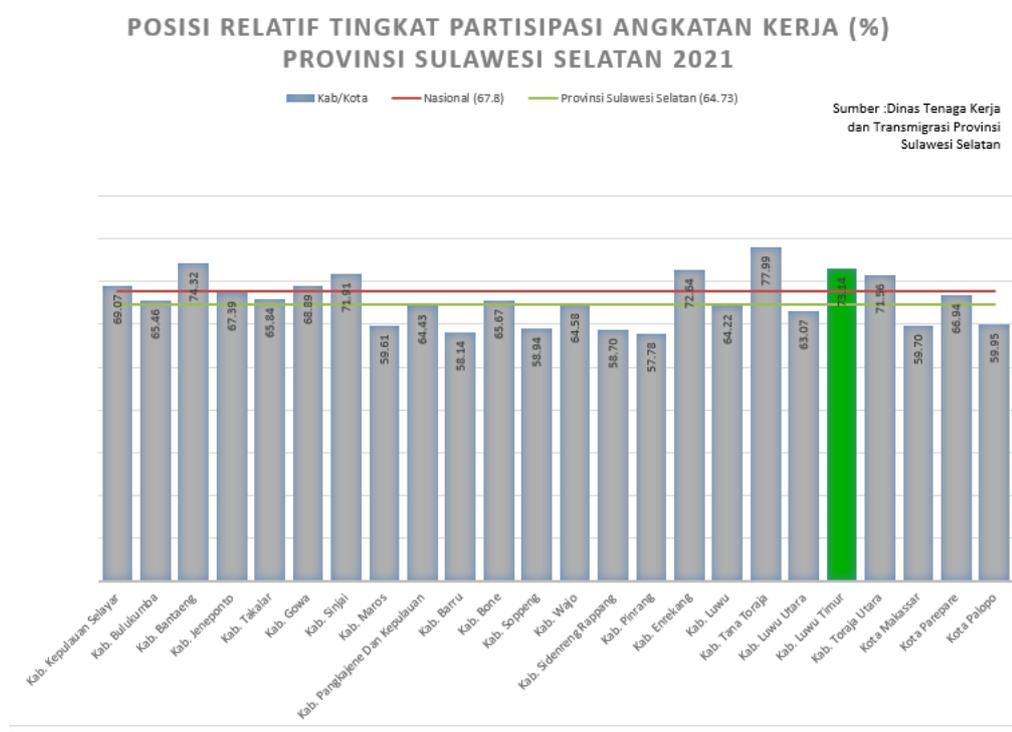


Kondisi Karakteristik Angkatan Kerja :

- a. Posisi Relatif:
 - ✓ Pada Tahun 2021 Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi selatan sebanyak 4.412.782 jiwa. Posisi pertama ditempati oleh Kota Makassar dengan jumlah Angkatan kerja sebanyak 752.529 jiwa dan posisi terendah di Kab Kepulauan Selayar sebanyak 71.533 jiwa. Kabupaten Luwu Timur menempati posisi ke-10 tertinggi di antara 24 Kab/Kota se-Sulawesi Selatan dengan capaian 162.182 jiwa.
- b. Perkembangan Antar Waktu:
 - ✓ Pada Periode tahun 2018-2021, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan dari 144.010 jiwa menjadi 162.182 jiwa. Perkembangan angka capaiannya cenderung konsisten tiap tahunnya mengalami kenaikan. Walaupun pernah mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 137.236 jiwa namun meningkat lagi di tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2021.
- c. Efektivitas:
 - ✓ Pada Periode 2018–2021, jumlah angkatan kerja mengalami tren yang fluktuatif menunjukkan kenaikan jumlah capaian, kondisi pandemi covid-19 ternyata tidak merubah pola perubahan angkatan kerja di periode Agustus 2020 yang harusnya terjadi penurunan, namun justru mengalami kenaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk peningkatan capaian jumlah Angkatan kerja di Kabupaten Luwu Timur cukup efektif.
- d. Relevansi:
 - ✓ Tren dan pola perubahan antara capaian Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur dengan capaian persentase penduduk miskin dapat dikatakan tidak beriringan, karena persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan sejak 2018 sampai 2021 sementara capaian Angkatan kerja mengalami kenaikan di periode tersebut. Tetapi ini merupakan capaian yang berkesesuaian. Idealnya semakin tinggi jumlah Angkatan kerja maka akan semakin mudah menurunkan tingkat kemiskinan. Sehingga dapat disimpulkan hubungan keduanya relevan.

3.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Gambar 3.33 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulsel Tahun 2021



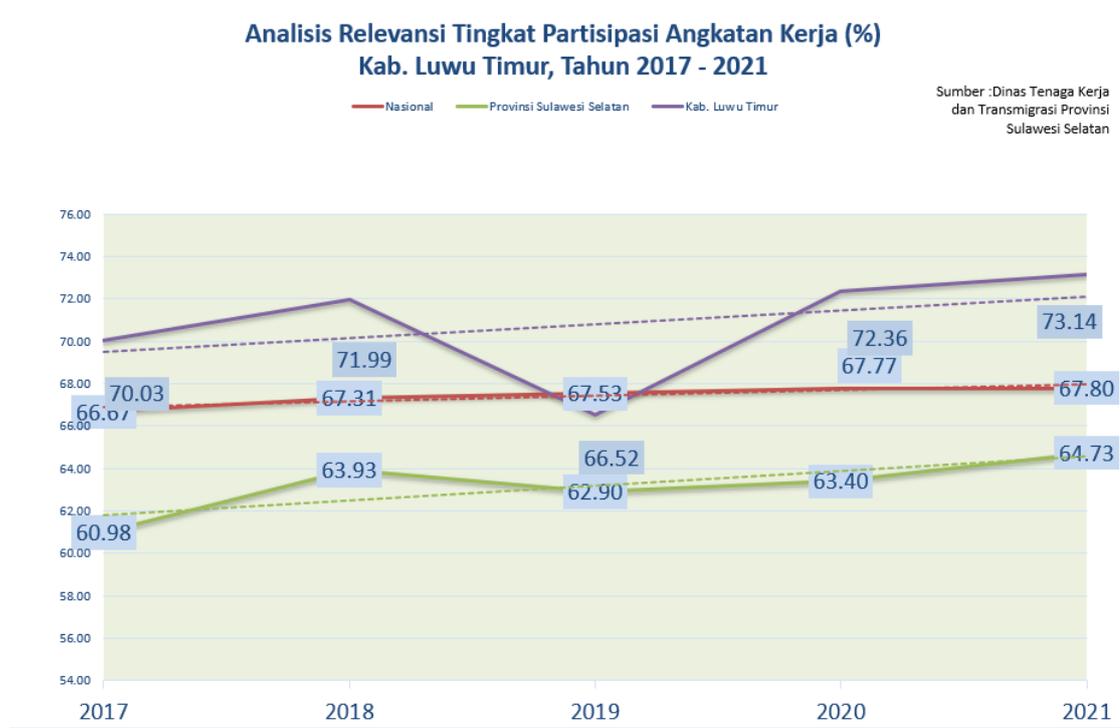
Gambar 3.34 Perkembangan Antar Waktu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.35 Analisis Efektivitas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.36 Analisis Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021

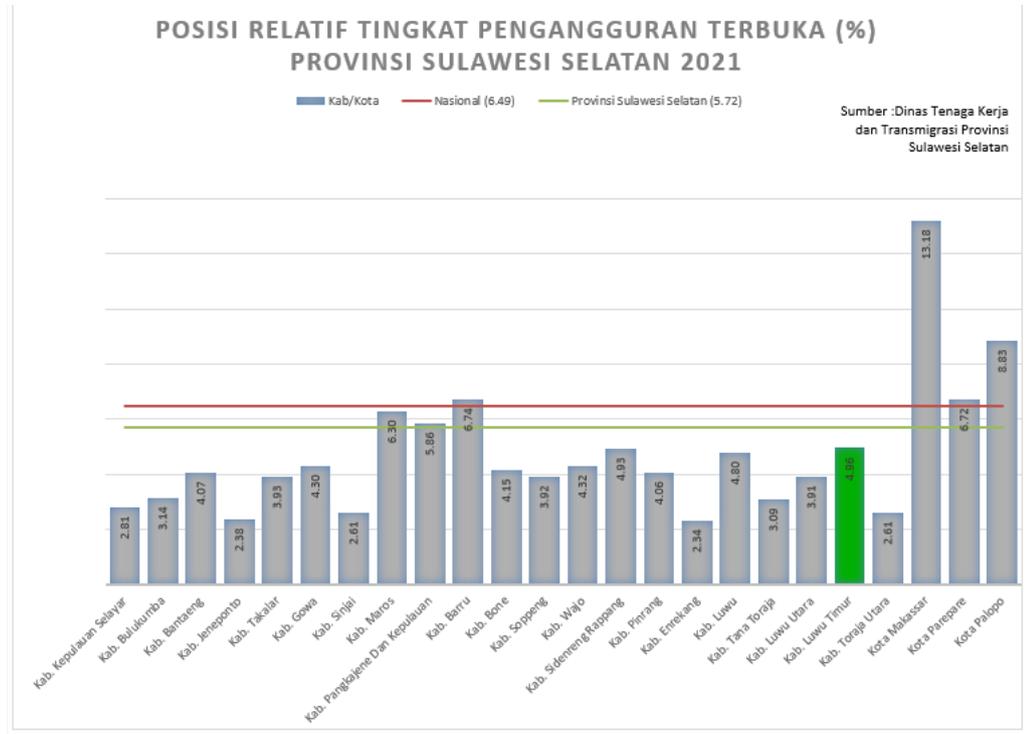


Kondisi Karakteristik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) :

- a. Posisi Relatif:
 - Pada Tahun 2021 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi selatan mencapai 64.73%, lebih rendah dari capaian nasional (67.8%). Pada tingkat kab/kota, terdapat 8 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang capaiannya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional. 4 kab/kota berada di atas Provinsi Sulawesi selatan dan di bawah Nasional. Serta sisanya sebanyak 12 kab/kota lainnya berada dibawah TPAK provinsi dan Nasional.
 - Kabupaten Luwu Timur menempati posisi ke-3 tertinggi dengan capaian 73.14% di antara 24 Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Posisi tertinggi di tempati oleh Kabupaten Tana Toraja dengan capaian 77.99% dan posisi terendah di tempati oleh Kabupaten Pinrang dengan capaian 57.78%.
- b. Perkembangan Antar Waktu:
 - Pada Periode Tahun 2017-2021, TPAK Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan dari 70.03% menjadi 73.14%. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir sebesar 3.11 poin artinya rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar 0.622%.
- c. Efektivitas:
 - Dalam 5 tahun terakhir yaitu 2017–2021, TPAK mengalami tren ~~kenaikan~~ yang fluktuatif, kondisipandemi covid-19 ternyata tidak merubah pola perubahan TPAK di tahun 2020 yang harusnya bisa membuka peluang terjadinya penurunan, namun justru mengalami kenaikan. Ini menunjukkan upaya pemkab untuk menaikkan capaian TPAK sudah efektif.
- d. Relevansi:
 - Tren dan pola perubahan antara capaian TPAK Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Hal ini menunjukkan pola perkembangan ketiganya relevan.

3.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Gambar 3.37 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulsel Tahun 2021



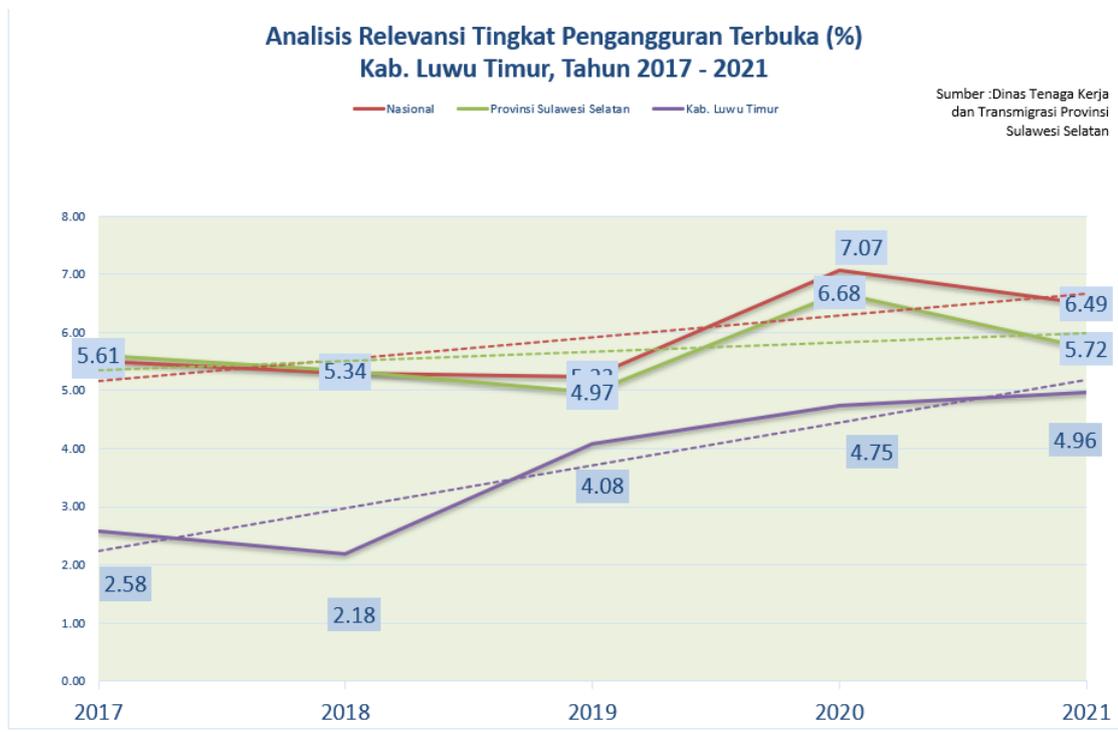
Gambar 3.38 Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.39 Analisis Efektivitas Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.40 Analisis Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Kondisi Karakteristik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) :

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi selatan mencapai 5.72%, lebih rendah dari TPT nasional (6.49%). Pada tingkat kab/kota, terdapat 4 Kab/Kota yang kondisi TPT nya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional. Dan 2 kab/kota berada diatas provinsi namun dibawah Nasional. Sedangkan sisanya sebanyak 18 kab/kota lainnya termasuk Kabupaten Luwu Timur capaiannya sudah dibawah TPT Provinsi Sulawesi selatan maupun Nasional.
- Kabupaten Luwu Timur dengan capaian 4.96% berada pada posisi ke-7 tertinggi di antara 24 Kab/Kota di Sulawesi Selatan. Posisi tertinggi pertama ditempati Kota Makassar dengan capaian 13.18% dan posisi terendah di tempati oleh Kabupaten Enrekang dengan capaian 2.34%

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2018, TPT Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 2.58% menjadi 2.18%. Kemudian mengalami kenaikan drastis di tahun 2019 dengan capaian 4.08% dan meningkat di tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 4.96% di tahun 2021.

c. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2021, TPT mengalami tren kenaikan yang fluktuatif, secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka dinyatakan belum efektif.

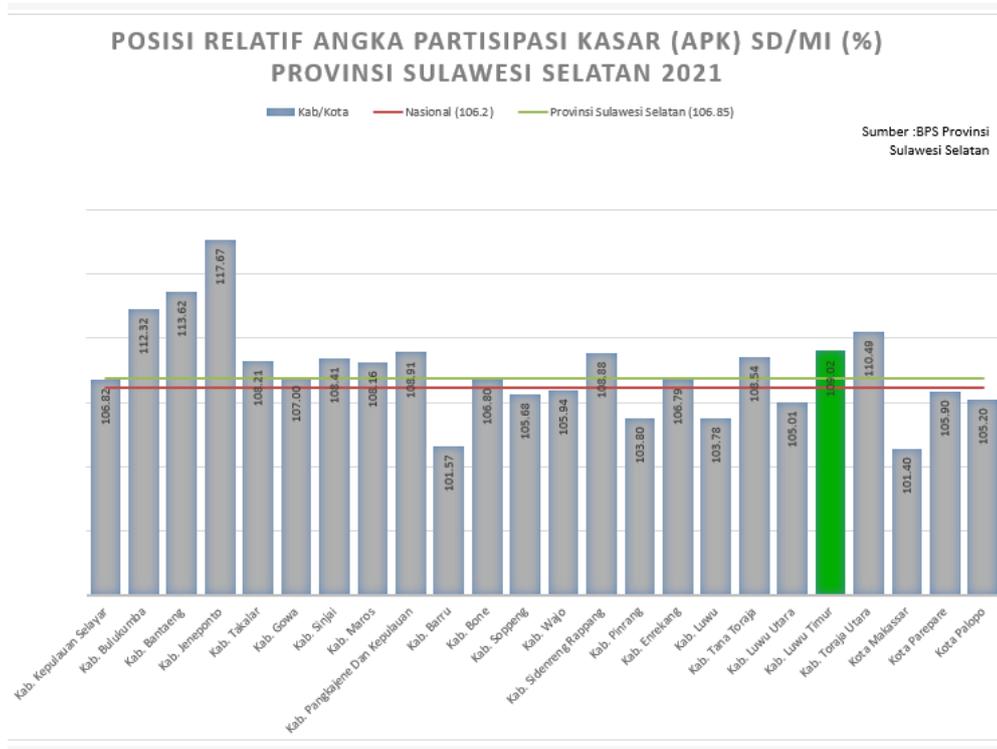
d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian TPT Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi selatan dengan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

3.3 Bidang Pendidikan

3.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

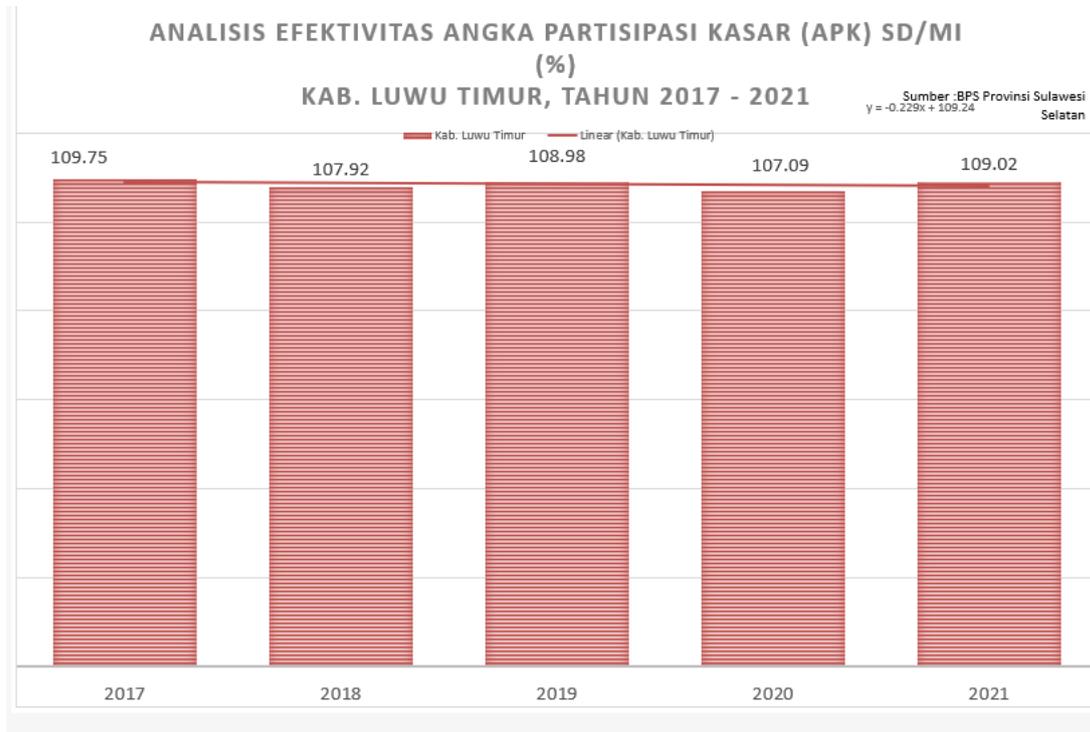
Gambar 3.41 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Prov Sulsel Tahun 2021



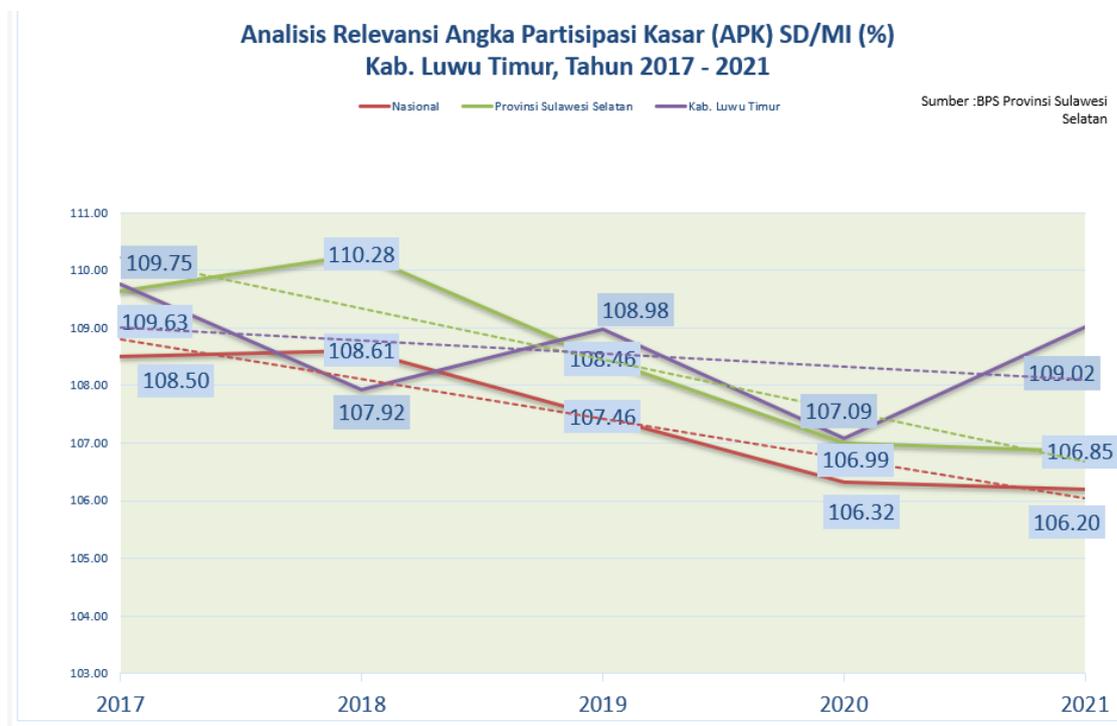
Gambar 3.42 Perkembangan Antar Waktu Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.43 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.44 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021

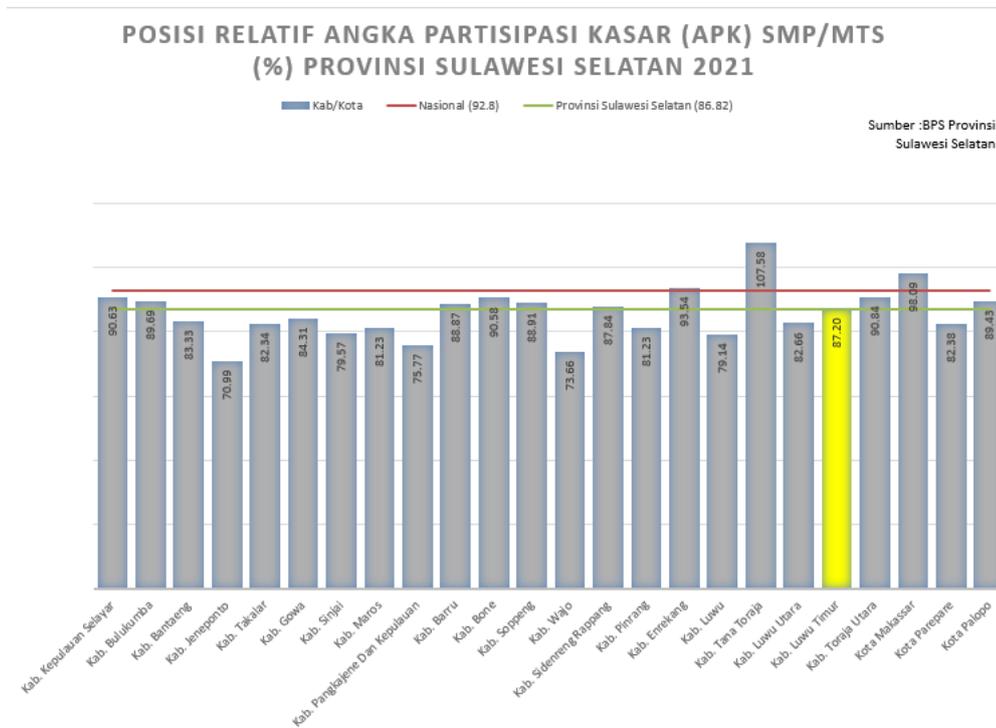


Kondisi Karakteristik Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI :

- a. Posisi Relatif:
 - Pada tahun 2021 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Provinsi Sulawesi selatan mencapai 106.85% lebih tinggi dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Nasional (106.2%). Pada tingkat kab/kota, terdapat 11 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang kondisi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI-nya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional. 4 Kab/kota di bawah Provinsi dan di atas capaian Nasional, sementara sisanya ada 9 kab/kota berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.
 - Kabupaten Luwu Timur berada pada posisi ke-5 tertinggi di antara 24 Kab/Kota se-Sulawesi Selatan dengan capaian 109.02%. Posisi tertinggi pertama ditempati Kabupaten Jeneponto dengan capaian 117.67% dan posisi terendah ditempati Kota Makassar dengan capaian 101.40%.
- b. Perkembangan Antar Waktu:
 - Pada Periode tahun 2017-2018, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 109.75% menjadi 107.92%. Kemudian mengalami kenaikan drastis di tahun 2019 dengan capaian 108.98% namun Kembali turun di tahun 2020 menjadi 107.09%, lalu meningkat di tahun 2021 menjadi 109.02% capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2017. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tren penurunannya fluktuatif.
- c. Efektivitas:
 - Pada Periode tahun 2017–2021, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI mengalami tren yang fluktuatif, namuncenderung menunjukkan tren penurunan. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dinyatakan belum efektif.
- d. Relevansi:
 - Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi selatan dengan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

3.3.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

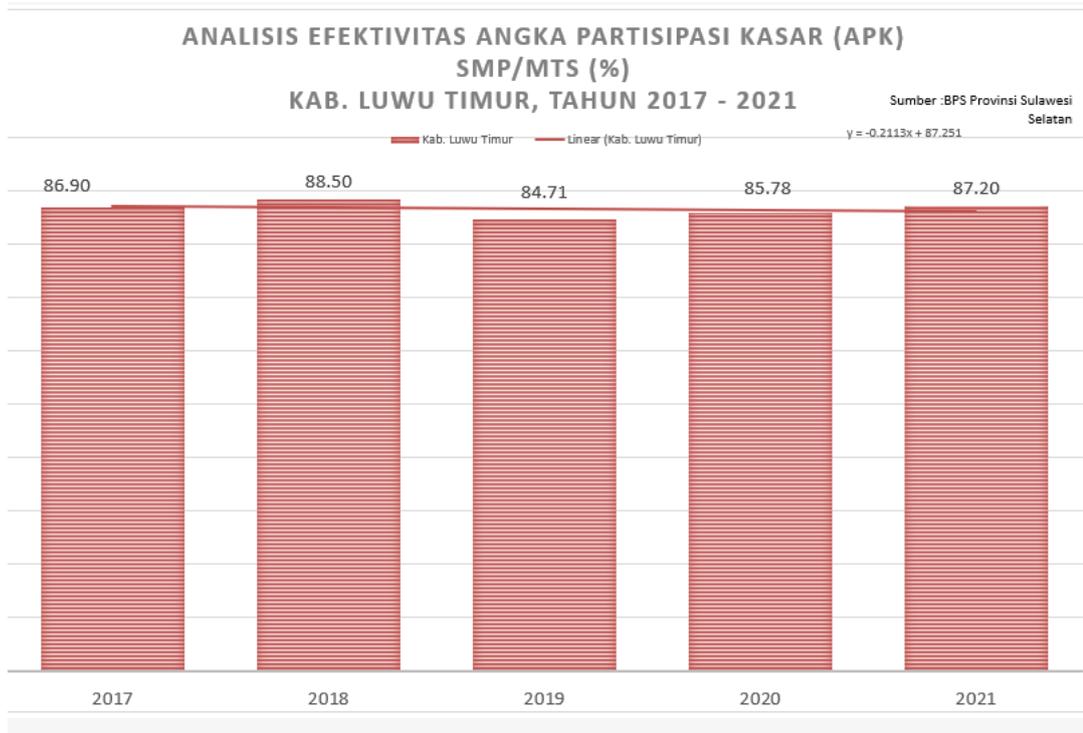
Gambar 3.45 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Prov Sulsel Tahun 2021



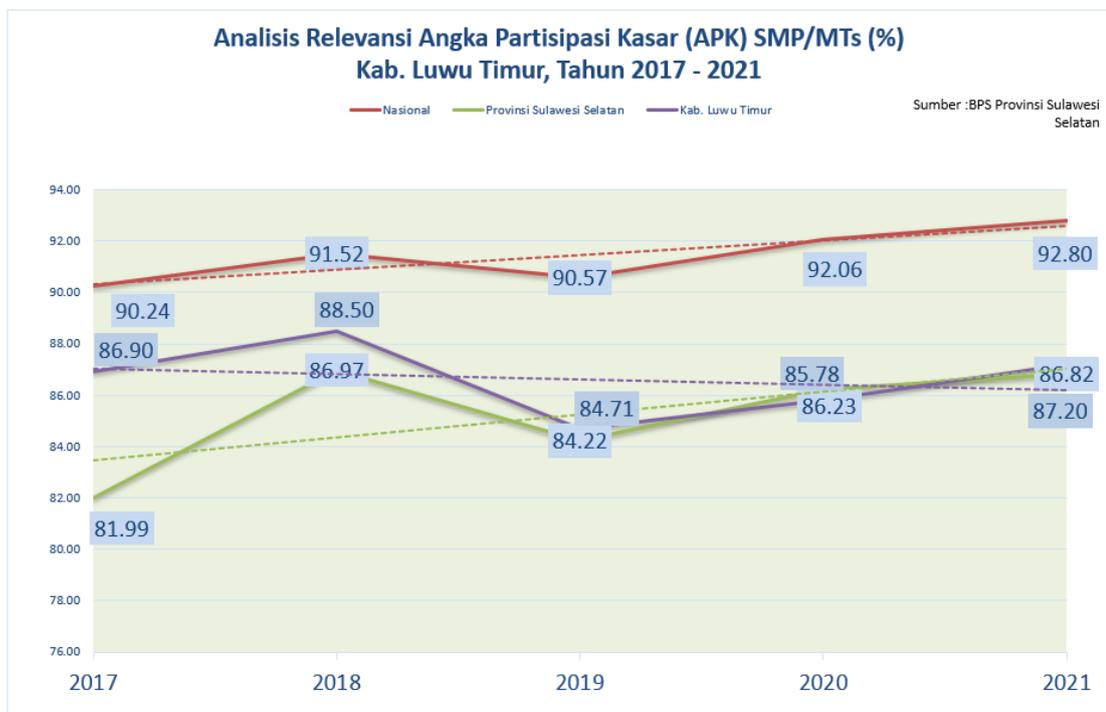
Gambar 3.46 Perkembangan Antar Waktu Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.47 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.48 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021

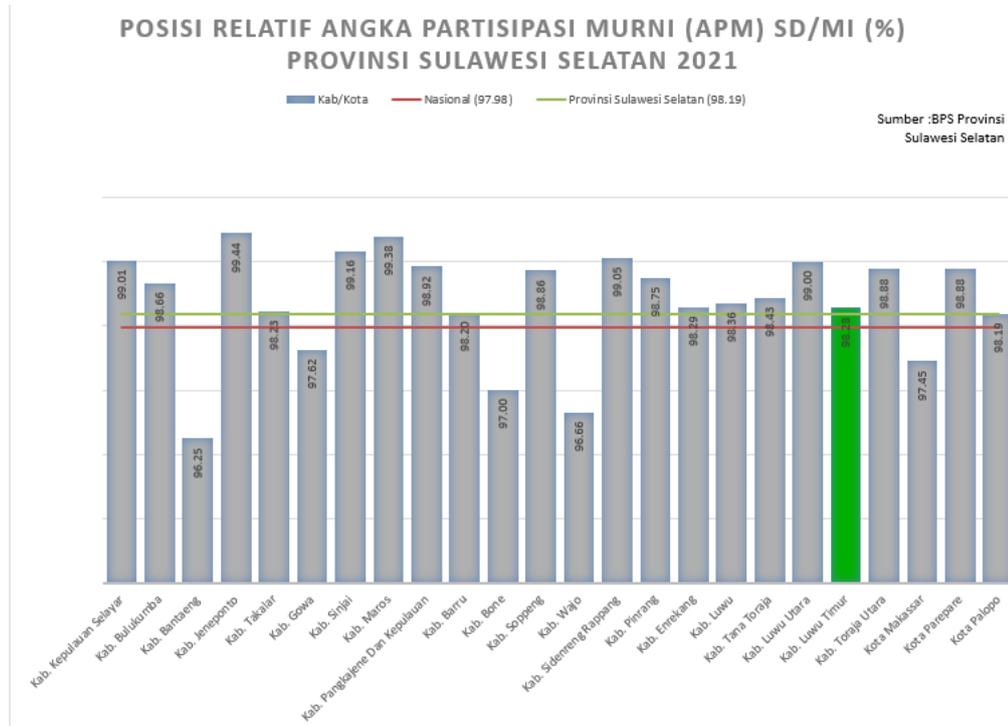


Kondisi Karakteristik Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs :

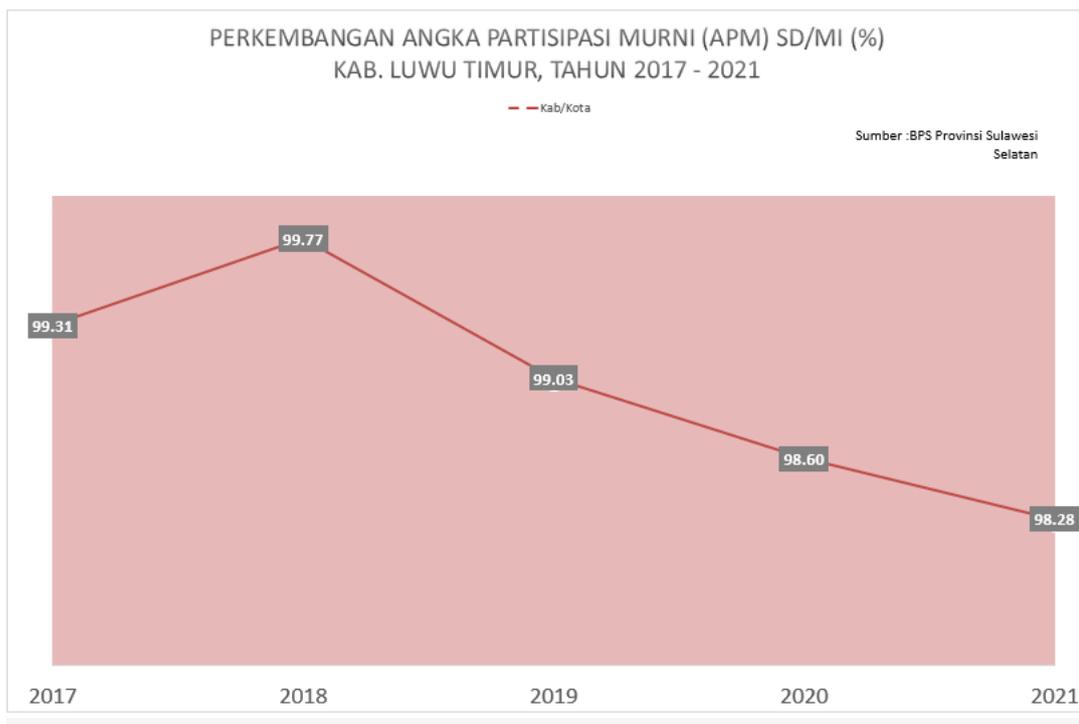
- a. Posisi Relatif:
 - Pada tahun 2021 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Provinsi Sulawesi selatan mencapai 88.82% lebih rendah dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Nasional (92.8%). Pada tingkat kab/kota, terdapat 3 Kab/Kota yang kondisi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs-nya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional. 8 Kab/Kota berada di atas provinsi di bawah capaian Nasional, dan sisanya 13 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.
 - Kabupaten Luwu Timur dengan capaian 87.20% berada pada posisi ke-12 tertinggi di antara 24 Kab/Kota se-Sulawesi Selatan. Posisi tertinggi pertama ditempati Kabupaten Tana Toraja dengan capaian 107.58% dan posisi terendah ditempati Kabupaten Jeneponto dengan capaian 70.99%.
- b. Perkembangan Antar Waktu:
 - Pada Periode tahun 2017-2021, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari 86.90% menjadi 87.20%. Peningkatannya hanya 0.3% selama kurun waktu 5 tahun. Hanya meningkat 0.06% setiap tahunnya.
- c. Efektivitas:
 - Pada Periode tahun 2017–2021, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs mengalami tren yang fluktuatif, namun cenderung menunjukkan tren kenaikan. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dinyatakan cukup efektif namun masih perlu kerja keras untuk meningkatkan capaiannya.
- d. Relevansi:
 - Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi selatan dengan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

3.3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

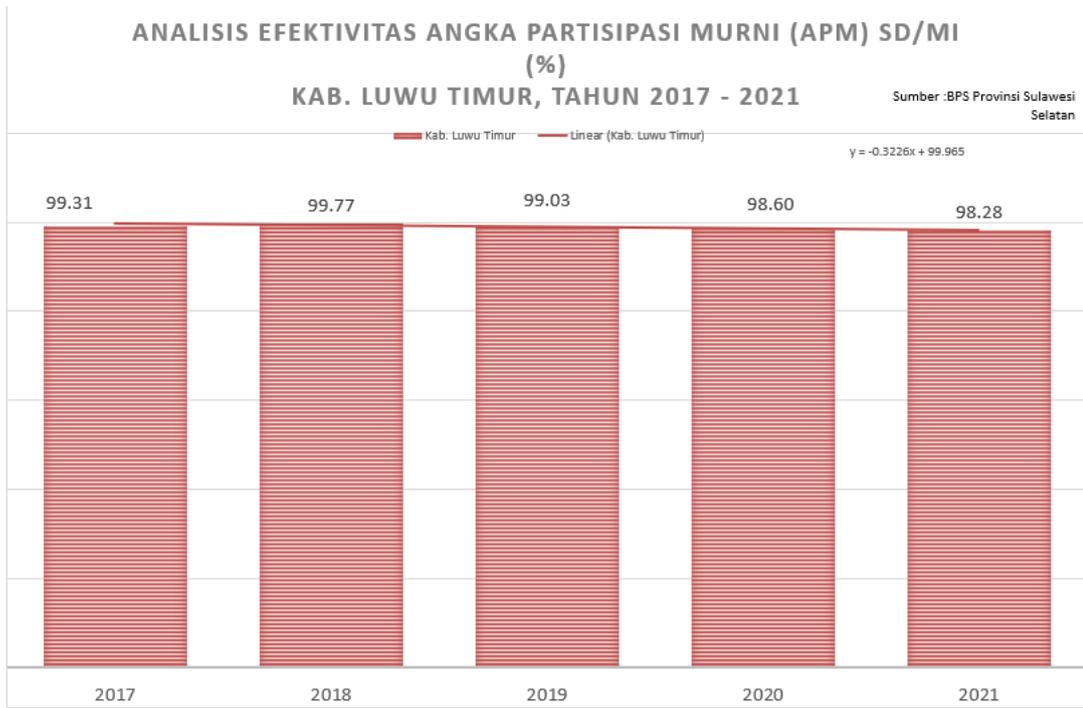
Gambar 3.49 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021



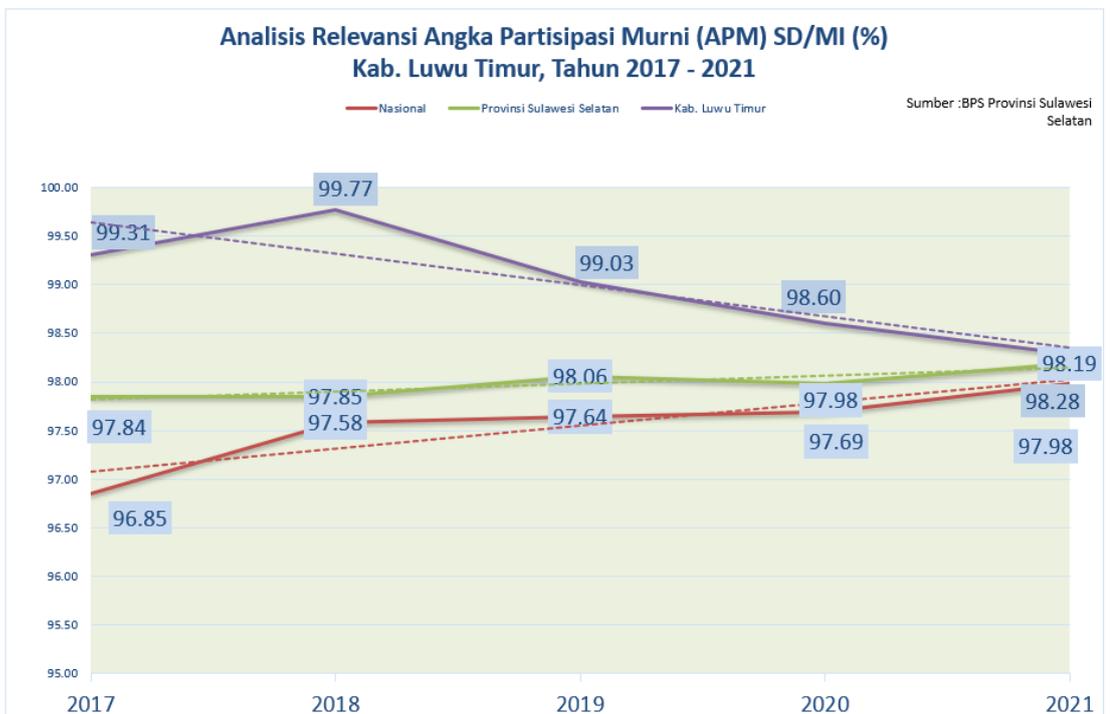
Gambar 3.50 Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.51 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.52 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Kondisi Karakteristik Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI:

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2021 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Provinsi Sulawesi selatan mencapai 98.19% lebih tinggi dari Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Nasional (97.98%). Pada tingkat kab/kota, terdapat 18 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang kondisi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI-nya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional. 1 Kab/Kota yang capaiannya sama dengan Provinsi tapi di atas capaian Nasional, sisanya sebanyak 5 kab/kota berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.
- Kabupaten Luwu Timur dengan capaian 98.28% menempati posisi ke-16 tertinggi di antara 24 Kab/Kota se-Sulawesi Selatan. Posisi tertinggi pertama ditempati oleh Kabupaten Jeneponto dengan capaian 99.44%, dan posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Bantaeng dengan capaian 96.25%.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2021, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 99.31% menjadi 98.28%. Penurunannya sebesar 1.03% selama 5 tahun, setiap tahunnya kurang lebih menurun sebanyak 0.206%.

c. Efektivitas:

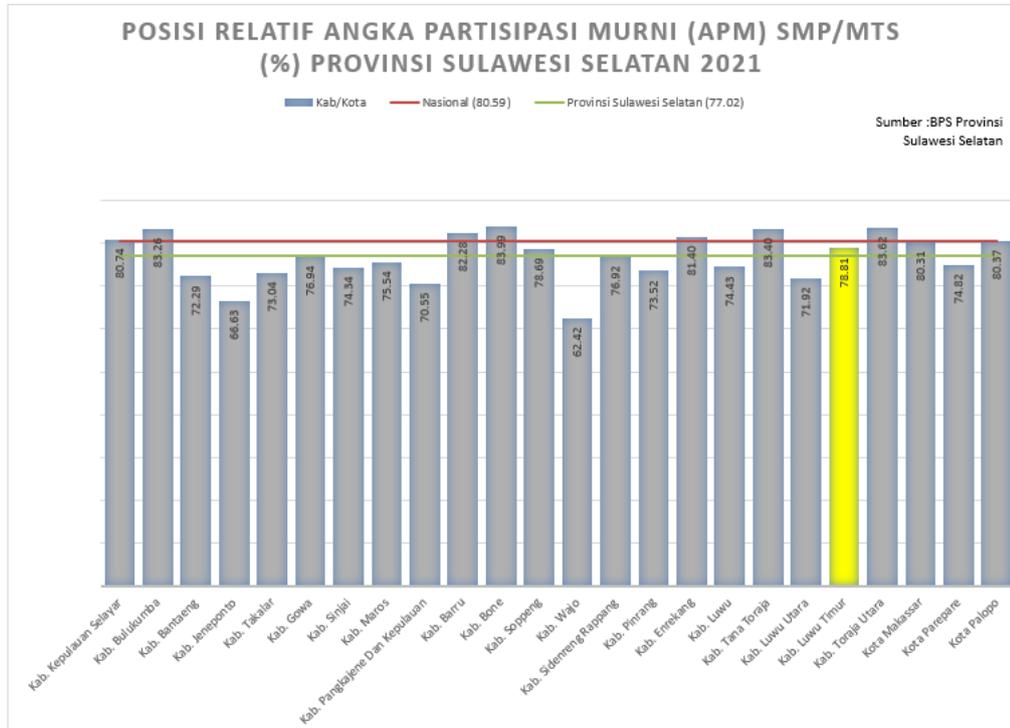
- Pada Periode tahun 2017–2021, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI mengalami tren penurunan yang fluktuatif. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dinyatakan belum efektif masih sangat dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya di tahun-tahun mendatang.

d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi selatan dengan capaian Nasional dapat dikatakan tidak beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga 2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya tidak relevan.

3.3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Gambar 3.53 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021



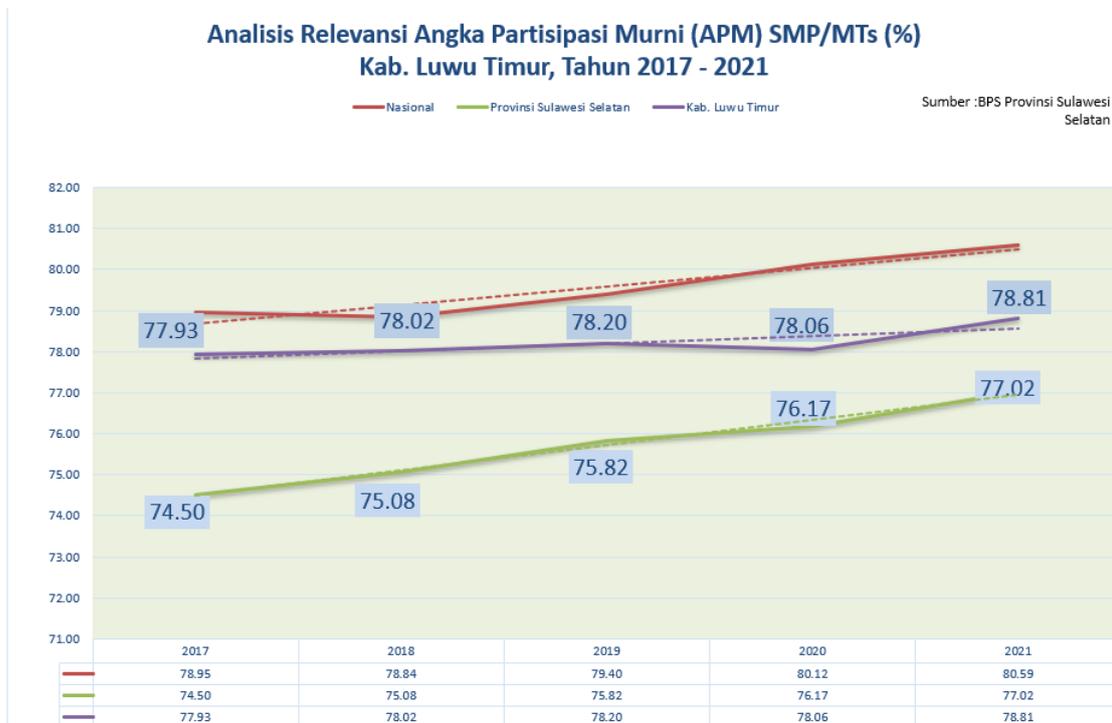
Gambar 3.54 Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.55 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.56 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Kondisi Karakteristik Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs:

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2021 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Provinsi Sulawesi selatan mencapai 77.02% lebih tinggi dari Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Nasional (80.59%). Pada tingkat kab/kota, terdapat 6 kab/kota yang kondisi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs-nya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional. 5 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang capaiannya di bawah Nasional di atas Provinsi. Sisanya sebanyak 13 kab/kota berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.
- Kabupaten Luwu Timur menempati posisi ke-9 tertinggi di antara 24 kab/kota se-Sulawesi Selatan dengan capaian 78.81%. Posisi tertinggi pertama ditempati oleh Kabupaten Bone dengan capaian 83.99% dan posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Wajo dengan capaian 62.43%.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2021, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan dari 77.93% menjadi 78.81%. Sejak 2017 kenaikannya cenderung konsisten sampai tahun 2019, dan sedikit menurun di tahun 2020 menjadi 78.06% namun meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 78.81%

c. Efektivitas:

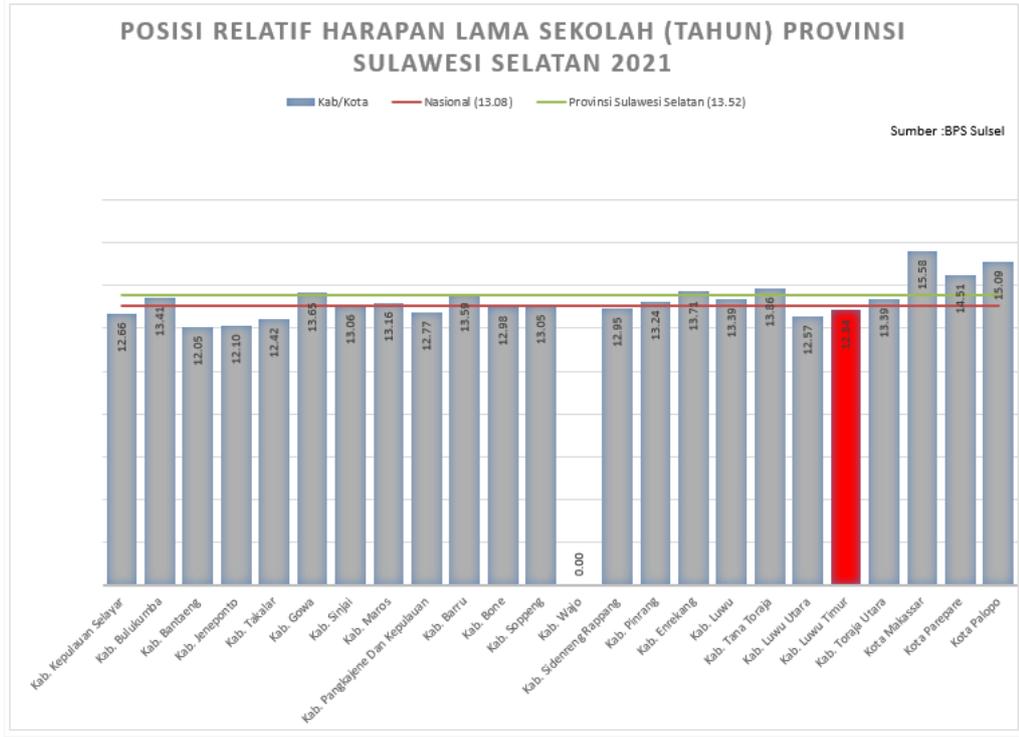
- Pada Periode tahun 2017–2021, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs mengalami tren kenaikan yang fluktuatif. Dari 77.93% di tahun 2017 menjadi 78.81% di tahun 2021, ini menunjukkan kenaikan yang belum maksimal. Hanya naik sebesar 0.88% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dinyatakan sudah efektif namun masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

d. Relevansi:

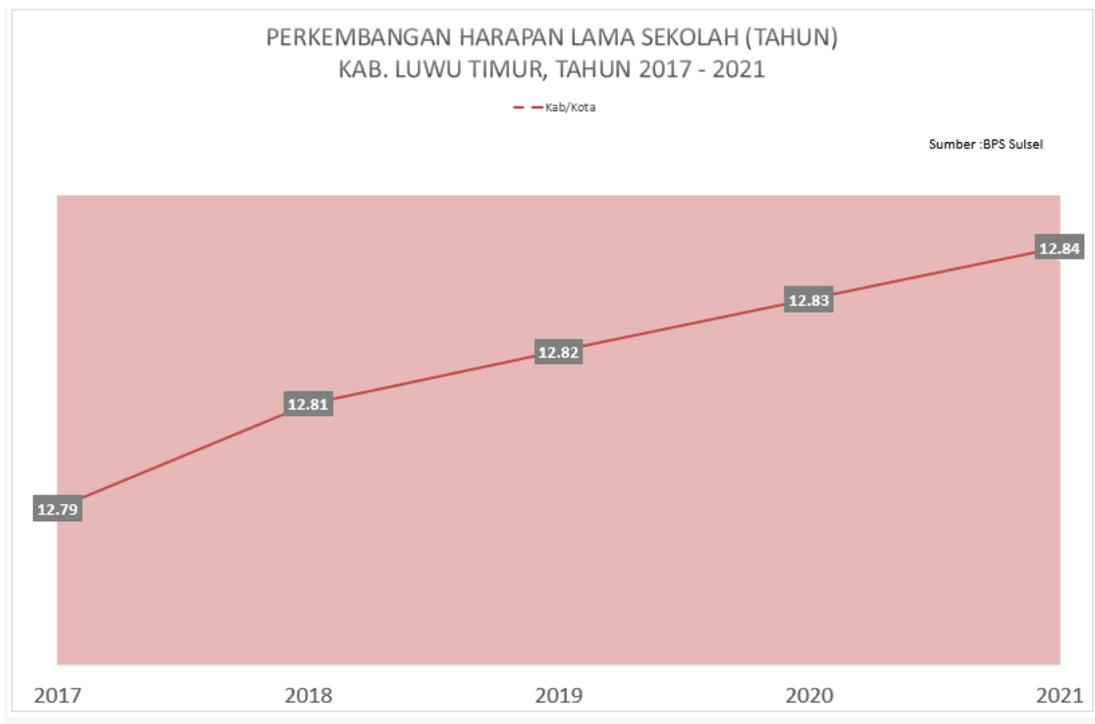
- Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga 2021, jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

3.3.5 Harapan Lama Sekolah

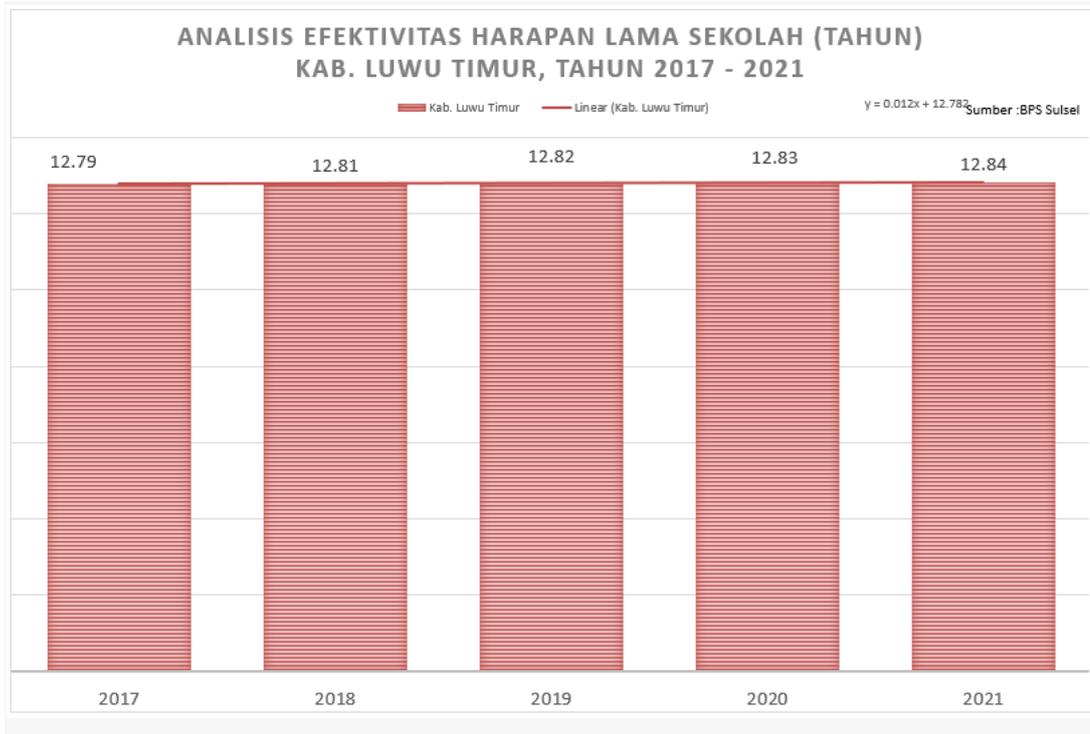
Gambar 3. 57 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Prov Sulsel Tahun 2021



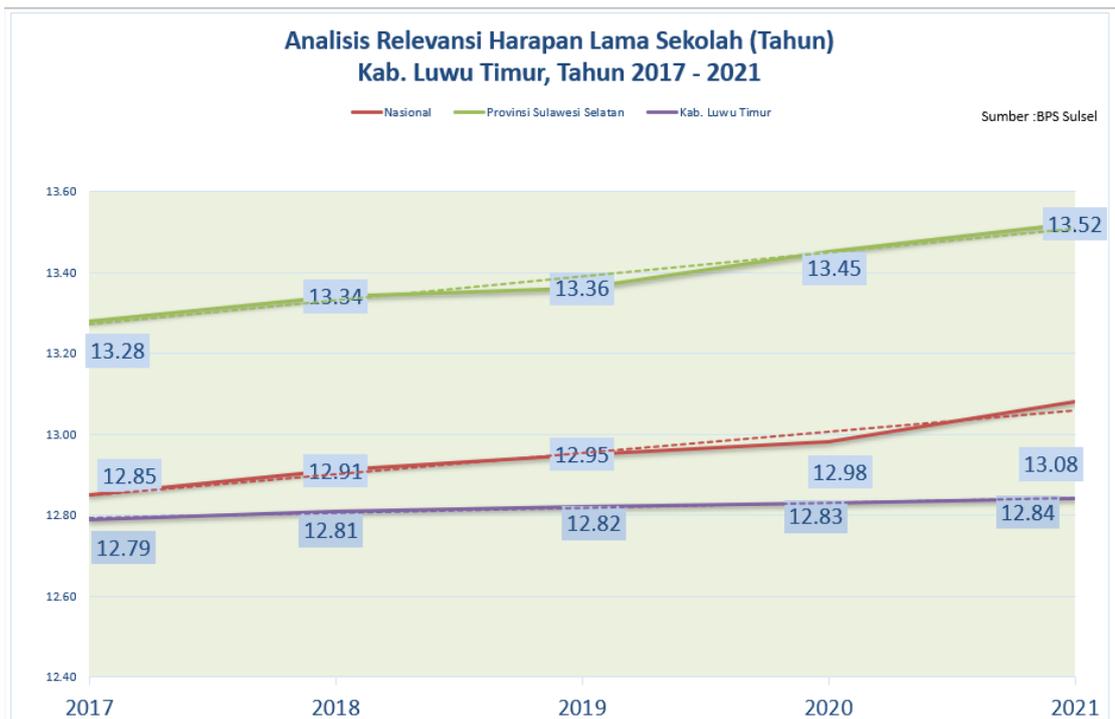
Gambar 3. 58 Perkembangan Antar Waktu Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3. 59 Analisis Efektivitas Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.60 Analisis Relevansi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Kondisi Karakteristik Harapan Lama Sekolah :

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2021 Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi selatan mencapai 13.57 tahun lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah Nasional (13.08 tahun). Pada tingkat kab/kota, terdapat 6 kab/kota yang kondisi Harapan Lama Sekolahnya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional. 5 kab/kota di bawah provinsi dan di atas capaian Nasional. Sisanya 13 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.
- Kabupaten Luwu Timur berada pada posisi 13 tertinggi di antara 24 kab/kota se-Sulawesi Selatan dengan capaian 12.84 tahun. Posisi pertama tertinggi ditempati oleh Kota Makassar dengan capaian 15.58 tahun dan posisi terendah di tempati oleh Kabupaten Bantaeng dengan capaian 12.05 tahun.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2021, Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan dari 12.79 tahun menjadi 12.84 tahun. Sejak 2017 kenaikannya cenderung konsisten sampai tahun 2021.

c. Efektivitas:

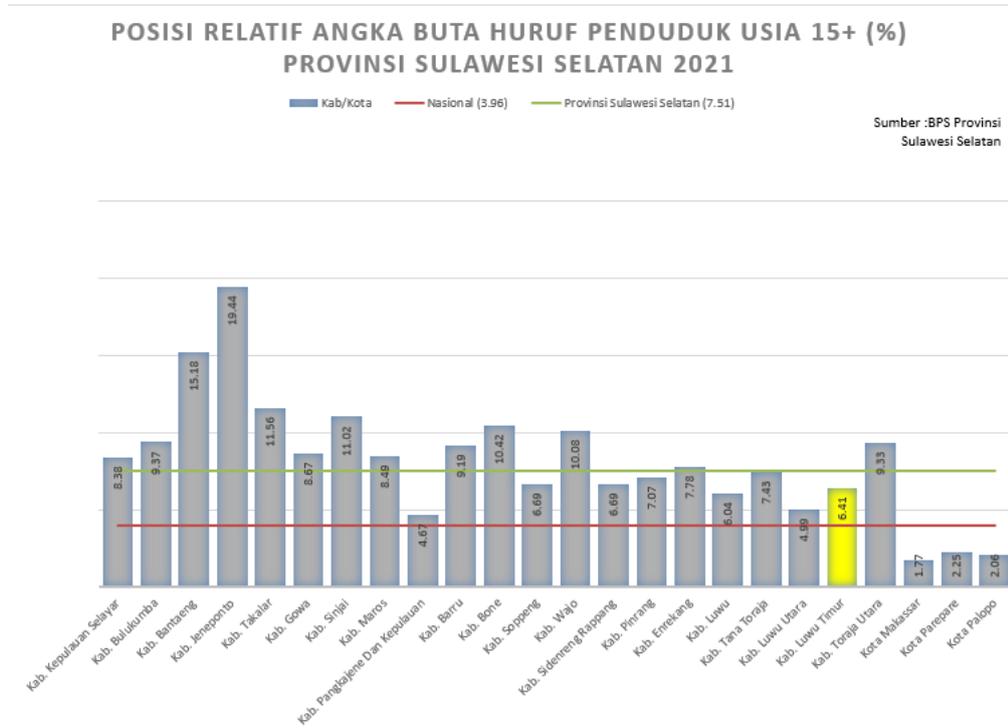
- Pada Periode tahun 2017–2021, Harapan Lama Sekolah mengalami tren kenaikan yang konsisten. Dari 12.79 tahun menjadi 12.84 tahun di tahun 2021, ini menunjukkan kenaikan yang belum maksimal. Hanya naik sebesar 0.05 poin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah dinyatakan sudah efektif namun masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

d. Relevansi:

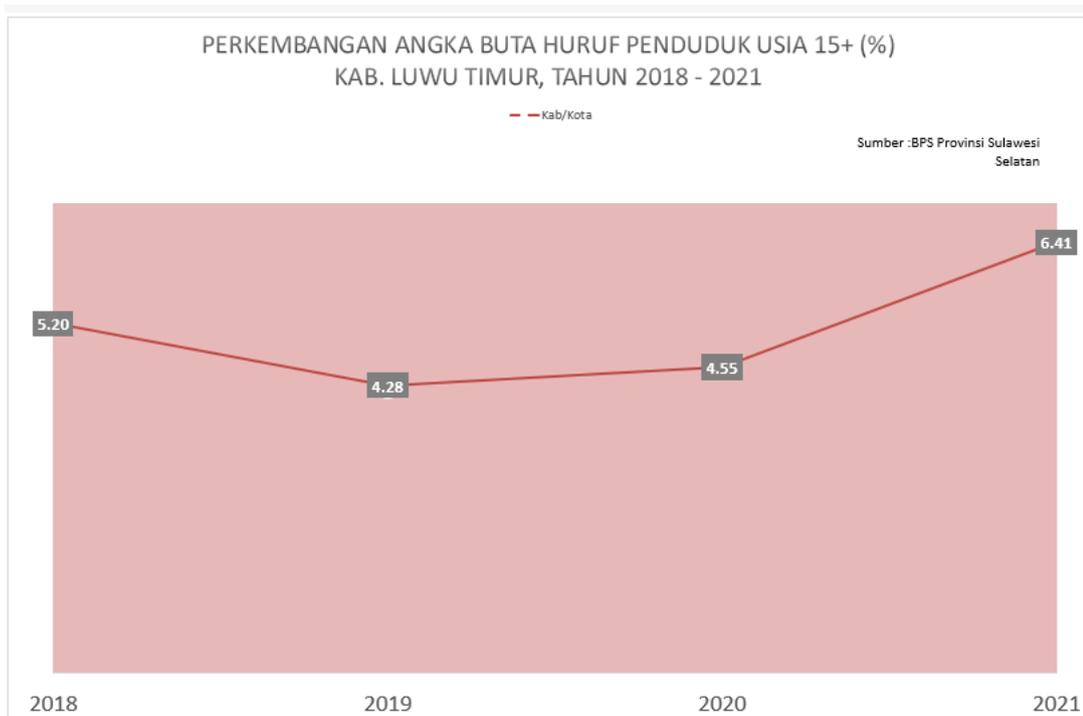
- Tren dan pola perubahan antara capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

3.3.6 Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+

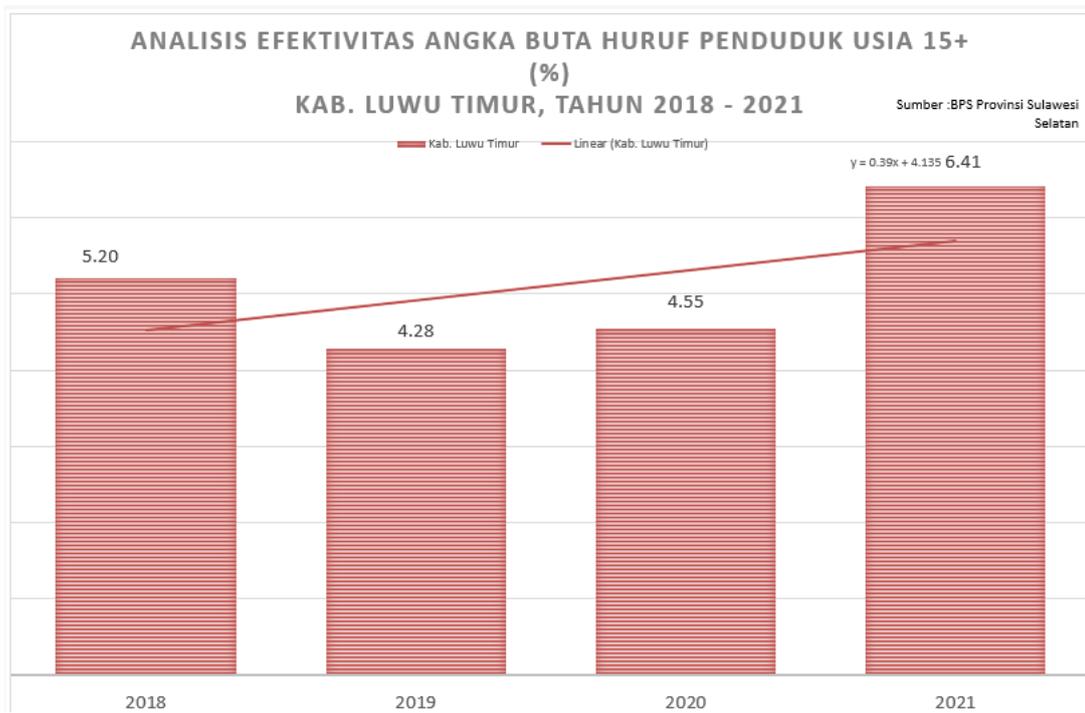
Gambar 3. 61 Posisi Relatif Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ Prov Sulsel Tahun 2021



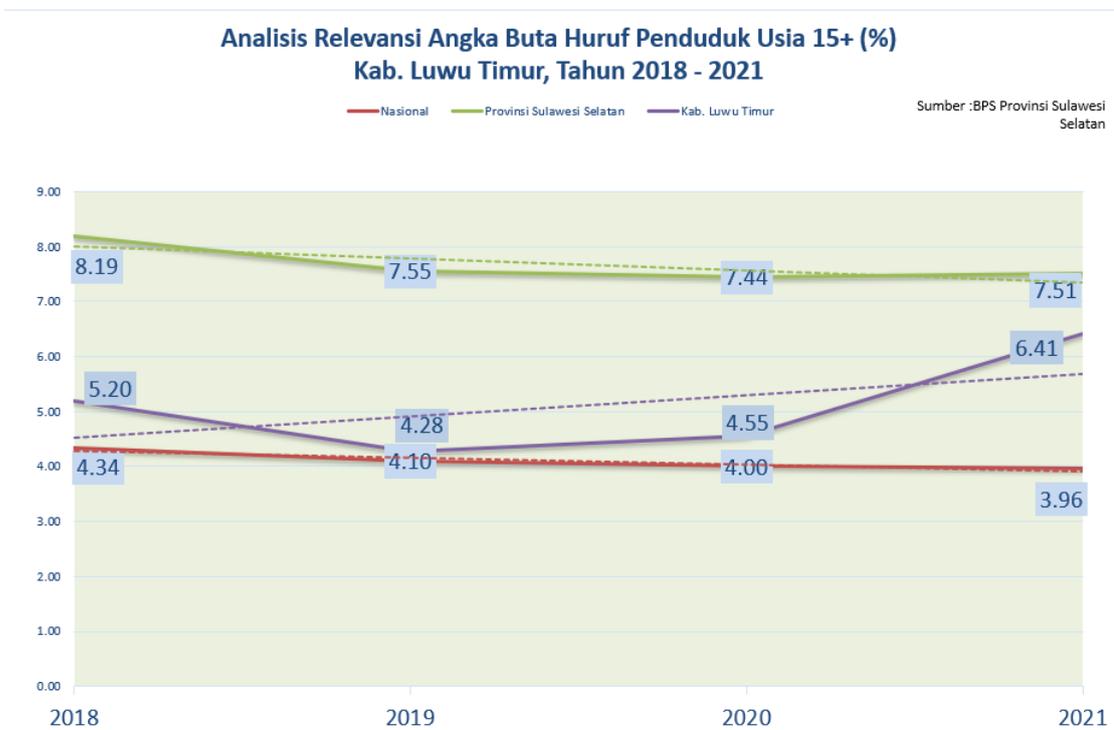
Gambar 3. 62 Perkembangan Antar Waktu Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Gambar 3.63 Analisis Efektivitas Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Gambar 3.64 Analisis Relevansi Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Kondisi Karakteristik Angka Buta Huruf Penduduk 15+ :

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2021 Angka Buta Huruf Penduduk 15+ Provinsi Sulawesi selatan mencapai 7.51% lebih tinggi dari Angka Buta Huruf Penduduk 15+ Nasional (3.96%). Pada tingkat kab/kota, terdapat 13 kab/kota yang kondisi Angka Buta Huruf Penduduk 15+-nya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional. 8 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur capaiannya di bawah Provinsi dan di atas capaian Nasional. Sisanya hanya 3 kab/kota berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.
- Kabupaten Luwu Timur berada pada posisi ke-7 terendah di antara 24 kab/kota di Sulawesi Selatan dengan capaian 6.41%. Posisi pertama terendah ditempati oleh Kota Makassar dengan capaian 1.77% dan posisi tertinggi ditempati Kabupaten Jeneponto dengan capaian 19.44%.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2018-2021, Angka Buta Huruf Penduduk 15+ Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari 5.20% menjadi 6.41%. walaupun di tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan sampai ke angka 4.55% namun akhirnya mengalami kenaikan drastis di tahun 2021 menjadi 6.41%.

c. Efektivitas:

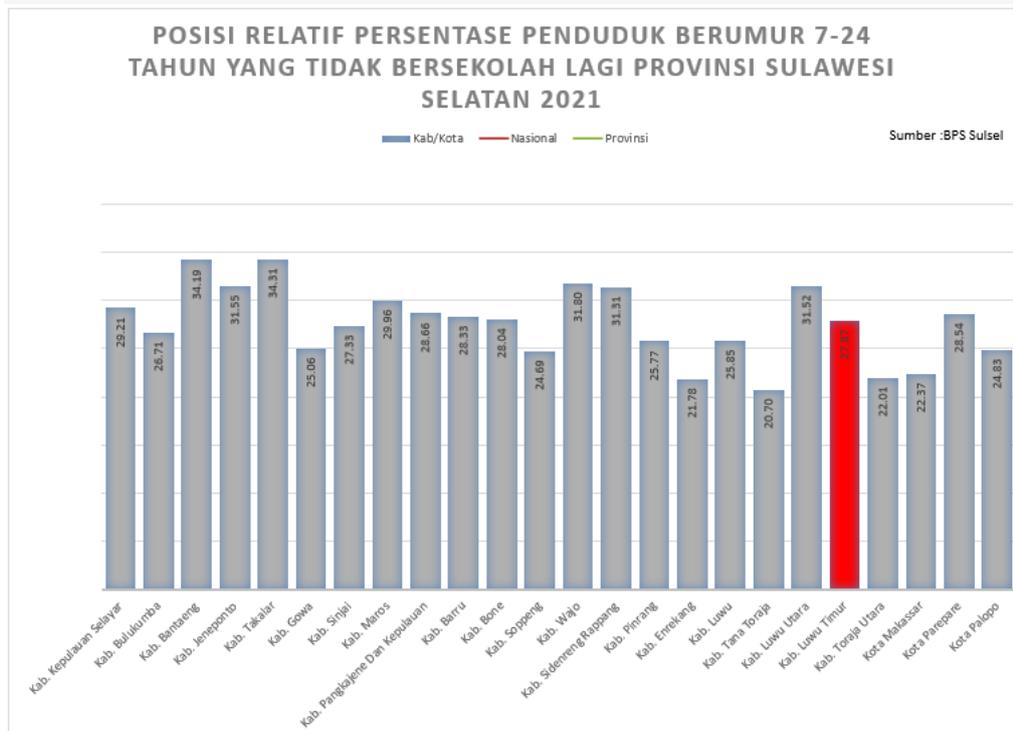
- Pada Periode tahun 2018–2021, Angka Buta Huruf Penduduk 15+ mengalami tren peningkatan yang fluktuatif. Dari 5.20% menjadi 6.41% di tahun 2021, ini menunjukkan upaya penurunan yang belum maksimal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan Angka Buta Huruf Penduduk 15+ dinyatakan tidak efektif dan masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

d. Relevansi:

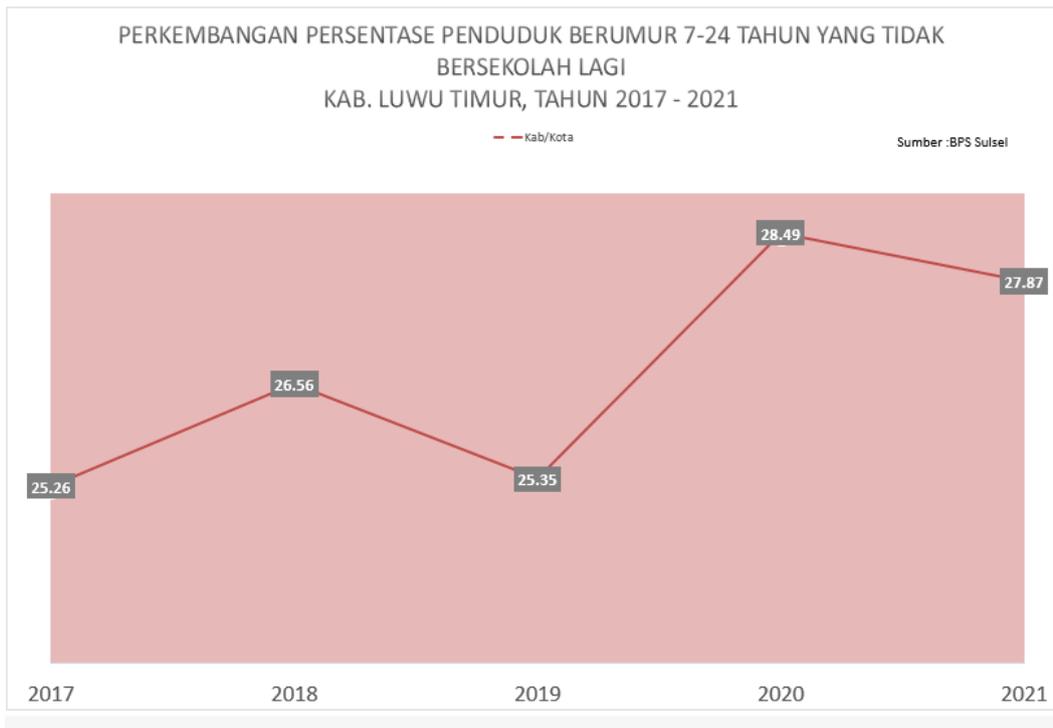
- Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Buta Huruf Penduduk 15+ Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan tidak beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. Karena capaian Provinsi dan Nasional mengalami tren penurunan sementara Kabupaten Luwu Timur mengalami tren kenaikan. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya tidak relevan.

3.3.7 persentasePenduduk Usia 7-24 Tahun yang Sudah Tidak Bersekolah lagi

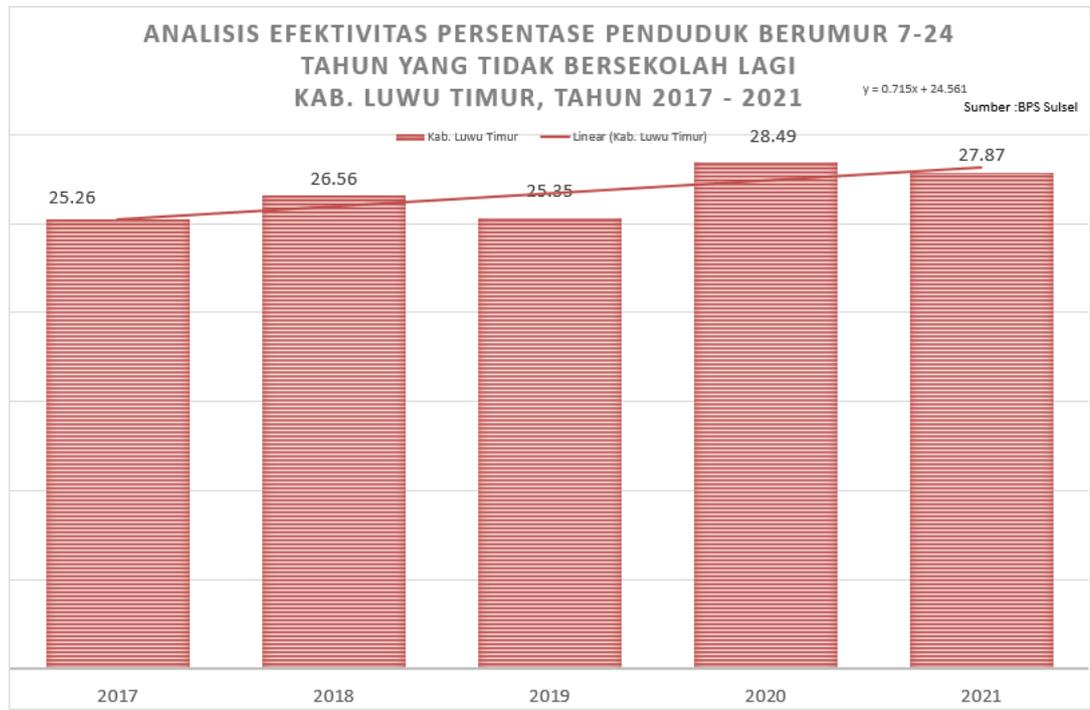
Gambar 3.65 Posisi Relatif persentasePenduduk Usia 7-24 Tahun Yang Tidak Bersekolah Lagi Prov Sulsel Tahun 2021



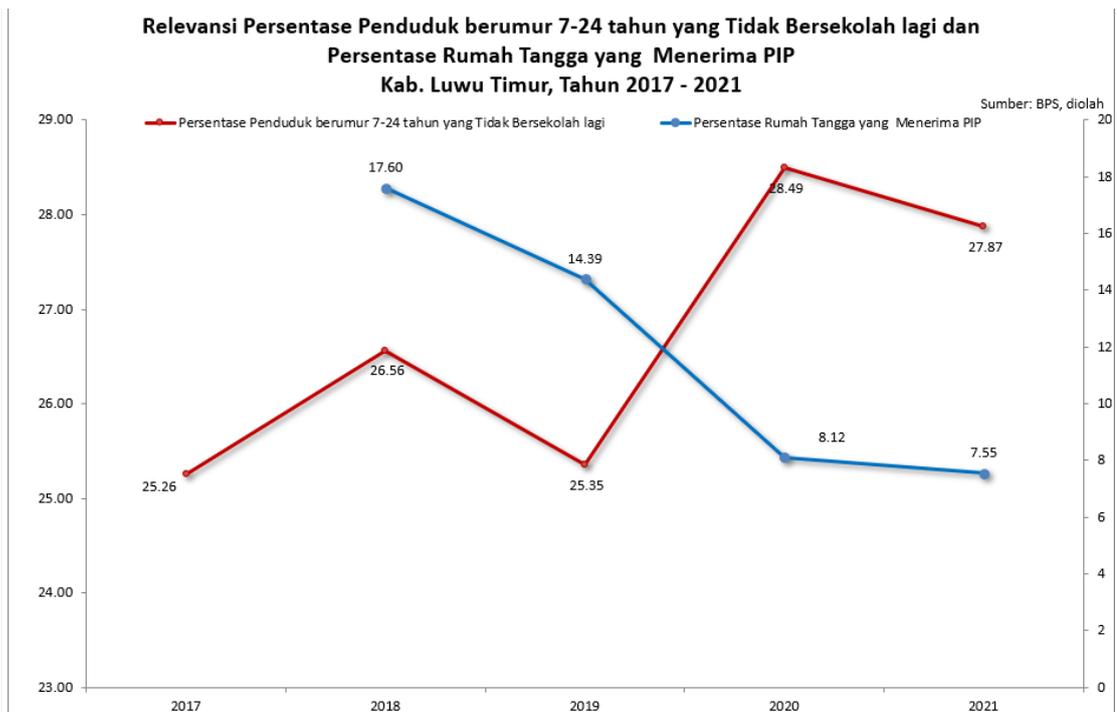
Gambar 3.66 Perkembangan Antar Waktu persentasePenduduk Usia 7-24 Tahun Yang Tidak Bersekolah Lagi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.67 Analisis Efektivitas persentasePenduduk Usia 7-24 Tahun Yang Tidak Bersekolah Lagi Kabupaten Luwu TimurTahun 2017-2021



Gambar 3.68 Analisis Relevansi persentasePenduduk Usia 7-24 Tahun Yang Tidak Bersekolah Lagi dan persentaseRumah Tangga yang Menerima PIP Kabupaten Luwu TimurTahun 2017-2021



Kondisi Karakteristik persentasePenduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi:

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2021 persentasePenduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi Provinsi Sulawesi selatan mencapai 26.71%. Pada tingkat kab/kota, terdapat 14 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang kondisi persentasePenduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi diatas ProvinsiSulawesi selatan dan 1 Kabupaten sama dengan capaian provinsi. Serta sisanya hanya 9 kab/kota berada di bawah capaian Provinsi.
- Kabupaten Luwu Timur menempati posisi ke-12 tertinggi di antara 24 kab/kota se-Sulawesi Selatan dengan capaian 27.87%. Posisi tertinggi pertama ditempati oleh Kabupaten Takalar dengan capaian 34.31%, posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Tana Toraja dengan capaian 20.70%

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2021, persentasePenduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah di Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan dari 25.26% menjadi 27.87%.

c. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2021, persentasePenduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi mengalami tren kenaikan yang fluktuatif. Dari 25.26% menjadi 27.87% di tahun 2021, ini menunjukkan kenaikan yang idealnya harus diturunkan. Angka kenaikannya sebesar 2.61 poin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan persentasePenduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi dinyatakan belum efektif dan masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

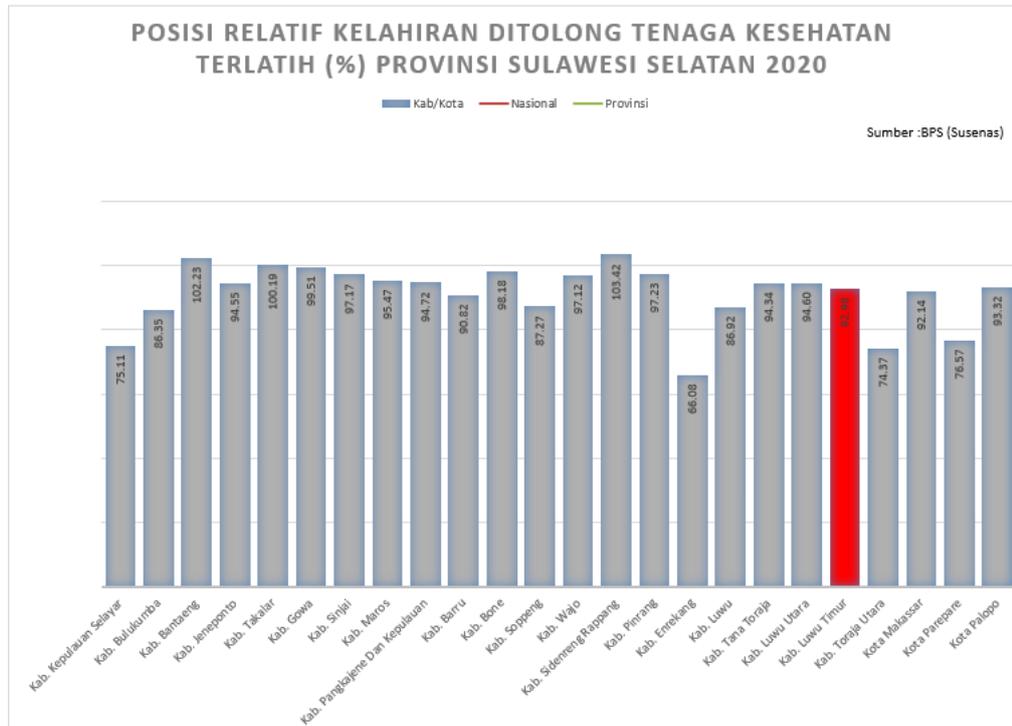
d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian persentasePenduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi Kabupaten Luwu Timur dengan capaian persentaseRumah tangga yang menerima PIP dapat dikatakan cukup relevan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. Hal ini menunjukkan hubungan timbal balik “jika terjadi penurunan angka persentaserumah tangga yang menerima PIP maka akan mempengaruhi kenaikan jumlah persentasependuduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi”. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan.

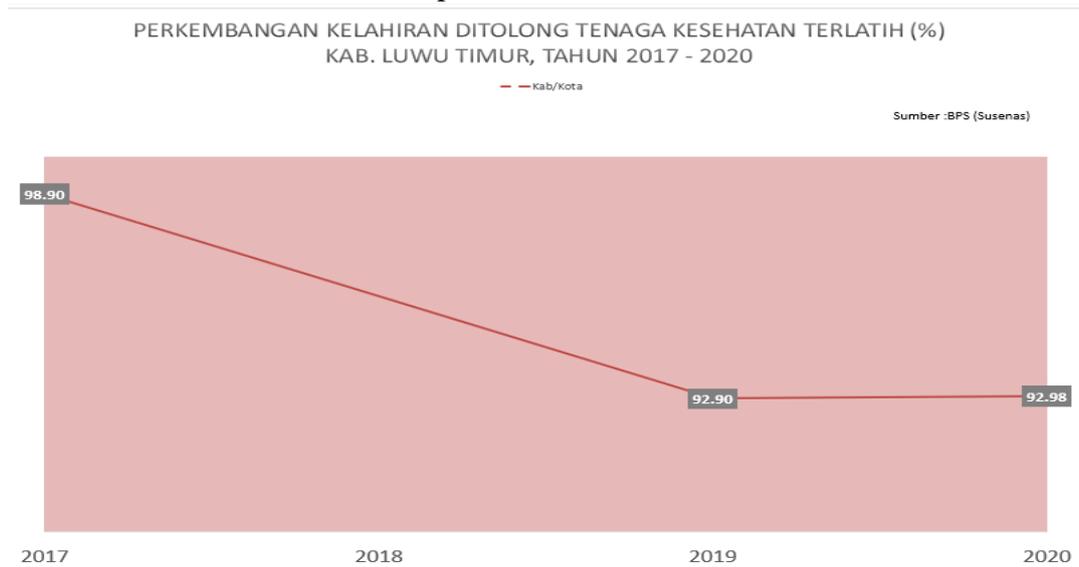
3.4 Bidang Kesehatan

3.4.1 Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih

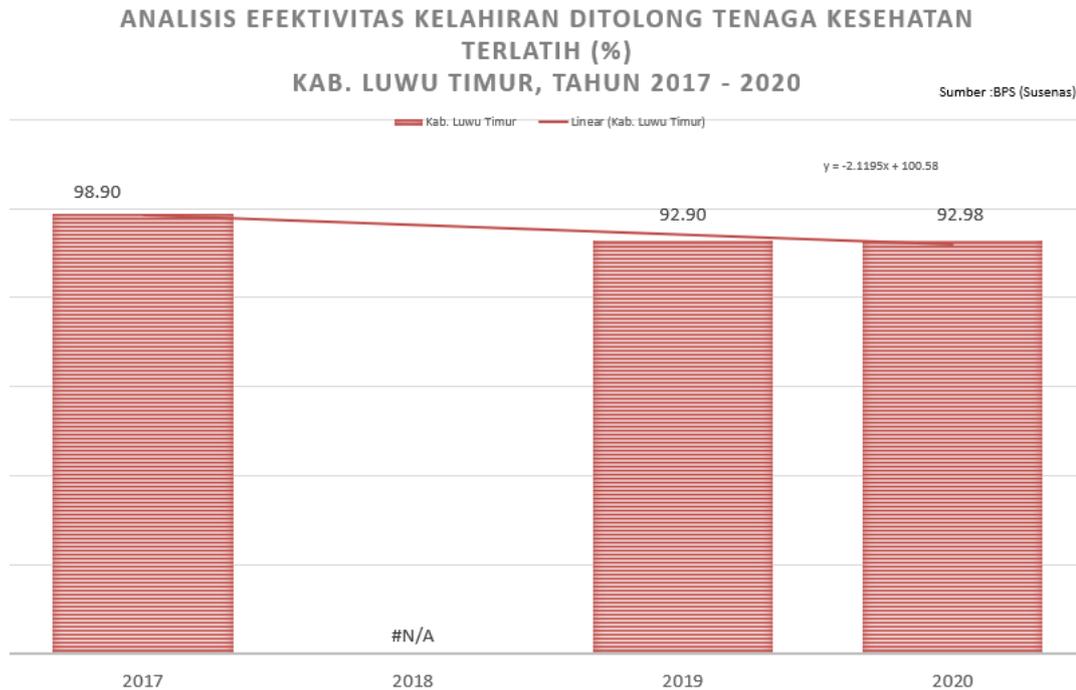
Gambar 3.69 Posisi Relatif Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020



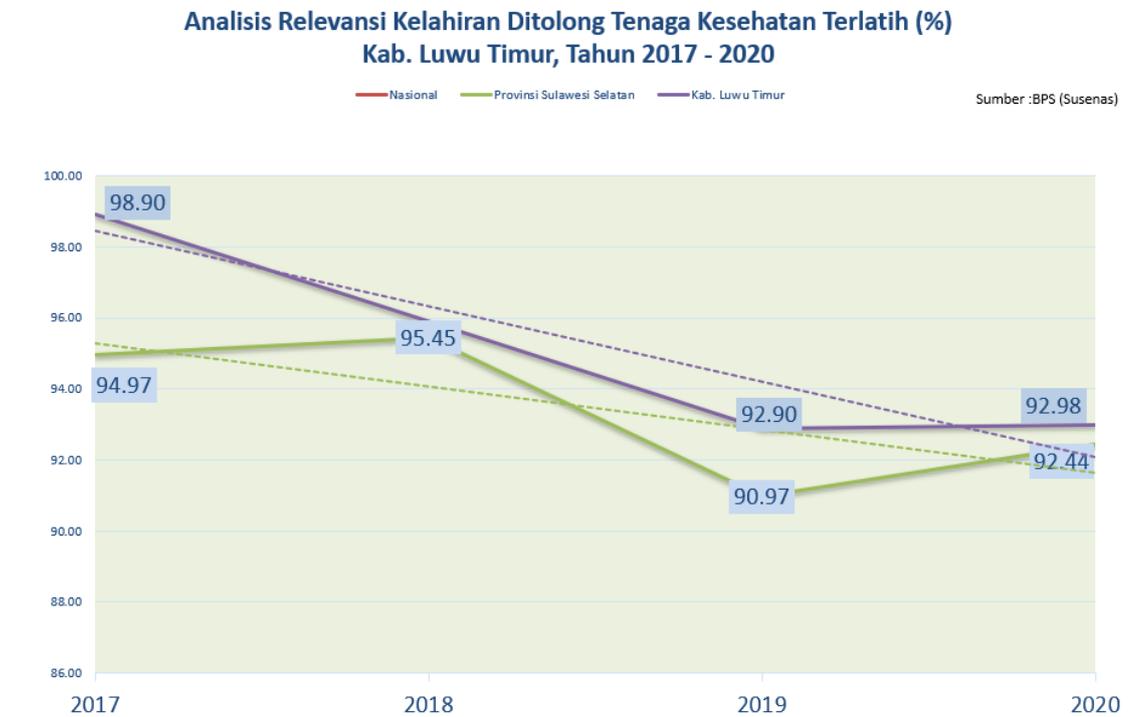
Gambar 3.70 Perkembangan Antar Waktu Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020



Gambar 3.71 Analisis Efektivitas Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020



Gambar 3.72 Analisis Relevansi Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020



Kondisi Karakteristik Kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih:

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2020 Kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih Provinsi Sulawesi selatan mencapai 92.44%. Pada tingkat kab/kota, terdapat 15 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang kondisi Kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih diatas Provinsi Sulawesi selatan. Serta sisanya hanya 9 kab/kota berada di bawah capaian Provinsi.
- Kabupaten Luwu Timur berada pada posisi ke-14 tertinggi di antara 24 kab/kota di Sulawesi Selatan dengan capaian 92.98%. Posisi tertinggi pertama ditempati oleh Kabupaten Sidenreng Rappang dengan capaian 103.42%, dan posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Enrekang dengan capaian 60.42%.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2020, Kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 98.90% menjadi 92.98%.

c. Efektivitas:

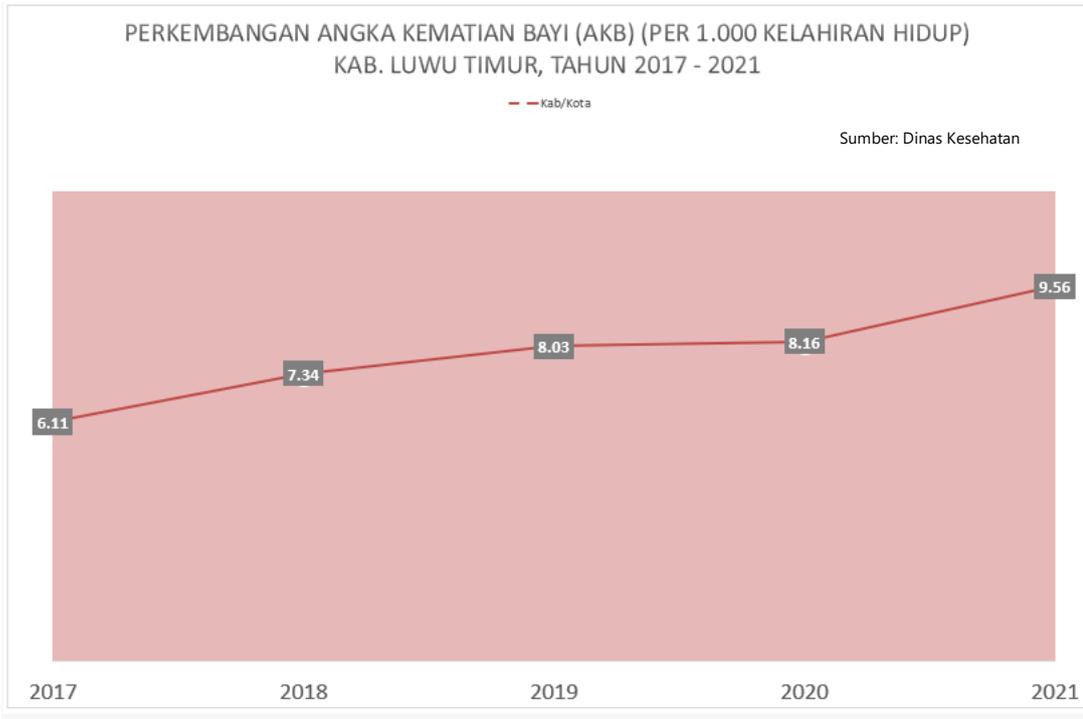
- Pada Periode tahun 2017–2020, Kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih mengalami tren penurunan yang cenderung fluktuatif. Dari 98.90% menjadi 92.98% di tahun 2020, ini menunjukkan penurunan yang idealnya harus ditingkatkan. Angka penurunannya sebesar 5.92 poin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan Kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih dinyatakan belum efektif dan masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

d. Relevansi:

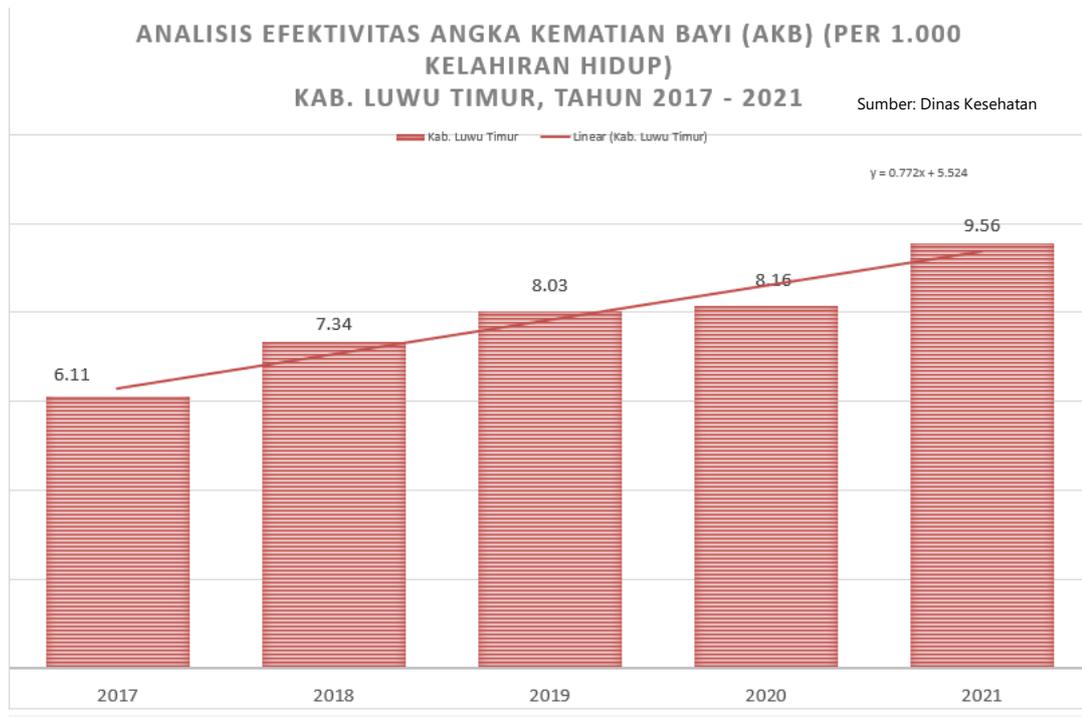
- Tren dan pola perubahan antara capaian Kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Provinsi Sulawesi selatan dapat dikatakan cukup beririsan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2020. Sama-sama mengalami penurunan. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan.

3.4.2 Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup)

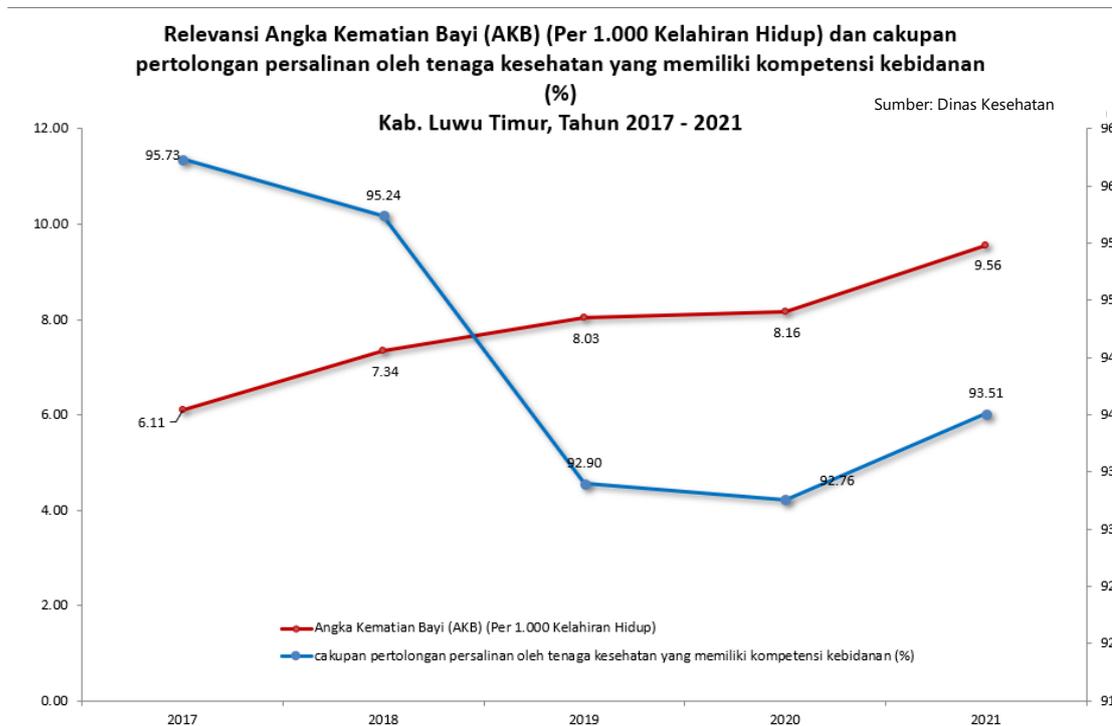
Gambar 3.73 Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.74 Analisis Efektivitas Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020



Gambar 3.75 Analisis Relevansi Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup) dan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020



Kondisi Karakteristik Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup):

- a. Perkembangan Antar Waktu:
 - Pada Periode tahun 2017-2021, Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya dari 6.11% menjadi 9.56%.
- b. Efektivitas:
 - Pada Periode tahun 2017–2021, Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup) mengalami tren kenaikan yang cenderung konsisten setiap tahunnya. Dari 6.11% menjadi 9.56% di tahun 2021, ini menunjukkan kenaikan yang idealnya harus terus diturunkan jumlahnya. Angka kenaikannya sebesar 3.45% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup) dinyatakan belum efektif dan masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya di tahun-tahun mendatang.

c. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dapat dikatakan cukup relevan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. Jika terjadi penurunan capaian Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tentu saja akan mengakibatkan peningkatan capaian pada indikator Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup). Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan.

3.4.3 Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup)

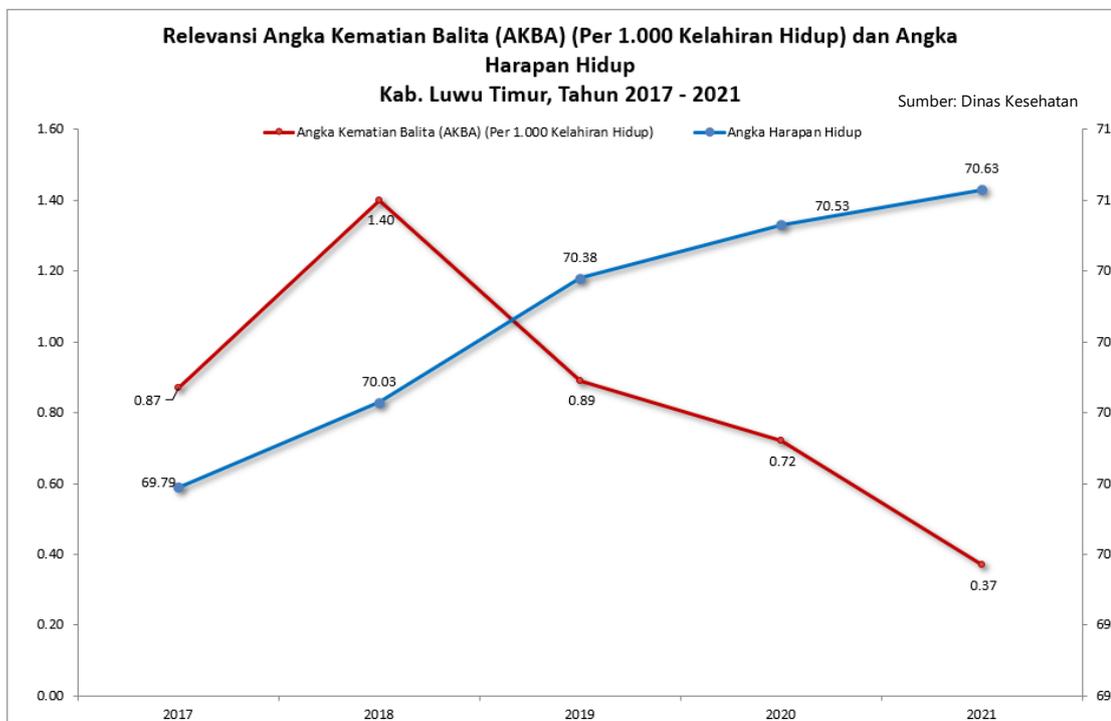
Gambar 3.76 Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.77 Analisis Efektivitas Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.78 Analisis Relevansi Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup) dengan Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Kondisi Karakteristik Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup):

a. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2020, Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 0.87% menjadi 0.37%.

b. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017-2020, Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup) mengalami tren penurunan yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Dari 0.87% di tahun 2017 meningkat drastis di tahun 2018 menjadi 1.40% lalu kemudian mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya menjadi 0.37% di tahun 2021, ini menunjukkan penurunan yang idealnya memang harus terus diturunkan jumlah capaiannya. Angka penurunannya sebesar 0.5% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup) dinyatakan sudah efektif namun masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

c. Relevansi:

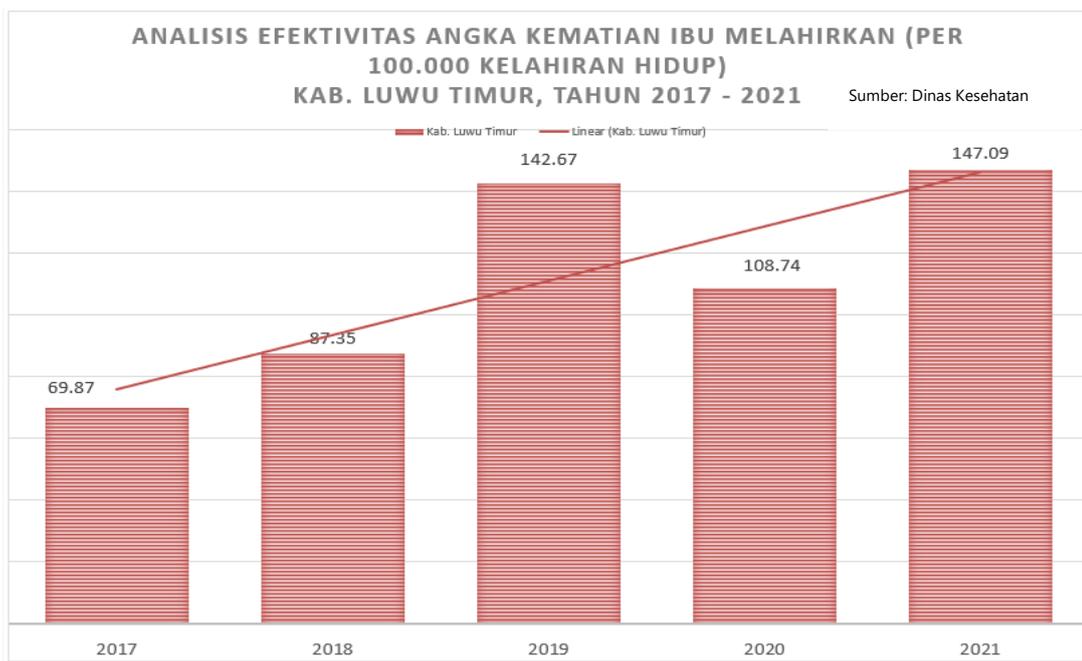
- Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Angka Harapan Hidup dapat dikatakan cukup relevan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2020. Jika terjadi penurunan capaian Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup) tentu saja akan mengakibatkan peningkatan capaian pada indikator Angka Harapan Hidup. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan.

3.4.4 Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

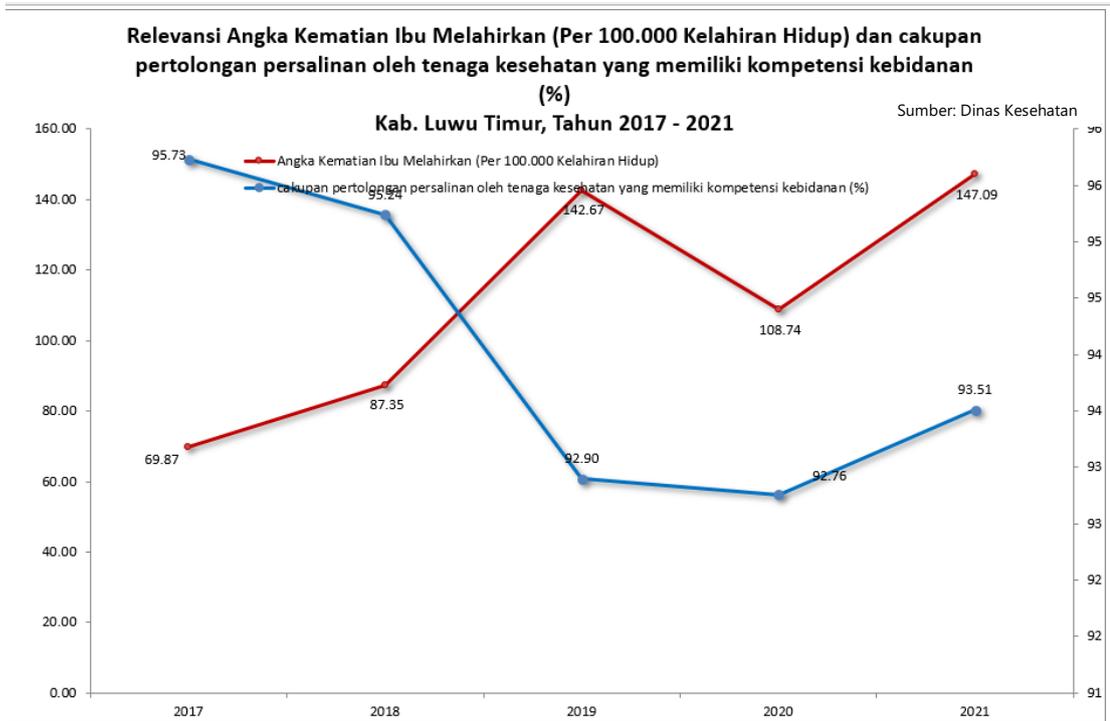
Gambar 3.79 Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.80 Analisis Efektivitas Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.81 Analisis Relevansi Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) dengan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Kondisi Karakteristik Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup):

a. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2020, Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari 69.87% menjadi 147.09%.

b. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2020, Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) mengalami tren peningkatan yang fluktuatif setiap tahunnya. Dari 69.87% menjadi 142.67% di tahun 2019 kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 108.74% dan mengalami peningkatan drastis di tahun 2021 menjadi 147.09%. Ini menunjukkan angka peningkatan yang idealnya harus terus diturunkan jumlahnya setiap tahunnya. Angka kenaikannya sebesar 77.22% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) dinyatakan sangat tidak efektif dan pastinya masih

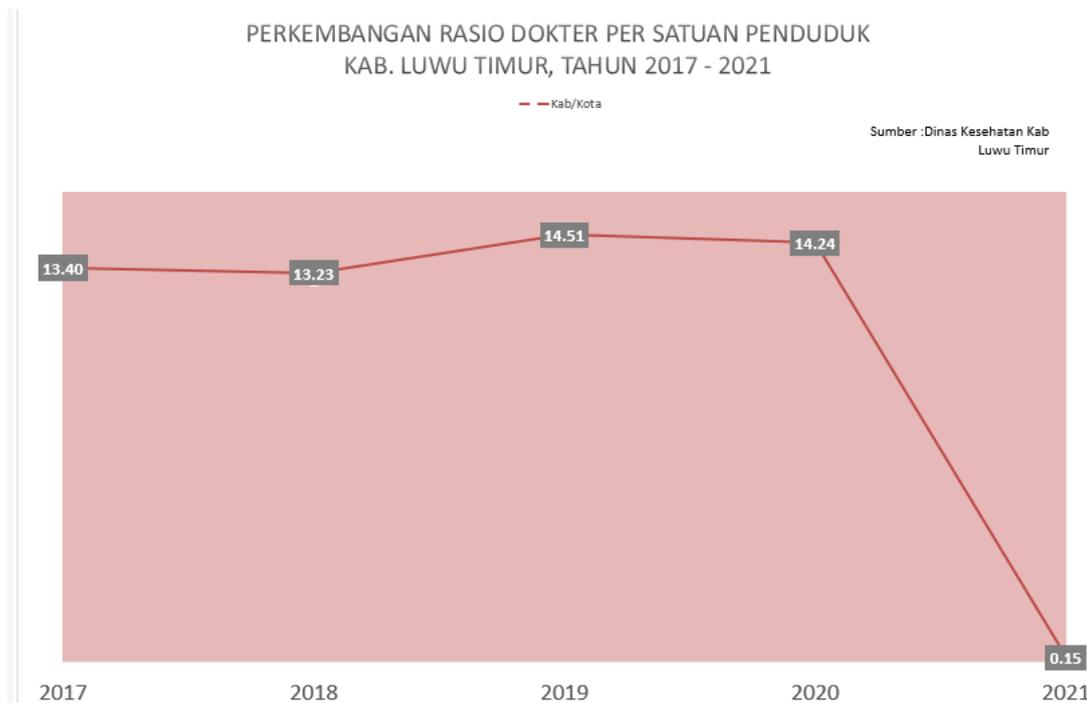
dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

c. Relevansi:

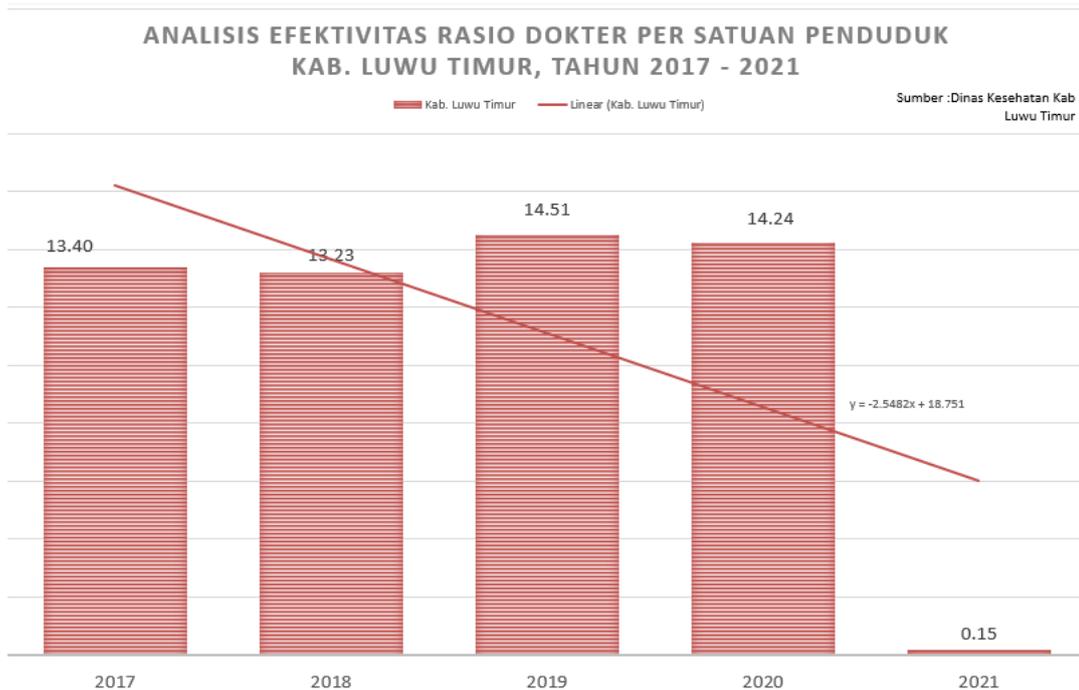
- Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur dengan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dapat dikatakan cukup relevan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2020. Jika terjadi penurunan capaian Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tentu saja akan mengakibatkan peningkatan capaian pada indikator Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup). Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan.

3.4.5 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

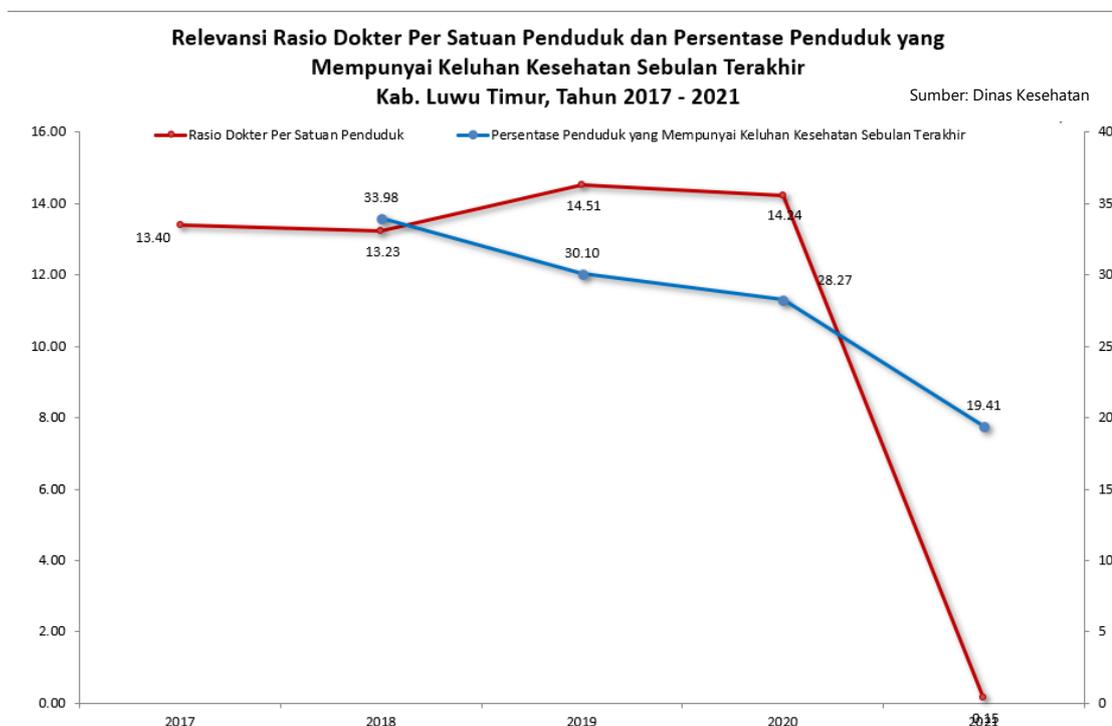
Gambar 3.82 Perkembangan Antar Waktu Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.83 Analisis Efektivitas Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.84 Analisis Relevansi Rasio Dokter Per Satuan Penduduk dan Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Kondisi Karakteristik Rasio Dokter Per Satuan Penduduk:

- a. Perkembangan Antar Waktu:
 - Pada Periode tahun 2017-2021, Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan secara fluktuatif dari 13.40% menjadi 0.15%. Walaupun pernah mengalami peningkatan drastis di tahun 2018 sebanyak 14.51%, tetapi kemudian menurun di tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2021.
- b. Efektivitas:
 - Pada Periode tahun 2017–2021, Rasio Dokter Per Satuan Penduduk mengalami tren penurunan drastis yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Dari 13.40% menjadi 0.15% di tahun 2021, ini menunjukkan angka penurunan yang idealnya harus terus ditingkatkan jumlahnya. Angka penurunannya sangat besar yaitu 13.25% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan layanan Kesehatan dengan cara peningkatan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk dinyatakan belum efektif dan pastinya masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.
- c. Relevansi:
 - Tren dan pola perubahan antara capaian Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir dapat dikatakan tidak relevan dimulai pada tahun 2018 hingga Agustus 2020. Jika terjadi penurunan capaian Rasio Dokter Per Satuan Penduduk harusnya akan mengakibatkan lonjakan capaian pada indikator Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir. Tetapi pada kenyataannya malah terjadi penurunan jumlah penduduk yang mempunyai keluhan Kesehatan sebulan terakhir. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya tidak relevan.

3.4.6 Penduduk Yang Menderita Sakit Sebulan Terakhir

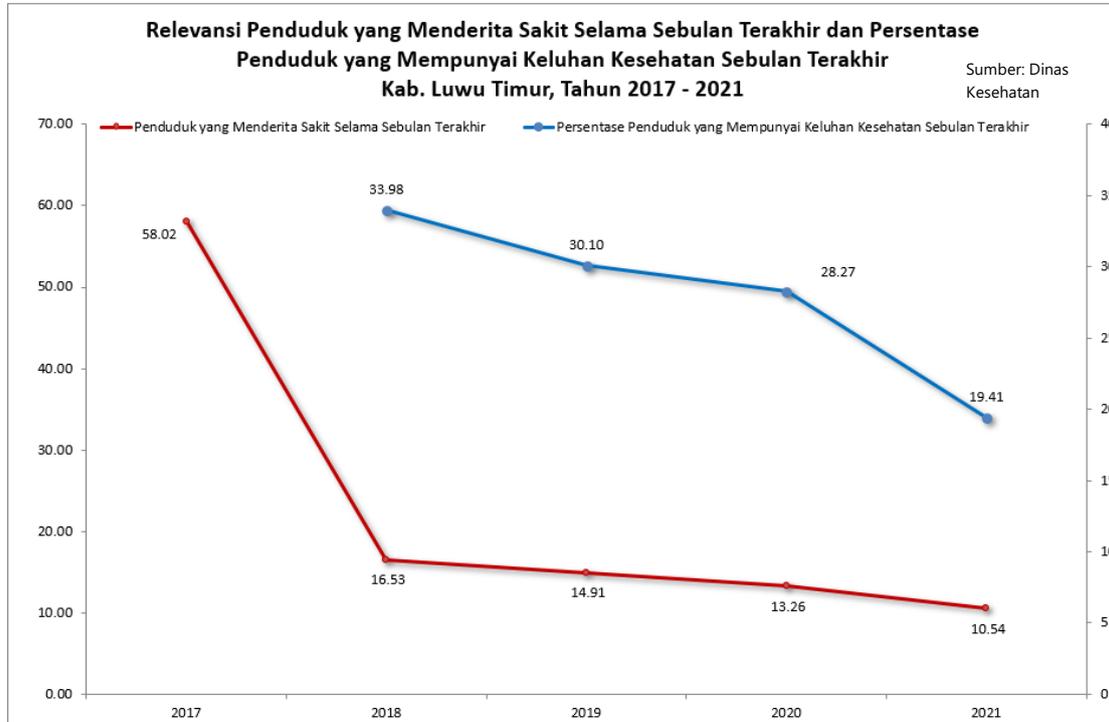
Gambar 3.85 Perkembangan Antar Waktu Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.86 Analisis Efektivitas Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.87 Analisis Relevansi Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir dengan persentasePenduduk yang Mempunyai Keluhan Sakit Sebulan Terakhir Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Kondisi Karakteristik Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir:

a. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2021, Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan drastis dari 58.02% menjadi 10.54%

b. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2021, Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir mengalami tren penurunan. Dari 58.02% menjadi 10.54% di tahun 2021, ini menunjukkan angka penurunan yang idealnya memang harus terus diturunkan jumlahnya. Angka penurunannya sebesar 47,48% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan jumlah Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir dinyatakan sudah efektif namun masih dibutuhkan upaya lebih lagi untuk memaksimalkan capaiannya.

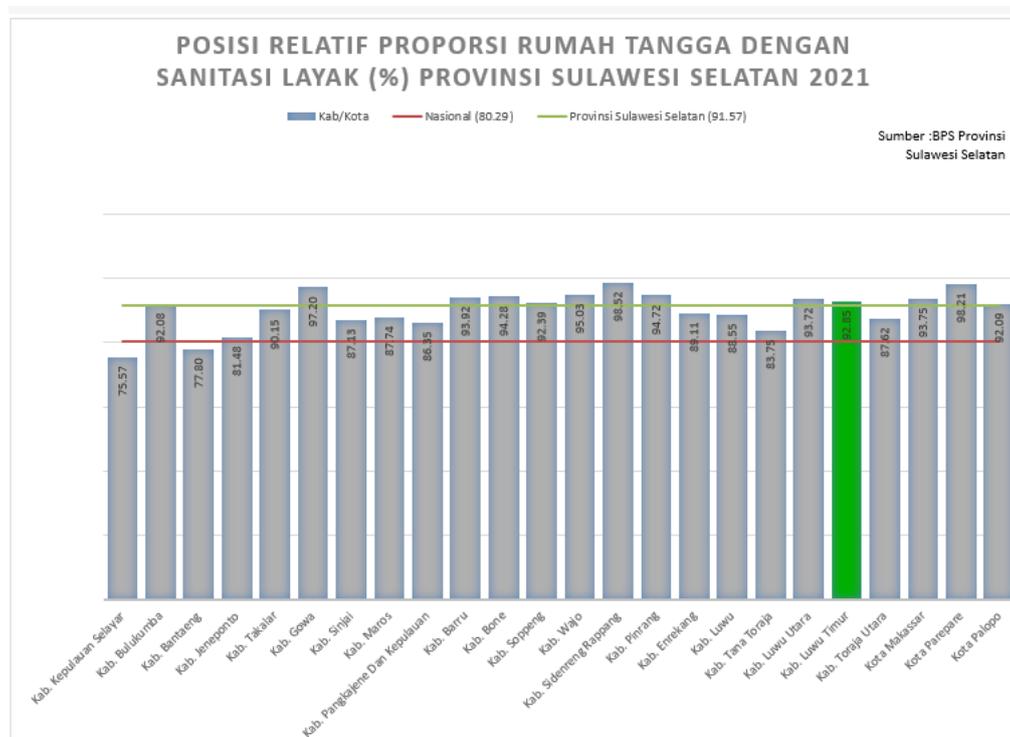
c. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Penduduk yang Mempunyai Keluhan Sakit Sebulan Terakhir dapat dikatakan cukup relevan dimulai pada tahun 2018 hingga Agustus 2021. Jika terjadi penurunan capaian Penduduk yang Mempunyai Keluhan Sakit Sebulan Terakhir tentu saja akan mengakibatkan penurunan angka capaian pada indikator Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir. Dengan kata lain semakin berkurang Penduduk yang Mempunyai Keluhan Sakit Sebulan Terakhir maka akan mengakibatkan mereka peduli pada kesehatannya dan implikasinya adalah berkurangnya jumlah penduduk yang menderita sakit. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan.

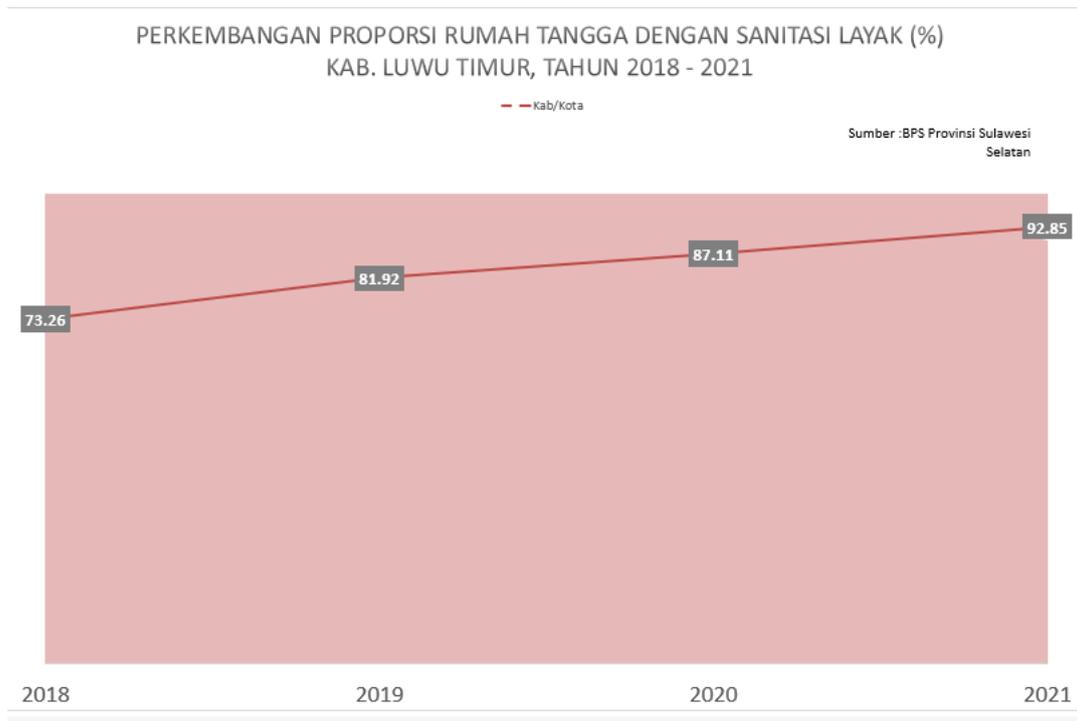
3.5 Bidang Infrastruktur Dasar

3.5.1 Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Gambar 3.88 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Prov Sulawesi Selatan Tahun 2021



Gambar 3.89 Perkembangan Antar Waktu Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Gambar 3.90 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Gambar 3.91 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Kondisi Karakteristik Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak :

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2021 Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Provinsi Sulawesi selatan mencapai 91.57% lebih tinggi dari Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Nasional (80.29%). Pada tingkat kab/kota, terdapat 22 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang kondisi Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak-nya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional. Dan hanya 2 kab/kota berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.
- Kabupaten Luwu Timur menempati posisi ke-10 tertinggi di antara 24 kab/kota se-Sulawesi Selatan dengan capaian 92.85%. Posisi tertinggi pertama ditempati oleh Kabupaten Sidenreng Rappang dengan capaian 98.52%, dan posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Kepulauan Selayar dengan capaian 75.57%.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2018-2021, Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari 73.26% menjadi 92.85%.

c. Efektivitas:

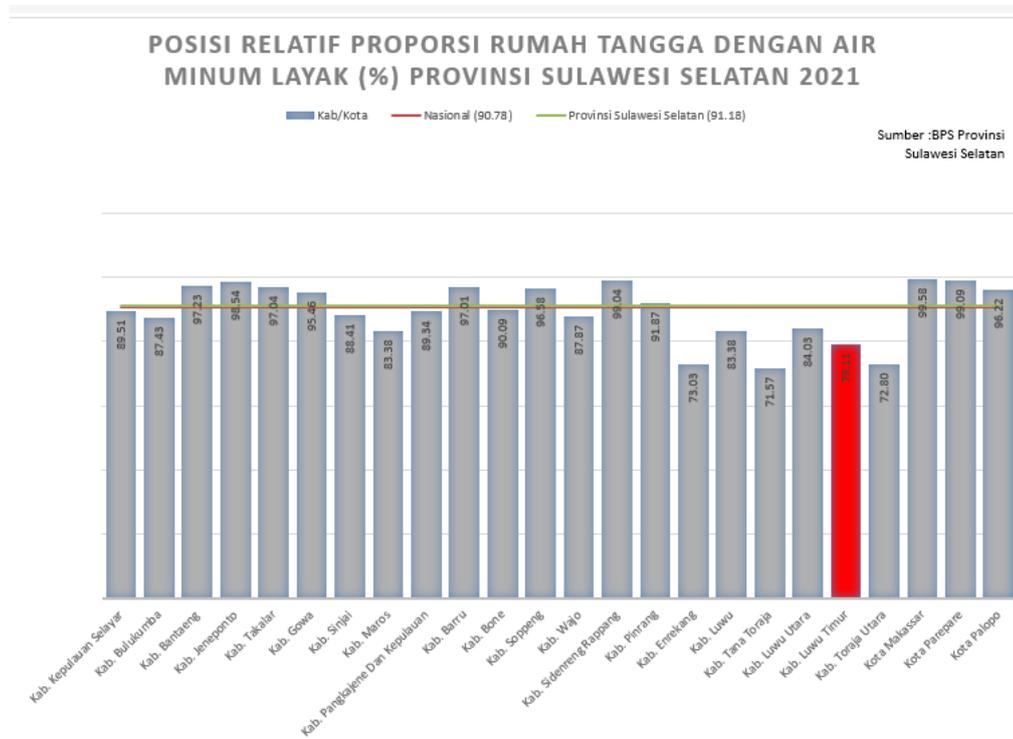
- Pada Periode tahun 2018–2021, Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak mengalami tren peningkatan yang cenderung konsisten setiap tahunnya. Dari 73.26% menjadi 92.85% di tahun 2021, ini menunjukkan peningkatan yang belum maksimal. Hanya naik sebesar 19.59 poin dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak dinyatakan sudah efektif namun masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

d. Relevansi:

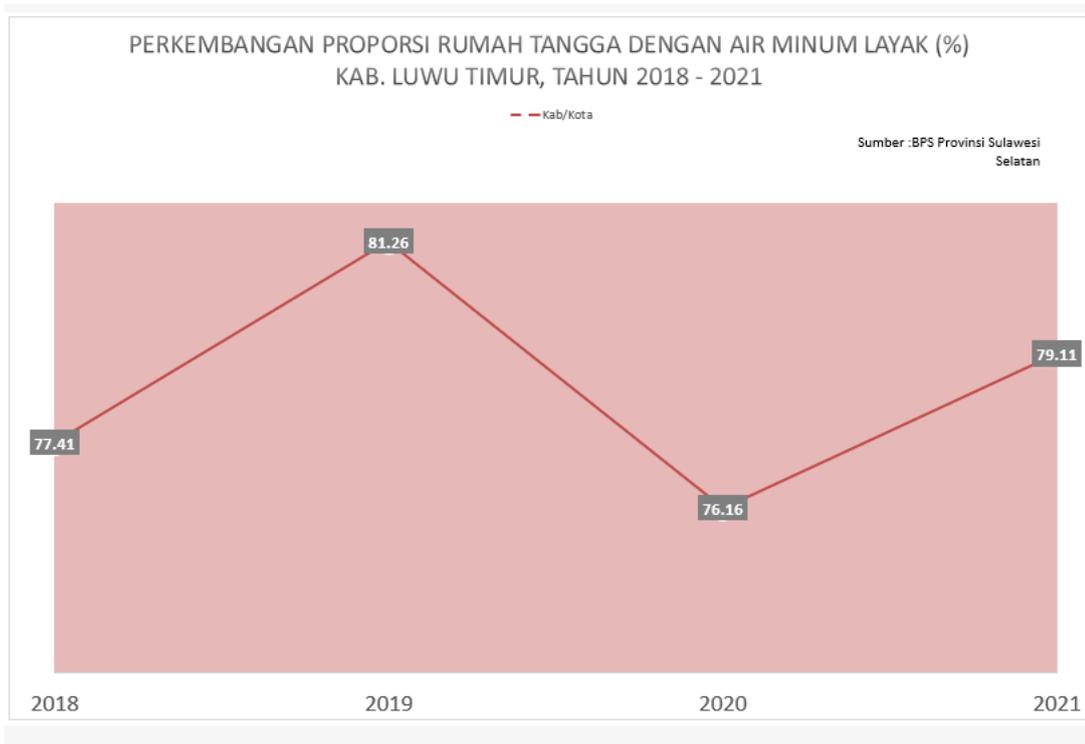
- Tren dan pola perubahan antara capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2018 hingga Agustus 2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

3.5.2 Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

Gambar 3.92 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Prov Sulawesi Selatan Tahun 2021



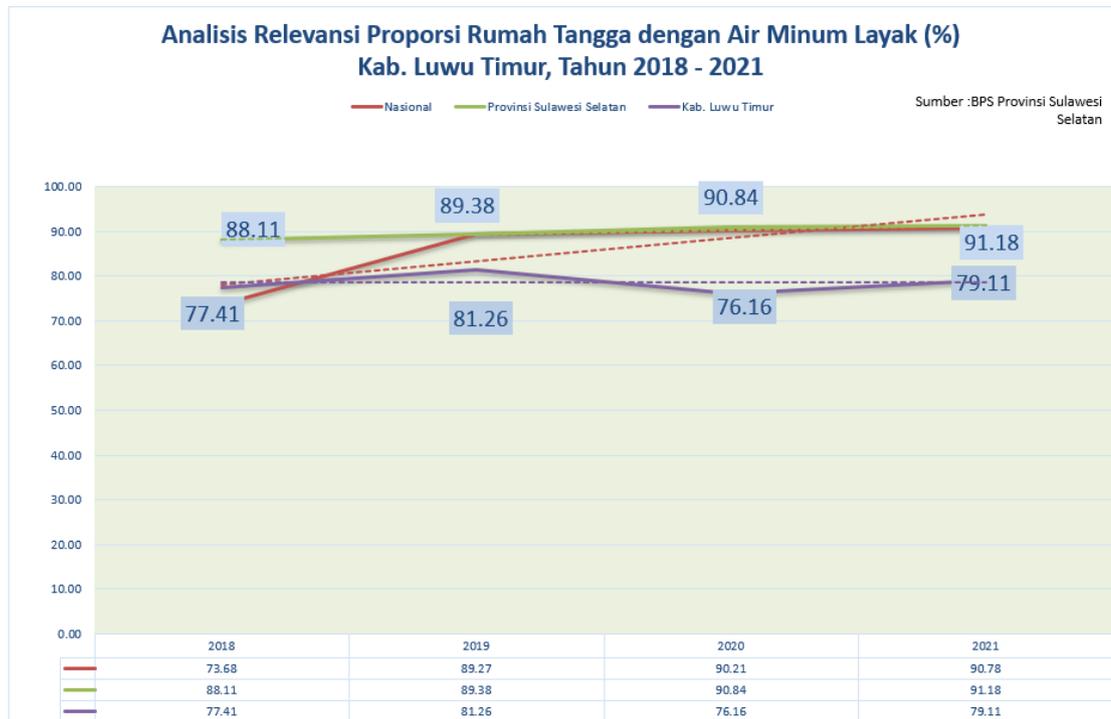
Gambar 3.93 Perkembangan Antar Waktu Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Gambar 3.94 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Gambar 3.95 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Kondisi Karakteristik Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak :

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2021 Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Provinsi Sulawesi selatan mencapai 91.18% lebih tinggi dari Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Nasional (90.78%). Pada tingkat kab/kota, terdapat 11 kab/kota yang kondisi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak - nya diatas ProvinsiSulawesi selatan dan Nasional. Dan 13 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2018-2021, Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari 77.41% menjadi 79.11%.

c. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2018–2021, Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak mengalami tren peningkatan yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Dari 77.41% di tahun 2018 menjadi 81.26% di tahun 2019, menurun di tahun 2020

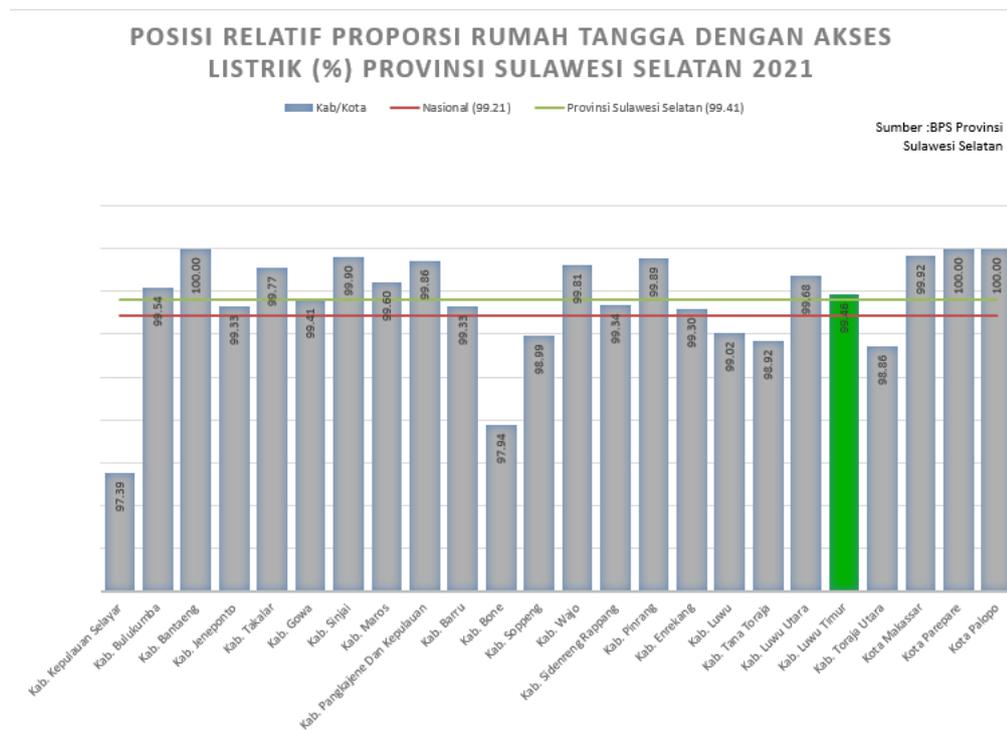
menjadi 76.16% dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2021 menjadi 79.11%. Hal ini menunjukkan peningkatan yang belum maksimal karena hanya naik sebesar 1.7 poin dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak dinyatakan sudah efektif namun masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

d. Relevansi:

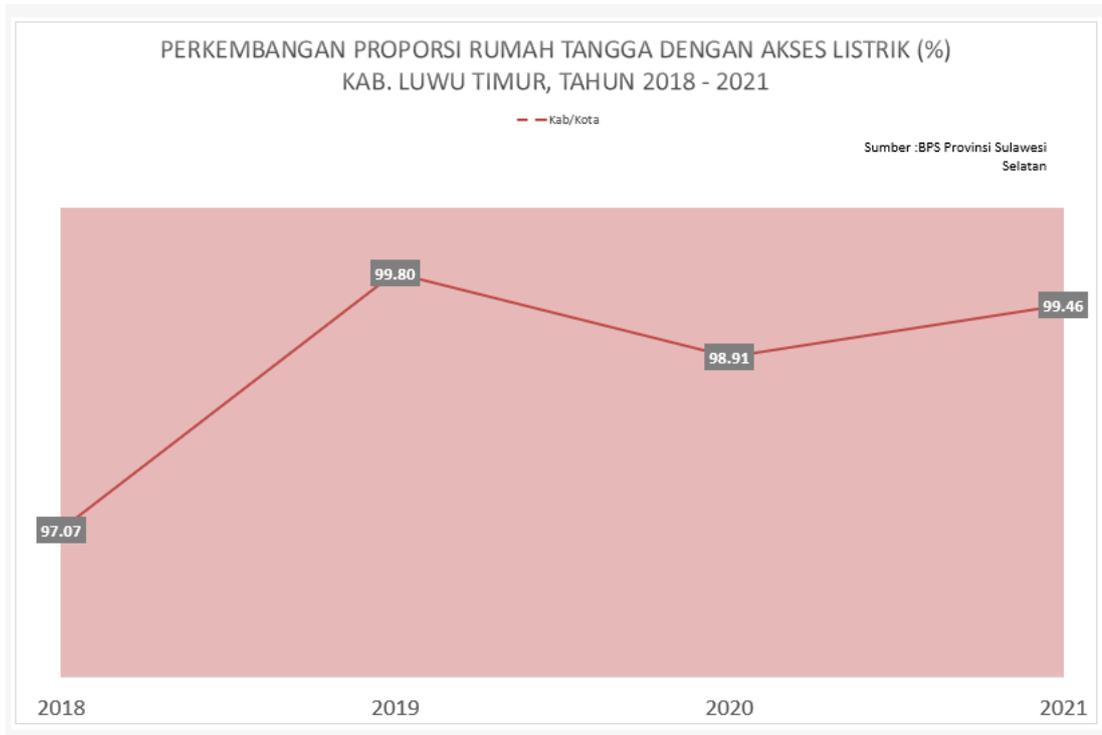
- Tren dan pola perubahan antara capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2018 hingga Agustus 2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

3.5.3 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik

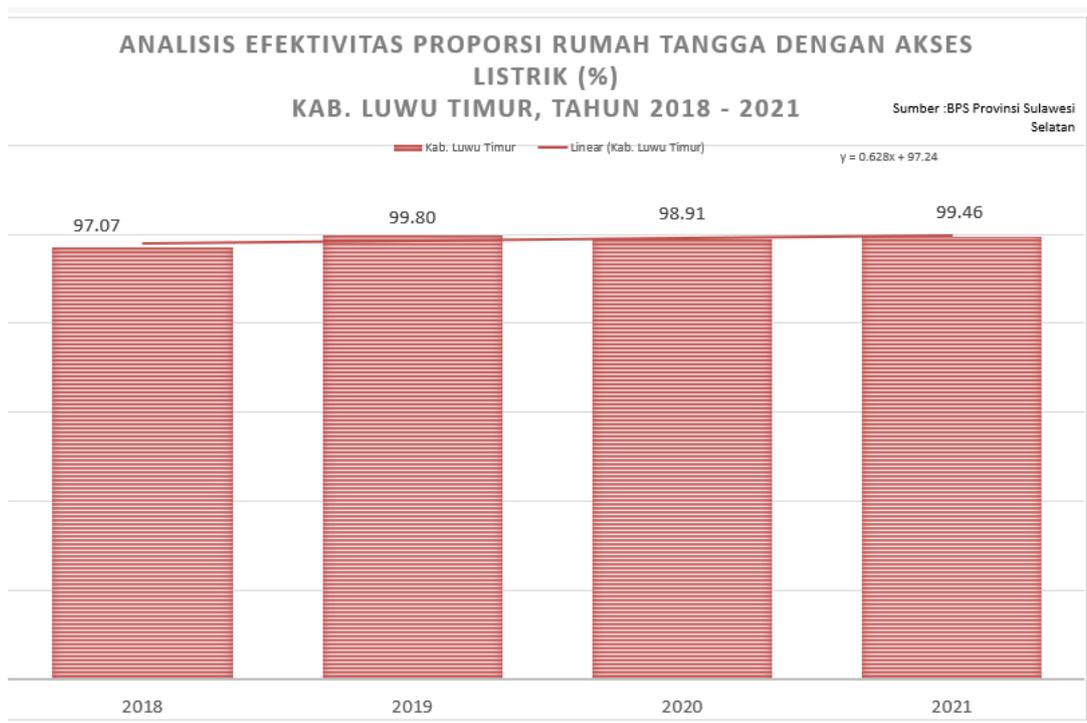
Gambar 3.96 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Prov Sulawesi Selatan Tahun 2021



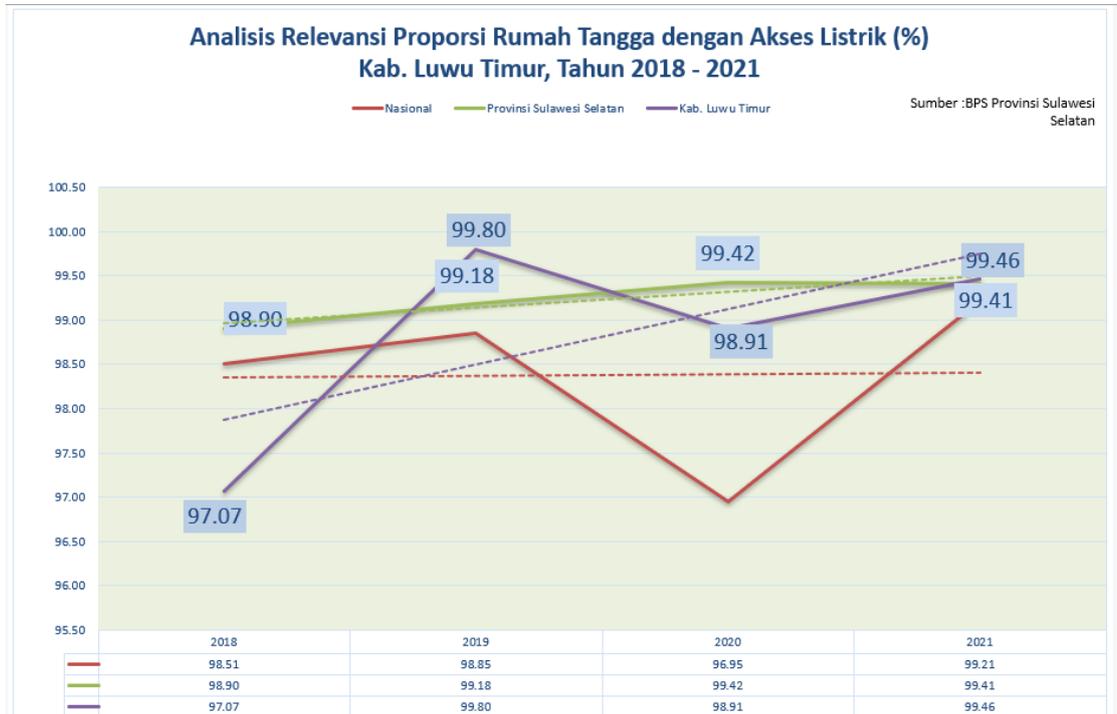
Gambar 3.97 Perkembangan Antar Waktu Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Gambar 3.98 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Gambar 3.99 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Kondisi Karakteristik Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik :

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2021 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Provinsi Sulawesi selatan mencapai 99.41% lebih tinggi dari Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Nasional (99.21%). Pada tingkat kab/kota, terdapat 18 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang kondisi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik-nya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional. Dan hanya 6 kab/kota berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.
- Kabupaten Luwu Timur berada pada posisi ke-13 tertinggi di antara 24 kab/kota se-Sulawesi Selatan dengan capaian 99.46%. Posisi tertinggi ditempati oleh Kabupaten Bantaeng, Kota Pare-pare dan Kota Palopo dengan capaian 100%. Dan Posisi terendah ditempati Kabupaten Kepulauan Selayar dengan capaian 97.39%.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2018-2021, Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik

Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari 97.07% menjadi 99.46%.

c. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2018–2021, Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik mengalami tren peningkatan yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Dari 97.07% di tahun 2018 menjadi 99.80% di tahun 2019, kemudian menurun menjadi 98.91% di tahun 2020 dan meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 99.46%. ini menunjukkan peningkatan yang belum maksimal. Hanya naik sebesar 2.46 poin dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik dinyatakan sudah efektif namun masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

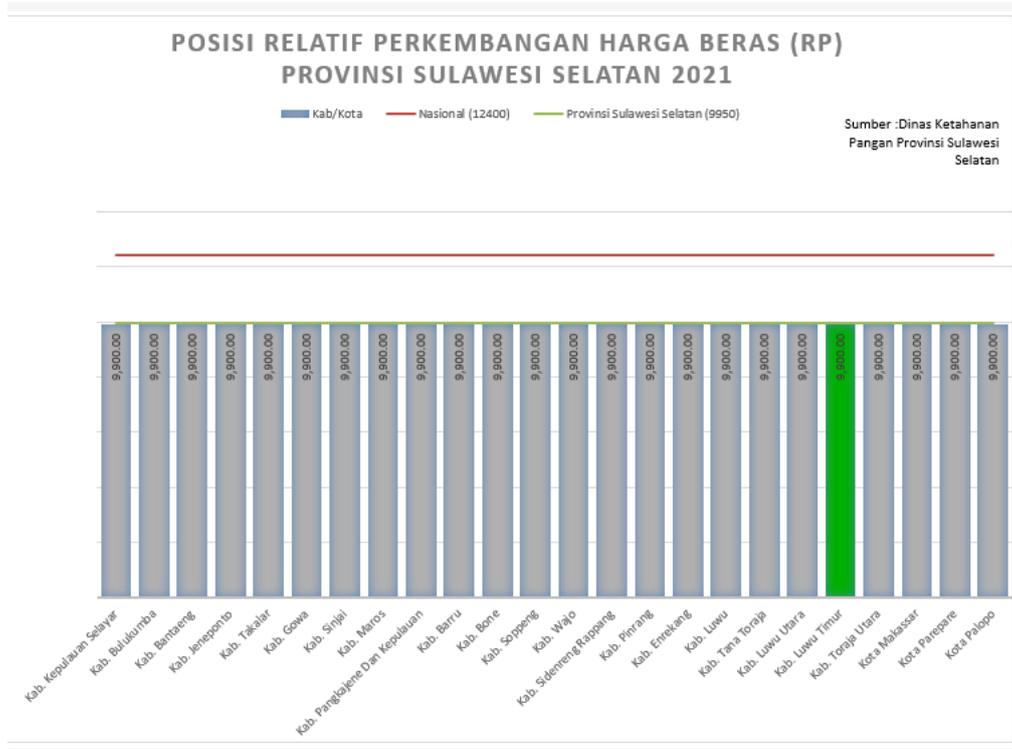
d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2018 hingga Agustus 2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

3.6 Bidang Ketahanan Pangan

3.6.1 Perkembangan Harga Beras

Gambar 3.100 Posisi Relatif Perkembangan Harga Beras Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021



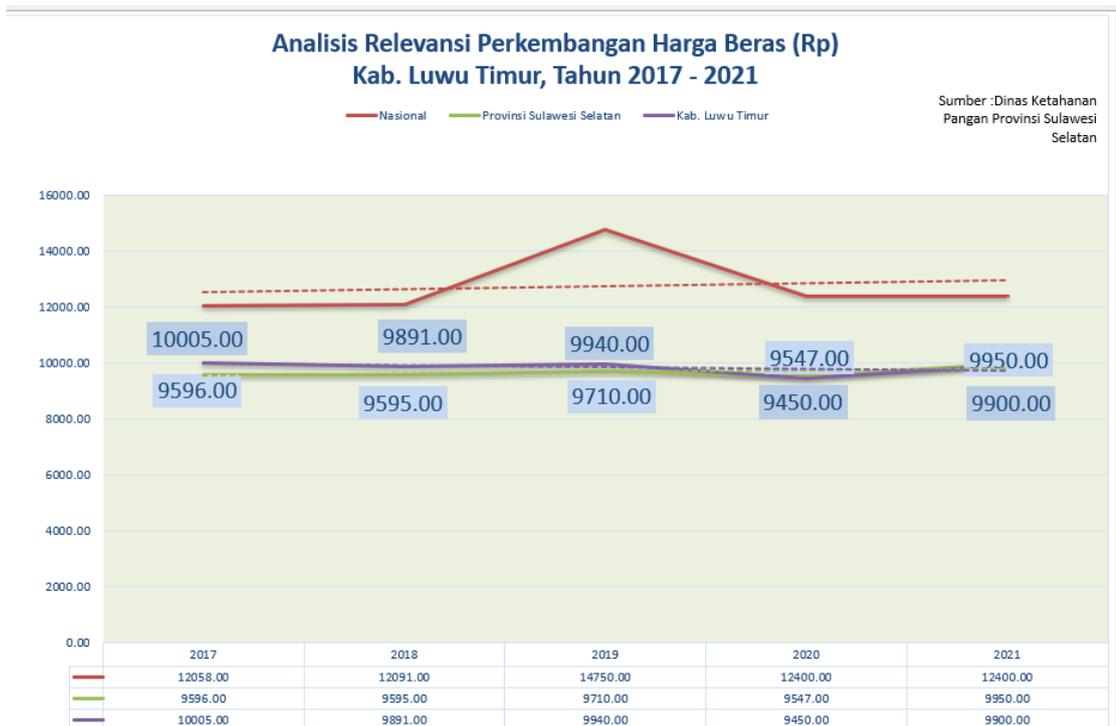
Gambar 3.101 Perkembangan Antar Waktu Perkembangan Harga Beras Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.102 Analisis Efektivitas Perkembangan Harga Beras Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.103 Analisis Relevansi Perkembangan Harga Beras Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021

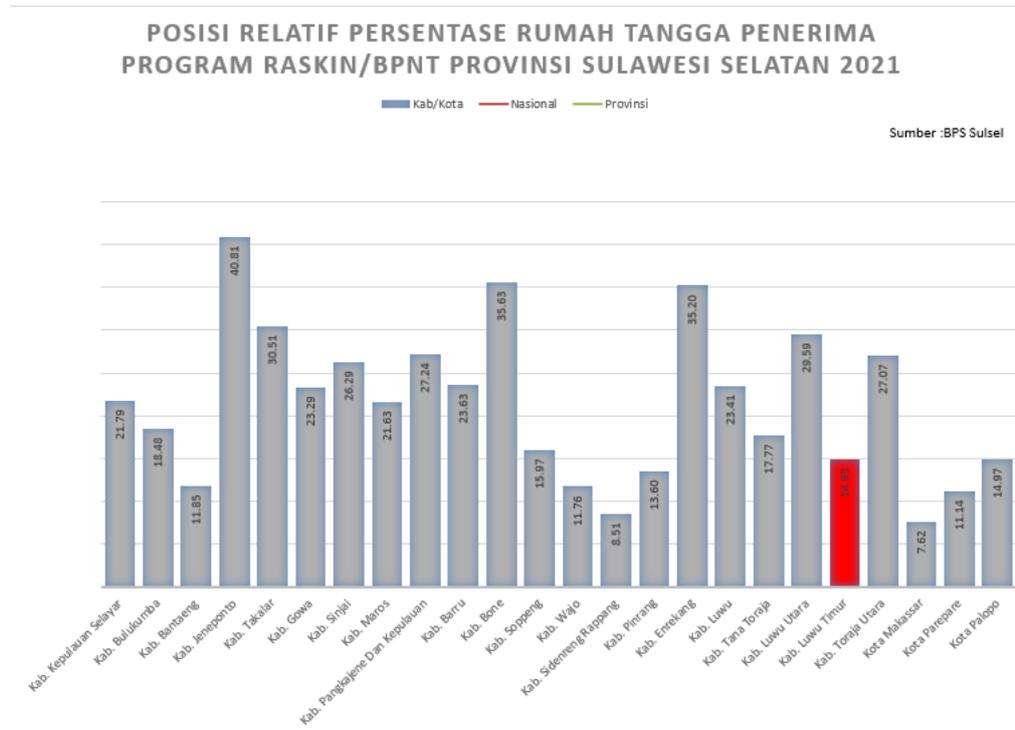


Kondisi Karakteristik Perkembangan Harga Beras:

- a. Posisi Relatif:
 - Pada tahun 2021 Perkembangan Harga Beras Provinsi Sulawesi selatan mencapai Rp 9.950,- lebih rendah dari Perkembangan Harga Beras Nasional (Rp 12.400,-). Pada tingkat kab/kota, terdapat 24 atau semua kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang kondisi Perkembangan Harga Beras-nya di bawah Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional.
- b. Perkembangan Antar Waktu:
 - Pada Periode tahun 2017-2021, Perkembangan Harga Beras Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan yang tidak terlalu berbeda setiap tahunnya. Dari Rp 10.005,- menjadi Rp 9.900,-
- c. Efektivitas:
 - Pada Periode tahun 2017–2021, Perkembangan Harga Beras mengalami tren penurunan yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Dari Rp 10.005,- menjadi Rp 9.900,- di tahun 2021, ini menunjukkan harga yang stabil setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan Perkembangan Harga Beras dinyatakan sudah efektif.
- d. Relevansi:
 - Tren dan pola perubahan antara capaian Perkembangan Harga Beras Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

3.6.2 persentaseRumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT

Gambar 3.104 Posisi Relatif persentaseRumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT Prov Sulawesi Selatan Tahun 2021



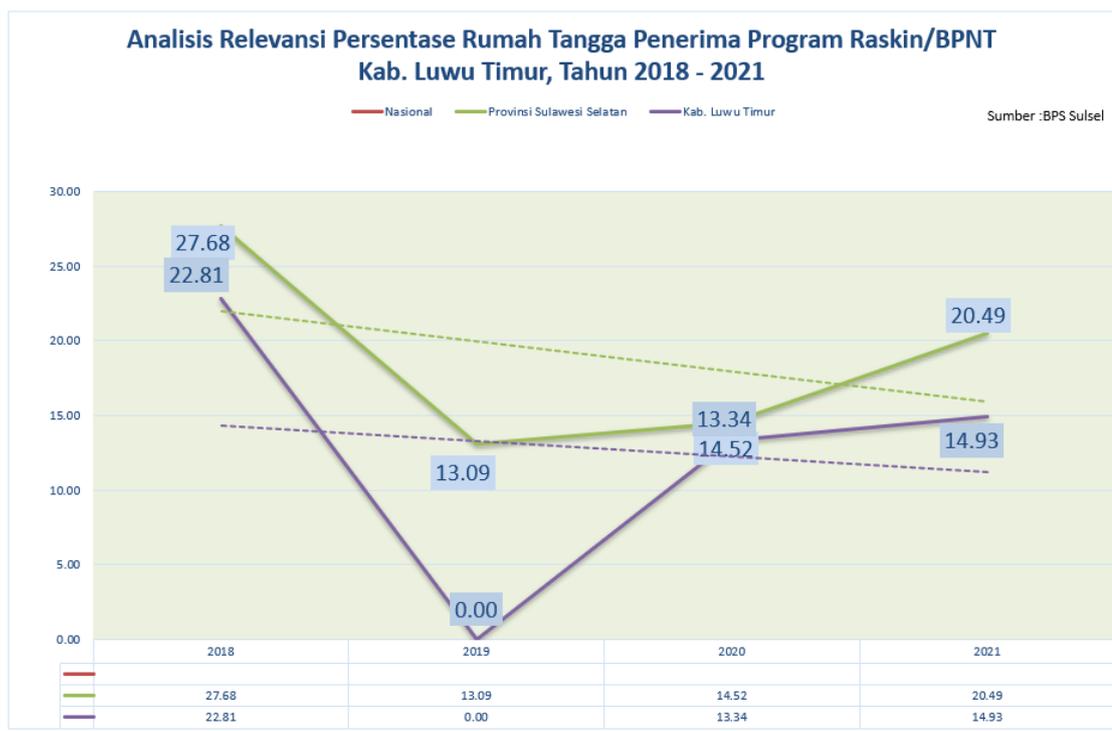
Gambar 3.105 Perkembangan Antar Waktu persentaseRumah Tangga PenerimaProgram Raskin/BPNT Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Gambar 3.106 Analisis Efektivitas persentaseRumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT Kabupaten Luwu TimurTahun 2018-2021



Gambar 3.107 Analisis Relevansi persentaseRumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT dengan persentasePenduduk Miskin Kabupaten Luwu TimurTahun 2017-2021



Kondisi Karakteristik Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT:

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2021 Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT Provinsi Sulawesi selatan mencapai 20.49%. Pada tingkat kab/kota, terdapat 13 kab/kota yang kondisi Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT diatas Provinsi Sulawesi selatan. Dan sisanya 11 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur berada di bawah capaian Provinsi.
- Kabupaten Luwu Timur berada pada posisi ke-7 terendah di antara 24 kab/kota se-Sulawesi Selatan dengan capaian 14.93%. Posisi pertama tertinggi ditempati oleh Kabupaten Jeneponto dengan capaian 40.81% dan Posisi terendah ditempati oleh Kota Makassar dengan capaian 7.62%.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2018-2021, Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 22.81% menjadi 14.93%.

c. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2018–2021, Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT mengalami tren penurunan yang fluktuatif. Dari 22.81% menjadi 14.93% di tahun 2021, angka capaiannya turun sebesar 7.17 poin dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah Tangga Miskin salah satunya dengan pemberian Program Raskin/BPNT dinyatakan belum efektif dan masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya. Semakin banyak Rumah tangga miskin yang bisa terjangkau oleh program Raskin/BPNT makan akan membantu penurunan tingkat kemiskinan.

d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2018 hingga Agustus 2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan.

3.6.3 Perkembangan harga Bahan Pokok Utama

Tabel 3.1 Perkembangan Harga Bahan Pokok Utama Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021

No.	Komoditas(Rp)	1/11/2021	1/12/2021	31/12/2021
I	Beras			
1	Beras Kualitas Bawah I (kg)	9,000.00	9,000.00	9,000.00
2	Beras Kualitas Bawah II (kg)	9,500.00	9,500.00	9,500.00
3	Beras Kualitas Medium I (kg)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
4	Beras Kualitas Medium II (kg)	10,500.00	10,500.00	10,500.00
5	Beras Kualitas Super I (kg)	11,000.00	11,000.00	11,000.00
6	Beras Kualitas Super II (kg)	11,000.00	11,000.00	11,000.00
II	Daging Ayam			
1	Daging Ayam Ras Segar (kg)	26,000.00	26,000.00	30,000.00
III	Daging Sapi			
1	Daging Sapi Kualitas 1 (kg)	120,000.00	120,000.00	125,000.00
2	Daging Sapi Kualitas 2 (kg)	125,000.00	125,000.00	130,000.00
IV	Telur Ayam			
1	Telur Ayam Ras Segar (kg)	17,500.00	17,500.00	24,000.00
V	Bawang Merah			
1	Bawang Merah Ukuran Sedang (kg)	25,000.00	25,000.00	25,000.00
VI	Bawang Putih			
1	Bawang Putih Ukuran Sedang (kg)	28,000.00	28,000.00	30,000.00
VII	Cabai Merah			
1	Cabai Merah Besar (kg)	25,000.00	40,000.00	50,000.00
2	Cabai Merah Keriting (kg)	30,000.00	40,000.00	55,000.00
VIII	Cabai Rawit			
1	Cabai Rawit Hijau (kg)	23,000.00	50,000.00	75,000.00
2	Cabai Rawit Merah (kg)	25,000.00	50,000.00	75,000.00
IX	Minyak Goreng			
1	Minyak Goreng Curah (kg)	15,000.00	15,000.00	16,000.00
2	Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 (kg)	19,000.00	20,000.00	22,000.00
3	Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 (kg)	21,000.00	22,000.00	23,000.00
X	Gula Pasir			
1	Gula Pasir Kualitas Premium (kg)	13,500.00	13,500.00	13,500.00
2	Gula Pasir Lokal (kg)	13,000.00	13,000.00	13,000.00

Sumber: Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Luwu Timur.

Jika melihat data dalam Tabel 3.1 di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan harga 10 Bahan pokok utama di Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 di tiga bulan terakhir pada umumnya masih stabil. Hanya ada 7 bahan pokok utama yang menunjukkan harga kenaikan di 3 bulan terakhir yaitu: daging ayam, daging sapi, telur ayam, bawang putih, cabai merah, cabai rawit dan minyak goreng. Ke-4 bahan pokok utama ini memang diketahui harganya selalu dipengaruhi oleh kondisi ketersediaannya di peternak ataupun petani. Tetapi jika dilihat kondisi ketersediaan semua bahan pokok

utama, bisa dipastikan stabilitas harganya masih berlanjut di tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk mendukung stabilitas harga bahan pokok utama cukup efektif. Jika kondisinya tetap stabil dan tidak ada lonjakan harga maka bisa dipastikan bisa menekan beban pengeluaran rumah tangga miskin yang tentu saja berimplikasi pada penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.

Profil kemiskinan daerah Kabupaten Luwu Timur dapat disimpulkan dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Profil Kemiskinan Provinsi Sulsel Tahun 2017-2021

No	Indikator	Analisis						
		Perkembangan Antar Waktu		Posisi Relatif	Analisis Efektivitas		Analisis Relevansi	
		Awal	Akhir	Perbandingan dengan Capaian Provinsi /Nasional	Efektif	Tidak Efektif	Capaian Provinsi/ Nasional	Capaian antar Indikator
I	Bidang Konsumsi Pengeluaran							
1	persentasePenduduk Miskin	7.66%	6.94%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.60%	1.09%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.50%	0.26%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
4	Jumlah Penduduk Miskin	21.940 jiwa	20.990 jiwa	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	(-)	Relevan dengan persentasePenduduk Miskin
5	Garis Kemiskinan	Rp 28.921,-	Rp 371.947,-	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi, Lebih Rendah dari Capaian Nasional	(-)	√	Relevan	(-)

6	persentasePendu duk Miskin Ekstrem	2.58%	1.66%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi, Lebih Rendah dari Capaian Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
7	Tingkat Ketimpangan Pengeluaran (Gini Rasio)	0.40%	0.40%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Nasional	(-)	√	Tidak Relevan	(-)
II	Bidang Ketenagakerjaan							
1	Angkatan kerja	144.010 jiwa	162.182 jiwa	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	(-)	Relevan dengan persentasePe nduduk Miskin
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70.03%	73.14%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.58%	4.96%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	(-)	√	Relevan	(-)
III	Bidang Pendidikan							
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	109.75 %	109.02%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Nasional	(-)	√	Relevan	(-)
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	86.90%	87.20%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	(-)	√	Relevan	(-)
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	99.31%	98.28%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Nasional	(-)	√	Tidak Relevan	(-)
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	77.93%	78.81%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi, Lebih Rendah dari Capaian Nasional	(-)	√	Relevan	(-)
5	Harapan Lama Sekolah	12.79 tahun	12.84 tahun	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)

6	Angka Buta Huruf Penduduk 15+	5.20%	6.41%	Lebih Rendah Dari Capaian Provinsi, Lebih Tinggi dari Capaian Nasional	(-)	√	Tidak Relevan	(-)
7	persentasePenduduk Usia 7-24 Tahun Yang Tidak Bersekolah Lagi	25.26%	27.87%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi, Tidak tersedia data Nasional	(-)	√	(-)	Relevan dengan persentaseRumah Tangga yang Menerima PIP
IV	Bidang Kesehatan							
1	Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih	98.90%	92.98%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi, Tidak tersedia data Nasional	(-)	√	Relevan	(-)
2	Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup)	6.11%	9.56%	Tidak tersedia data Provinsi dan Nasional	(-)	√	(-)	Relevan dengan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
3	Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup)	0.87%	0.37%	Tidak tersedia data Provinsi dan Nasional	√	(-)	(-)	Relevan dengan Angka Harapan Hidup
4	Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	69.87%	147.09%	Tidak tersedia data Provinsi dan Nasional	(-)	√	(-)	Relevan dengan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

5	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	13.40%	0.15%	Tidak tersedia data Provinsi dan Nasional	(-)	√	(-)	Tidak Relevan dengan Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir
6	Penduduk Yang Menderita Sakit Sebulan Terakhir	58.02%	10.54%	Tidak tersedia data Provinsi dan Nasional	√	(-)	(-)	Relevan dengan Penduduk yang Mempunyai Keluhan Sakit Sebulan Terakhir
V	Bidang Infrastruktur Dasar							
1	Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak	73.26%	92.85%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
2	Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak	77.41%	79.11%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
3	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik	97.07%	99.46%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
VI	Bidang Ketahanan Pangan							
1	Perkembangan Harga Beras	Rp 10.005,-	Rp 9.900,-	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
2	persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Raskin/BPNT	22.81%	14.93%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi, Tidak tersedia data Nasional	(-)	√	Relevan	(-)
3	Perkembangan Harga Bahan Pokok	Stabil	Stabil	Tidak tersedia data Provinsi dan Nasional	√	(-)	(-)	(-)

3.7 Analisis Data Terpadu (Kepmensos 19/HUK/2020)

Analisis data dilakukan pada tingkat kabupaten berdasarkan karakteristik demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kepesertaan program, kepemilikan aset, dan sosial ekonomi lainnya.

3.7.1 Distribusi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Indikator Demografi

Karakteristik demografi yang disajikan meliputi jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berdasarkan rumah tangga, keluarga, anggota rumah tangga, serta jumlah kepala rumah tangga laki-laki dan perempuan.

a. Jumlah dan persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Perbedaan terlihat antar kecamatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Luwu Timur cukup tinggi. Perbedaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dapat dilihat pada Tabel 3.3

Tabel 3.3 Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan

Kecamatan	Rumah Tangga	Keluarga	Anggota Rumah Tangga	Populasi Penduduk (Desember 2020)	persentasePenduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)
Mangkutana	2.488	4.774	9.261	22.437	41.27
Nuha	550	876	2.070	23.755	8.71
Towuti	2.955	3.672	11.733	43.597	26.91
Malili	3.265	3.469	13.774	43.421	31.72
Angkona	3.679	3.276	14.211	25.303	56.16
Wotu	3.268	4.177	13.139	33.732	38.95
Burau	4.380	6.843	17.497	35.100	49.85
Tomoni	2.817	3.471	10.247	26.773	38.27
Tomoni	2.044	2.140	7.418	13.649	54.35
Timur	1.869	3.228	6.567	12.297	53.40
Kalaena	1.890	1.673	8.119	21.975	36.94
Wasuponda					
TOTAL	29.205	37.099	114.006	302.039	X=37.74%

Sumber: 1. DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Timur

Dari **Tabel 3.3** jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terkonsentrasi di Kecamatan Burau. Perbedaan cukup tinggi dapat dilihat pada tiap kecamatan, jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Burau 4.380 rumah tangga, 6.843 keluarga dan 17.497 anggota rumah tangga. Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terendah berada di Kecamatan Nuha 550 rumah tangga, 876 keluarga, dan untuk jumlah anggota rumah tangga terendah berada di Kecamatan Nuha dengan Jumlah 2.070 anggota rumah tangga.

Berdasarkan **Tabel 3.3** menunjukkan persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut kecamatan berdasarkan DTKS Nomor 19/HUK/2020. Terlihat bahwa persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terbesar berada di Kecamatan Angkona, Tomoni Timur dan Kalaena. Dari DTKS terdapat 3 (tiga) kecamatan yang dapat dikategorikan memiliki persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang relatif rendah yaitu Kecamatan Nuha (8,71 %), Towuti (26,91 %) dan Malili (31,72 %). persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang relatif lebih besar terdapat Kecamatan Angkona (56,16 %) dan Tomoni Timur (54,35 %).

b. Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Kelamin

KRT adalah salah seorang dari ART yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Dari **Tabel 3.4** terlihat jumlah KRT laki-laki lebih banyak dibandingkan KRT perempuan yaitu sebanyak 16.001 KRT, sedangkan KRT perempuan sebanyak 3.063 KRT. Jumlah KRT laki-laki tertinggi berada di Kecamatan Burau sebanyak 2.504 KRT (15.65 %) dan yang terendah berada di Nuha sebanyak 316 KRT (1.97 %), sedangkan jumlah KRT perempuan tertinggi berada di Burau sebesar 515 KRT (16.81 %) dan terendah di Kecamatan Nuha sebanyak 84 KRT (2.74 %).

Tabel 3.4 Jumlah dan persentase Kepala Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Kelamin

Kecamatan	KRT Laki-Laki		KRT Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)
Mangkutana	1.385	8.66	232	7.57
Nuha	316	1.97	84	2.74
Towuti	879	5.49	206	6.73
Malili	1.760	11.00	426	13.91
Angkona	2.473	15.45	334	10.91
Wotu	1.808	11.30	419	13.68
Burau	2.504	15.65	515	16.81
Tomoni	1.560	9.75	270	8.82
Tomoni Timur	947	5.92	152	4.96
Kalaena	1.174	7.34	198	6.46
Wasuponda	1.195	7.47	227	7.41
TOTAL	16.001	100	3.063	100

Sumber: DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

3.7.2 Distribusi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Indikator Pendidikan

Kemiskinan dan pendidikan merupakan dua hal yang saling berkaitan, menurut berbagai penelitian bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah begitu juga sebaliknya. Indikator pendidikan yang akan dijelaskan pada bagian ini adalah indikator pendidikan menurut kelompok usia, jenis kelamin dan pendidikan yang ditamatkan.

a. Anak Bersekolah dan Tidak Bersekolah Menurut Kelompok Usia

Tabel 3.5 menunjukkan jumlah dan persentase anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut anak yang bersekolah dan yang tidak bersekolah. Pada tabel dapat dilihat bahwa dari 26.598 jiwa anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan usia antara 7 s.d 18 tahun, terdapat 24.974 jiwa (93.90 %) anak yang bersekolah dan 1.624 jiwa (6.10 %) yang tidak bersekolah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sebagian besar anggota rumah tangga Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial yang berusia 7 s.d 18 tahun merupakan anak yang bersekolah.

Tabel 3.5 Jumlah dan persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Anak yang Bersekolah dan yang Tidak Bersekolah Usia 7 s.d 18 Tahun

Status Pendidikan	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)
Anak yang Bersekolah	24.974	93.90
Anak yang Tidak Bersekolah	1.624	6.10
TOTAL	26.598	100

Sumber: DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

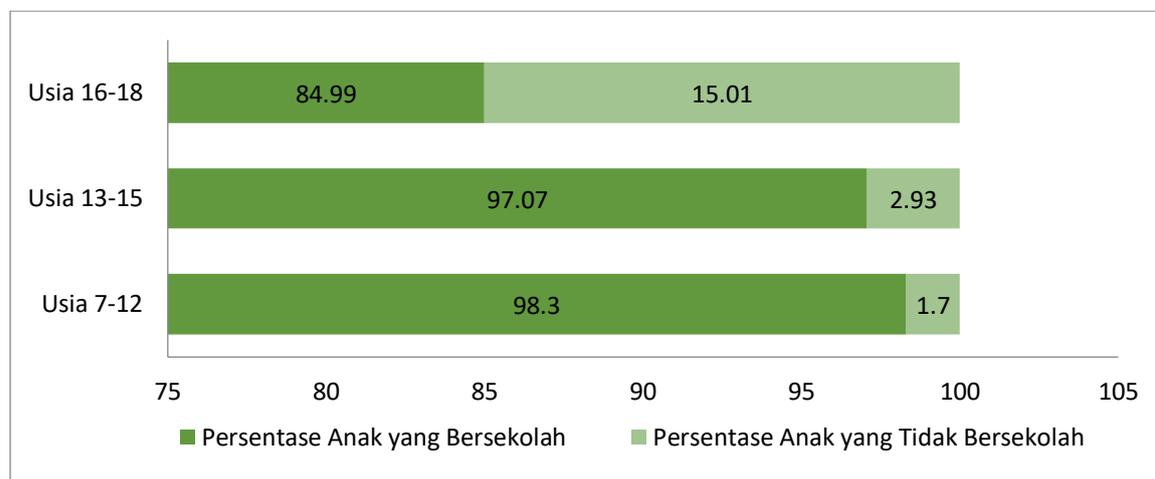
Selanjutnya untuk mengetahui jumlah anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut kelompok usia anak bersekolah dan tidak bersekolah disajikan dalam **Tabel 3.6**. Berdasarkan **Tabel 3.6**, anak yang bersekolah dan yang tidak bersekolah dengan usia 7-12 tahun berjumlah 10.879 jiwa, usia 13-15 tahun berjumlah 7.617 jiwa, dan usia 16-18 tahun berjumlah 8.102 jiwa. Gambaran mengenai anak yang bersekolah dan tidak bersekolah menurut kelompok usia disajikan pada **Tabel 3.6**

Tabel 3.6 Jumlah dan persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Kelompok Usia Anak Berdasarkan Anak yang Bersekolah dan yang Tidak Bersekolah

Status Pendidikan	Usia 7-12		Usia 13-15		Usia 16-18	
	Tahun		Tahun		Tahun	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Anak yang Bersekolah	10.694	98.30	7.394	97.07	6.886	84.99
Anak yang Tidak Bersekolah	185	1.70	223	2.93	1.216	15.01
TOTAL	10.879	100	7.617	100	8.102	100

Sumber: DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

Dari **Gambar 3.108** terlihat bahwa untuk semua kelompok usia persentase anak yang bersekolah lebih besar dari persentase anak yang tidak bersekolah. Anak dengan kelompok usia 7 s.d 12 tahun menempati persentase tertinggi untuk anak yang bersekolah yaitu sebesar 98.30 % dari total jumlah anak usia 7 s.d 12 tahun.



Sumber: DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

Gambar 3.108 Persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Kelompok Usia Anak yang Bersekolah dan yang Tidak Bersekolah

b. Pendidikan yang Ditamatkan Anggota Rumah Tangga

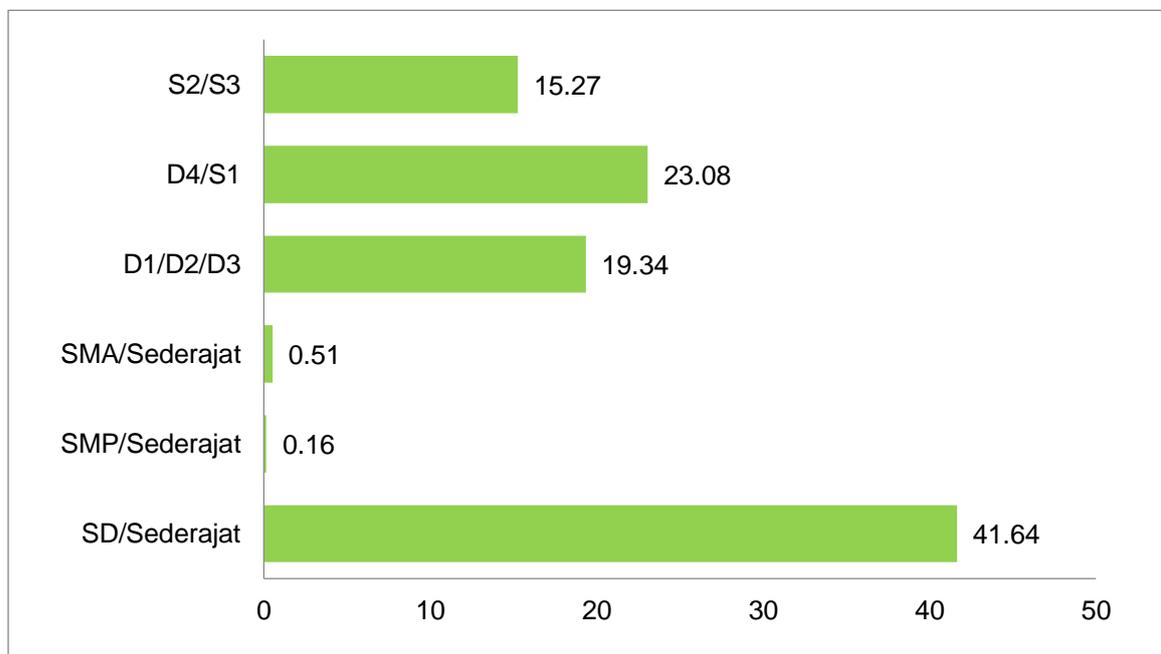
Pendidikan yang ditamatkan anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial disajikan pada **Tabel 1.5**. Terlihat bahwa anggota rumah tangga yang menamatkan pendidikan dari jenjang SD/Sederajat sampai dengan S2/S3 berjumlah 109.537 jiwa. Selanjutnya gambaran tentang pendidikan yang ditamatkan anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dapat dilihat pada **Gambar 1.5**.

Tabel 3.7 Jumlah dan persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Pendidikan yang Ditamatkan	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)
SD/Sederajat	45.614	41.64%
SMP/Sederajat	175	0.16%
SMA/Sederajat	555	0.51%
D1/D2/D3	21.183	19.34%
D4/S1	25.283	23.08%
S2/S3	16.727	15.27%
TOTAL	109.537	100

Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

Dari **Tabel 3.7** dan **Gambar 3.109** dapat dinyatakan bahwa pendidikan yang ditamatkan anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagian besar adalah jenjang pendidikan SD/Sederajat sebesar 45.614 jiwa (41.64 %). Sementara itu, jenjang pendidikan yang paling sedikit ditamatkan adalah SMP/Sederajat sebesar 175 jiwa (0,16 %).



Sumber : DT- PFM dan OTM Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

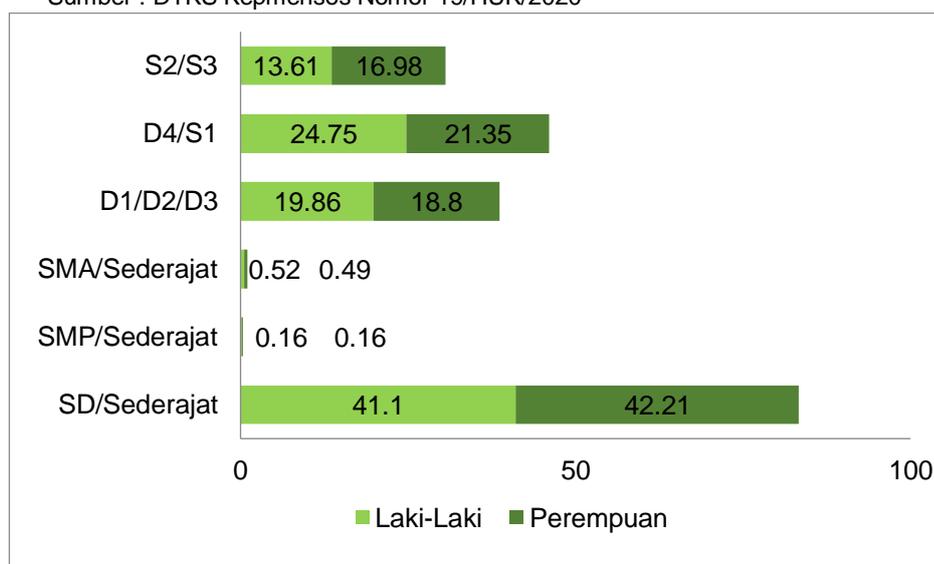
Gambar 3.109 Persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Pengelompokan anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut jenis kelamin dan pendidikan yang ditamatkan disajikan pada **Tabel 3.8** dan **Gambar 3.110**. Dari **Gambar 3.110** terlihat bahwa untuk jenjang pendidikan yaitu SD/Sederajat, SMP/Sederajat, DI/D2/D3, D4/SI, dan S2/S3, anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang berjenis kelamin perempuan memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang laki-laki, kecuali untuk jenjang SMA/Sederajat dimana yang berjenis kelamin laki-laki memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan dengan yang perempuan.

Tabel 3.8 Jumlah dan persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan yang Ditamatkan

Pendidikan yang Ditamatkan	Laki-Laki		Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/Sederajat	22.900	41.10	22714	42.21
SMP/Sederajat	86	0.16	89	0.16
SMA/Sederajat	291	0.52	264	0.49
D1/D2/D3	11.065	19.86	10.118	18.80
D4/S1	13.793	24.75	11.490	21.35
S2/S3	7.586	13.61	9.141	16.98
TOTAL	55.721	100	53.816	100

Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020



Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

Gambar 3.110 persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan yang Ditamatkan

3.7.3 Distribusi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Indikator Kesehatan

a. Fasilitas Tempat Pembuangan Air Besar

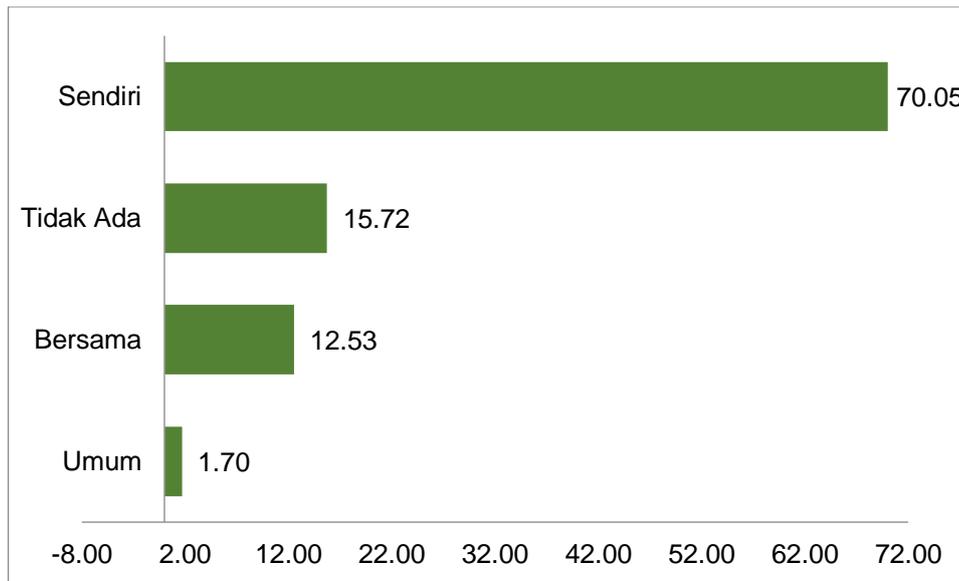
Dalam pembangunan kesehatan masyarakat, salah satu indikator kesehatan adalah akses sanitasi. Termasuk dalam akses sanitasi adalah ketersediaan fasilitas tempat pembuangan air besar. Fasilitas tempat pembuangan air besar yang dimaksud adalah ketersediaan jamban atau kakus yang digunakan oleh rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Informasi mengenai jumlah dan persentase rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut fasilitas tempat pembuangan air besar dapat dilihat pada **Tabel 3.9**, terlihat bahwa dari 29.205 rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, terdapat 20.457 rumah tangga (70.05 %) yang menggunakan jamban sendiri, 3.660 rumah tangga (12.53 %) menggunakan jamban bersama, 496 (1.70 %) rumah tangga menggunakan jamban umum, dan 4.592 rumah tangga (15.72 %) tidak memiliki fasilitas tempat pembuangan air besar. Dari angka-angka tersebut terlihat bahwa lebih dari sebagian rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah memiliki sendiri fasilitas tempat pembuangan air besar, sebaliknya yang tidak memiliki fasilitas tempat pembuangan air besar jumlahnya juga cukup signifikan seperti terlihat pada **Gambar 3.111**

Tabel 3.9 Jumlah dan persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Fasilitas Tempat Pembuangan Air Besar

Fasilitas Tempat Pembuangan Air Besar	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)
Sendiri	20.457	70.05
Bersama	3.660	12.53
Umum	496	1.70
Tidak Ada	4.592	15.72
TOTAL	29.205	100

Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020



Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

Gambar 3.111 persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Fasilitas Tempat Pembuangan Air Besar

b. Tempat Pembuangan Akhir Tinja

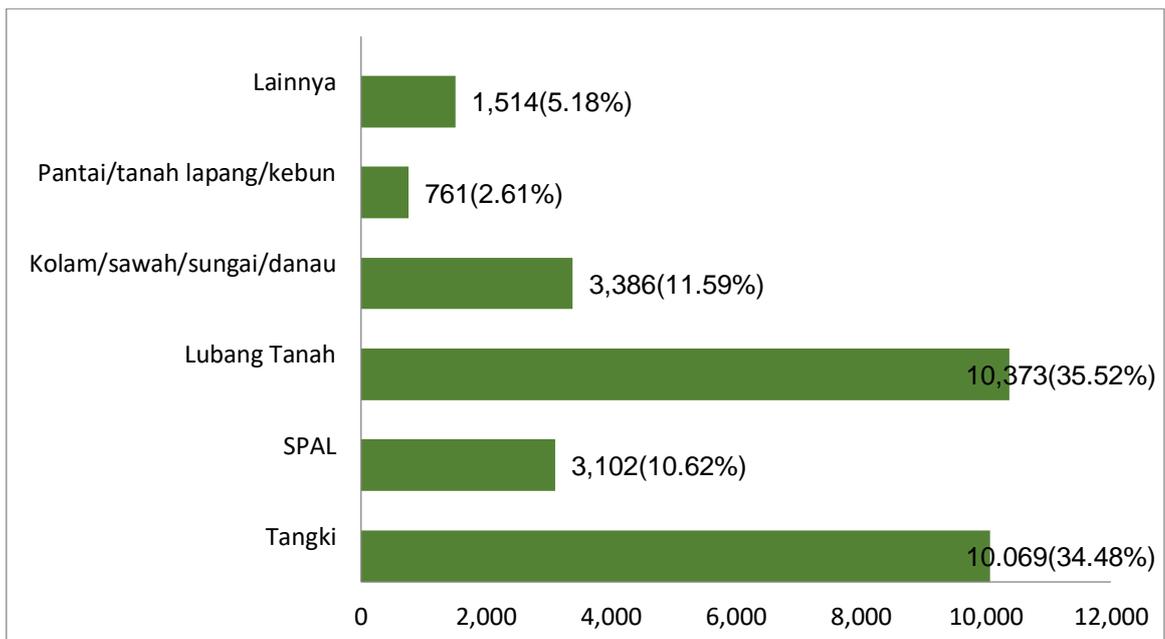
Tempat pembuangan akhir tinja yang memenuhi standar kesehatan adalah jika kedap air sehingga menghindari pencemaran lingkungan, selain itu letaknya paling sedikit berjarak meter dari sumber air minum (sumur). Ada beberapa macam tempat pembuangan akhir tinja diantaranya tangki, Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL), lubang tanah, kolam/sawah/sungai/danau, pantai/tanah lapang/kebun dan lainnya. Dalam DTKS, tempat pembuangan akhir tinja yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah tangki, lubang tanah, kolam/sawah/sungai/danau, dan sistem pembuangan air limbah (SPAL) dengan jumlah dan persentase secara berurutan adalah 10.069 rumah tangga (34.48 %), 10.373 rumah tangga (35.52 %), 3.386 rumah tangga (35.52 %) dan 3.102 rumah tangga (10.62 %).

Sebaliknya tempat pembuangan akhir tinja yang paling sedikit digunakan oleh rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah pantai/tanah lapang/kebun sebesar 761 rumah tangga (2.61 %) dan lainnya sebesar 1.514 rumah tangga (5.18 %). Informasi dan gambaran lengkap mengenai jumlah dan persentase rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut tempat akhir pembuangan tinja disajikan pada **Tabel 3.10 dan Gambar 3.112**

Tabel 3.10 Jumlah dan persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Fasilitas Tempat Pembuangan Akhir Tinja

Fasilitas Tempat Pembuangan Akhir Tinja	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)
Tangki	10.069	34.48
SPAL	3.102	10.62
Lubang Tanah	10.373	35.52
Kolam/sawah/sungai/danau	3.386	11.59
Pantai/tanah lapang/kebun	761	2.61
Lainnya	1.514	5.18
TOTAL	29.205	100

Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020



Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

Gambar 3.112 Jumlah dan persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Fasilitas Tempat Pembuangan Akhir Tinja

c. Penyandang Disabilitas

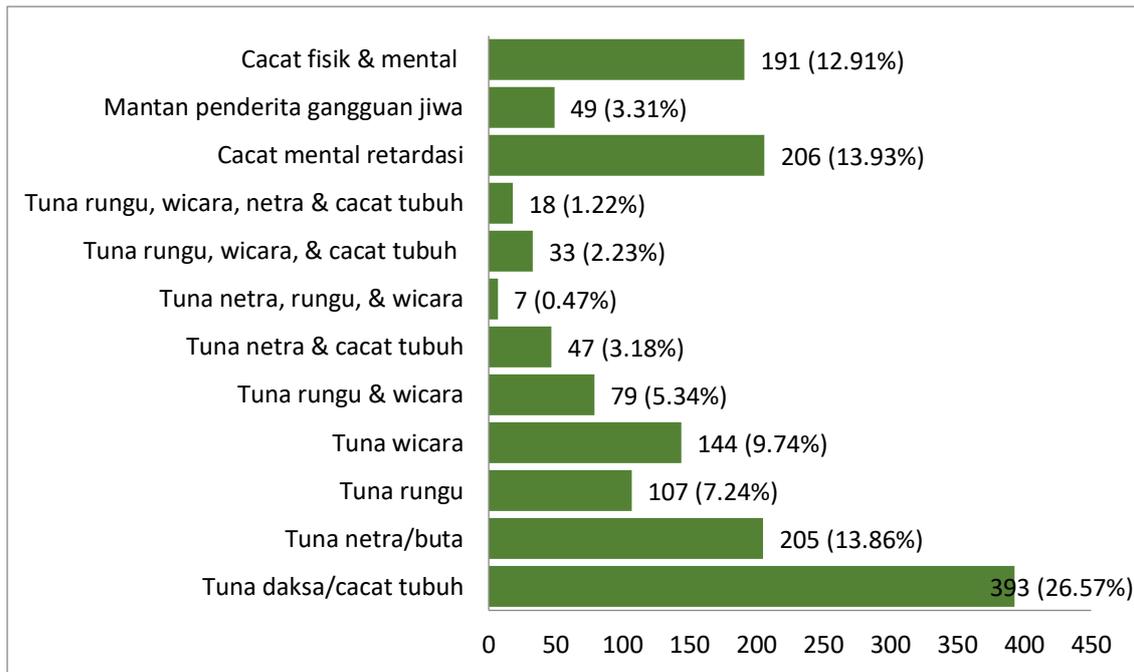
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Informasi mengenai penyandang disabilitas dalam DTKS disajikan dalam **Tabel 3.11** Berdasarkan **Tabel 3.11** di bawah ini, anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang memiliki disabilitas hanya sebesar 1.479 jiwa (1,29 %) selebihnya merupakan anggota rumah tangga yang bukan penyandang disabilitas sejumlah 113.007 jiwa (98,71 %).

Tabel 3.11 Jumlah dan persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Disabilitas

Status Disabilitas	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)
Bukan Penyandang Disabilitas (Tidak cacat)	113.007	98,71
Penyandang Disabilitas	1.479	1,29
TOTAL	114.486	100

Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

Selanjutnya informasi tentang jenis disabilitas yang disandang oleh anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berdasarkan jumlah anggota rumah tangga fakir miskin dan orang tidak mampu yang menyandang disabilitas dapat dilihat pada **Gambar 3.113**.



Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

Gambar 3.113 Jumlah dan persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Disabilitas

Berdasarkan **Gambar 3.113** diketahui bahwa jenis disabilitas yang paling banyak disandang oleh anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah tuna daksa/cacat tubuh yaitu sebesar 393 jiwa (26,57 %) sedangkan yang paling sedikit adalah tuna netra rungu wicara sebesar 7 jiwa (0,47 %).

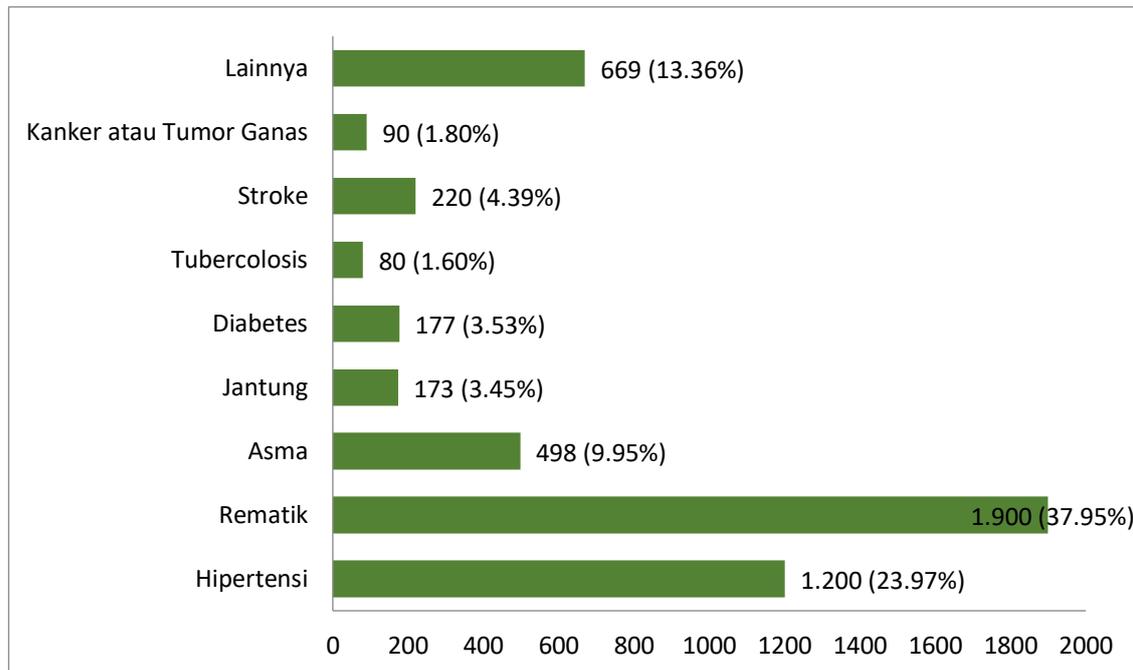
d. Penyakit Kronis/Menahun

Penyakit kronis/menahun adalah gangguan atau penyakit yang berlangsung lama (berbulan-bulan atau bertahun-tahun), tidak terjadi secara tiba-tiba/spontan, dan penyembuhannya pun memakan waktu yang lama. Informasi mengenai penyakit kronis/menahun berdasarkan DTKS disajikan dalam **Tabel 3.12** Ada beberapa jenis penyakit kronis/menahun yang dialami oleh anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diantaranya hipertensi, rematik, asma, jantung, diabetes, TBC, stroke, kanker, dan lainnya (seperti gagal ginjal dan sejenisnya). Pada **Tabel 3.12** terlihat bahwa jumlah anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang mengidap penyakit kronis/menahun adalah 109.479 jiwa (95.63 %) sedangkan yang tidak mengidap penyakit kronis/menahun sebanyak 5.007 jiwa (4.37 %). Jumlah anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang mengidap penyakit kronis/menahun dan yang tidak mengidap penyakit kronis/menahun sebesar 114.486 jiwa.

Tabel 3.12 Jumlah dan persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Tidak Mengidap/Mengidap Penyakit Kronis/Menahun

Status Penyakit Kronis	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)
Tidak Ada	109.479	95,63
Mengidap Penyakit Kronis	5.007	4.37
TOTAL	114.486	100

Rincian tentang jenis penyakit kronis yang dimiliki oleh anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial disajikan pada **Gambar 3.114**. Terlihat bahwa penyakit kronis/menahun yang paling banyak dialami oleh anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah rematik sebesar 1.900 jiwa (37.95 %) sebaliknya jenis penyakit kronis/menahun yang paling sedikit adalah Tuberculosis (TBC) sebesar 80 jiwa (1,60 %).



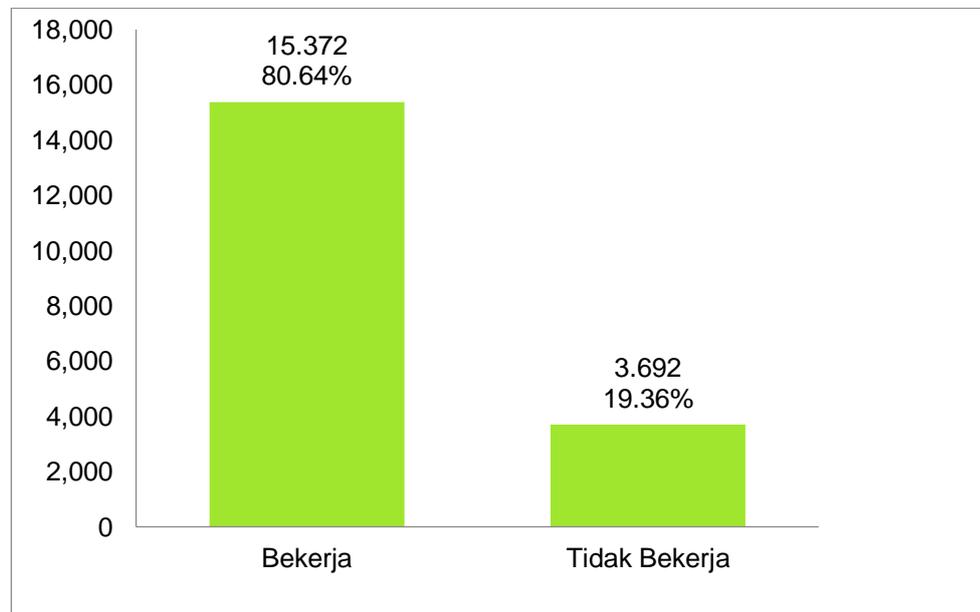
Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

Gambar 3.114 Jumlah dan persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Penyakit Kronis/Menahun

3.7.4 Distribusi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Indikator Ketenagakerjaan

a. Kepala Rumah Tangga yang Bekerja dan Tidak Bekerja

KRT mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga, pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan bekerja. Bekerja merupakan suatu kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit satu jam dalam seminggu terakhir. Dalam DTKS terdapat KRT yang bekerja dan tidak bekerja. Informasi mengenai jumlah dan persentase KRT Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang bekerja dan tidak bekerja disajikan pada **Gambar 3.115**.



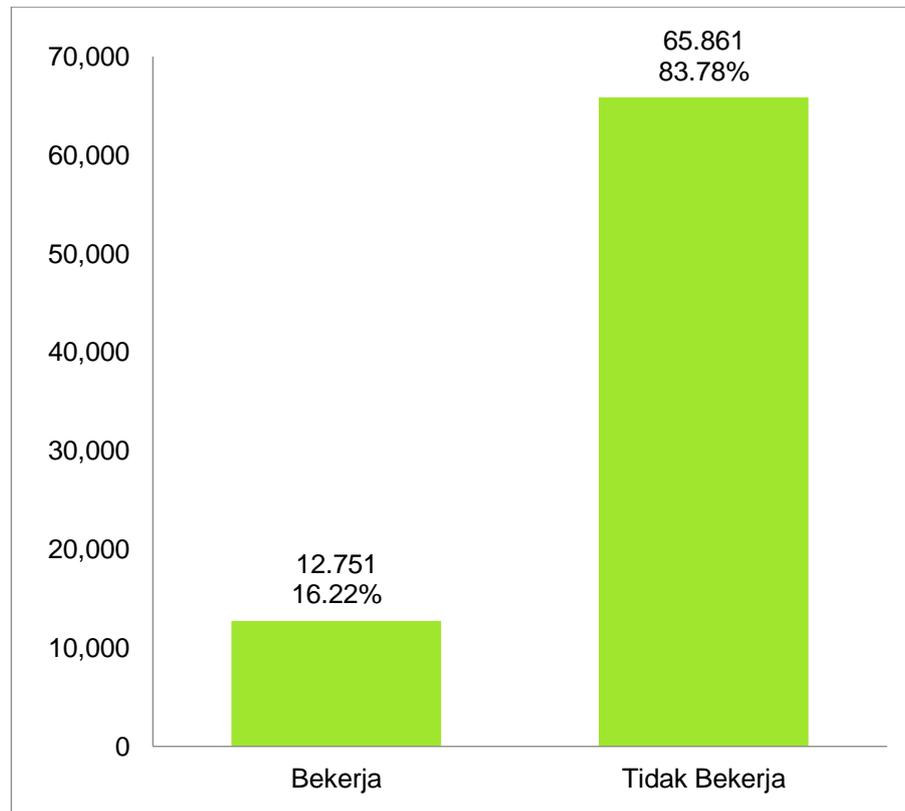
Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

Gambar 3.115 Jumlah dan persentase KRT Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Bekerja dan Tidak Bekerja

Dari **Gambar 3.115** terlihat bahwa lebih dari sebagian KRT Data Terpadu Kesejahteraan Sosial memiliki status bekerja yaitu sebesar 15.372 jiwa (80.64 %) sedangkan KRT yang tidak bekerja berjumlah 3.692 jiwa (19.36 %).

b. Anggota Rumah Tangga yang Bekerja dan Tidak Bekerja

Status bekerja dan tidak bekerja dalam DTKS tidak hanya pada KRT tapi juga ART yang berusia di atas lima tahun. ART Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang bekerja dan tidak bekerja dapat dilihat pada **Gambar 3.116**.



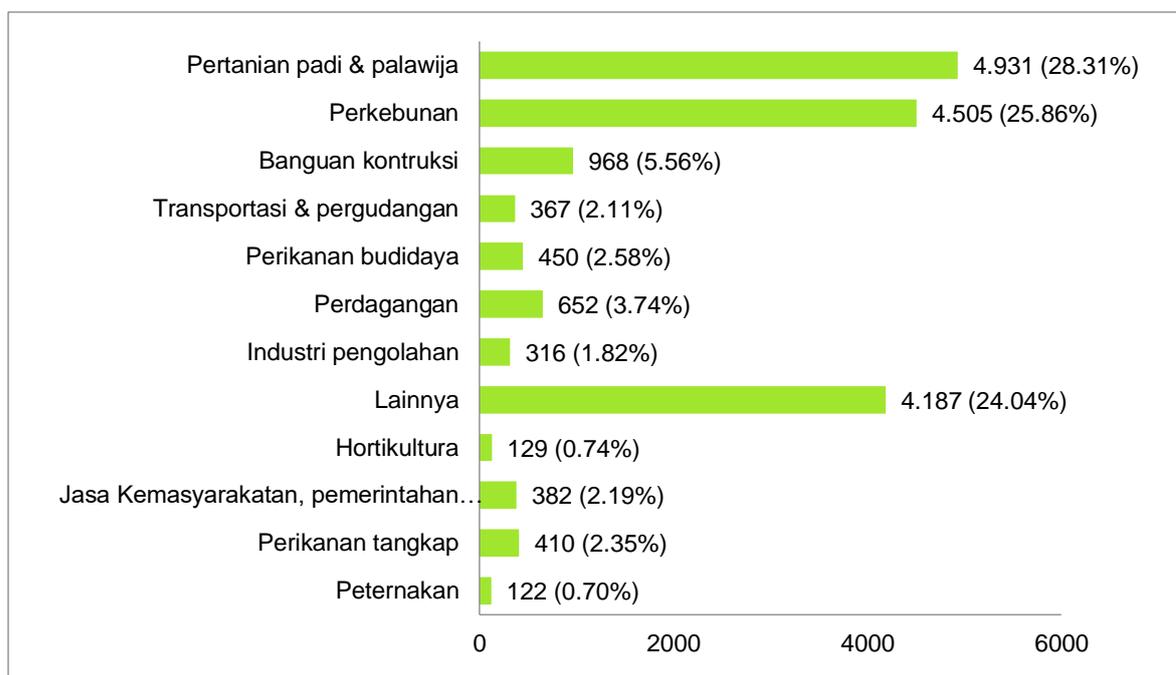
Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

Gambar 3.116 Jumlah dan persentase ART Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Bekerja dan Tidak Bekerja

ART Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang bekerja berdasarkan **Gambar 1.9** jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang tidak bekerja, yang bekerja berjumlah 12.751 jiwa (16.22 %) sedangkan yang tidak bekerja berjumlah 65.861 jiwa (83.78 %).

c. Lapangan Usaha dari Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga

KRT Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang bekerja memiliki beragam bentuk lapangan usaha dari pekerjaannya yang terdiri dari pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan tangkap, peternakan, industri pengolahan, bangunan/konstruksi, perdagangan, transportasi dan pergudangan, jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan perorangan, dan lainnya. Informasi mengenai jumlah dan persentase KRT Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berdasarkan lapangan usaha dari pekerjaan utama KRT disajikan pada **Gambar 3.117**



Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

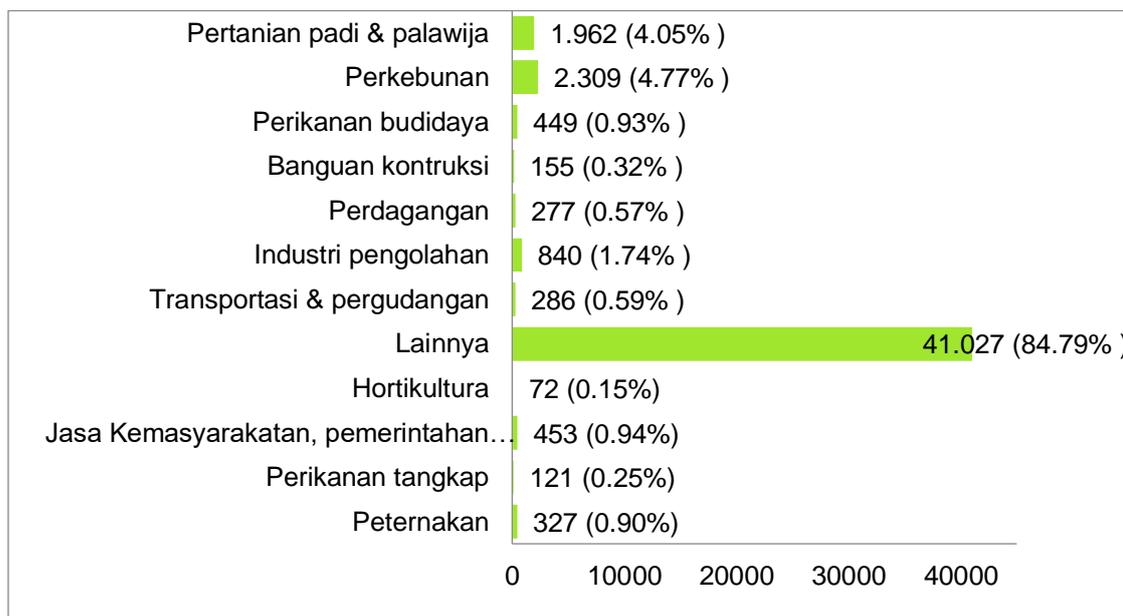
Gambar 3.117 Jumlah dan persentase KRT Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut lapangan usaha dari pekerjaan utama KRT

Dari **Gambar 3.117** terlihat bahwa KRT Data Terpadu Kesejahteraan Sosial lebih banyak bekerja di sektor pertanian tanaman padi dan palawija sebesar 4.931 jiwa (28.31%) dan perkebunan sebesar 4.505 jiwa (25.86%).

d. Lapangan Usaha dari Pekerjaan Utama Anggota Rumah Tangga

ART Data Terpadu Kesejahteraan Sosial mempunyai sektor lapangan usaha yang tidak jauh berbeda dengan dengan sektor lapangan usaha pada KRT Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial. **Gambar 3.118** memberikan gambaran tentang lapangan usaha dari pekerjaan utama ART.



Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

Gambar 3.118 Jumlah dan persentase ART Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Lapangan Usaha

ART Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berdasarkan **Gambar 3.118** kebanyakan bekerja di sektor lainnya (84.79 %) dan perkebunan (4.77 %).

3.7.5 Distribusi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Indikator Perumahan

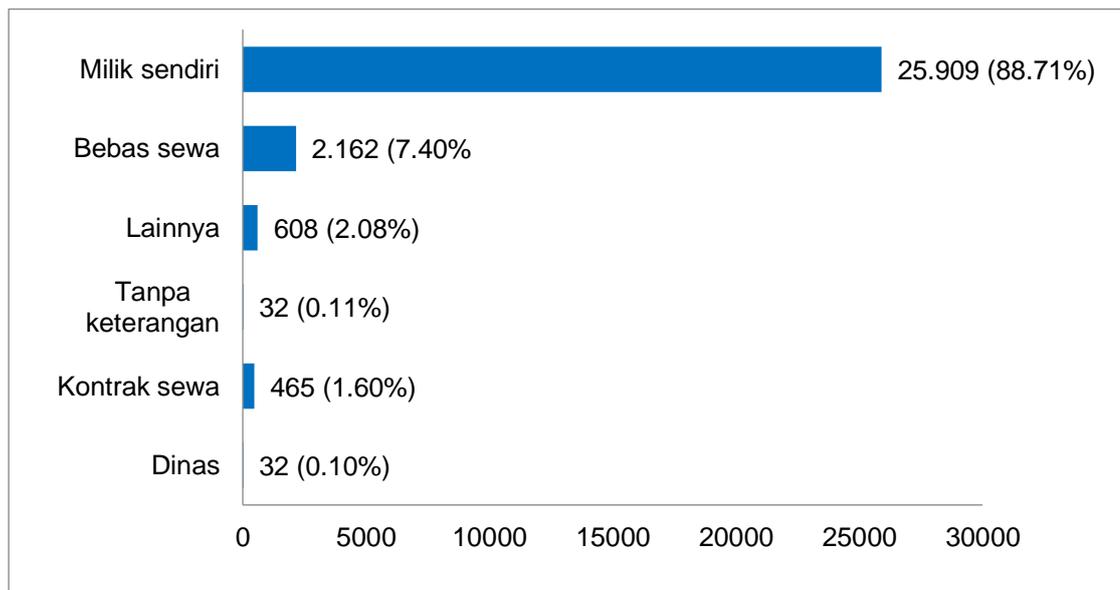
a. Status Tempat Tinggal

Rumah atau tempat tinggal merupakan tempat istirahat dan berlindung. Dari DTKS terlihat bahwa rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang memiliki rumah sendiri menempati kelompok terbesar hingga 88.71 %. Uniknya lagi ternyata ada rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang menempati rumah dinas sebesar 0,10 %. Rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang harus membayar sewa/kontrak rumah %tasenya 1.60 %. Untuk rumah tangga yang kepemilikan rumahnya adalah milik orang tua/sanak/saudara sekitar 2.08 %, sedangkan yang lainnya yang tidak termasuk dalam kategori diatas sejumlah 0.11 %. Jumlah dan persentaserumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati dapat dilihat pada **Tabel 3.13** dan **Gambar 3.119**

Tabel 3.13 Jumlah dan persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal

Status Penguasaan Tempat Tinggal	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)
Milik sendiri	25.909	88.71
Kontrak sewa	465	1.60
Bebas sewa	2.162	7.40
Dinas	29	0.10
Lainnya	608	2.08
Tanpa Keterangan	32	0.11
TOTAL	29.205	100

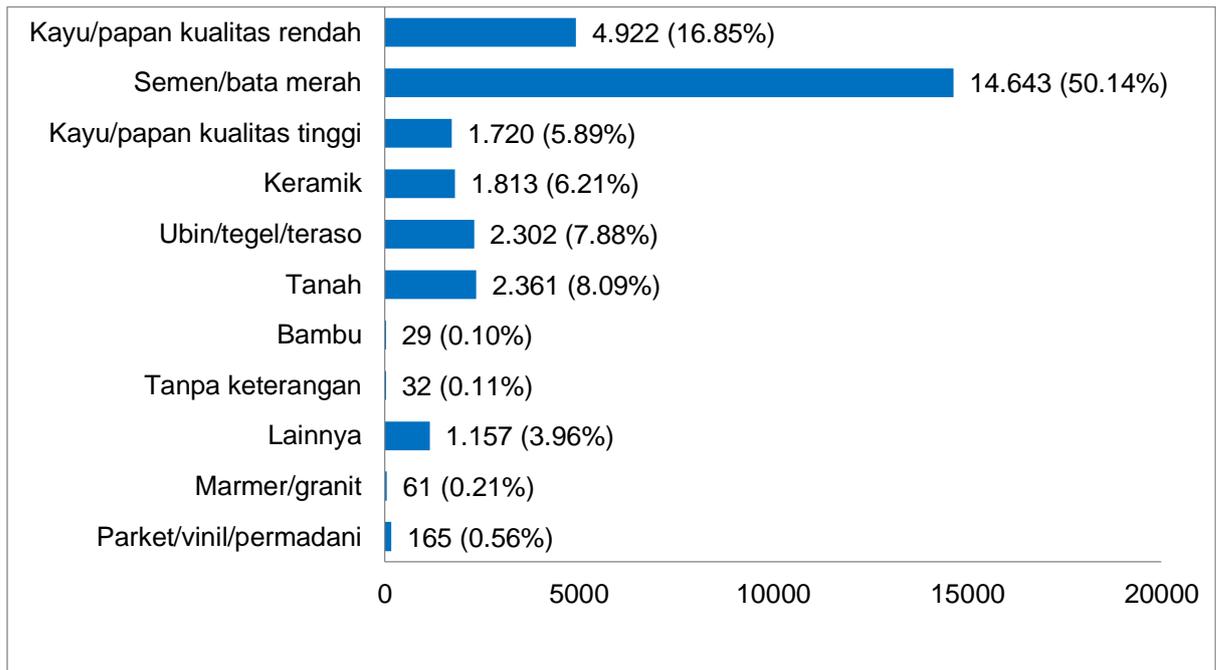
Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020



Gambar 3.119 Jumlah dan persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal

b. Jenis Lantai

Rumah yang baik harus memenuhi syarat kelayakan sebagai tempat tinggal. Beberapa variabel yang sering digunakan untuk menilai kelayakan sebuah tempat tinggal adalah lantai, dinding dan atap. Semakin bagus kualitas dari lantai, dinding dan atap, mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang tinggi. Dari DTKS jenis lantai rumah yang ditempati rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dikelompokkan menjadi 10 jenis, seperti terlihat pada **Gambar 3.120**



Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

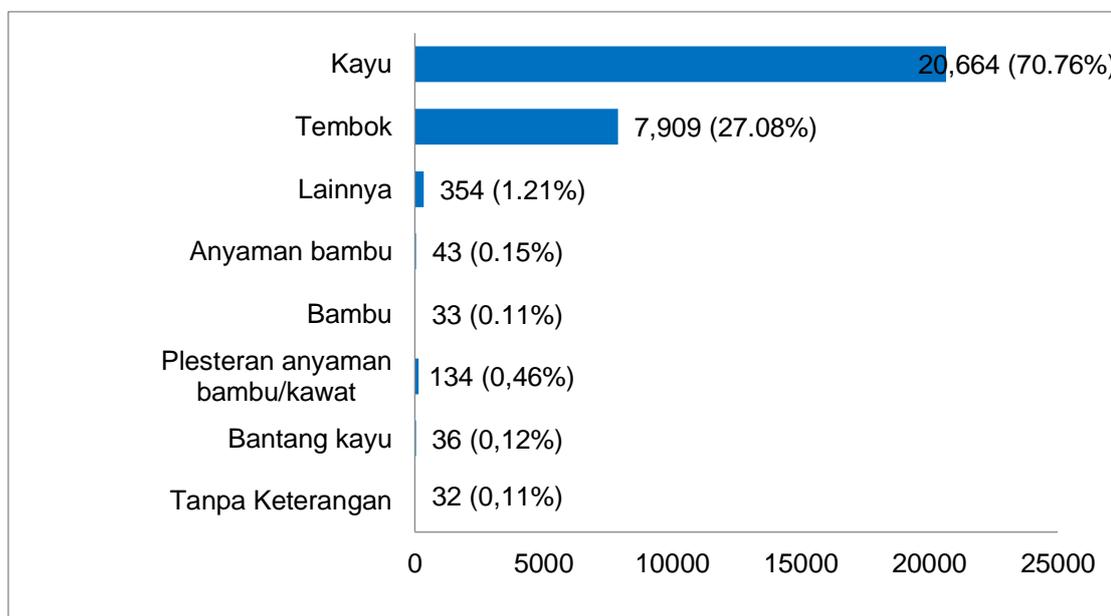
Gambar 3.120 Jumlah dan persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Lantai

Persentase rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan rumah berjenis lantai semen/bata merah menempati urutan pertama sebesar 14.643 rumah tangga (50,14 %), diikuti oleh lantai kayu/papan kualitas rendah sebesar 4.922 rumah tangga (16.85 %), dan jenis lantai tanahi sebesar 2.361 rumah tangga (8.09 %).

c. Jenis Dinding

Informasi karakteristik berikutnya dari tempat tinggal adalah jenis dinding. Salah satu indikasi kualitas tempat tinggal adalah kualitas dinding. Secara logika, semakin tinggi tingkat kesejahteraan rumah tangga maka kualitas tempat tinggalnya

pun akan meningkat. Rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial memiliki rumah dengan jenis dinding beragam yaitu tembok, kayu, bambu dan beberapa jenis lainnya. **Gambar 3.121** memberikan gambaran tentang jumlah dan persentase rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut jenis dinding tempat tinggal.



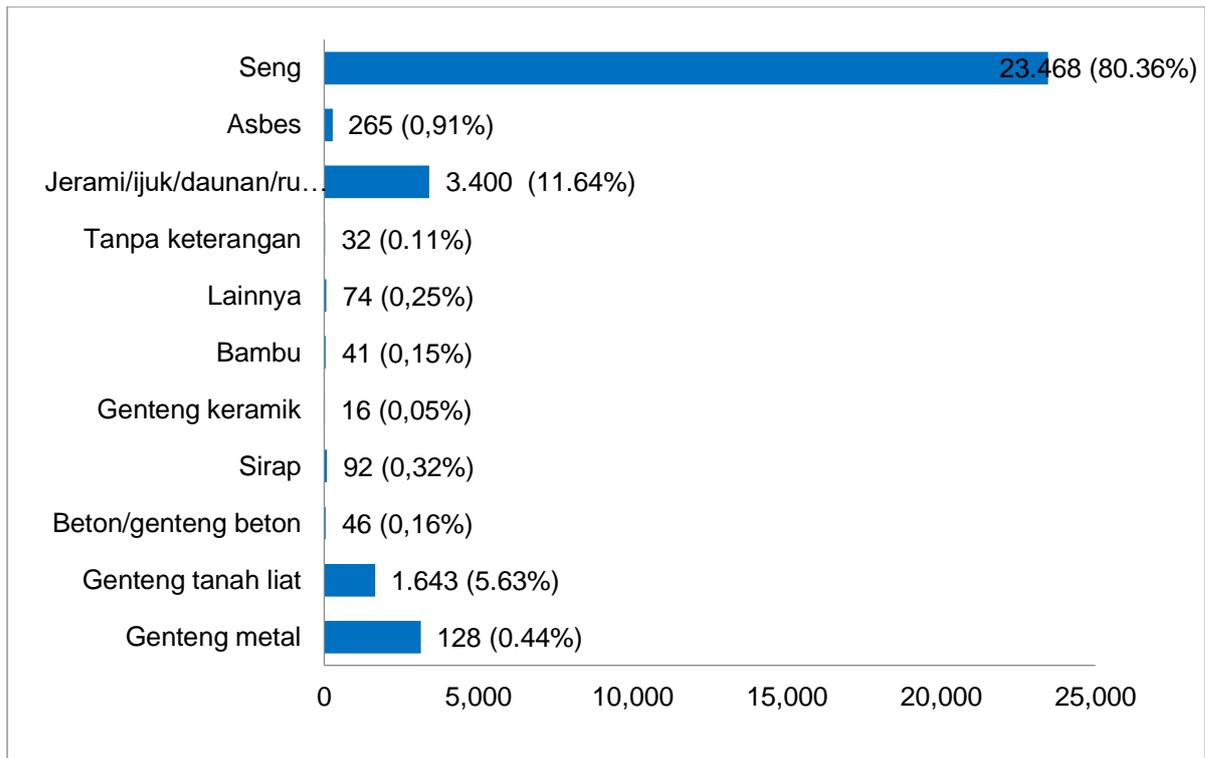
Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

Gambar 3.121 Jumlah dan persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Dinding Tempat Tinggal

Dari **Gambar 3.121** dapat dilihat bahwa jenis dinding rumah untuk rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagian besar berjenis kayu berjumlah 20.664 rumah tangga (70,76 %), diikuti dinding tembok berjumlah 7.909 rumah tangga (27.08 %), dan dinding jenis lainnya berjumlah 354 rumah tangga (1.21 %).

d. Jenis Atap

Pada umumnya jenis atap rumah yang dipergunakan adalah genteng. Tetapi ada wilayah tertentu yang sangat sulit untuk mendapatkan genteng dan bila ada harganya pun sangat mahal sehingga mereka memilih seng atau asbes sebagai pengganti genteng. Rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam DTKS menggunakan beberapa jenis atap untuk tempat tinggal mereka. Informasi mengenai jenis atap tersebut dilihat pada **Gambar 3.122**



Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

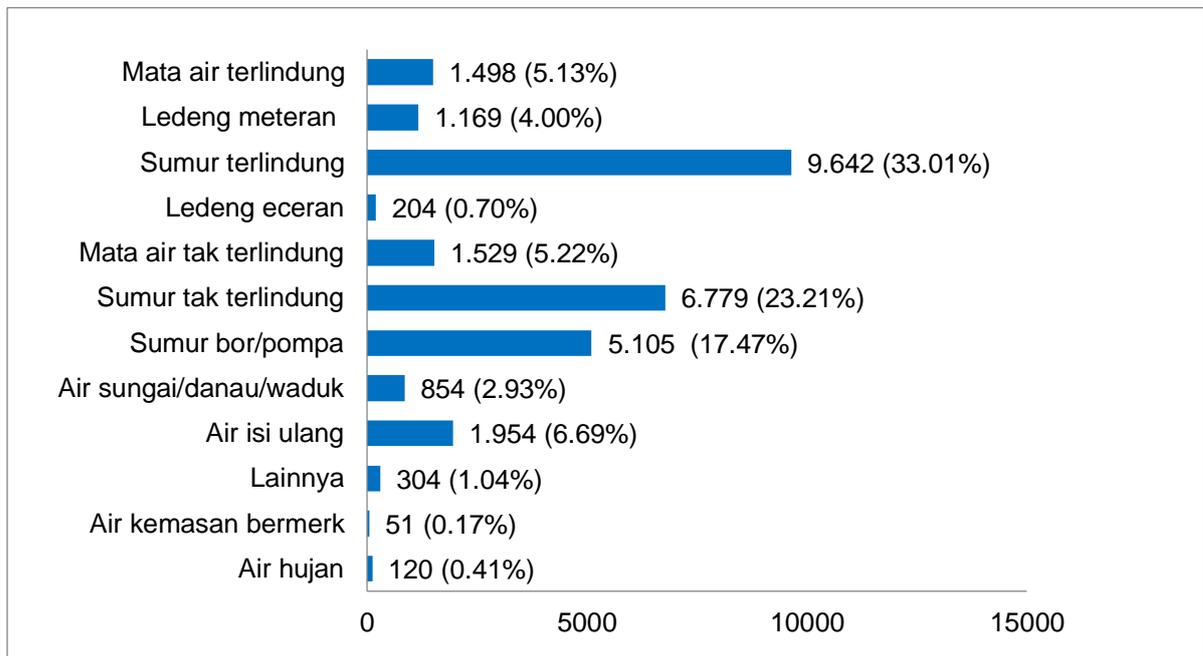
Gambar 3.122 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Atap Tempat Tinggal

Berdasarkan **Gambar 3.122** terlihat bahwa mayoritas rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tinggal dirumah dengan atap jenis seng dengan persentase 80.36 % sedangkan untuk jenis atap yang paling sedikit digunakan adalah atap berjenis genteng keramik sebesar 0,05 %.

e. Sumber Air Minum

Sumber air minum yang digunakan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dibidang kesehatan sehingga air yang dipergunakan untuk minum haruslah air yang bersih. Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Air bersih sangat dipengaruhi oleh sumber air minum tersebut. Semakin jauh dari sumber pencemar maka air tersebut akan semakin bersih dan sehat untuk dikonsumsi. Air yang bersih dan layak untuk diminum adalah air yang bersumber seperti dari air kemasan, air isi ulang, ledeng, sumur bor, sumur air terlindung, dan mata air terlindung. Dari berbagai

sumber air tersebut, yang banyak digunakan oleh rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah mata air terlindung (33.01 %) seperti terlihat pada **Gambar 3.123**



Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

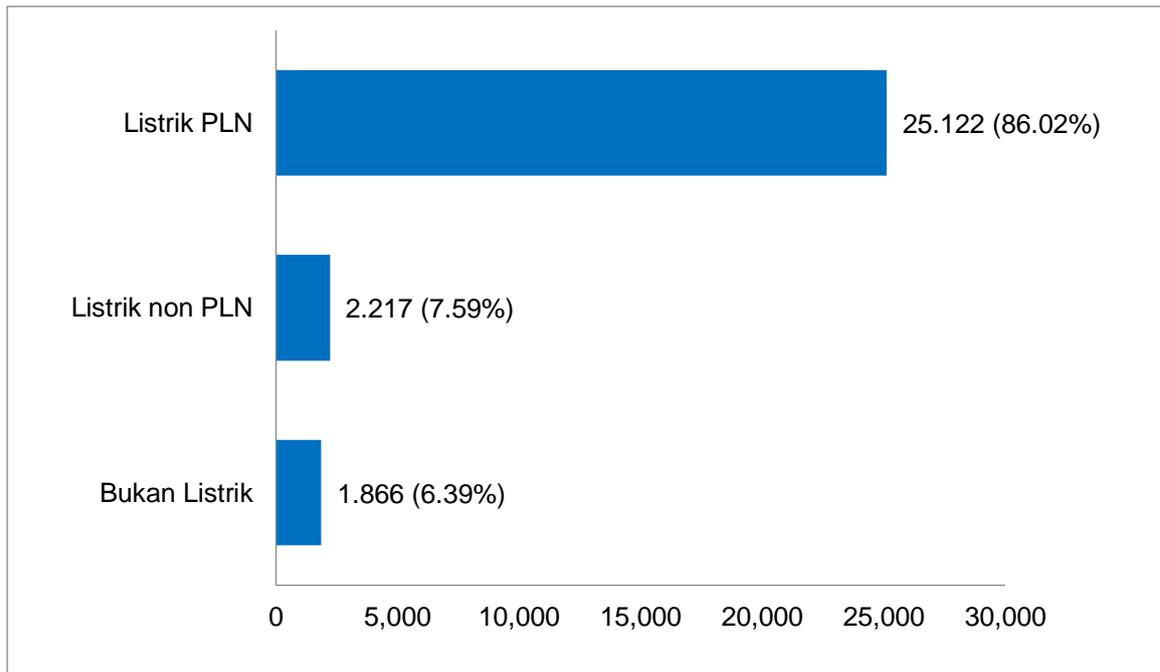
Gambar 3.123 Jumlah dan persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Sumber Air Minum

Selain mata air terlindung, sumber air minum yang banyak digunakan berikutnya adalah sumur tak terlindung (23.21 %), dan sumur bor/pompa (17.47 %), sedangkan rumah tangga pengguna air kemasan bermerk menempati urutan terendah (0,17 %).

f. Sumber Penerangan Utama

Sumber penerangan sangat diperlukan oleh setiap rumah tangga. Sumber penerangan utama bisa berasal dari listrik, petromak, atau pelita. Listrik memegang peranan yang vital dalam kehidupan. Dapat dikatakan bahwa listrik telah menjadi sumber penerangan dan sumber energi dalam setiap kegiatan di rumah tangga seperti untuk peralatan memasak, setrika, mencuci atau yang lainnya.

Menurut DTKS lebih dari 86 % rumah tangga menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama baik listrik PLN maupun non PLN. **Gambar 3.124** menunjukkan jumlah dan persentase sumber penerangan rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.



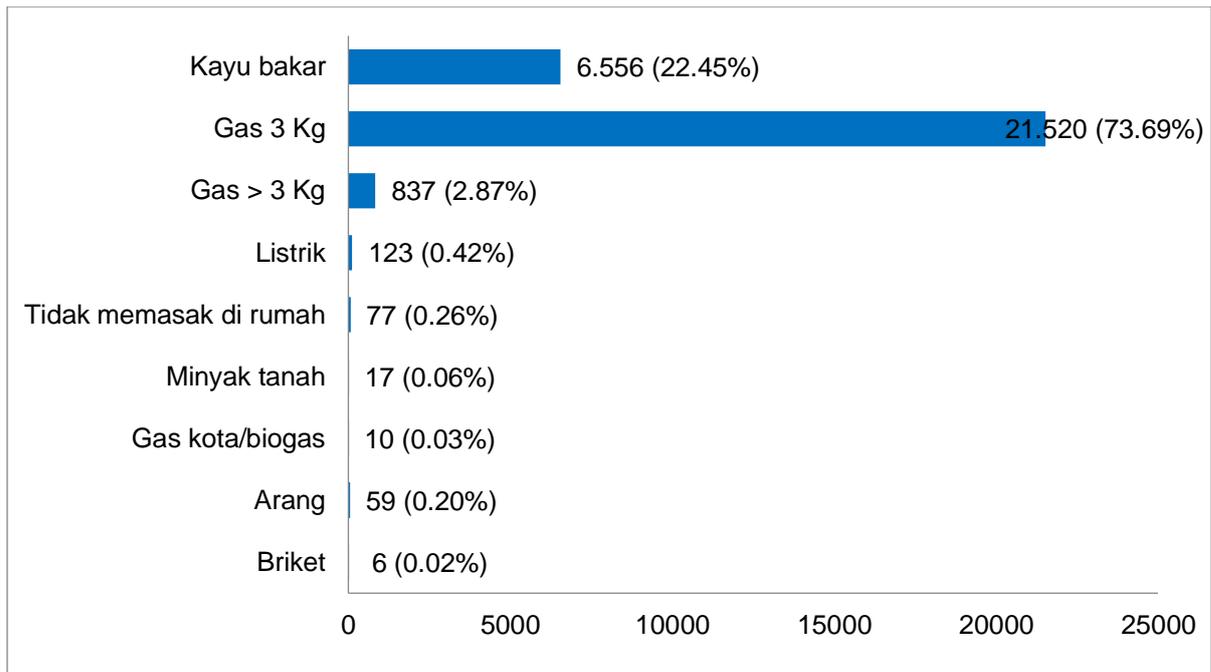
Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

Gambar 3.124 Jumlah dan persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Sumber Penerangan Utama

Dari **Gambar 3.124** terlihat rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang menggunakan listrik PLN sebesar 25.122 rumah tangga (86.02 %), listrik non PLN sebesar 2.217 rumah tangga (7.59 %) dan yang sumber penerangannya bukan menggunakan listrik sejumlah 1.866 rumah tangga (6.39 %).

g. Bahan Bakar Utama Untuk Memasak

Dalam hal penggunaan bahan bakar untuk memasak pada umumnya rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menggunakan kayu bakar dan gas 3 kg untuk memasak. **Gambar 3.125** memperlihatkan jumlah dan persentase rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut bahan bakar/energi utama untuk memasak.



Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

Gambar 3.125 Jumlah dan persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Bahan Bakar/Energi Utama Untuk Memasak

Rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial paling banyak menggunakan kayu bakar dan gas 3 kg sebagai bahan bakar/energi utama untuk memasak dengan jumlah dan persentase sebesar 21.520 rumah tangga (73.69 %) menggunakan kayu bakar dan 6.556 rumah tangga (22.45 %) seperti terlihat pada **Gambar 3.125**. Hal ini sejalan dengan program dari pemerintah tentang pemberian tabung gas elpiji 3 kg yang dimulai pada tahun 2007. Pada tanggal 28 November 2007 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No.104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung Tiga Kilogram. Peraturan tersebut sebagai bagian dari kebijakan konversi minyak tanah ke gas/LPG yang telah dimulai pada bulan Mei tahun 2007. Program konversi minyak tanah ke gas ini didasarkan pada penghematan subsidi sektor minyak tanah untuk rumah tangga yang diprediksikan akan membengkak sebagai akibat dari lonjakan harga minyak dunia yang terus melambung. Sementara itu bahan bakar/energi utama yang paling sedikit digunakan adalah briket sebesar 6 rumah tangga (0,02 %).

3.7.6 Distribusi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Kepemilikan Aset

Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat dilihat dari aset atau barang yang dimiliki. Aset dapat berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak. Semakin besar aset yang dimiliki maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Aset tidak bergerak yang dimiliki oleh rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terdiri dari lahan dan rumah lain. Lahan adalah semua lahan yang dimiliki oleh rumah tangga baik lahan pertanian maupun lahan non pertanian. Termasuk juga semua lahan baik yang ada bangunan (untuk usaha atau bukan) maupun tidak. Rumah lain adalah kepemilikan rumah selain rumah yang ditempati sekarang tanpa mempertimbangkan status kepemilikan lahan rumah tersebut. Status kepemilikan aset tidak bergerak rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial disajikan pada **Tabel 3.14**.

Tabel 3.14 Jumlah dan persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Kepemilikan Aset Tidak Bergerak

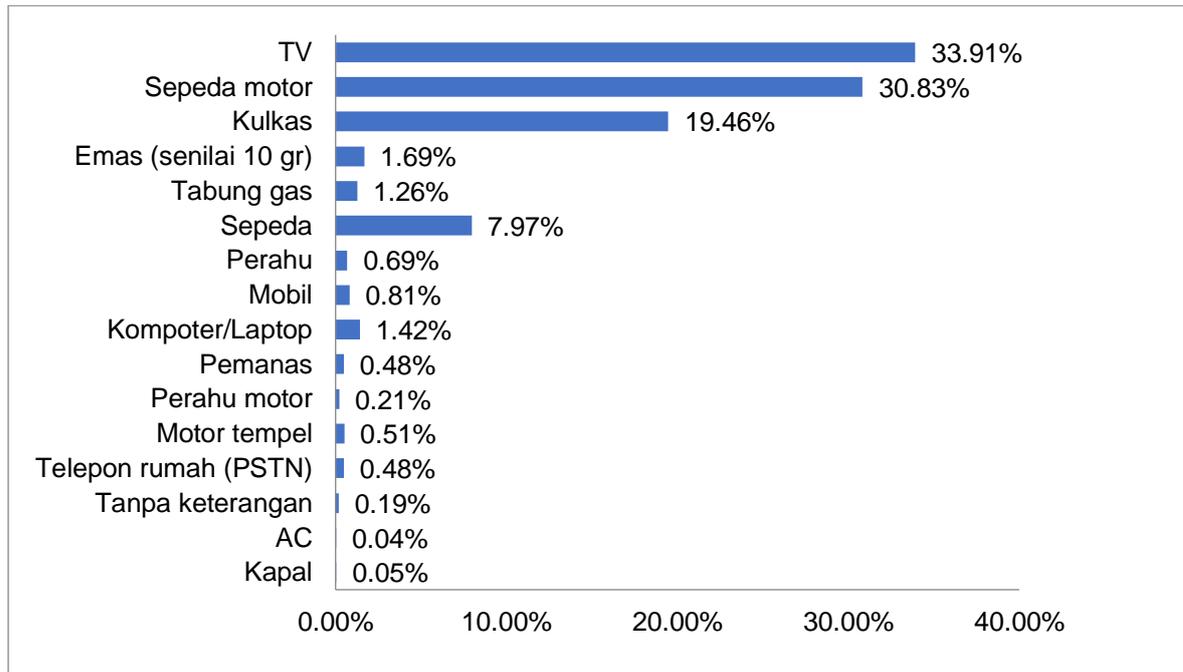
Status Kepemilikan Aset	Jenis Aset Tidak Bergerak			
	Lahan		Rumah Lain	
	Jumlah	%tase	Jumlah	%tase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Punya	20.743	71.03	18,524	63.43
Tidak Punya	8.430	28.86	4,768	16.33
Tanpa Keterangan	32	0,11	32	0,11
Jumlah	29.205	100	29.205	100

Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

Mayoritas dari rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial memiliki aset tidak bergerak berupa lahan yaitu sebesar 20.743 rumah tangga (71.03 %). Sementara itu kepemilikan aset tidak bergerak berupa rumah lain hanya sebesar 18.524 rumah tangga (0,50 %).

Selanjutnya aset bergerak yang dimiliki rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial meliputi TV, kulkas, tabung gas, emas, telepon rumah (PSTN), pemanas, AC, laptop/komputer, sepeda motor, mobil, perahu, motor tempel, perahu motor, dan kapal. Informasi mengenai kepemilikan aset bergerak rumah tangga Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial dapat dilihat pada **Gambar 3.126**



Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

Gambar 3.126 persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Kepemilikan Aset Bergerak

Berdasarkan **Gambar 3.126** dapat dilihat bahwa aset bergerak yang paling banyak dimiliki oleh rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah TV sebesar 33,91 % dari total rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, kemudian diikuti aset berupa sepeda motor sebesar 30.83 % dan kulkas 19.46 % . Sedangkan aset bergerak berupa kapal menjadi aset yang paling sedikit dimiliki oleh rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yaitu sebesar 0,05 %.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM

Bab ini akan memberikan informasi lebih lanjut tentang: Prioritas Intervensi (teori perubahan) atau theory of change (ToC); Analisis keterkaitan; dan Analisis APBD untuk penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan identifikasi data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diketahui permasalahan di Kabupaten Luwu Timur terdapat dibidang apa saja yang tercermin dari hasil analisis indikator-indikator perbidangnya. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut akan dilakukan intervensi dan disajikan ke dalam bentuk theory of change (ToC) yang terbagi menjadi beberapa bidang yaitu konsumsi pengeluaran, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan ketahanan pangan.

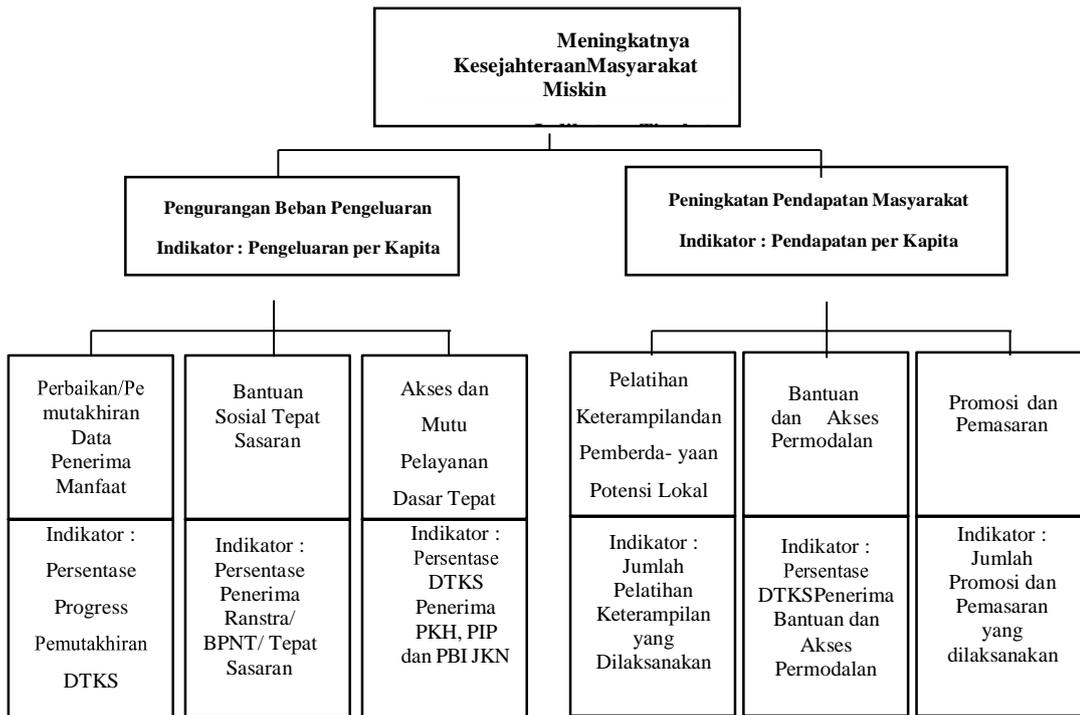
4.1 Prioritas Intervensi

4.1.1 Teori Perubahan/Theory of Change

a. Bidang Konsumsi/Pengeluaran

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab III, permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Luwu Timur yaitu masih tingginya tingkat kemiskinan yang tercermin dari tingginya persentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur. Tingkat kemiskinan Luwu Timur menunjukkan pencapaian yang belum optimal bila dilihat secara relatif dengan beberapa Kabupaten/Kota yang setara lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor utama yang menyebabkan masih tingginya tingkat kemiskinan di Luwu Timur di dorong oleh faktor kualitas manusia yang masih rendah walaupun secara persentase penduduk miskin cenderung mengalami penurunan dan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,78% dan Nasional sebesar 10,14%, namun fokus penanggulangan kemiskinan bukan hanya pada persentase penduduk miskin tapi lebih pada jumlah penduduk miskinnya. Sehingga di balik derajat pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli yang cukup tinggi, namun penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan porsinya terbilang juga masih cukup besar. serta diikuti dengan daya serap tenaga kerja sektor ekonomi yang masih terbatas hal ini yang mendasari kurang optimalnya upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin.

Selain itu masih kurangnya kualitas pemutakhiran data untuk memastikan ketepatan sasaran program-program penanggulangan kemiskinan serta masih kurang dimanfaatkannya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dalam upaya penanggulangan kemiskinan tiap OPD. Hal ini yang menjadi penyebab utama masih kurang optimalnya capaian hasil dari sisi pengurangan beban rumah tangga miskin. Untuk menguraikan permasalahan tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu menurunkan tingkat kemiskinan.



Gambar 4.1 Teori Perubahan/ToC Bidang Konsumsi/Pengeluaran

Agar tujuan menurunkan tingkat dan jumlah penduduk miskin dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC ini ada dua hal yaitu:

1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin, melalui:
 - Perbaikan/pemutakhiran data penerima manfaat
 - Bantuan sosial tepat sasaran
 - Peningkatan akses dan mutu pelayanan dasar tepat sasaran
2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin, melalui:
 - Pelatihan keterampilan dan pemberdayaan potensi lokal
 - Bantuan dan akses permodalan
 - Peningkatan promosi dan pemasaran

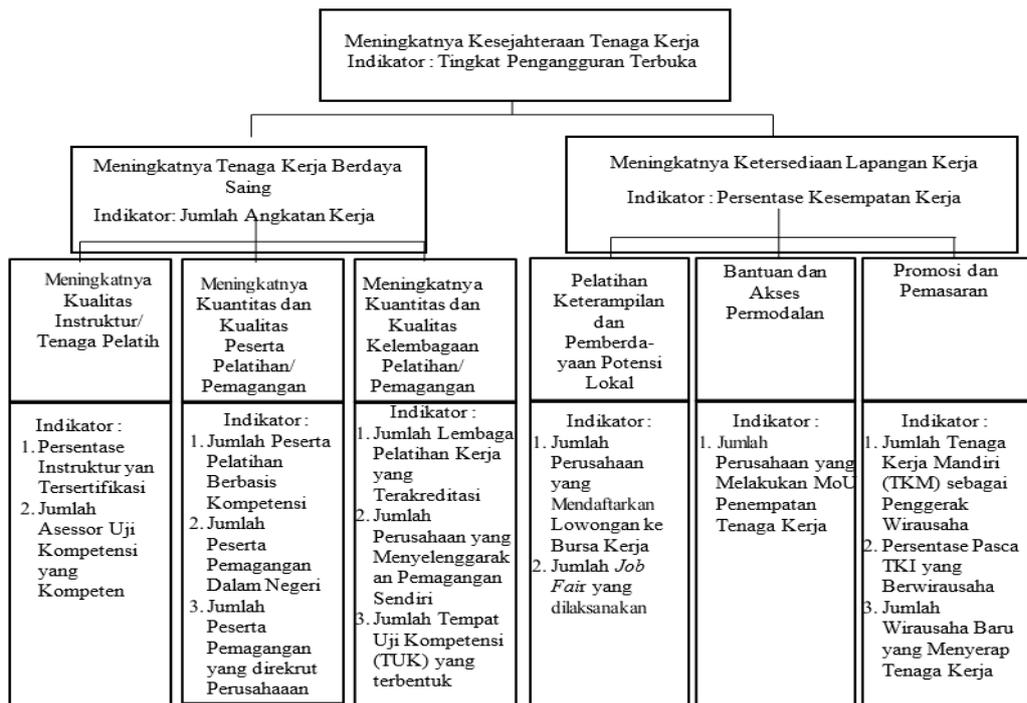
b. Ketenagakerjaan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, tujuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Luwu Timur di bidang ketenagakerjaan yaitu Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja dengan indikator penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tingkat pengangguran daerah yang diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Luwu Timur masih tergolong tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sulsel. Masih tingginya tingkat pengangguran Luwu Timur tersebut terutama disebabkan oleh faktor kualitas sumber daya manusia yang masih tergolong rendah. Rendahnya minat pencari kerja untuk meningkatkan kapasitasnya disamping itu ketersediaan Pendidikan vokasional belum mampu menciptakan *link and macth* antara kurikulum vokasional dengan kebutuhan dunia industri.

Faktor lain yang menyebabkan meningkatnya angka pengangguran di Sulawesi Selatan adalah adanya pandemi covid-19. Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Timur. Selain pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam ToC berikut ini.



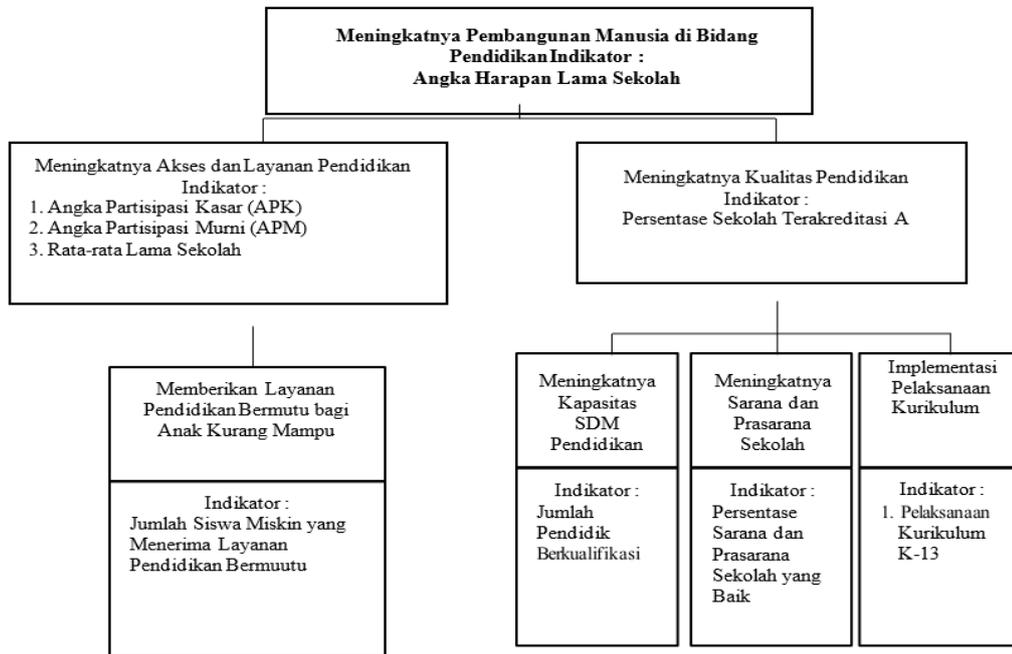
Gambar 4.2 Teori Perubahan/*ToC* Bidang Ketenagakerjaan

Agar tujuan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam *ToC* ini ada 2 hal yaitu:

1. Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja, melalui:
 - Peningkatan kualitas instruktur/tenaga pelatih
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas peserta pelatihan dan pemagangan
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas kelembagaan pelatihan dan pemagangan
 - Penguatan kompetensi jurusan SMK yang sesuai Kebutuhan pasar kerja
2. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, melalui:
 - Meningkatnya informasi pasar kerja yang dapat diakses
 - Peningkatan jejaring kerjasama penempatan tenaga kerja
 - Perluasan kerja sektor informal

c. Bidang Pendidikan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, tujuan yang akan dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan di bidang pendidikan yaitu Peningkatan Akses Pendidikan yang Berkualitas dengan indikator Harapan Lama Sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam ToC berikut ini.



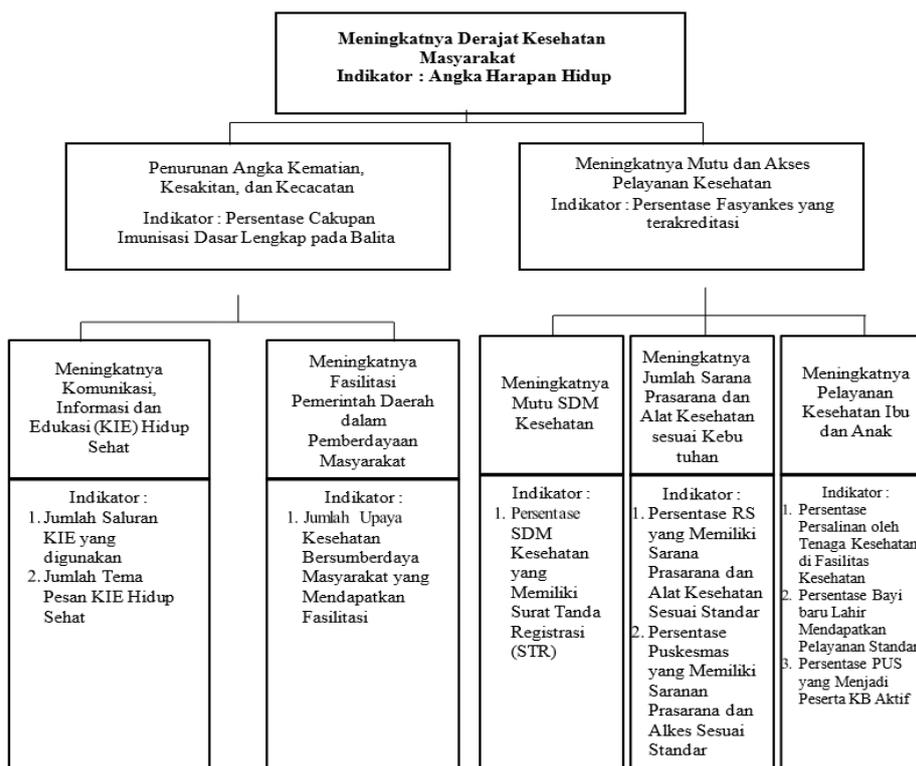
Gambar 4.3 Teori Perubahan/*ToC* Bidang Pendidikan

Agar tujuan meningkatkan Harapan Lama Sekolah dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC ini ada 2 hal yaitu:

1. Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan melalui :
 - pemberian layanan pendidikan bermutu bagi anak kurang mampu
2. Meningkatnya kualitas pendidikan, melalu
 - Peningkatan kapasitas SDM pendidikan
 - Peningkatan sarana dan prasarana sekolah
 - Implementasi pelaksanaan kurikulum

d. Bidang Kesehatan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, tujuan yang akan dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan di bidang kesehatan yaitu Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat yang tercermin dari Angka Harapan Hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun capaianantara/prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yangtergambar dalam ToC berikut ini.



Gambar 4.4 Teori Perubahan/*ToC* Bidang Kesehatan

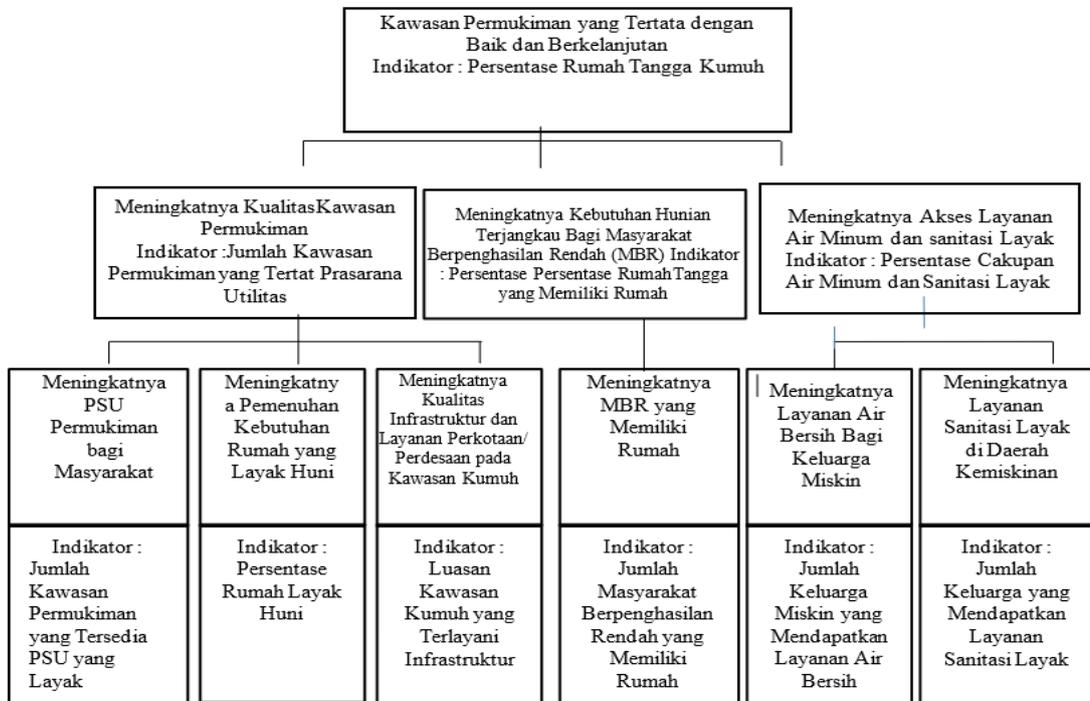
Agar tujuan meningkatkan Angka Harapan Hidup dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC ini ada 2 hal yaitu:

1. Menurunnya angka kematian, kesakitan, dan kecacatan, melalui:
 - Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi hidup sehat
 - Meningkatnya fasilitasi pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat
2. Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan, melalui:
 - Meningkatnya mutu SDM Kesehatan

- Meningkatnya jumlah sarana prasarana dan alat Kesehatan sesuai kebutuhan
- Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak

e. Bidang Infrastruktur Dasar

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, tujuan yang akan dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan di bidang infrastruktur dasar yaitu Kawasan Permukiman yang Tertata dengan Baik dan Berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam ToC berikut



Gambar 4.5 Teori Perubahan/ToC Bidang Infrastruktur Dasar

Agar tujuan meningkatkan kawasan permukiman yang berkelanjutan dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC ini ada 3 hal yaitu:

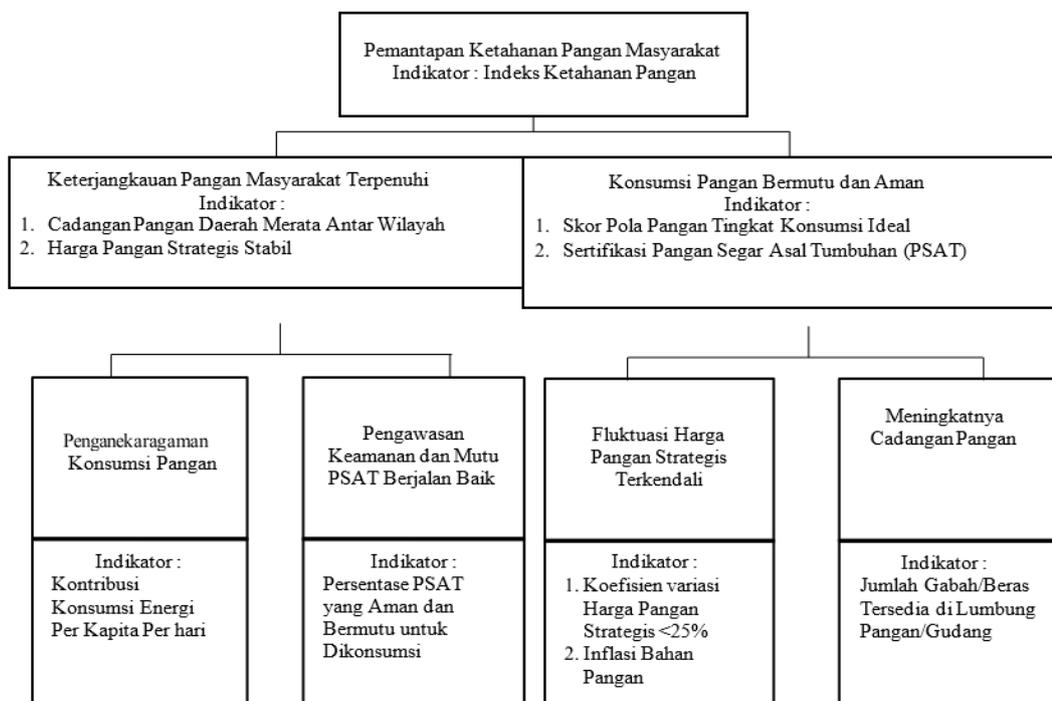
1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman, melalui:
 - Meningkatnya PSU permukiman bagi masyarakat
 - Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak

huni

- Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan perkotaan/pedesaan pada kawasan kumuh
- 2. Meningkatnya kebutuhan hunian yang terjangkau bagi masyarakatberpenghasilan rendah (MBR) melalui peningkatan masyarakat MBR yang memiliki rumah
- 3. Meningkatnya akses layanan air minum dan sanitasi yang layak, melalui:
 - Meningkatnya layanan air bersih bagi keluarga miskin
 - Meningkatnya layanan sanitasi layak di daerah kemiskinan

f. Bidang Ketahanan Pangan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, tujuan yang akan dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan di bidang ketahanan pangan yaitu Pemantapan Ketahanan Pangan Masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam ToC berikut ini.



Gambar 4.6 Teori Perubahan/*ToC* Bidang Ketahanan Pangan

Agar tujuan Pemantapan Ketahanan Pangan dapat tercapai makaprakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC ini ada 2 hal yaitu:

1. Terpenuhinya Keterjangkauan Pangan Masyarakat, melalui:

- Fluktuasi harga pangan strategis yang terkendali
- Peningkatan cadangan pangan

2. Konsumsi Pangan Bermutu dan Aman, melalui:

- Penganekaragaman konsumsi pangan
- Pengawasan keamanan dan mutu PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) yang berjalan baik

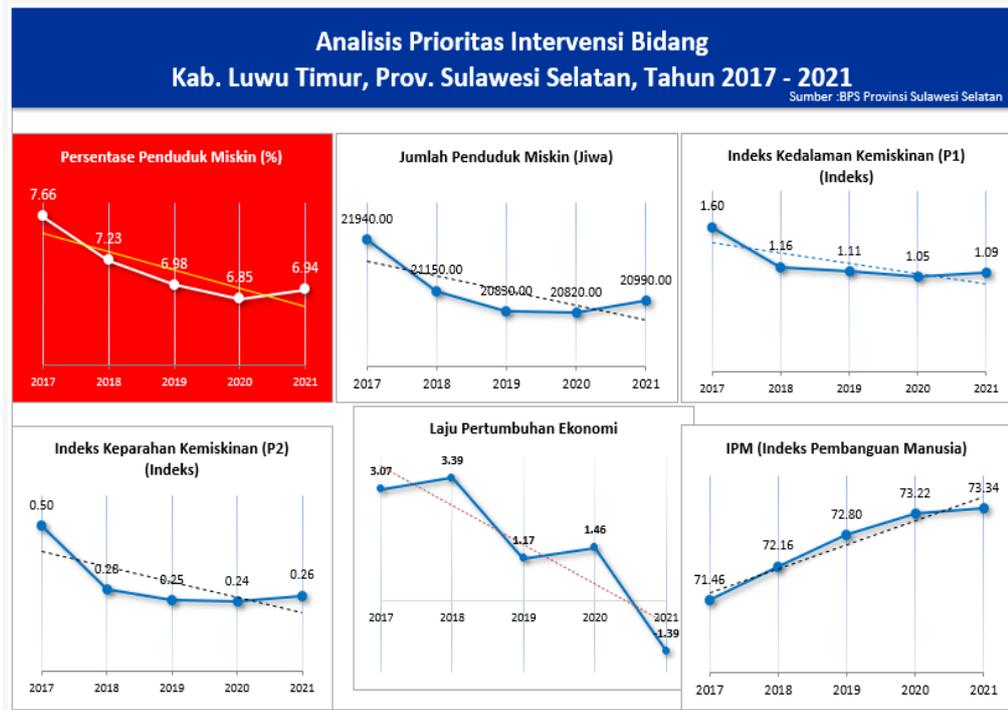
4.2 Analisis Keterkaitan (*Causal Relationship*)

Analisis keterkaitan digunakan untuk mengevaluasi dampak dari suatu program/kegiatan terhadap *outcome* yang telah dihasilkan. Melalui analisis keterkaitan kita dapat mengetahui apakah capaian yang dihasilkan disebabkan oleh intervensi kebijakan pemerintah melalui pelaksanaan program/kegiatan atau bukan. Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam melakukan analisis keterkaitan sehingga dapat ditentukan faktor penentu keberhasilan suatu capaian. Dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan suatu capaian, Bappelitbangda Kabupaten Luwu Timur melakukan diskusi/FGD untuk menganalisis lebih detail bersama dengan perangkat daerah terkait.

Setelah dilakukan identifikasi terhadap tujuan dan sasaran antara */intermediate outcome* pada masing-masing bidang seperti yang ditunjukkan dalam grafik ToC, selanjutnya dilakukan analisis keterkaitan untuk mengidentifikasi apakah program/kegiatan yang telah dilakukan berpengaruh terhadap capaiansasaran antara yang pada akhirnya akan mempengaruhi tujuan secara keseluruhan. Jika diketahui bahwa suatu kegiatan tidak memiliki pengaruh terhadap hasil capaian, maka perlu dipertimbangkan kegiatan tersebut apakah tetap dianggarkan atau tidak. Sebaliknya jika ada kegiatan yang belum dilaksanakan namun memiliki pengaruh terhadap hasil capaian, maka kegiatan tersebut perlu dialokasikan dalam rangka mendukung tujuan yang ingin dicapai.

a. Bidang Konsumsi

Untuk mencapai indikator Tingkat Kemiskinan yang rendah terdapat 2 sasaran antara yang digunakan yaitu Pengurangan Beban Pengeluaran dengan indikator pengeluaran per kapita dan sasaran antara Peningkatan Pendapatan Masyarakat dengan indikator pendapatan per kapita.



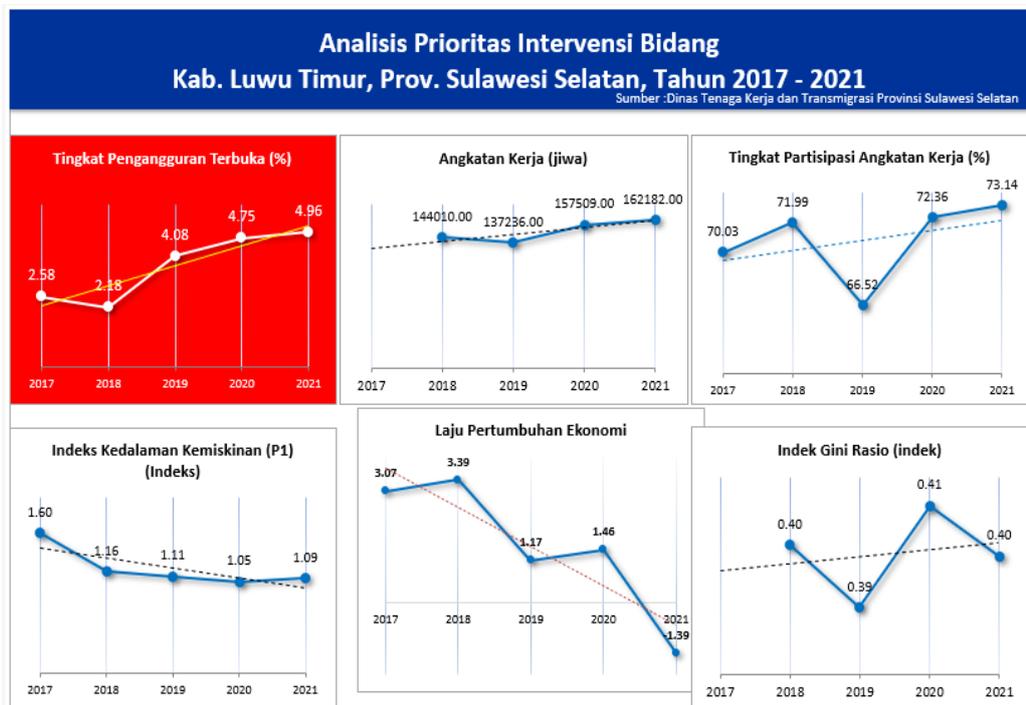
Gambar 4.7 Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Konsumsi/Pengeluaran

Berdasarkan grafik keterkaitan di atas, terlihat bahwa persentase penduduk miskin berkaitan dengan capaian jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Dimana pola perkembangannya hampir sama untuk keempat indikator tersebut. tren penurunan keempat indikator tersebut seiring dengan menurunnya tingkat kemiskinan. Hal yang berbeda dengan indikator IPM yang menunjukkan tren kenaikan, hal ini semakin menguatkan wacana peningkatan IPM akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Terkhusus untuk indikator laju pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren penurunan semakin memperjelas bahwa pengaruh pandemic Covid-19 masih sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi pasca tahun 2020. Hal yang sama terjadi disebagaian besar daerah di Indonesia. Idealnya kondisi laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya akan berpengaruh pada penurunan persentase penduduk miskin. Tren penurunan laju pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu penyebab mengapa penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Luwu

Timur masih cenderung lamban dalam lima tahun terakhir.

b. Bidang Ketenagakerjaan

Pada sektor ketenagakerjaan, yang masih menjadi permasalahan di Kabupaten Luwu Timur yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Tujuan tersebut akan tercapai dengan meningkatkan daya saing dan memperluas kesempatan kerja sebagai sasaran antara yang harus diraih. Untuk melihat keterkaitan sasaran antara tersebut dengan tujuan utamanya dapat dilihat berdasarkan gambar di bawah ini.



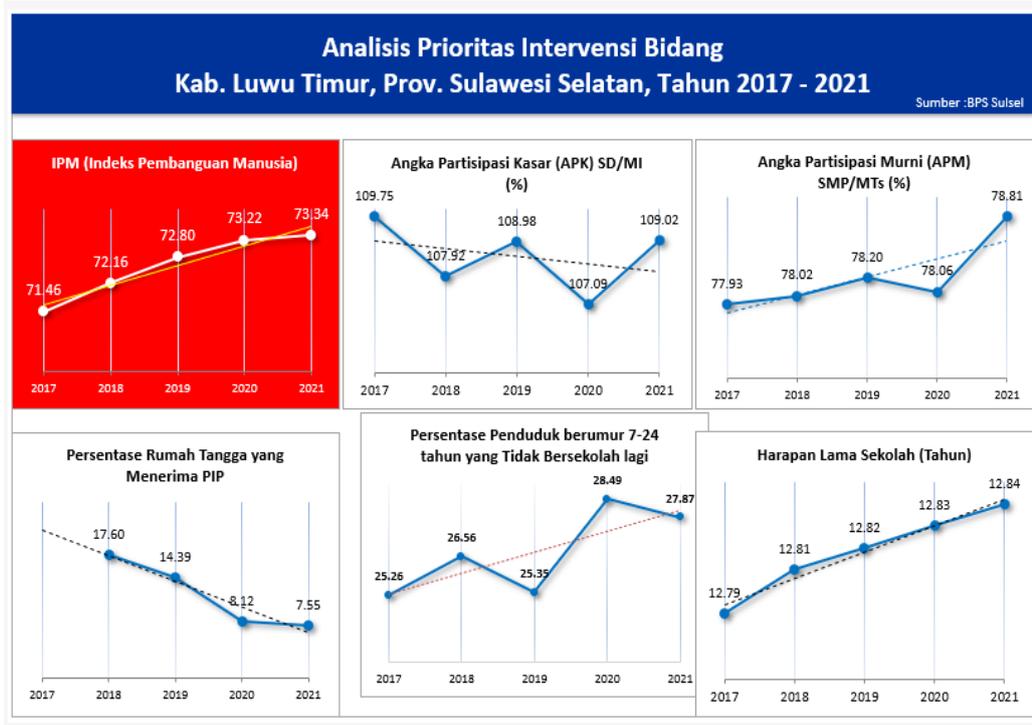
Gambar 4.8 Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Ketenagakerjaan

Perkembangan tenaga kerja formal berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT), dimana ketika terjadi kenaikan Angkatan kerja ternyata tingkat pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan, begitu juga dengan tingkat partisipasi Angkatan kerja menunjukkan tren kenaikan seiring dengan kenaikan TPT. Hal yang sebaliknya terjadi pada indikator indeks kedalaman kemiskinan (P1), laju pertumbuhan ekonomi dan Indeks Gini ratio. Dimana penurunan capaian ketiga indikator tersebut ternyata dikuti dengan kenaikan TPT. Salah satu

penyebab utama peningkatan TPT adalah semakin berkurangnya kesempatan kerja. Walaupun persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan. Jika capaian indikator kesempatan kerja menurun maka hal ini akan mengakibatkan kenaikan tingkat pengangguran terbuka. Sehingga kondisi ekonomi yang stabil dengan tersedianya kesempatan kerja yang luas akan mendukung penurunan tingkat pengangguran terbuka.

c. Bidang Pendidikan

Pada sektor pendidikan, permasalahan yang perlu diintervensi di Kabupaten Luwu Timur yaitu harapan lama sekolah. Adapun APK dan APM dan rata-rata lama sekolah sebagai sasaran antara yang harus tercapai, termasuk juga peningkatan kualitas pendidikan. Gambaran jelas mengenai keterkaitan sasaran antara dan tujuan utama dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



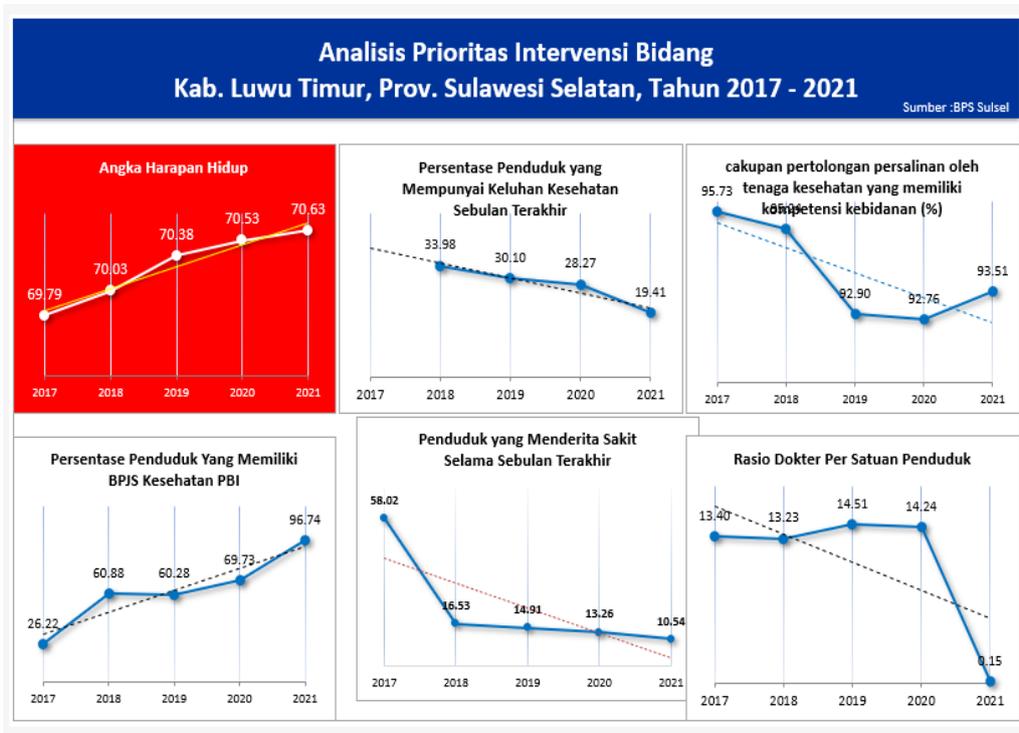
Gambar 4.9 Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan

Dari gambar analisis keterkaitan diatas, diperoleh gambaran bahwa yang berkaitan kuat dengan peningkatan IPM adalah peningkatan APM SMP/MTs juga peningkatan capaian Harapan Lama Sekolah. Sedangkan untuk penurunan capaian indikator APK SD/MI, Persentase

Rumah Tangga yang Menerima PIP dan kenaikan persentase penduduk berumur 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi tidak mempengaruhi peningkatan IPM. Hal ini disebabkan jumlah siswa penerima PIP masih sangat sedikit jika dibandingkan jumlah siswa yang berada dalam rumah tangga miskin dan juga jumlah penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah lagi masih dalam batas kewajaran sehingga kenaikan capaiannya belum berpengaruh. Jika harapan lama sekolah mengalami kenaikan maka akan sejalan dengan peningkatan capaian indeks pembangunan manusia (IPM).

d. Bidang Kesehatan

Pada sektor kesehatan, permasalahan yang perlu diintervensi di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu umur harapan hidup saat lahir, prevalensi stunting, imunisasi dasar lengkap, persalinan oleh tenaga dokter atau bidan, tingkat kesakitan (morbiditas), serta peningkatan kualitas sarana kesehatan sebagai sasaran antara yang ingin diraih. Adapun keterkaitan antar indikator tersebut sebagai berikut:

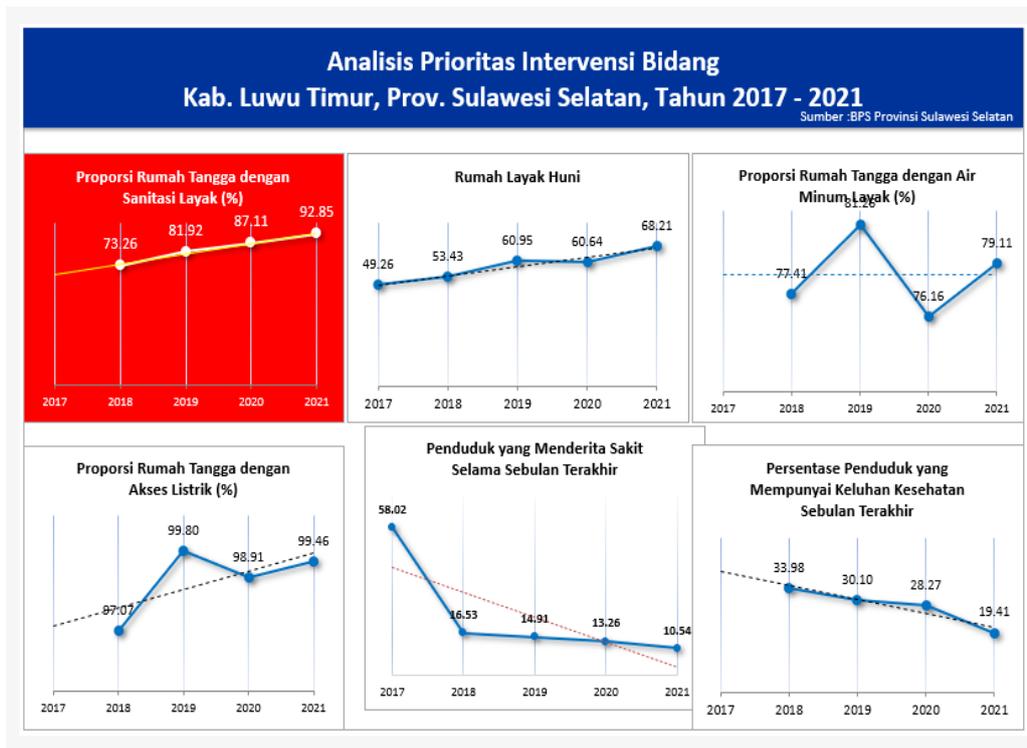


Gambar 4.10 Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan

Semua indikator sasaran antara berkaitan dengan tujuan utama yang ingin dicapai yaitu usia harapan hidup. Penurunan capaian indikator persentase penduduk yang mempunyai keluhan Kesehatan selama sebulan terakhir, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, dan penduduk yang menderita sakit selama sebulan terakhir juga berkaitan dengan kenaikan usia harapan hidup, hal ini bisa dilihat dari pola perkembangan indikator-indikator tersebut. Sementara peningkatan capaian indikator persentase penduduk yang memiliki BPJS Kesehatan juga ikut berpengaruh menaikkan angka harapan hidup karena semakin banyak warga yang terjamin kesehatannya secara gratis. Sementara penurunan capaian indikator Rasio Dokter per satuan penduduk tidak ikut berpengaruh pada peningkatan angka harapan hidup.

e. Bidang Infrastruktur Dasar

Pada sektor infrastruktur, permasalahan yang perlu diintervensi di Kabupaten Luwu Timur yaitu akses sanitasi dan air minum yang layak, serta kepemilikan rumah sebagai sasaran antara, sementara tujuan utamanya menurunkan rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni. Adapun gambaran keterkaitannya sebagai berikut.



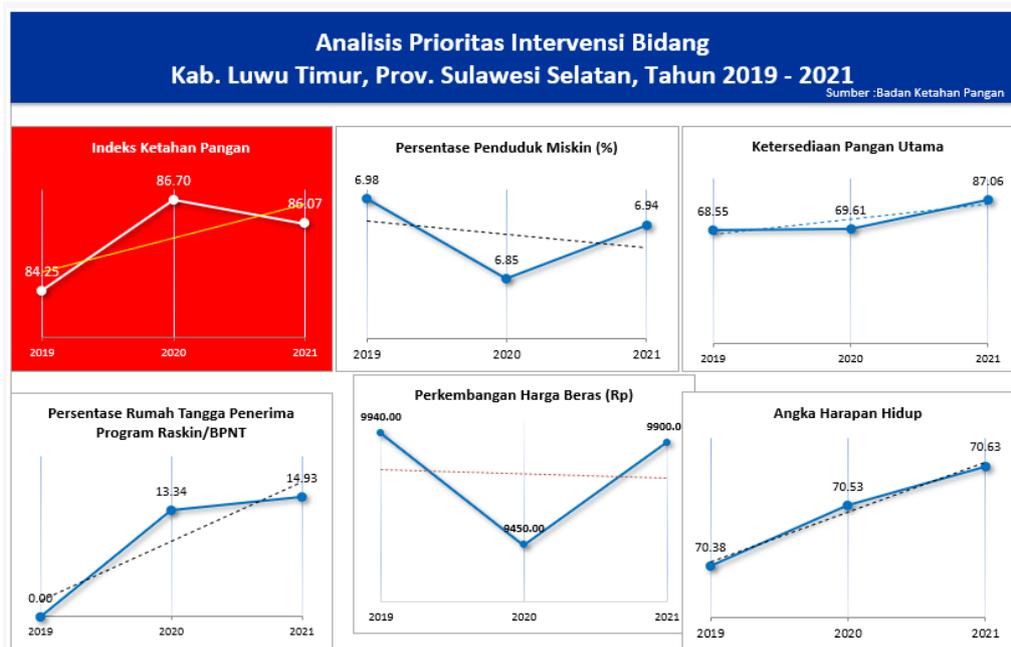
Gambar 4.11 Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang
 Infrastruktur Dasar/Perumahan

Hampir semua indikator sasaran antara berkaitan erat dengan tujuan utama, yaitu meningkatnya capaian rumah layak huni atau menurunnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah kumuh. Peningkatan capaian Indikator Proporsi Rumah tangga dengan sanitasi layak sangat erat kaitannya dengan peningkatan capaian proporsi rumah tangga dengan air minum layak, rumah layak huni dan proporsi rumah tangga dengan akses listrik. Sedangkan capaian Indikator Persentase penduduk yang mempunyai keluhan Kesehatan dan penduduk yang menderita sakit dalam sebulan terakhir sangat dipengaruhi oleh capaian indikator proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak. Semakin tinggi capaian indikator proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak maka akan semakin bagus capaian dua indikator Kesehatan tersebut.

f. Bidang Ketahanan Pangan

Akses rumah tangga terhadap pangan secara umum dipengaruhi

oleh ketersediaan infrastruktur, institusi, jaringan distribusi dan kapasitas produksi antar wilayah dan musim, yang berdampak pada pasokan dan stabilitas harga. Dari semua indikator tersebut bisa tergambarkan dari indeks ketahanan pangan (IKP) yang dijadikan sebagai tujuan utama yang ingin diraih dibidang ketahanan pangan. Sementara sasaran antara yang ingin dicapai yaitu keterjangkauan pangan yang bisa terpenuhi dan konsumsi pangan yang aman dan bermutu. Adapun gambaran keterkaitan indikator sasaran antara dan tujuan utama bisa tergambar dari perbandingan pola perkembangannya sebagai berikut.



Gambar 4.12 Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Ketahanan Pangan

Adanya peningkatan capaian Indeks Ketahanan Pangan berkaitan dengan peningkatan capaian indikator ketersediaan pangan utama dan persentase rumah tangga yang menerima program Raskin/BPNT. Sementara itu, pola keterkaitan juga terlihat antara perkembangan harga beras dengan indeks ketahanan pangan, dimana penurunan harga beras berkaitan dengan kenaikan indeks ketahanan pangan. Hal yang sama berlaku juga pada indikator persentase penduduk miskin, semakin bagus capaian indeks ketahanan pangan maka akan mengakibatkan penurunan persentase penduduk miskin. Peningkatan Indikator Angka Harapan

Hidup juga sangat ditunjang oleh peningkatan capaian Indeks ketahanan pangan.

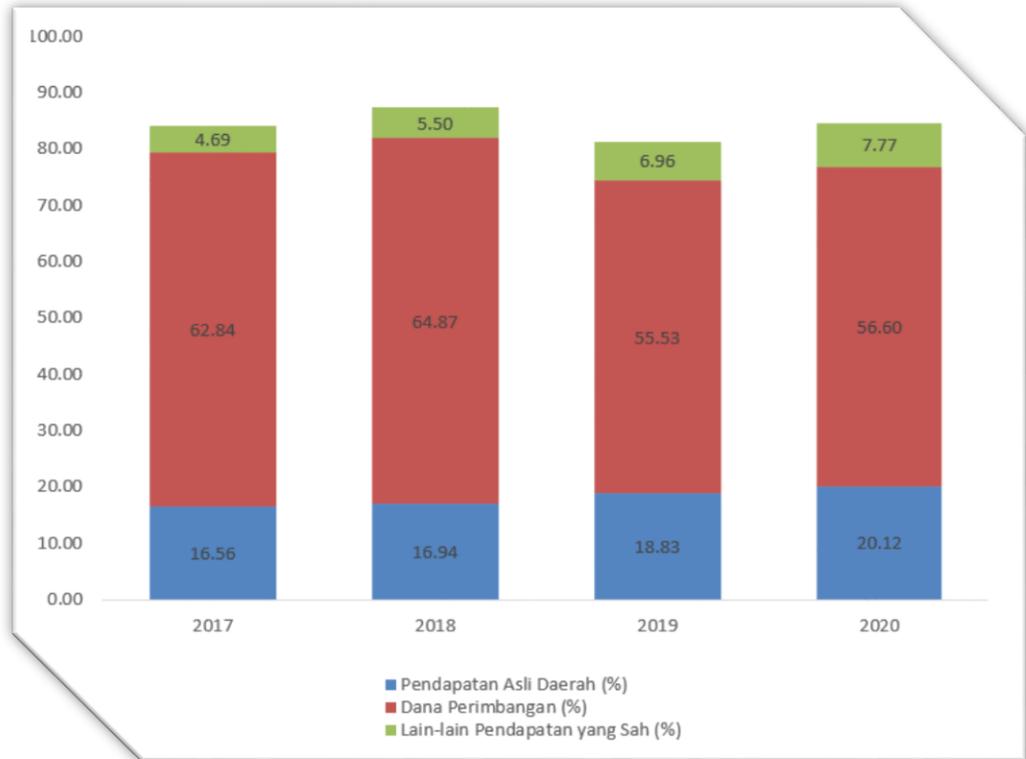
4.3. Analisis APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka pelayanan publik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di berbagai sektor. APBD merupakan sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai prioritas pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan DPRD. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

4.3.1. Analisis Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2020, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan. Pandemi covid-19 tidak merubah tren positif kenaikan pendapatan daerah pada tiga tahun sebelumnya (2017-2019).

Berdasarkan komposisinya, dana perimbangan masih mendominasi sumber pendapatan daerah, walaupun trennya cenderung menurun dari 62,84% di tahun 2017 menjadi 56,60% di tahun 2020



Sumber: djk.kemenkeu.go.id

Gambar 4.13 Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017 – 2020

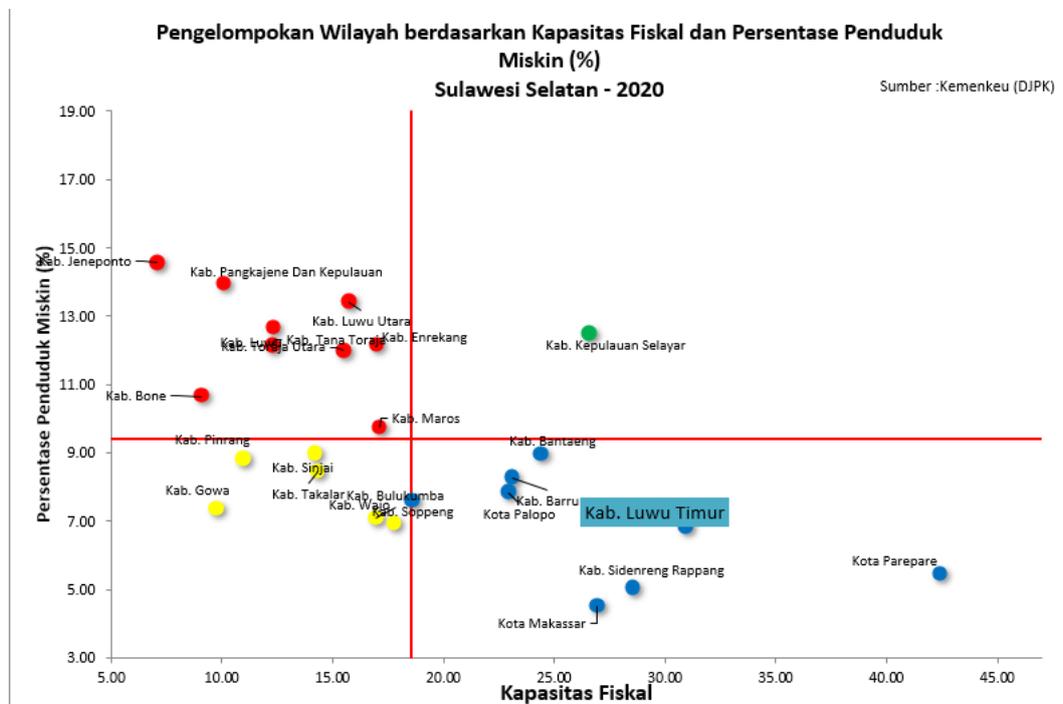
Dari komposisi pendapatan daerah tahun 2017-2020, dominasi dana perimbangan menunjukkan bahwa derajat otonomi fiskal daerah Kabupaten Luwu Timur cukup rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Luwu Timur memiliki ketergantungan terhadap bantuan eksternal terutama yang bersumber dari pemerintah pusat.

Dari sisi kapasitas/ruang fiskal, indeks kapasitas fiskal Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 sebesar 1,127 dengan kategori sedang, sehingga potensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan masih perlu usaha yang lebih kuat lagi terkait dengan anggaran yang tersedia.

Secara pola hubungan, memang tidak terlihat pola korelasi yang jelas atau dengan kata lain angka korelasinya rendah. Namun demikian, kapasitas fiskal yang tinggi tentunya akan lebih memudahkan dalam penganggaran program-program penanggulangan kemiskinan terutama yang sifatnya langsung seperti bantuan sosial tunai.

Kondisi pandemi covid-19 akan menambah beban fiskal bagi pemerintah daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, munculnya *refocusing* anggaran untuk penanggulangan covid-19 tentu akan berdampak besar pada penganggaran penanggulangan kemiskinan, meskipun banyak program penanggulangan covid-19 yang berkaitan langsung dengan penanggulangan kemiskinan.

Jika dilihat dari data pengelompokan Kabupten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan dalam hubungannya dengan capaian indikator persentase penduduk miskin dan indeks kapasitas fiskal, Kabupaten Luwu Timur menempati posisi kuadran IV dengan kategori kapasitas fiskal tinggi dan persentase penduduk miskin rendah.



Gambar 4.14 Pengelompokan Kabupaten/Kota berdasarkan Kapasitas Fiskal dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2020

Dari Gambar 4.14 dapat dilihat hubungan kapasitas fiskal dan tingkat kemiskinan terbagi kedalam 4 kelompok kuadran kabupaten/kota sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Pengelompokan Kabupaten/Kota menurut Kapasitas Fiskal dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020

<p>Kuadran I (Kapasitas fiskal rendah dan kemiskinan tinggi)</p>	<p>Kab Jeneponto, Kab Pangkajene Kepulauan, Kab Luwu Utara, Kab Luwu, Kab Enrekang, Kab Tana Toraja, Kab Toraja Utara, Kab Bone, Kab Maros</p>
<p>Kuadran II (Kapasitas fiskal tinggi dan kemiskinan tinggi)</p>	<p>Kab Sinjai, Kab Bulukumba, Kab Takalar, Kab Gowa, Kab Pinrang, Kab Wajo</p>
<p>Kuadran III (Kapasitas fiskal rendah dan kemiskinan rendah)</p>	<p>Kab Kepulauan Selayar</p>
<p>Kuadran IV (Kapasitas fiskal tinggi dan kemiskinan rendah)</p>	<p>Kab Barru, Kab Bantaeng, Kab Soppeng, Kota Palopo, Kab Sidenreng Rappang, Kab Luwu Timur, Kota Makassar, Kota Pare-pare</p>

Sumber: Kemenkeu dan BPS 2020, diolah.

Kabupaten/kota yang berada pada kuadran I semestinya menjadi perhatian utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu kabupaten/kota yang berada di kuadran I perlu memprioritaskan kebijakan penganggarannya untuk efektivitas belanja daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Sementara Kabupaten Luwu Timur masih berada pada prioritas IV hal ini menggambarkan bahwa kondisi kapasitas fiskal untuk upaya penanggulangan kemiskinan masih efektif.

4.3.2. Analisis Belanja Daerah

4.3.2.1. Struktur Belanja Daerah

Komponen belanja daerah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanjanya untuk

pelayanan publik. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2020) komponen Belanja Tidak Langsung proporsinya lebih besar dibandingkan Belanja Langsung sebagaimana gambar 4.15 berikut:



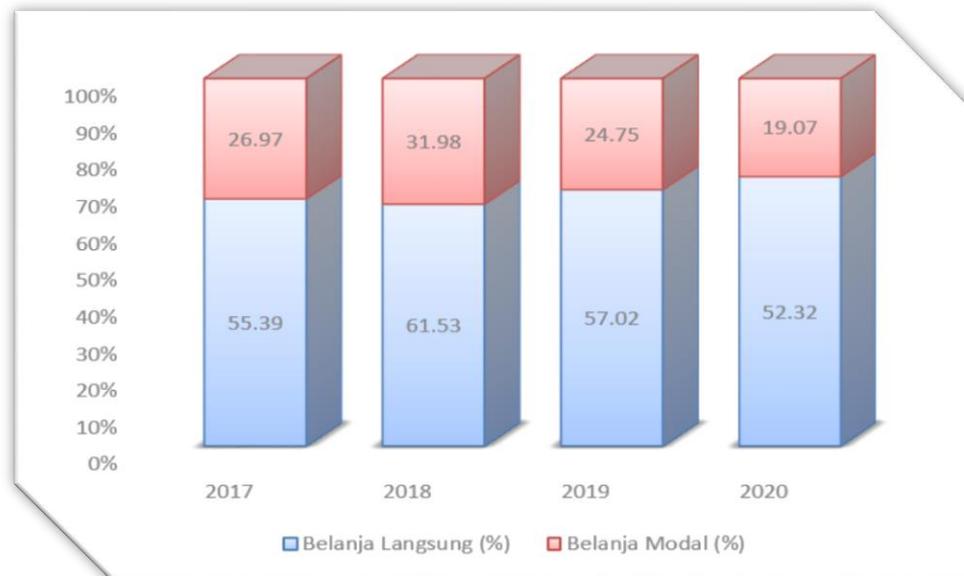
Sumber: djk.kemenkeu.go.id.

Gambar 4.15 Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung APBD Kabupaten Luwu Timur T.A. 2017 – 2020

Meskipun belanja tidak langsung (BTL) proporsinya lebih besar tetapi di dalamnya bukan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai saja. Dalam komponen BTL juga terdapat belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lainnya yang dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan upaya penanggulangan kemiskinan, antara lain diwujudkan melalui Bantuan Siswa Miskin dan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Pada komponen belanja modal, persentasenya terhadap total belanja langsung pada tahun 2017-2020 terus mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya pengalihan kewenangan urusan wajib pendidikan (pendidikan menengah) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang berkonsekuensi adanya tambahan pembiayaan khususnya untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap

(PTT). Penyebab lainnya adalah pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan) tidak lagi menjadi prioritas pembangunan di tahun berikutnya. Proporsi Belanja Modal terhadap total belanja Langsung tahun anggaran 2017-2020 sebagaimana gambar 4.16 di bawah ini.

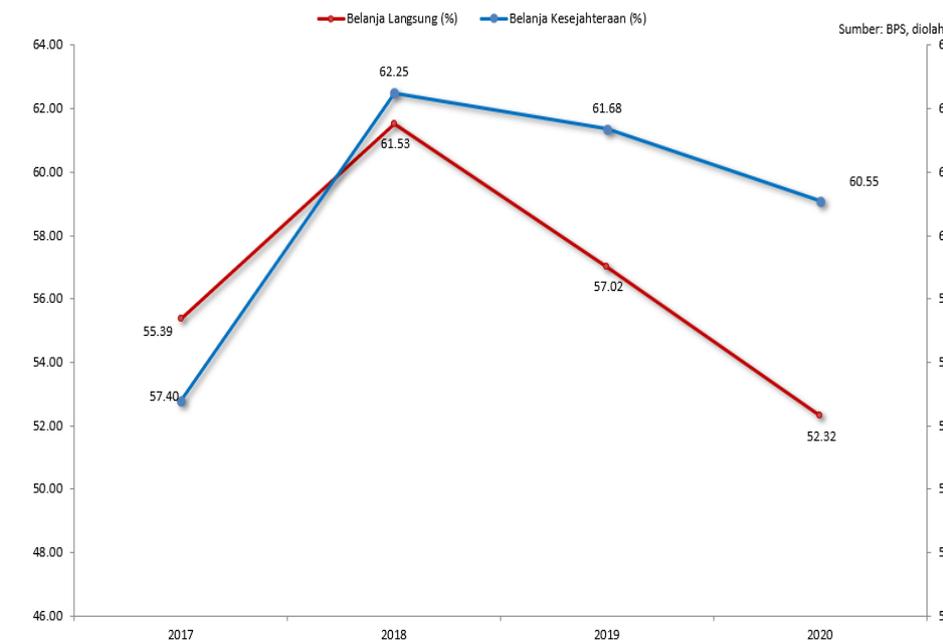


Sumber: djpk.kemenkeu.go.id, diolah.

Gambar 4.16 Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Langsung Kabupaten Luwu Timur T.A. 2017 – 2020

4.3.2.2. Analisis Belanja Kesejahteraan

Pengalokasian belanja untuk kesejahteraan masyarakat (belanja hibah dan bantuan sosial dibagi jumlah penduduk miskin) dari tahun 2017 sampai 2020 memiliki tren peningkatan dari 55,22% di tahun 2017 menjadi 59,74% di tahun 2020. Berbeda dengan perkembangan Belanja Tidak Langsung yang cenderung menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2017 sampai 2020. Dari 57,40% di tahun 2017 menjadi 60,55% di tahun 2020. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar 4.19 di bawah ini:



Sumber: djpk.kemenkeu.go.id, diolah.

Gambar 4.19 Perkembangan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Kesejahteraan Kabupaten Luwu Timur T.A. 2017 – 2020

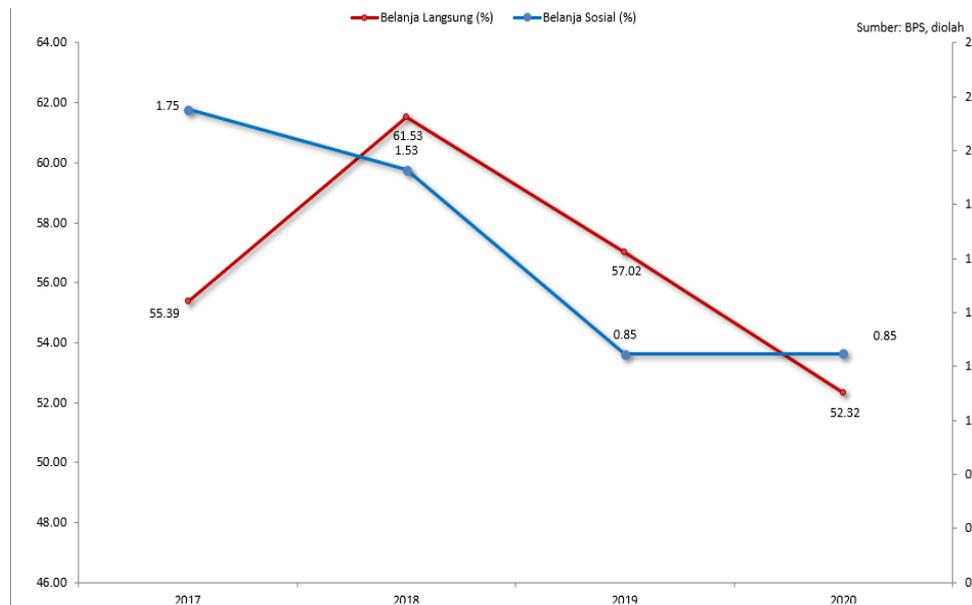
Dari berbagai kondisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa secara umum kebijakan belanja daerah pada APBD Kabupaten Luwu Timur sudah sesuai dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin, ditandai dengan peningkatan belanja kesejahteraan terutama dalam periode 2017-2020. Meskipun tren untuk belanja langsung bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2017-2020 mengalami penurunan.

Jika Pengalokasian belanja untuk kesejahteraan masyarakat (belanja hibah dan bantuan sosial dibagi jumlah penduduk miskin) selalu mengalami peningkatan, maka hal ini akan membantu pemda mempercepat upayanya untuk menurunkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur.

4.3.2.3. Analisis Belanja Fungsi Perlindungan Sosial

Analisis belanja pemerintah menurut fungsi perlindungan sosial memberikan gambaran bagaimana upaya pemerintah untuk bisa menjaga dan melindungi kemampuan ekonomi penduduk miskin dan rentan dalam menghadapi guncangan ekonomi yang terjadi, sekaligus

sebagai penyangga untuk tidak masuk kedalam gerbang kemiskinan.



Sumber: djpk.kemenkeu.go.id, diolah.

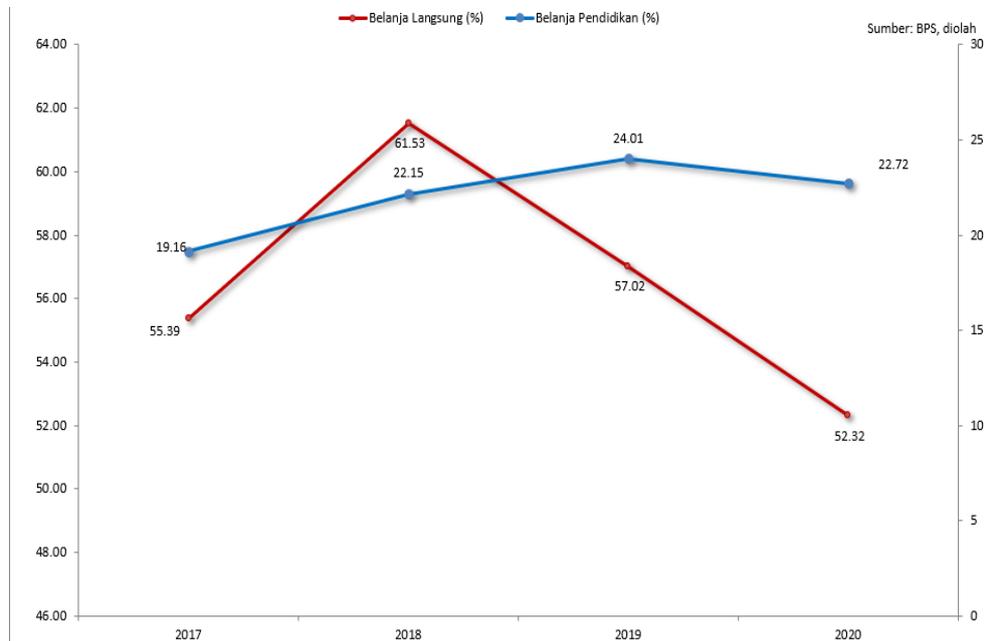
Gambar 4.20 Perkembangan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial dan Belanja Langsung Kabupaten Luwu Timur T.A. 2017 – 2020

Dari kondisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa perkembangan belanja fungsi perlindungan sosial menunjukkan tren penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Walaupun tren untuk belanja langsung bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2017-2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif namun tetap menunjukkan tren penurunan. Jika Pengalokasian belanja untuk fungsi perlindungan sosial mengalami penurunan, implikasinya adalah akan terjadi perlambatan dalam upaya menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Sehingga bisa berdampak pada kurang optimalnya capaian pemerintah pada indikator persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi selatan.

4.3.2.4 Analisis Belanja Pendidikan

Analisis belanja pemerintah menurut fungsi pendidikan memberikan gambaran bagaimana upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan layanan Pendidikan yang baik kepada masyarakat. Semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin tinggi tingkat kemiskinan dan

sebaliknya, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Capaian indikator di bidang Pendidikan juga sangat mempengaruhi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Sumber: djpk.kemenkeu.go.id, diolah.

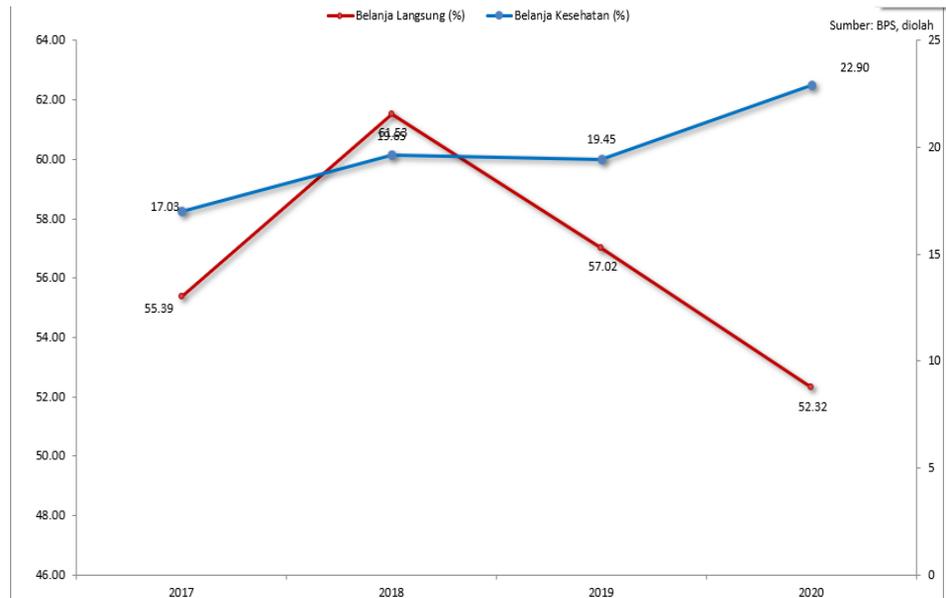
Gambar 4.21 Perkembangan Belanja Pendidikan dan Belanja Langsung Kabupaten Luwu Timur T.A. 2017 – 2020

Dari kondisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa perkembangan belanja fungsi pendidikan menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Walaupun perkembangan tren untuk belanja langsung mengalami perkembangan fluktuatif dan juga menunjukkan tren penurunan. Jika Pengalokasian belanja untuk fungsi pendidikan mengalami kenaikan, implikasinya adalah akan mendukung percepatan dalam upaya menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. Sehingga bisa berdampak pada optimalisasi capaian pemerintah pada indikator persentase penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur.

4.3.2.5 Analisis Belanja Kesehatan

Analisis belanja pemerintah menurut fungsi Kesehatan memberikan gambaran upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat dan memastikan jaminan layanan Kesehatan

bagi masyarakat. Kemiskinan dan kesehatan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kesehatan yang buruk dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan menambah beban pengeluaran rumah tangga sehingga pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup yang bisa menurunkan pendapatan rumah tangga miskin dan tentu saja menciptakan kemiskinan. Capaian indikator di bidang Kesehatan sangat menentukan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



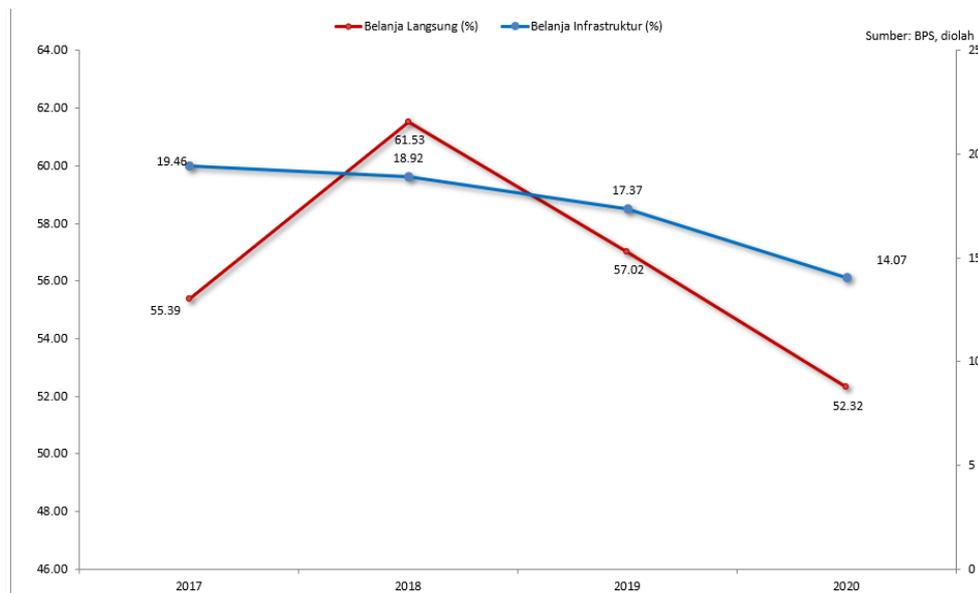
Sumber: djpk.kemenkeu.go.id, diolah.

Gambar 4.22 Perkembangan Belanja Kesehatan dan Belanja Langsung Kabupaten Luwu Timur T.A. 2017 – 2020

Dari gambaran tersebut diatas dapat diketahui bahwa perkembangan belanja fungsi kesehatan menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Walaupun pada belanja langsung mengalami perkembangan fluktuatif dan menunjukkan tren penurunan. Jika Pengalokasian belanja untuk fungsi Kesehatan mengalami peningkatan, implikasinya adalah akan mendukung percepatan dalam upaya menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. Sehingga bisa berdampak pada optimalisasi capaian pemerintah pada indikator persentase penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur.

4.3.2.5 Analisis Belanja Infrastruktur

Analisis belanja pemerintah menurut bidang infrastruktur dasar memberikan gambaran upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya sanitasi yang layak, air minum yang layak, dan akses listrik bagi masyarakat. Kemiskinan dan infrastruktur dasar merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Infrastruktur yang buruk dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup dan menambah beban pengeluaran rumah tangga sehingga pada akhirnya bisa menurunkan pendapatan rumah tangga miskin dan tentu saja menciptakan kemiskinan.



Sumber: djk.kemenkeu.go.id, diolah.

Gambar 4.23 Perkembangan Belanja Infrastruktur dan Belanja Langsung Kabupaten Luwu Timur T.A. 2017 – 2020

Dari gambaran tersebut diatas dapat diketahui bahwa perkembangan belanja fungsi Infrastruktur menunjukkan tren penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Seiring dengan belanja langsung yang mengalami perkembangan fluktuatif dan menunjukkan tren penurunan. Jika Pengalokasian belanja untuk fungsi Infrastruktur mengalami penurunan, implikasinya adalah akan memperlambat pemerintah dalam upaya menurunkan beban pengeluaran rumah tangga

miskin dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. Sehingga bisa berdampak pada optimalisasi capaian pemerintah pada indikator persentase penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur.